



PEMERINTAH KOTA MALANG

**PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)
KOTA MALANG TAHUN 2015**



TAHUN 2014



WALIKOTA MALANG
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG
TAHUN 2015

WALIKOTA MALANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, tentang tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli;

- 18 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- 19 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah;
- 20 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
- 21 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Pemerintah Daerah Kota Malang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Walikota Malang dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- (2) Walikota adalah Walikota Malang.
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
- (4) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Malang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (6) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
- (7) Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
- (8) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang.
- (9) Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Malang.

Pasal 2

- (1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari rancangan Rencana Kerja (RENJA) SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi makro, prioritas pembangunan, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- (4) RKPD Kota Malang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
 - a. Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015.
 - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015.
 - c. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-SKPD sesuai pedoman penyusunan yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 3

Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam jajaran Pemerintah Daerah melaksanakan program/kegiatan dalam RKPD yang dituangkan dalam APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam jajaran Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bagian Keuangan dalam menyusun RKA-SKPD

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pemantauan/pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD Kota Malang Tahun 2015 yang menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD yang telah dijabarkan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD serta RKA-SKPD sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

Pasal 6

RKPD Kota Malang Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal

WALIKOTA MALANG,

H. MOCH ANTON

Diundangkan di Malang
Pada Tanggal

SEKRETARIS DARAH KOTA MALANG

.....

.....

NIP.

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN

NOMOR

SERI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	Hal
DAFTAR ISI	i
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I-8
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I-9
1.5. Sistematika Dokumen RKPD	I-10
BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	II-1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	II-2
2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi.....	II-2
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-6
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II-9
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-26
BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN	III-1
3.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014.....	III-1
3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014	III-2
3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-3
3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-4
3.4.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-5
3.4.2 Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah	III-10
3.4.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-11
3.4.4 Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.....	III-21
3.4.5 Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah.....	III-22
BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015	IV-1

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-2
4.2. Prioritas dan Pembangunan	IV-6
4.2.1. Isu Strategis Pembangunan Nasional.....	IV-9
4.2.2. Sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan pembangunan nasional.....	IV-11
4.2.3. Isu Strategis Pembangunan Provinsi.....	IV-67
4.2.3.1. Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif.....	IV-67
4.2.3.2. Peningkatan kemampuan dan daya saing Koperasi dan UMKM.....	IV-67
4.2.3.3. Disparitas Wilayah.....	IV-68
4.2.3.4. Infrastruktur.....	IV-68
4.2.3.5. Pengangguran.....	IV-70
4.2.3.6. Energi.....	IV-71
4.2.3.7. Lingkungan Hidup.....	IV-71
4.2.3.8. IPM.....	IV-72
4.2.3.9. Ketahanan Pangan dan Pertanian.....	IV-73
4.2.3.10. Kemiskinan.....	IV-74
4.2.3.11. Kerjasama Daerah.....	IV-75
4.2.3.12. Komunikasi dan Informatika.....	IV-75
4.2.3.13. Penanggulangan Bencana.....	IV-76
4.2.4. Prioritas pembangunan Kota Malang.....	IV-78
4.2.5. Sasaran Pembangunan Daerah.....	IV-80
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH.....	V-1
BAB VI. PENUTUP.....	VI-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan rencana pembangunan dilakukan dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top down process*. Hal ini bermakna bahwa perencanaan pembangunan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan. Partisipasi dan aspirasi dari semua pihak juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Dengan demikian keterlibatan *stakeholder* dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal pada saat diimplementasikan.

Untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut, salah satu perencanaan pembangunan yang harus disusun adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD. RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Selain itu RKPD menjembatani rencana tahunan dengan rencana strategis serta mengoperasionalkan rencana strategis ke dalam langkah-langkah

tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya rencana strategis jangka menengah.

Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. Berdasarkan acuan dan kerangka tersebut, maka rencana kerja dan pendanaan RKPD akan dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan seperti Pemerintah Kota Malang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif. Begitu pula, RKPD memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten yang selanjutnya RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama.

RKPD Kota Malang Tahun 2015 yang disusun pada tahun 2014 ini merupakan perencanaan pembangunan daerah pada tahun mendatang atau Tahun 2015 yang di dalam penyusunannya, proses yang harus dilalui salah satunya adalah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD. Musrenbang merupakan suatu forum atau wahana partisipasi masyarakat dalam menyampaikan permasalahan dan kebutuhannya yang dirumuskan melalui usulan program dan kegiatan, di mana dalam pelaksanaannya dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tingkat kelurahan (Musrenbangkel), tingkat kecamatan (Musrenbangcam) dan tingkat kota (Musrenbang kota). Di tingkat kota, pelaksanaan Musrenbang Kota Malang Tahun 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2014 telah dirumuskan kebijakan

pembangunan 1 (satu) tahun ke depan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015 dengan mensinergikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat (hasil dari Musrenbang kecamatan) dengan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Selain proses perencanaan yang bersifat *bottom-up*, seperti tersebut di atas, RKPD dalam penyusunannya juga melalui pendekatan perencanaan *top-down*, di mana RKPD Kota Malang Tahun 2015 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018, yang selanjutnya disinergikan dengan RKP Tahun 2015 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015. Koordinasi perencanaan pembangunan tersebut, pelaksanaannya dilakukan melalui proses Musrenbang tingkat provinsi (musrenbangprov) dan Musrenbang tingkat nasional (musrenbangnas). Dengan demikian diharapkan kebijakan pembangunan yang ditempuh dapat dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, bersinergi dan berkesinambungan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018, RKPD Kota Malang Tahun 2015 merupakan tahun ke-2 atau tahap ke-dua dalam pelaksanaan RPJMD dimaksud. Capaian yang diharapkan dalam tahun ke-2 tersebut menjadi suatu acuan dalam penentuan prioritas pembangunan daerah.

Sebagaimana ketentuan yang berlaku, RKPD merupakan pijakan awal dalam penyusunan APBD. Maka untuk mendapatkan konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran tahunan, RKPD perlu mengikuti kerangka penyusunan anggaran tahunan yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini untuk

memastikan bahwa RKPD dapat diterjemahkan secara konsisten kepada proses penganggaran, yaitu perumusan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD, Rancangan APBD, dan APBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan RKPD ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1054 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

- Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
 16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
23. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
24. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran

Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 61);

25. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 3);

26. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);

27. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 5);

28. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 6);

29. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018.

1.3. Hubungan antar Dokumen

RKPD Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018 dengan mengacu pada

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 serta berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota sekitarnya. Oleh karenanya substansi RKPD Tahun 2015 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan lain, sehingga terjadi sinergitas antara perencanaan pembangunan nasional dan provinsi dan Kabupaten/Kota sekitarnya.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kota Malang Tahun 2015 ini adalah merumuskan kebijakan pembangunan daerah 1 (satu) tahun dengan mensinergikan dan menyelaraskan RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) SKPD, RKP, RKPD Provinsi Jawa Timur dan hasil musrenbang RKPD tingkat kota ke dalam rencana program dan kegiatan serta penganggaran tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan RKPD adalah sebagai berikut :

1. Mengoperasionalkan RPJMD ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur;

2. Memberikan pedoman kepada SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD;
3. Sebagai dasar dan acuan penyusunan KU-APBD, PPAS APBD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika penulisan RKPD Kota Malang Tahun 2015 mengacu pada Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Hubungan antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
 - 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah;

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas dan Pembangunan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Secara geografis, Kota Malang terletak pada posisi 112,06 -112,07° Bujur Timur dan 7,06° - 8,02° Lintang Selatan sehingga membentuk wilayah dengan luas sebesar 11.006 ha atau 110,06 km². Meskipun hanya memiliki wilayah yang relatif kecil, namun Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota Malang berada di tengah-tengah wilayah administrasi Kabupaten Malang dengan wilayah batas administrasi sebagai berikut:

- (1) Sebelah Utara: berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang;
- (2) Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;
- (3) Sebelah Barat: berbatasan dengan Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang;
- (4) Sebelah Timur: berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

Dalam ketentuan tentang pembagian wilayah, Kota Malang secara administratif terbagi menjadi 5 (lima) kecamatan dengan jumlah kelurahan sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kelurahan. Dari 57 kelurahan tersebut, terbagi lagi menjadi 544 Rukun Warga (RW) dan 4.071 Rukun Tetangga (RT). Adapun rincian data kelurahan, RW dan RT pada masing-masing kecamatan di Kota Malang sebagai berikut :

No	Kecamatan	Luas Area (Km ²)	% Terhadap Luas Kota	Kelurahan		Jumlah	
						RW	RT
I	BLIMBING	17,77	16,15	1	Balearjosari	8	43
				2	Arjosari	5	34
				3	Polowijen	6	38
				4	Purwodadi	13	93
				5	Blimbing	10	55
				6	Pandanwangi	13	120
				7	Purwantoro	24	155
				8	Bunulrejo	21	146
				9	Kesatrian	12	70
				10	Polehan	7	74
				11	Jodipan	8	86
						JUMLAH	125
II	KEDUNGKANDANG	39,89	36,24	1	Kotalama	11	141
				2	Mergosono	6	78
				3	Bumiayu	6	56
				4	Wonokoyo	5	25
				5	Buring	9	38
				6	Kedungkandang	7	49
				7	Lesanpuro	11	92
				8	Sawojajar	16	118
				9	Madyopuro	15	108
				10	Cemorokandang	11	57
				11	Arjowinangun	9	50
				12	Tlogowaru	8	37
		JUMLAH	114	848			
III	LOWOKWARU	22,60	20,53	1	Tasikmadu	6	28
				2	Tunggulwulung	6	49
				3	Merjosari	12	79
				4	Tlogomas	9	49
				5	Dinoyo	7	50
				6	Sumbersari	7	40
				7	Ketawanggede	5	32
				8	Jatimulyo	10	74
				9	Tunjungsekar	8	73
				10	Mojolangu	19	112
				11	Tulusrejo	16	74
				12	Lowokwaru	15	104
		JUMLAH	120	764			
IV	KLOJEN	8,83	8,02	1	Klojen	7	46
				2	Samaan	8	58
				3	Rampalcelaket	6	35
				4	Kiduldalem	8	50
				5	Sukoharjo	7	57
				6	Kasin	11	96

				7	Kauman	10	67
				8	Oro-oro Dowo	10	97
				9	Bareng	8	74
				10	Gadingkasri	6	50
				11	Penanggungan	8	45
				JUMLAH		89	675
NO	KECAMATAN	LUAS AREA (km ²)	% TERHADAP LUAS KOTA	KELURAHAN		JUMLAH	
						RW	RT
V	SUKUN	20,97	19,06	1	Bakalan Krajan	6	43
				2	Mulyorejo	7	51
				3	Karangbesuki	9	78
				4	Ciptomulyo	5	62
				5	Gadang	8	65
				6	Kebonsari	5	41
				7	Bandungrejosari	11	108
				8	Sukun	9	109
				9	Tanjungrejo	13	137
				10	Pisangcandi	10	84
				11	Bandulan	7	58
				JUMLAH		90	836
JUMLAH TOTAL		110,06	100,00	57		544	4.071

Dipandang dari aspek topografis, Kota Malang terletak pada lokasi yang cukup tinggi yaitu 440 – 667 meter di atas permukaan air laut. Salah satu lokasi yang paling tinggi adalah Pegunungan Buring yang terletak di sebelah Timur Kota Malang. Dengan letak lokasi yang tinggi dan berada diantara wilayah pegunungan, menjadikan Kota Malang sebagai kota yang berpotensi dalam sektor pariwisata. Dari atas pegunungan ini terlihat jelas pemandangan yang indah antara lain dari arah Barat terlihat barisan Gunung Kawi dan Panderman, sebelah Utara adalah Gunung Arjuno, sebelah Timur adalah Gunung Semeru dan jika melihat kebawah terlihat hamparan Kota Malang.

Lokasi administrasi Kota Malang, dipandang dari aspek hidrologis, terletak pada Cekungan Air Tanah (CAT) Brantas. Di dalam CAT Brantas terkandung potensi dan cadangan air tanah

dengan kualitas yang sangat bagus untuk bahan baku air minum. Wilayah CAT Brantas ini mempunyai wilayah cekungan yang terbesar di Propinsi Jawa Timur. Karena letak Kota Malang yang berada pada CAT Brantas ini, maka pemerintah daerah melalui PDAM saat ini menggunakannya sebagai bahan baku utama untuk air minum bagi masyarakat. Sementara itu, perairan permukaannya berupa aliran beberapa sungai yang berfungsi sebagai bahan baku pengairan maupun untuk saluran pembuangan akhir dari drainase kota. Di wilayah Kota Malang terdapat 4 (empat) sungai utama yang cukup besar, yaitu Sungai Brantas, Sungai Metro, Sungai Mewek-Kalisari-Bango, dan Sungai Amprong. Sungai-sungai yang lain adalah merupakan sungai-sungai relatif kecil yang merupakan sungai pecahan, maupun sungai terusan dari keempat sungai besar tersebut. Kondisi Kota Malang berada pada daerah lereng gunung sehingga Kota Malang menjadi jalur aliran air bagi daerah dataran rendah dibawahnya.

Kondisi iklim (aspek klimatologi), Kota Malang relatif nyaman. Rata-rata suhu udara berkisar antara 22,2°C sampai 24,5°C. Sedangkan suhu maksimum mencapai 32,3°C dan suhu minimum 17,8°C. Rata-rata kelembaban udara berkisar 74% - 82%, dengan kelembaban maksimum 97% dan minimum mencapai 37%. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso, curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Januari, Pebruari, Maret, April dan Desember. Sedangkan pada bulan Juni, Agustus dan November curah hujan relatif rendah.

Menurut hasil Sensus Penduduk 2010 jumlah penduduk Kota Malang sebanyak 820.243 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 404.553 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 415.690 jiwa. Dengan demikian rasio jenis kelamin penduduk Kota Malang sebesar 97,05. Ini artinya bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 97-98 penduduk laki-laki. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, pada periode 2000–2012 rata-rata laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya adalah 0,80 %.

Dilihat dari penyebarannya, diantara 5 kecamatan yang ada Kecamatan Lowokwaru memiliki penduduk terbanyak yaitu sebesar 186.013 jiwa, kemudian diikuti oleh kecamatan Sukun (181.513 jiwa), Kecamatan Kedungkandang (174.477 jiwa), Kecamatan Blimbing (172.333 jiwa) dan Kecamatan Klojen (105.907 jiwa). Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi terjadi di wilayah Kecamatan Klojen yaitu mencapai 11.994 jiwa per Km², sedangkan terendah di wilayah Kecamatan Kedungkandang sebesar 4.374 jiwa per Km².

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Per Kecamatan
Tahun 2009-2013

No	KECAMATAN	TAHUN 2009	TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013
1	KLOJEN	127.415	105.907	118.472	110.816	107.729
2	BLIMBING	171.935	172.333	198.040	188.387	187.001
3	KEDUNGKANDANG	162.941	174.477	201.976	193.784	194.071
4	LOWOKWARU	182.794	186.013	169.238	161.603	162.591
5	SUKUN	175.772	181.513	202.353	191.643	193.310
KOTA MALANG		820.857	820.243	890.079	846.233	844.702
Sumber : BPS Kota Malang						

Peningkatan jumlah penduduk Kota Malang dalam waktu 5 tahun (2009 – 2013) sebesar 23.845 jiwa atau rata-rata per tahun mengalami peningkatan 1.987 jiwa dengan peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2011 sebesar 69.836 jiwa.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2013

N0.	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	32.210	30.520	62.730
2	5-9	31.490	29.731	61.171
3	10-14	29.605	28.785	58.390
4	15-19	38.520	42.612	81.132
5	20-24	52.882	50.994	103.876
6	25-29	36.672	34.652	70.824
7	30-34	33.493	32.637	66.130
8	35-39	30.688	30.646	60.834
9	40-44	28.535	30.345	58.880
10	45-49	25.957	28.775	54.732
11	50-54	23.257	25.670	48.927
12	55-59	18.867	19.927	38.794
13	60-64	13.255	13.492	26.747
14	65-69	8.778	10.042	18.820
15	70-74	6.861	8.849	13.261
16	75 +	5.981	9.974	15.555
Jumlah		417.051	427.651	844.702
Sumber : BPS Kota Malang				

Struktur umum penduduk Kota Malang dapat menggambarkan tingkat produktifitas penduduk Kota Malang. Usia produktif berkisar antara 15 – 64 tahun atau sekitar 72,32 % dari jumlah penduduk, dimana diharapkan penduduk pada usia ini memiliki kemampuan untuk berusaha/melakukan pekerjaannya secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB

Perkembangan ekonomi adalah persentase perubahan angka PDRB atas dasar harga berlakupada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan PDRB atas dasar harga konstan 2000 pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya. Angka perkembangan ekonomi

memperlihatkan kemampuan suatu daerah secara nominal dalam memproduksi karena dipengaruhi oleh perubahan harga (inflasi) dan perubahan jumlah produksi (output). Sedangkan angka pertumbuhan ekonomi mengindikasikan seberapa besar kemampuan suatu daerah secara riil dalam memproduksi karena hanya dipengaruhi oleh perubahan output tanpa dipengaruhi besarnya perubahan harga. Namun pada dasarnya baik angka perkembangan maupun angka pertumbuhan, keduanya sama-sama menunjukkan kondisi perubahan. Perkembangan dan pertumbuhan PDRB Kota Malang tahun 2009 s.d tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Kota Malang
Tahun 2009 – 2013

Tahun	PDRB ADH Berlaku (Juta Rp)	Perkembangan (%)	PDRB ADH Konstan	Pertumbuhan (%)
2009	27.164.722,58	11,37	13.218.916,86	4,9
2010	30.802.611,88	13,39	14.044.625,15	6,52
2011	34.226.477,00	11,16	15.038.460,41	7,08
2012	38.512.635,20	12,52	16.176.980,57	7,57
2013	43.395.888,98	12,68	17.293.338,71	7,30
Rata-rata		12,24		6,67
Sumber : BPS Kota Malang				

Dari tabel di atas terlihat bahwa pembangunan ekonomi Kota Malang semakin menunjukkan peningkatan. Besarnya laju perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, selama kurun waktu lima tahun terakhir (2009-2013) memperlihatkan kondisi ekonomi yang sehat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 6,60%. Rata-rata pertumbuhan ini masih di atas pertumbuhannasional yang ditargetkan sebesar 5,78%. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja sehingga jumlah pengangguran dapat berkurang secara signifikan.

2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi dan peningkatan pendapatan perkapita merupakan suatu kemajuan, akan tetapi harus diukur dari keberhasilan mengangkat harkat dan martabat rakyat ke tempat yang lebih baik dan manusiawi secara keseluruhan. Ini berarti pembangunan harus difokuskan pada manusia sebagai titik sentralnya sehingga akan tercipta kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Untuk mengetahui dampak pembangunan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maka dapat mengacu pada perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Peningkatan IPM Kota Malang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Tabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Malang
Tahun 2009– 2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Indeks Pendidikan <i>Angka Melek Huruf (%)</i> <i>Rata-rata Lama Sekolah (tahun)</i>	88,87 97,20 10,83	89,59 97,30 11,12	89,87 97,72 11,12	89,33 97,24 11,03	89,79 98,38 10,89
2	Indeks Kesehatan <i>Angka Harapan Hidup (tahun)</i>	74,65 69,79	75,39 70,23	76,05 70,68	76,36 70,82	76,90 71,14
3	Indeks Daya Beli <i>Rata-rata Pengeluaran Riil</i> <i>Perkapita (Rp 000)</i>	66,24 646,62	66,32 647,00	67,58 652,42	68,40 655,40	69,65 661,39
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,58	77,10	77,76	77,99	78,78

Sumber : BPS Kota Malang

Pada tahun 2013 Indeks Pembangunan Manusia Kota Malang berada di urutan kedua setelah Kota Surabaya dimana IPM Kota Surabaya sebesar 78,97 dan IPM Kota Malang masih jauh di atas IPM Propinsi Jawa Timur yang hanya sebesar 73,21.

3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Analisis seni budaya dan olah raga dilakukan terhadap indikator jumlah grup kesenian, jumlah klub olah raga dan jumlah gedung olah raga. Hasil analisis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Perkembangan Seni Budaya dan Olah Raga
Tahun 2009– 2013

No	Capaian Pembangunan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	35	37	39	42	45
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.	1	1	1	2	2
3	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.	138	140	141	142	145
4	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.	4	4	4	4	4

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kepemudaan dan Olahraga

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, Pemerintah Kota Malang telah melaksanakan pelayanan publik/pelayanan umum . Pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pelayanan umum ini pada dasarnya terbagi 2 (dua) urusan yaitu layanan urusan wajib dan layanan urusan pilihan.

a. Layanan Urusan Wajib

Analisis kinerja layanan urusan wajib yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah, yaitu : (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum; (4) Perumahan; (5) Penataan Ruang; (6) Perencanaan Pembangunan; (7) Perhubungan; (8) Lingkungan Hidup; (9) Pertanahan; (10) Kependudukan dan Catatan Sipil; (11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (12) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; (13) Sosial; (14) Ketenagakerjaan; (15) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; (16) Penanaman Modal; (17) Kebudayaan; (18) Kepemudaan dan Olah Raga; (19) Kesatuan Bangsa, dan Politik Dalam Negeri, Otonomi

Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian; (20) Ketahanan Pangan; (21) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; (22) Statistik; (23) Kearsipan; (24) Komunikasi dan Informatika; dan (25) Perpustakaan.

1. Pendidikan

Tabel 2.6
Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Pendidikan
Kota Malang Tahun 2011 – 2013

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Target Th. 2014	Proyeksi Th. 2015
1	Angka Melek Huruf (AMH) (%)	92,7%	95,87%	98,50%	100%	100%
2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/ Jumlah Lembaga PAUD setiap RW	89,62%	69,78%	37,89%	37,89%	39,14%
3	Penduduk usia >15 tahun melek huruf	92,7%	99,27%	100%	100%	100%
4	Angka partisipasi murni SD/MI/Paket A	101,71 %	115,35%	102,44	102,44	102,44
5	Angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B	74,38%	109,28%	75,38	75,38	75,38
6	Angka partisipasi murni SMA/SMK/MA/Paket C	73,87%	88,80%	81,88	81,88	81,88
7	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,09	0,09	0,05	0,05	0,04
8	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,29	0,25	0,19	0,19	0,18
9	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,92	0,92	0,72	0,72	0,72
10	Angka kelulusan SD/MI	97,96%	97,96%	99,21%	99,21%	99,22%
11	Angka kelulusan SMP/MTs	96,29%	93,43%	99,63%	99,63%	99,63%
12	Angka kelulusan SMA/SMK/MA	96,21%	95,58%	99,08%	99,08%	99,08%
13	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	115,49	183,41	105,49	105,49	105,49
14	Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	104,35	103,09	91,81%	141,81	141,81
15	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV	95,21%	84,15%	91,53	91,53	91,53

Sumber : Dinas Pendidikan

2. Kesehatan

Tabel 2.7
Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Kesehatan
Kota Malang Tahun 2011 – 2013

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Target Th. 2014	Proyeksi Th. 2015
1	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	94,89%	95,41	95,41	96,36%	97,32%
2	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	98,80%	99,72%	80%	82%	90%
3	Cakupan kelurahan universal child immunization (UCI)	67%	73,7%	85,96%	85%	90%
4	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%
5	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	70%	65,10	80%	>80%	>80%
6	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100	100%	100%	100%
7	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100%	100%	74%	75%
8	Cakupan kunjungan bayi	74,13 %	84,82	92,72	80%	85%

Sumber : Dinas Kesehatan

3. Pekerjaan Umum

Tabel 2.8
Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Pekerjaan Umum
Kota Malang Tahun 2011 – 2013

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Target Th. 2014	Proyeksi Th. 2015
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	94,76%	94,76%	90,59%	80%	80%
2	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	119,70	134,70	137,30	140,04	142,84

3	Panjang Jalan Dalam Kondisi Sedang	14,58	6,58	6,58	5,32	2,8
4	Panjang Jalan Dalam Kondisi Rusak	6,50	0,50	3,48	3,132	2,8188
5	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk	1,03	1,006	2,98	0,26	0,26
6	Kawasan kumuh	5,38%	5,38%	16%	15%	14%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan

4. Perumahan

Tabel 2.9
Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Perumahan
Kota Malang Tahun 2011 – 2013

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Target Th. 2014	Proyeksi Th. 2015
1	Rumah tangga pengguna air bersih	87%	100	100%	95%	96%
2	Rumah tangga pengguna listrik	85,42%	90%	93%	95%	96%
3	Rumah tangga bersanitasi	86%	87%	85%	85%	86%
4	Lingkungan pemukiman kumuh	5,38%	5,38%	15%	16%	17%
5	Rumah layak huni	93,53	93,53	95,85	96%	97%

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan

5. Penataan Ruang

Tabel 2.10
Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Penataan Ruang
Kota Malang Tahun 2011 – 2013

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Target Th. 2014	Proyeksi Th. 2015
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) Per satuan luas wilayah ber-HPH/HGB	25,5	25,7	25,7	16,05%	15,98%
2	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	80,70	81	83,78%	85,50%	86,00%

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan

6. Perencanaan Pembangunan

Tabel 2.11
Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Perencanaan Pembangunan
Kota Malang Tahun 2011 – 2013

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Target Th. 2014	Proyeksi Th. 2015
1	Tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2	Tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perkada/Perda	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
3	Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
4	Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

7. Perhubungan

Tabel 2.12
Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Perhubungan
Kota Malang Tahun 2011 – 2013

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Target Th. 2014	Proyeksi Th. 2015
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	2.477.342	1.730.764	5.182.963	267346	273863
2	Rasio ijin trayek	3.375	3.632	2.216	1.808	1.808
3	Jumlah uji kir angkutan umum	1	1	1	1	1
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal bus	3	3	3	3	3
5	Angkutan darat	371.013	427.656	516.712	542.548	569.675
6	Kepemilikan	371.013	427.656	516.712	542.548	

	KIR angkutan umum					569.675
7	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari
8	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	16.500	16.500	JBB> 3.500 = 59.000 JBB< 3.500 = 48.500	JBB> 3.500 = 59.000 JBB< 3.500 = 48.500	JBB> 3.500 = 59.000 JBB< 3.500 = 48.500
9	Pemasangan rambu-rambu	1.407	1.572	1.740	1.914	2.105
<i>Sumber : Dinas Perhubungan</i>						

8. Lingkungan Hidup

Tabel 2.13
Pencapaian Indikator Kinerja Bidang lingkungan Hidup
Kota Malang Tahun 2011 – 2013

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Target Th. 2014	Proyeksi Th. 2015
1	Persentase penanganan sampah	91%	95%	95,42%	96%	96%
2	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	5	8	9	10	10
3	Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	0,75	1.006	2,98	3,24	3,24
4	Penegakan hukum lingkungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Penegakan Hukum Lingkungan belum bisa berjalan karena BLH Kota Malang belum memiliki PPLHD (Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup Daerah)</i>						
<i>Sumber : Badan Lingkungan Hidup</i>						

9. Pertanahan

Tabel 2.14
Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Pertanahan
Kota Malang Tahun 2011 – 2013

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Target Th. 2014	Proyeksi Th. 2015
1	Penyelesaian kasus tanah Negara	67%	100%	100%	100%	100%
2	Penyelesaian izin lokasi	100%	100%	100%	100%	100%
3	Luas Lahan Bersertifikat	83,1%	87,90%	81,7%	87%	89%
<i>Sumber :Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah</i>						

10. Kependudukan dan Catatan Sipil

Tabel 2.15
Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Malang Tahun 2011 – 2013

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Target Th. 2014	Proyeksi Th. 2015
1	Kepemilikan KTP	95%	91,62%	90,89%	98,04	98,05
2	Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	88%	82%	82%	87,8	89,6
3	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	sudah	sudah	sudah	sudah

Sumber :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2.16
Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Malang Tahun 2011 – 2013

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Target Th. 2014	Proyeksi Th. 2015
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	2,62%	2,12%	1,75%	12%	12%
2	Rasio KDRT	41	35	45	10	10
3	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	0%	0%	0%	0%	0%
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	97,4%	98%	97%	100%	100%
5	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dan tindakan kekerasan	41	35	25	28	23

Sumber : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Tabel 2.17
Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Kota Malang Tahun 2011 – 2013

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Target Th. 2014	Proyeksi Th. 2015
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2	2	2
2	Prevalensi peserta KB aktif	-	93,8%	73.25%	75,85%	75,90%
3	Cakupan peserta KB aktif	75,5%	76,0%	81%	82%	82%
4	Keluarga Pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1	55.958	56.608	55.454	49.908	44.917

Sumber : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

13. Sosial

Tabel 2.18
Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Sosial
Kota Malang Tahun 2011 – 2013

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Target Th. 2014	Proyeksi Th. 2015
1	Sarana sosial seperti panti asuhan panti jompo dan panti rehabilitasi	65%	76%	100%	100%	100%
2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	6%	8%	13,53%	15,97%	18,19%
3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	6%	8%	10%	17%	20%

Sumber : Dinas Sosial

Pencapaian indikator kinerja pada bidang sosial di Tahun 2015 diproyeksikan mengalami peningkatan dari realisasi di tahun-tahun sebelumnya diantaranya adalah Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial diproyeksikan pada Tahun 2015 mengalami penurunan yaitu sekitar 34.345 orang hal ini disebabkan karena realisasi di tahun 2013 sudah mencapai 37.363 orang kemudian direncanakan pada tahun 2014 nanti targetnya adalah 38.158 orang PMKS yang memperoleh bantuan sosial sehingga di Tahun 2015 nanti jumlahnya bisa berkurang. Hal ini berlaku juga indikator kinerja penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang diproyeksikan pada Tahun 2015 sudah mengalami penurunan.

14. Ketenagakerjaan

Tabel 2.19
Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Ketenagakerjaan
Kota Malang Tahun 2011 – 2013

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Target Th. 2014	Proyeksi Th. 2015
1	Angka partisipasi angkatan kerja	73,17%	63,82%	62,95%	80%	80%
2	Angka Sengketa pengusaha - pekerja per tahun	37	33	31	35	31
3	Tingkat partisipasi angkatan kerja	73,17%	63,82%	62,95%	80%	80%
4	Pencari kerja yang ditempatkan	73,41%	32,16%	25%	50%	60%
5	Tingkat pengangguran terbuka	10.176	6.739	7.145	7.073	6.967
6	Keselamatan dan perlindungan	-	720	707	810	920

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Pada bidang ketenagakerjaan, proyeksi pencapaian indikator kinerja di Tahun 2015 juga mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya diantaranya adalah meningkatnya penyelesaian kasus sengketa antara pengusaha dan pekerjasebanyak 31 kasus, penempatan pencari kerja meningkat 60%serta tingkat pengangguran terbuka sebanyak 6.967orang.

15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Tabel 2.20
Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kota Malang Tahun 2011 – 2013

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Target Th. 2014	Proyeksi Th. 2015
1	Persentase koperasi aktif	63,08%	63,08%	64,61%	67,84%	71,23%
2	Usaha Mikro Kecil	63.483	63.483	63.483	63.483	63.483
3	Pertumbuhan Industri	0,07%	0,73%	0,94%	1,47%	2,00%

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Realisasi pencapaian indikator kinerja Bidang Koperasi dan UKM pada tahun 2013 berusaha ditingkatkan pada tahun 2015 nanti,

diantaranya Usaha Mikro Kecil bisameningkat sebesar 63.483 unit demikian juga dengan persentase koperasi aktif sebesar 71,23%%. Sedangkan untuk pertumbuhan Industri pada tahun 2015 nantidiproeksikan bisa meningkat hingga 2%, hal ini disebabkan karena Industri diKota Malang masih didominasi oleh Industri Kecil dan Industri Menengahsedangkan untuk Industri Berat diperkirakan tidak mengalami peningkatan.

16. Penanaman Modal

Tabel 2.21
Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Penanaman Modal
Kota Malang Tahun 2011 – 2013

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Target Th. 2014	Proyeksi Th. 2015
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PM A)	2	2	2	10	11
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PM A)	441.659.000.000	441.659.000.000	441.659.000.000	441.659.000.000	441.659.000.000
3	Rasio daya serap tenaga kerja	61	59	64,81	60,00%	65,00%
4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	35,93 %	42,49%	42%	42,49%	43,42%

Sumber : Bagian Kerjasama dan Penanaman Modal

17. Kebudayaan

Tabel 2.21
Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Kebudayaan
Kota Malang Tahun 2011 – 2013

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Target Th. 2014	Proyeksi Th. 2015
1	Jumlah Grup Kesenian per 10.000 penduduk	218	162	250	250	250
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	1	1	1	1	1
3	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	208	210	212	214	216

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

18. Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 2.22
Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Kota Malang Tahun 2011 – 2013

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Target Th. 2014	Proyeksi Th. 2015
1	Jumlah organisasi pemuda	50	50	240	232	234
2	Jumlah organisasi olahraga	51	40	43	45	47
3	Jumlah kegiatan kepemudaan	113	113	121	121	121
4	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	108	181	145	160	180
5	Jumlah Gedung olahraga per 10.000 penduduk	3	3	3	3	3
6	Gelanggang/balai remaja (selain swasta)	4	4	4	4	4
7	Lapangan olahraga	20	20	20	20	22

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Tabel 2.23

***Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Kota Malang Tahun 2011 – 2013***

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Target Th. 2014	Proyeksi Th. 2015
1	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	2	2	2	2	2
2	Kegiatan pembinaan politik daerah	3	1	12	13	14

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Tabel 2.24

***Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Kota Malang Tahun 2011 – 2013***

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Target Th. 2014	Proyeksi Th. 2015
1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	1,970	1,857	1,644	1,655	2,010
2	Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	38,66	32,56	0,63	1	1,25
3	Rasio Pos Siskamling per jumlah kelurahan	69%	69%	50%	100%	100%
4	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%
5	Penegakan PERDA	12	9	12	22	22
6	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, dan Keindahan) Kota	327	353	369	401	440
7	Rasio Petugas Linmas	0,35	0,35	0,35	0,35	0,45
8	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik	100%	100%	100%	100%	100%
9	Jumlah Sistem Informasi	15	17	25	27	29

	Manajemen Pemda					
10	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	ada	ada	ada	ada	ada

21. Ketahanan Pangan

Tabel 2.25
Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Ketahanan Pangan
Kota Malang Tahun 2011 – 2013

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Target Th. 2014	Proyeksi Th. 2015
1	Data produksi padi	13725	13553	13103	14413	15855
2	Data produksi jagung	947	935	970	1067	1174
1	Data produksi ubi jalar	67	19	0	21	23
2	Data produksi ubi kayu	1363	1043	1850	2035	2239

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan

22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 2.26
Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kota Malang Tahun 2011 – 2013

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Target Th. 2014	Proyeksi Th. 2015
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM)	114	114	114	125	138
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	63	63	63	69	76
3	PKK aktif	63	63	63	69	76
4	Posyandu aktif	655	655	656	5.712	5.712

Sumber : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat

23. Statistik

Tabel 2.27
Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Statistik
Kota Malang Tahun 2011 – 2013

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Target Th. 2014	Proyeksi Th. 2015
1	Buku "Kota Malang Dalam Angka"	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2	Buku " PDRB Kota Malang"	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

24. Kearsipan

Tabel 2.28
Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Kearsipan
Kota Malang Tahun 2011 – 2013

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Target Th. 2014	Proyeksi Th. 2015
1	Persentase SKPD yang menerapkan Pengelolaan arsip secara baku	41	42	42	43	44
2	Jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	0	0	0	4	4

Sumber : Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah

25. Komunikasi dan Informatika

Tabel 2.29
Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika
Kota Malang Tahun 2011 – 2013

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Target Th. 2014	Proyeksi Th. 2015
1	Jumlah jaringan komunikasi	8	8	8	9	9
2	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0,00058	0,0005	0,0006	0,00066	0,0007
3	Jumlah surat kabar nasional/lokal	12	27	27	27	27
4	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	6	6	6	6	6
5	Website milik pemerintah daerah	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

25. Perpustakaan

Tabel 2.30
Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Perpustakaan
Kota Malang Tahun 2011 – 2013

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Target Th. 2014	Proyeksi Th. 2015
1	Jumlah perpustakaan kota	1	1	1	1	1
2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	310.000orang	370.968orang	240.045 orang	250.000 orang	250.000 orang
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	136.000	136.000	141.794	147.588	153.382

Sumber : Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah

b. Layanan Urusan Pilihan

Disamping urusan wajib, Pemerintah Kota Malang juga menyelenggarakan layanan urusan pilihan yang merupakan amanat dari peraturan perundangundangan. Layanan urusan pilihan meliputi beberapa bidang, yaitu : (1) Pertanian; (2) Kehutanan; (3) Pariwisata; (4) Kelautan dan Perikanan; (5) Perdagangan; (6) Industri; dan (7) Ketransmigrasian. Adapun pencapaian indikator kinerja masing-masing bidang tersebut adalah sebagai berikut

1. Pertanian

Tabel 2.31
Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Pertanian
Kota Malang Tahun 2011 – 2013

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Target Th. 2014	Proyeksi Th. 2015
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	64,90	65,78	65,42	71,962	79,1582
2	Kontribusi sektor pertanian /perkebunan terhadap PDRB	0,33	0,32	0,30	0,32	0,34
3	Kontribusi sektor pertanian	0,13	0,12	0,11	0,12	0,12

	(palawija) terhadap PDRB					
4	Kontribusi sektor Perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	0,12	0,11	0,11	0,12	0,12
5	Cakupan bina kelompok petani	5,37%	8,05%	8,72%	9,5%	10,55%
<i>Sumber : Dinas Pertanian</i>						

2. Kehutanan

Tabel 2.32
Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Kehutanan
Kota Malang Tahun 2011 – 2013

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Target Th. 2014	Proyeksi Th. 2015
1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kerusakan kawasan hutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sumber : Dinas Pertanian</i>						

3. Pariwisata

Tabel 2.33
Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Pariwisata
Kota Malang Tahun 2011 – 2013

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Target Th. 2014	Proyeksi Th. 2015
1	Kunjungan Wisata(orang)	1.561.870	1.765.100	1.899.254	2.102.723	2.312.995
2	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB (Harga Konstan)	688.167,97	927.431	1.069.702	1.176.672	1.294.339
<i>Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</i>						

4. Kelautan dan Perikanan

Tabel 2.34
Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Kelautan dan Perikanan
Kota Malang Tahun 2011 – 2013

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Target Th. 2014	Proyeksi Th. 2015
1	Produksi perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Konsumsi ikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Dinas Pertanian

5. Perdagangan

Tabel 2.35
Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Perdagangan
Kota Malang Tahun 2011 – 2013

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Target Th. 2014	Proyeksi Th. 2015
1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (Harga konstan)	4.592.962,07	5.011.790,38	5.478.302,86	5.484.329	5.490.362
2	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (Harga berlaku)	9.810.509,95	11.031.183,01	13.012.992,09	13.027.306	13.041.636

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

6. Industri

Tabel 2.36
Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Industri
Kota Malang Tahun 2011 – 2013

No	Indikator Kinerja	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Target Th. 2014	Proyeksi Th. 2015
1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (Harga Konstan)	30,06	29,73	29,14	30,59	32,12
2	Kontribusi sektor	33,05	33,14	32,02	33,62	35,30

	industri terhadap PDRB (Harga berlaku)					
3	Kontribusi sector industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri (Harga konstan)	8,38	8,19	8,12	8,52	8,952
4	Kontribusi sektor industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri (Harga berlaku)	6,42	6,34	6,14	6,44	6,76
5	Pertumbuhan industri	3249	3273	3278	3441	3613
<i>Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan</i>						

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan terbuka padapersaingan dengan daerah lainnya yang berdekatan atau domestik. Aspek daya saingdaerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2014 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Malang Nomor 23 Tahun 2013 tanggal 27 Mei 2013. Dalam RKPD tersebut telah dipaparkan prioritas-prioritas pembangunan yang diimplementasikan kedalam sejumlah program dan kegiatan beserta indikator capaian kinerjanya. Namun, dalam pembahasan selanjutnya, ada beberapa program/kegiatan tidak diakomodir dalam APBD Kota Malang tahun 2014 namun ada yang bertambah sesuai hasil musyawarah perencanaan pembangunan. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan

Dalam RKPD Tahun 2014, Dinas Pendidikan sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang pendidikan, merencanakan akan melaksanakan 9 program dan 168 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.202.087.977.351,00. Dalam APBD Tahun 2014, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 154.664.567.800,00.

2. Dinas Kesehatan

Dalam RKPD Tahun 2014, Dinas Kesehatan sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang kesehatan, merencanakan akan melaksanakan 16 program dan 225 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.83.285.934.494,00. Dalam APBD Tahun 2014, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 86.059.305.000,00.

3. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan

Dalam RKPD Tahun 2014, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang pekerjaan umum, perumahan dan penataan ruang serta perencanaan pembangunan, merencanakan akan melaksanakan 11 program dan 165 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 104.653.542.520,00. Dalam APBD Tahun 2014, dialokasikan anggaran sebesar Rp.271.250.000.000,00.

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam RKPD Tahun 2014, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang perencanaan pembangunan dan tata ruang, merencanakan akan melaksanakan 12 program dan 59 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.6.842.519.000,00. Dalam APBD Tahun 2014, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.730.000.000,00.

5. Dinas Perhubungan

Dalam RKPD Tahun 2014, Dinas Perhubungan sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang perhubungan, merencanakan akan melaksanakan 11 program dan 79 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.11.807.864.715,00. Dalam APBD Tahun 2014, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 10.966.444.500,00.

6. Badan Lingkungan Hidup

Dalam RKPD Tahun 2014, Badan Lingkungan Hidup sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang lingkungan hidup, merencanakan akan melaksanakan 10 program dan 47 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.4.088.100.000,00. Dalam APBD Tahun 2014, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.050.000.000,00.

7. Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Dalam RKPD Tahun 2014, Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang lingkungan hidup, merencanakan akan melaksanakan 9 program dan 62 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.11.567.815.000,00. Dalam APBD Tahun 2014, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 41.330.063.100,00.

8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Dalam RKPD Tahun 2014, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang kependudukan dan catatan sipil, merencanakan akan melaksanakan 4 program dan 53 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.5.813.363.500,00. Dalam APBD Tahun 2014, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.829.602.500,00.

9. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam RKPD Tahun 2014, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak, merencanakan akan melaksanakan 11 program dan 82 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.20.200.000.000,00. Dalam APBD Tahun 2014, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 12.907.000.000,00.

10. Dinas Sosial

Dalam RKPD Tahun 2014, Dinas Sosial sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang sosial, merencanakan akan melaksanakan 11 program dan 60 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.3.516.409.500,00. Dalam APBD Tahun 2014, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.650.430.000,00.

11. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Dalam RKPD Tahun 2014, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang ketenagakerjaan, merencanakan akan melaksanakan 7 program dan 39 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.2.704.950.200,00. Dalam APBD Tahun 2014, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 29.531.600.000,00.

12. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dalam RKPD Tahun 2014, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang koperasi dan usaha kecil menengah, merencanakan akan melaksanakan 5 program dan 30 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.1.822.000.000,00. Dalam APBD Tahun 2014, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.522.000.000,00.

13. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dalam RKPD Tahun 2014, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang kebudayaan, merencanakan akan melaksanakan 8 program dan 55 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 8.007.538.700,00. Dalam APBD Tahun 2014, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.182.250.000,00.

14. Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Dalam RKPD Tahun 2014, Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang perencanaan pembangunan dan tata ruang, merencanakan akan melaksanakan 7 program dan 48 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.17.691.185.800,00. Dalam APBD Tahun 2014, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.328.336.000,00.

15. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam RKPD Tahun 2014, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, merencanakan akan melaksanakan 10 program dan 34 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 5.125.836.575,00. Dalam APBD Tahun 2014, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.125.850.000,00.

16. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

Dalam RKPD Tahun 2014, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, merencanakan akan melaksanakan 7 program dan 47 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.7.573.650.050,00. Dalam APBD Tahun 2014, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.850.000.000,00.

17. Bagian Pemerintahan

Dalam RKPD Tahun 2014, Bagian Pemerintahan sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 7 program dan 10 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 7.767.800.000,00. Dalam APBD Tahun 2014, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 9.950.000.000,00.

18. Bagian Hukum

Dalam RKPD Tahun 2014, Bagian Hukum sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 3 program dan 12 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.3.822.420,00. Dalam APBD Tahun 2014, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.850.000.000,00.

19. Bagian Organisasi

Dalam RKPD Tahun 2014, Bagian Organisasi sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 8 program dan 22 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 2.100.954.800,00. Dalam APBD Tahun 2014, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.280.000.000,00.

20. Bagian Pembangunan

Dalam RKPD Tahun 2014, Bagian Pembangunan sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 4 program dan 14 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.036.900.000,00. Dalam APBD Tahun 2014, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00.

21. Bagian Perkonomian dan Usaha Daerah

Dalam RKPD Tahun 2014, Bagian Perkonomian dan Usaha Daerah sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, merencanakan akan melaksanakan 5 program dan 11 kegiatan dengan pagu

indikatif sebesar Rp.1.560.480.003,00.Dalam APBD Tahun 2014, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00.

22. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Dalam RKPD Tahun 2014, Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 2 program dan 29 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.10.130.134.500,00.Dalam APBD Tahun 2014, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 12.250.000.000,00.

23. Bagian Hubungan Masyarakat

Dalam RKPD Tahun 2014, Bagian Hubungan Masyarakat sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 2 program dan 7 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 2.739.720.000,00.Dalam APBD Tahun 2014, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.300.000.000,00.

24. Bagian Umum

Dalam RKPD Tahun 2014, Bagian Umum sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 5 program dan 38 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.33.501.855.850,00.Dalam APBD Tahun 2014, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 32.979.000.000,00.

25. Bagian Kerjasama dan Penanaman Modal

Dalam RKPD Tahun 2014, Bagian Kerjasama dan Penanaman Modal sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,

perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 2 program dan 7 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 630.000.000,00. Dalam APBD Tahun 2014, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 750.000.000,00.

26. Sekretariat DPRD

Dalam RKPD Tahun 2014, Sekretariat DPRD sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 4 program dan 48 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 42.322.239.540,00. Dalam APBD Tahun 2014, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 42.822.239.540,00.

27. Inspektorat

Dalam RKPD Tahun 2014, Inspektorat sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 4 program dan 24 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.956.501.650,00. Dalam APBD Tahun 2014, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.006.483.750,00.

28. Badan Kepegawaian Daerah

Dalam RKPD Tahun 2014, Badan Kepegawaian Daerah sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 6 program dan 49 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 6.394.160.500,00. Dalam APBD Tahun 2014, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.231.991.000,00.

29. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Dalam RKPD Tahun 2014, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 7 program dan 33 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.3.261.539.200,00. Dalam APBD Tahun 2014, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.405.347.000,00.

30. Dinas Pendapatan Daerah

Dalam RKPD Tahun 2014, Dinas Pendapatan Daerah sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 4 program dan 34 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 10.349.369.000,00. Dalam APBD Tahun 2014, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 11.142.500.000,00.

31. Kecamatan Klojen

Dalam RKPD Tahun 2014, Kecamatan Klojen sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 15 program dan 41 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 635.550.000,00. Dalam APBD Tahun 2014, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 547.000.000,00.

32. Kecamatan Blimbing

Dalam RKPD Tahun 2014, Kecamatan Blimbing sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 6 program dan 23 kegiatan dengan pagu indikatif

sebesar Rp. 877.661.305,00. Dalam APBD Tahun 2014, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 570.000.000,00.

33. Kecamatan Kedungkandang

Dalam RKPD Tahun 2014, Kecamatan Kedungkandang sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 6 program dan 27 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.134.000.000,00. Dalam APBD Tahun 2014, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 577.000.000,00.

34. Kecamatan Lowokwaru

Dalam RKPD Tahun 2014, Kecamatan Lowokwaru sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 8 program dan 33 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 790.528.000,00. Dalam APBD Tahun 2014, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 548.000.000,00.

35. Kecamatan Sukun

Dalam RKPD Tahun 2014, Kecamatan Sukun sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 8 program dan 33 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 790.528.000,00. Dalam APBD Tahun 2014, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 555.000.000,00.

36. Kelurahan se Kota Malang (57 Kelurahan)

Dalam RKPD Tahun 2014, Kelurahan sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan rata-rata 6 program dan rata-rata 33 kegiatan dengan pagu indikatif rata-rata sebesar Rp. 750.000.000,00. Dalam APBD Tahun 2014, dialokasikan anggaran rata-rata sebesar Rp. 750.000.000,00.

37. Sekretariat KORPRI

Dalam RKPD Tahun 2014, Sekretariat KORPRI sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 3 program dan 38 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 550.700.000,00. Dalam APBD Tahun 2014, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00.

38. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Dalam RKPD Tahun 2014, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, merencanakan akan melaksanakan 8 program dan 56 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 8.581.092.870,00. Dalam APBD Tahun 2014, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.826.900.000,00.

39. Kantor Ketahanan Pangan

Dalam RKPD Tahun 2014, Dinas Kesehatan sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang ketahanan pangan, merencanakan akan melaksanakan 3 program dan 38 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 5.110.920.000,00. Dalam APBD Tahun 2014, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.445.000.000,00.

40. Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah

Dalam RKPD Tahun 2014, Dinas Kesehatan sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang kearsipan, merencanakan akan melaksanakan 5 program dan 26 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.3.444.625.150,00. Dalam APBD Tahun 2014, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.744.625.150,00.

41. Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam RKPD Tahun 2014, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika, merencanakan akan melaksanakan 6 program dan 45 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 4.727.585.000,00. Dalam APBD Tahun 2014, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.485.235.000,00.

42. Dinas Pertanian

Dalam RKPD Tahun 2014, Dinas Pertanian sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan pilihan bidang pertanian, merencanakan akan melaksanakan 11 program dan 25 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.1.730.180.000,00. Dalam APBD Tahun 2014, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.730.180.000,00.

43. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dalam RKPD Tahun 2014, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan pilihan bidang perdagangan, merencanakan akan melaksanakan 18 program dan 57 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 53.698.485.000,00. Dalam APBD Tahun 2014, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.750.000.000,00.

44. Dinas Pasar

Dalam RKPD Tahun 2014, Dinas Pasar sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan pilihan bidang perdagangan, merencanakan akan melaksanakan 9 program dan 36 kegiatan

dengan pagu indikatif sebesar Rp.5.978.501.000,00.Dalam APBD Tahun 2014, dialokasikan anggaran sebesar Rp.5.667.723.000,00.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014

Kondisi perekonomian di Kota Malang sangat dipengaruhi oleh perekonomian nasional dan regional Jawa Timur. Apabila ditinjau dari trend pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi daerah Kota Malang, sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di tingkat regional Jawa Timur dan nasional.

Sektor-sektor yang memberikan andil cukup signifikan terhadap PDRB Tahun 2013 secara berurutan adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran; Industri Pengolahan; Jasa-jasa; Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; Angkutan dan Komunikasi. Sedangkan sektor dengan laju pertumbuhan paling dominan pada Tahun 2013 antara lain Perdagangan, Hotel dan Restoran 39,86%; Industri Pengolahan 32,02%; Jasa-jasa 12,18%; Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 8,18%; Angkutan dan Komunikasi 2,96%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Kota Malang tahun 2013 mencapai 7,30 persen.

Tekanan inflasi mengalami penurunan dibandingkan pada Tahun 2012. Pada Tahun 2012, inflasi mencapai 7,57%, sedangkan pada tahun 2013 yang sebelumnya diproyeksikan sebesar 5,5% plus minus 1%, namun perhitungan sampai akhir tahun 2013 ini laju inflasi Kota Malang adalah sebesar 7,92%. Dengan demikian, tingkat inflasi di Kota Malang lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Jawa Timur yang sebesar 7,59 %. Tingkat inflasi ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga pangan dan adanya kenaikan indeks pada kelompok-kelompok sandang dan pendidikan.

Berdasarkan RPJMD Kota Malang tahun 2013-2018, ditetapkan target pertumbuhan ekonomi Kota Malang pada tahun 2015 adalah 7,57%. Untuk dapat mencapai target tersebut, kondisi ekonomi Kota Malang harus didorong dengan salah satunya memberi kemudahan-kemudahan kepada sektor riil untuk tumbuh.

Faktor-faktor yang masih bisa diandalkan sebagai pendorong ekonomi pada 2015 adalah konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah, adapun ekspor dan investasi diperkirakan masih akan menghadapi tekanan berat pada 2015. Oleh karena itu pelaksanaan APBD yang tepat waktu diharapkan akan membantu dalam rangka pertumbuhan perekonomian di daerah.

3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014

Masalah dan tantangan utama yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2015 untuk meningkatkan perekonomian daerah, antara lain adalah :

1. Bagaimana upaya untuk memantapkan hubungan antara pusat dan daerah dan hubungan antar daerah guna meningkatkan daya tarik investasi, menguatkan daya saing ekspor, dan mengembangkan industri manufaktur;
2. Bagaimana upaya untuk mendorong sektor perdagangan, hotel, jasa dan restoran serta meningkatkan produktivitas dan akses UKM kepada sumber daya produktif, termasuk upaya untuk meningkatkan dukungan infrastruktur bagi peningkatan daya saing daerah dan sektor unggulan daerah.

Prospek perekonomian Kota Malang yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kota Malang Tahun 2015 disesuaikan dengan prakiraan asumsi ekonomi makro APBN 2015 dan prakiraan asumsi ekonomi makro APBD Jawa Timur 2015. Asumsi berdasarkan APBN antara lain; pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen, laju inflasi sebesar 5 persen. Selain itu, sebagai pertimbangan pula, perkiraan kondisi keuangan negara tahun 2013 yang akan mengalami defisit APBN sebesar 1,4 – 1,6 persen dari PDB. Sedangkan asumsi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 7,5 – 7,7% dan laju inflasi sebesar 5,05%.

Merujuk pada prakiraan asumsi ekonomi makro tersebut di atas, maka asumsi dasar yang dipakai dalam penyusunan RKPD Kota Malang Tahun 2015 adalah mengacu pada asumsi yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan target yang ditetapkan pada RPJMD Kota Malang. Selanjutnya penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 dengan prospek perekonomian daerah Tahun 2015 sebagaimana tersebut di atas dengan perkiraan kondisi keuangan negara tahun 2015 akan mengalami defisit APBN sebesar 1,7 – 2,5 persen dari PDB, maka akan berpengaruh pada penerimaan daerah terkait dengan transfer dana dari Pemerintah. Oleh karena itu pembiayaan pembangunan yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah, diupayakan diperoleh dari potensi-potensi yang telah ada dan mendorong masuknya investasi/modal dari pihak swasta untuk berpartisipasi membangun di Kota Malang.

3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sesuai dengan kondisi dan tantangan perekonomian tahun 2015, kebijakan ekonomi makro daerah Kota Malang tahun 2015 diarahkan untuk **'mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran dengan lebih memberdayakan UMKM dan Koperasi dan sektor riil lainnya serta peningkatan kualitas SDM'**.

Pertumbuhan ekonomi dipacu terutama dengan meningkatkan investasi. Peningkatan investasi didorong dengan meningkatkan daya tarik investasi baik dari dalam negeri (PMDN) maupun dari luar negeri (PMA) serta mengurangi hambatan prosedur perijinan. Perhatian juga diberikan pada upaya meningkatkan produktivitas dan akses UMKM pada sumber permodalan, sumber teknologi, sumber bahan baku dan sumber informasi. Dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi juga diberikan dengan mempercepat pembangunan sektor sektor riil dan produktivitas industri kecil (*home industri*) secara luas. Pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat apabila dilakukan pula pengembangan infrastruktur.

Perbaikan fasilitasi ketenagakerjaan akan ditingkatkan dengan mendorong pelaksanaan negosiasi bipartit dan pembinaan penyiapan tenaga kerja sesuai standar. Perhatian juga diberikan pada penempatan, perlindungan, dan pengembangan SDM tenaga kerja.

3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam beberapa peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kesemua peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah tersebut diarahkan agar pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Selanjutnya kebijakan pengelolaan keuangan daerah tersebut secara operasional dituangkan dalam kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Oleh karena itu, guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, maka semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD. APBD tersebut merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah.

Khusus dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pengelolaan APBD pada Tahun 2013 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. adanya pengalihan dana Bantuan Operasional Sekolah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. penetapan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berimplikasi terhadap perubahan struktur pendapatan,
3. pengaturan pendanaan tanggap darurat bencana,

Dalam kerangka pelaksanaan APBD Kota Malang Tahun 2015, nantinya diterbitkan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2015. Dalam penyusunan APBD, sebelumnya dilakukan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang mengacu pada RKPD. Selain itu penyusunan APBD Kota Malang Tahun 2015 juga akan mengacu pada peraturan/kebijakan teknis yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

3.4.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya, meliputi :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- 2) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilarang menganggarkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang peraturan daerahnya bertentangan dengan Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan/atau telah dibatalkan.

- 3) Kebijakan penganggaran tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- 4) Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah).
- 5) Pendapatan yang berasal dari bagian laba bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang layanannya belum mencapai 80% dari jumlah penduduk yang menjadi cakupan pelayanan PDAM dianggarkan sebagai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, selanjutnya diinvestasikan kembali untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan tersebut dianggarkan untuk tambahan penyertaan modal kepada PDAM sesuai peraturan perundang-undangan.
- 6) Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Penerimaan BLUD dianggarkan dalam jenis pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, obyek pendapatan BLUD, rincian obyek pendapatan BLUD.
- 7) Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan dalam APBD pada akun pendapatan, kelompok pendapatan asli daerah, jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, obyek hasil pengelolaan dana bergulir dan rincian obyek hasil pengelolaan dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
- 8) Penerimaan bunga dari dana cadangan dianggarkan pada jenis pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah Tahun 2015, penetapan target Pendapatan Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini yang

kemungkinan masih berlangsung dalam Tahun Anggaran 2014 yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat, sehingga berpengaruh kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu hal-hal yang menjadi pertimbangan adalah realisasi penerimaan tahun lalu dan tahun sekarang serta potensinya.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah antara lain :

1. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Intensifikasi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sistem pengelolaan pendapatan daerah, melalui

- Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- Peningkatan ketersediaan data; dan
- Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
- Peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD

Sedangkan ekstensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan pengembangan jenis pajak dan retribusi yang belum terjaring/belum digali dengan didukung adanya peraturan daerah.

Di sisi lain, dalam rangka mengurangi ketergantungan daerah terhadap pusat, utamanya pada aspek anggaran pembangunan; maka pemerintah pusat telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bersifat *closed list*. Hal ini perlu diantisipasi sejak dini, karena memang memerlukan penataan secara terpadu baik dari aspek sarana prasarana, SDM maupun sistemnya. Khususnya untuk penanganan dan pengelolaan PBB yang akan diserahkan kepada daerah. Terkait hal ini, maka dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Malang, transfer data dan sistem pengelolaannya serta

ketersediaan sarana dan prasarana pendukungnya harus menjadi prioritas dan diagedakan pada Tahun 2015 ini, yang sebelumnya telah dimulai pada Tahun 2013.

2. Peningkatan penerimaan pendapatan melalui peningkatan kinerja BUMD.
3. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

b. Dana Perimbangan

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2014 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2013.
- 2) Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) mempertimbangkan besaran alokasi DBH yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Tahun Anggaran 2014, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga hasil produksi minyak/gas/pertambangan lainnya tahun 2014 dan/atau tidak tercapainya hasil produksi minyak/gas/pertambangan lainnya tahun 2014, serta memperhatikan realisasi DBH Tahun Anggaran 2013.
- 3) Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dianggarkan sebagai pendapatan daerah, sepanjang telah ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2015. Dalam hal Pemerintah Daerah akan memperoleh DAK Tahun Anggaran 2015 setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah menganggarkan DAK dimaksud dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, selanjutnya DAK dimaksud ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.
- 5) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk kabupaten/kota dan provinsi dialokasikan sesuai keputusan Gubernur.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam APBD Tahun Anggaran 2015, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Alokasi dana penyesuaian dianggarkan sebagai pendapatan daerah pada kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sepanjang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015. Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana penyesuaian yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2015 setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah menganggarkan dana penyesuaian dimaksud dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), selanjutnya dana penyesuaian dimaksud ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.
- 2) Penganggaran dana Bantuan Operasional Sekolah, didasarkan pada alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014, dengan memperhatikan realisasi dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013. Selisih lebih atau kurang dari alokasi anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah, ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.
- 3) Target pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil yang diterima dari Pemerintah Provinsi, didasarkan pada alokasi bagi hasil Tahun Anggaran 2014 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil Tahun Anggaran 2013, sedangkan bagian Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah

Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2014, ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

- 4) Target pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Dalam hal penetapan APBD penerima bantuan mendahului penetapan APBD pemberi bantuan, maka penganggaran bantuan keuangan pada APBD penerima bantuan dilakukan dengan cara melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD penerima bantuan dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk bantuan yang bersifat khusus, dan persetujuan DPRD untuk bantuan keuangan yang bersifat umum, selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD penerima bantuan. Dalam hal penganggaran untuk bantuan keuangan tersebut terjadi setelah penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam laporan realisasi anggaran Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota penerima bantuan.
- 5) Penetapan target penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD pada kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud.

3.4.2. Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dari sisi penerimaan pembiayaan daerah, dalam hal APBD

diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2014.
- 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- 3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
- 4) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

3.4.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Oleh karena itu dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, yang antara lain adalah untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan

melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Upaya melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Selanjutnya dalam mengelola belanja daerah juga mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja Daerah dibagi menurut kelompok belanja, terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kelompok Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan kelompok Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

a. Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

- a) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2013 serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD dan pemberian gaji ketiga belas.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2013.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

d) Penyediaan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah. Terkait dengan hal tersebut, maka penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan tunjangan kesehatan diluar cakupan pelayanan kesehatan yang disediakan asuransi kesehatan sebagaimana tersebut di atas, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Bunga

Kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang supaya dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2015.

3) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak serta terlebih dahulu dilakukan pengkajian agar tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

4) Belanja Hibah

- a) Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- b) Penganggaran untuk belanja hibah harus dibatasi jumlahnya, mengingat belanja hibah bersifat bantuan yang tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Penggunaan hibah harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- c) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- d) Mekanisme penganggaran belanja hibah dari pemerintah daerah kepada pemerintah, mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Bagi instansi penerima dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya mengacu pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan Permenkeu Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah, Permenkeu Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja Yang Bersumber Dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri Yang Diterima Langsung Oleh Kementerian Negara/Lembaga Dalam Bentuk Uang. Pemerintah daerah sebagai pemberi hibah melaporkan penyaluran hibah tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran, kecuali pemberian hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi/kabupaten/kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) dalam rangka penyelenggaraan pemilihan

kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009.

- e) Hibah dari pemerintah daerah dapat diberikan kepada pemerintah daerah lainnya sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.
- f) Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah, penganggaran untuk hibah harus memperhatikan asas manfaat, keadilan dan kepatutan, mulai dari landasan pertimbangan pemberian, penggunaan sampai pengawasannya. Penyediaan anggaran untuk hibah harus dijabarkan dalam rincian obyek belanja sehingga jelas penerimanya serta tujuan dan sasaran penggunaannya.
- g) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja hibah harus ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya.

5) Belanja Bantuan Sosial

- a) Dalam rangka menjalankan dan memelihara fungsi pemerintahan daerah dibidang kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan pemberian bantuan social kepada kelompok/anggota masyarakat.
- b) Penganggaran untuk belanja bantuan sosial dimaksud harus dibatasi jumlahnya dan diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan

keuangan daerah. Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

- c) Dalam menetapkan kebijakan anggaran untuk bantuan sosial harus mempertimbangkan rasionalitas dan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas manfaat, keadilan, kepatutan, transparan, akuntabilitas dan kepentingan masyarakat luas. Penyediaan anggaran untuk bantuan sosial harus dijabarkan dalam rincian obyek belanja sehingga jelas penerimanya serta tujuan dan sasaran penggunaannya.
- d) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial harus ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

6) Belanja Bagi Hasil

Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya pada APBD memperhitungkan rencana pendapatan pada Tahun Anggaran 2014, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2014 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah desa ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

7) Belanja Bantuan Keuangan

- a) Pemerintah kabupaten/kota dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus.

Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

- b) Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik.
- c) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

8) Belanja Tidak Terduga

Penetapan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2014 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2014, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

b. Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2015, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Alokasi belanja langsung dalam APBD mengutamakan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik.

Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani Standar Pelayanan Minimal (SPM), Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

2) Belanja Pegawai

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD

dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan, termasuk honorarium narasumber/tenaga ahli dari luar instansi pelaksana kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. \

3) Belanja Barang dan Jasa

a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2014.

b) Mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

c) Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa asset tetap) yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.

d) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Ke Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.

- e) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah, sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pelatihan/bimbingan teknis dalam rangka pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah.
- f) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan diprioritaskan menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.
- g) Dalam rangka antisipasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang akan menjadi kewenangan daerah paling lambat 1 Januari 2014 menjadi Pendapatan Asli Daerah pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota memprioritaskan penganggaran untuk program dan kegiatan pengalihan dimaksud, baik aspek regulasi, kelembagaan, pendataan, sistem, standar pengelolaan, dan pengembangan sumber daya manusia serta penyiapan sarana dan prasarana maupun faktor lain yang terkait dengan pengalihan PBB-P2.

4) Belanja Modal

- a) Penganggaran belanja modal, setelah dikurangi belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung dan belanja wajib lainnya diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- b) Pengadaan kebutuhan barang milik daerah, menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memperhatikan standar barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006.

3.4.4. Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Dari sisi pengeluaran pembiayaan daerah, kebijakan yang ditempuh antara lain :

- 1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penganggaran dana bergulir dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.
- 2) Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.
- 3) Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.

- 4) Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerah harus menetapkan terlebih dahulu peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur: tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan.
- 5) Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6) Dalam rangka penguatan struktur permodalan PDAM, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat, agar percepatan pemenuhan target pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% sesuai target *Millenium Development Goal's (MDG's)* tahun 2015 dapat segera tercapai.
- 7) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.4.5. Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Secara garis besar, kerangka pendanaan pembangunan daerah yang dibiayai melalui APBD berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah tersebut terdiri dari komponen-komponen, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari SILPA, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman

Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah.

Dari proyeksi Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Daerah tersebut, maka dapat diperkirakan alokasi anggaran untuk membiayai Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan.

Berikut rekapitulasi realisasi dan proyeksi kerangka pendanaan pembangunan daerah sebagaimana tabel berikut, yang disusun berdasarkan kecenderungan 3 (tahun) sebelumnya dan proyeksi berdasarkan RPJMD.

Tabel III - 1
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2012-2013 dan
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2012-2013

Nomor Urut	Uraian	REALISASI		PROYEKSI	
		2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH	1.356.369.664.504,83	1,524,846,569,429.26	1.582.084.675.797,09	1.701.347.126.513,79
1.1	Pendapatan Asli Daerah	230.295.806.325,83	317,850,423,684.26	336.245.803.914,39	353.427.746.711,29
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	159.124.119.792,89	238,499,748,161.57	250.000.000.000,00	270.000.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	35.596.756.524,00	38,485,627,769.00	39.980.209.448,90	47.864.373.448,90
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.350.056.538,28	16,571,050,907.26	16.513.172.612,82	11.703.610.469,39
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	21.224.873.470,66	24,293,996,846.43	29.752.421.852,67	23.859.762.793,00
1.2	Dana Perimbangan	817.671.023.179,00	863,736,860,965.00	784,554,731,701.54	909.563.930.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	83.745.292.270,00	86,734,213,965.00	96,729,613,701.54	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	665.927.808.000,00	746,686,937,000.00	665,927,808,000.00	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	21.897.310.000,00	30,315,710,000.00	21,897,310,000.00	
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	308.402.735.000,00	342,259,284,780.00	246,453,488,610.00	144.864.230.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	17,756,000,000.00	14,000,000,000.00	
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0.00	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	101.923.440.000,00	109,068,387,780.00	107,009,260,009.00	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	154.326.955.000,00	191,569,752,000.00	121,998,938,601.00	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	52.152.440.000,00	24,865,145,000.00	3,445,290,000.00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.356.369.664.504,83	1,524,846,569,429.26	2,613,092,896,108.63	2,755,775,286,513,79

Tabel III - 2
 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2012-2013 dan
 Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2014-2015

Nomor Urut	Uraian	REALISASI		PROYEKSI	
		2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	94.141.092.275	161,443,965,225.79		0.00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	94.141.092.275	161,443,965,225.79	54,000,000,000.00	0.00

Dari proyeksi kerangka pendanaan pembangunan daerah sebagaimana tabel tersebut di atas, yang disusun berdasarkan kecenderungan 3 (tahun) sebelumnya dan proyeksi berdasarkan RPJMD, maka dapat diperkirakan bahwa Belanja Daerah pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 2.755.775.286.513,79

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

Prioritas pembangunan daerah adalah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh suatu daerah, oleh karena itu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program-program unggulan dari SKPD yang paling tinggi relasinya bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun rencana. Mengingat pada tahun 2015 merupakan tahun kedua dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang tahun 2013 – 2018 maka perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan cara mengevaluasi target sasaran pembangunan daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2013 sebagaimana yang dimuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2013. Program prioritas tidak semua menjadi prioritas pembangunan daerah sehubungan dengan keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal. Dalam menyeimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Malang, maka harus ditentukan prioritas pembangunan daerah Tahun 2015 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang (RPJMD) Tahun 2013–2018 dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada tahun 2014 dan 2015, disamping itu juga berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi isu strategis dan masalah

mendesak, serta rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaannya. Program prioritas pembangunan daerah ini menjadi arahan bagi seluruh SKPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang direncanakan serta kebutuhan pendanaan untuk mencapai sasaran pembangunan yang diinginkan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam Bab. V Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang (RPJMD) Tahun 2013–2018 memuat tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 tahun kedepan sebagai penjabaran dari Visi dan Misi pembangunan Kota Malang Tahun 2013-2018 yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kota Malang tahun 2015, dimana dalam penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan ini perlu memperhatikan seluruh potensi yang ada di Kota Malang. Tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang (RPJMD) Tahun 2013–2018 untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut :

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Menciptakan masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis, toleran dan setara.	1. Terwujudnya kualitas kesejahteraan sosial bagi masyarakat;	Meningkatnya pemerataan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat.
		2. Terwujudnya dan tumbuhnya kehidupan beragama yang	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial beragama.

		berkualitas dan toleran;	
		3. Terwujudnya kehidupan sosial masyarakat yang tertib dan berkesadaran hukum;	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum untuk mendukung terciptanya ketertiban dan ketentraman masyarakat.
		4. Terwujudnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak.
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, terukur dan akuntabel.	1. Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Prima;	a) Meningkatnya kualitas layanan publik kepada masyarakat;
			b) Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah;
			c) Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan publik.
		2. Terwujudnya Peningkatan kualitas peraturan daerah;	Meningkatnya kualitas dan legitimasi peraturan daerah.
		3. Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan daerah.	Meningkatnya kualitas perencanaan daerah.
3	Mengembangkan potensi daerah yang berwawasan lingkungan yang berkesinambungan, adil, dan ekonomis.	Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	a) Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan perusakan lingkungan hidup;
			b) Meningkatnya daya dukung tata ruang terhadap pembangunan.
4	Meningkatkan kualitas pendidikan	1. Meningkatnya kualitas dan relevansi	Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan.

	masyarakat Kota Malang sehingga bisa bersaing di era global.	pendidikan yang dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat.	
		2. Terwujudnya peningkatan peran pemuda dalam pembangunan daerah.	Meningkatnya semangat profesionalitas pemuda dan budaya prestasi di kalangan pemuda.
5	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kota Malang baik fisik, maupun mental untuk menjadi masyarakat yang produktif.	Terwujudnya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.	a) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan;
			b) Meningkatnya kesehatan ibu dan anak;
			c) Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat;
			d) Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
6	Membangun Kota Malang sebagai kota tujuan wisata yang aman, nyaman, dan berbudaya.	Terwujudnya pengembangan pariwisata berbasis kebudayaan, lingkungan, dan kreativitas masyarakat	a) Meningkatnya kelestarian seni budaya dan kearifan lokal, yang antara lain ditujukan guna meningkatkan daya tarik wisata;
			b) Meningkatnya ragam dan kualitas obyek wisata alam dan buatan.
7	Mendorong pelaku ekonomi sektor informal dan UKM agar lebih produktif dan kompetitif.	1) Terwujudnya Produktivitas dan Daya Saing Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;	a) Meningkatnya produktivitas dan daya saing pelaku usaha kecil menengah;

			b) Meningkatnya produktivitas dan daya saing pelaku usaha mikro;
			c) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Koperasi di Kota Malang.
		2. Terwujudnya peningkatan pengelolaan potensi pangan daerah.	a) Meningkatnya daya saing produk pangan daerah;
			b) Meningkatnya produk pangan lokal sebagai pendukung ketahanan pangan daerah.
8	Mendorong produktivitas industri dan ekonomi skala besar yang berdaya saing, etis dan berwawasan lingkungan.	1. Terwujudnya Pertumbuhan industri-industri baru guna peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah;	a) Meningkatnya nilai investasi untuk pengembangan industri berskala besar;
			b) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja industri.
		2. Terwujudnya kawasan industri terintegrasi yang memperhitungkan daya dukung lingkungan.	Terintegrasinya sentra industri kecil menengah.
9	Mengembangkan sistem transportasi terpadu dan infrastruktur yang nyaman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.	1. Terwujudnya daya dukung transportasi;	Meningkatnya fungsi sarana transportasi.
		2. Terwujudnya Pengembangan sistem	Meningkatnya daya dukung sistem transportasi dan sarana perhubungan untuk

		transportasi perkotaan terpadu yang menjamin kelancaran mobilitas masyarakat;	menunjang mobilitas masyarakat.
		3. Terwujudnya ketersediaan infrastruktur perkotaan di bidang pemukiman dan drainase.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketersediaan infrastruktur pemukiman dan drainase.

4.2. Prioritas dan Pembangunan

Kota Malang sebagai daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Namun demikian dalam rangka pembangunan kewilayahan, Kota Malang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Provinsi Jawa Timur dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, perencanaan pembangunan Kota Malang tahun 2015 tetap memperhatikan prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan provinsi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengharuskan adanya sinkronisasi antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. Sinkronisasi dilaksanakan melalui pengaturan tata cara maupun prosedur penyusunan perencanaan pembangunan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Adapun kebijakan pembangunan nasional pada tahap yang ketiga yaitu RPJMN 2015–2019, pembangunan ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Kehidupan demokrasi bangsa makin mengakar dalam kehidupan bangsa sejalan dengan makin mantapnya pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi dan

kemitraan dan semakin mantapnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Kondisi itu mendorong tercapainya penguatan kepemimpinan dan kontribusi Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional dalam rangka mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil dan damai dalam berbagai aspek kehidupan. Bersamaan dengan itu kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat sebanding dengan tingkat kesejahteraan negara-negara berpenghasilan menengah, dan merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial. Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayananan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, serta kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; dan mantapnya budaya dan karakter bangsa.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia.

Daya saing perekonomian Indonesia semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong

peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai, serta mulai dimanfaatkannya tenaga nuklir untuk pembangkit listrik dengan mempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat; terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia; terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian. Sejalan dengan itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Kondisi itu semakin mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015, **tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015** adalah :

"Melanjutkan Reformasi Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan"

Tema ini mencerminkan :

- a. Pencapaian dan perkiraan capaian tahun 2014 sebagai tahun terakhir RPJMN Kedua yang perlu dilanjutkan dalam RPJMN Ketiga.
- b. Mencerminkan upaya untuk menghadapi tantangan pembangunan Tahun 2015 baik yang bersumber pada eksternal maupun internal.
- c. Kesesuaian dengan tema RPJMN-3 (2015-2019) yang digariskan dalam RPJPN 2005-2025 yaitu: memantapkan pembangunan

secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.

4.2.1. Isu Strategis Pembangunan Nasional

Isu Strategis Pembangunan Nasional, sebagai penjabaran Tema RKP 2015 di atas, diidentifikasi 25 (dua puluh lima) isu strategis yang dikelompokkan menurut bidang-bidang pembangunan yang digariskan dalam RPJPN 2005-2025 sebagai berikut ;

1). BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

1. Pengendalian Jumlah Penduduk
2. Reformasi Pembangunan Kesehatan
 - a. Sistem Jaminan Sosial Nasional (Demand and Supply)
 - b. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi
3. Reformasi Pembangunan Pendidikan
4. Sinergi Percepatan

2). BIDANG EKONOMI

5. Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas
6. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja
7. Peningkatan Daya saing UMKM dan Koperasi
8. Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi
9. Reformasi Keuangan Negara

3). BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

10. Peningkatan Kapasitas Iptek

4). BIDANG SARANA DAN PRASARANA

11. Peningkatan Ketahanan Air
12. Penguatan Konektivitas Nasional

- a. Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah
 - b. Pendorong Pertumbuhan Ekonomi
 - c. Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan
13. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar
- a. Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional
 - b. Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi
 - c. Penataan Perumahan/Permukiman
- 5). BIDANG POLITIK
14. Konsolidasi Demokrasi
- 6). BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN
15. Percepatan Pembangunan MEF dan Almitsus POLRI dengan Pemberdayaan Industri Pertahanan
16. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri
- 7). BIDANG HUKUM DAN APARATUR
17. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik
18. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- 8). BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG
19. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan
20. Pengelolaan Risiko Bencana
21. Sinergi Pembangunan Perdesaan
- 9). BIDANG SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN
22. Perkuatan Ketahanan Pangan
23. Peningkatan Ketahanan Energi
24. Percepatan Pembangunan Kelautan

25. Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan Hidup.

4.2.2. Sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan pembangunan nasional.

Isu Strategis 1: Pengendalian Jumlah Penduduk ;

Upaya untuk pengendalian kuantitas penduduk dilakukan antara lain melalui keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Namun, capaian pembangunan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sampai dengan saat ini masih belum optimal. Hal ini antara lain disebabkan oleh: (a) pelayanan KB kurang berkualitas dan belum terjangkau secara merata; (b) pelaksanaan advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi/KIE program KB dan kesehatan reproduksi/KR belum efektif; (c) peningkatan pemahaman remaja mengenai kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga dalam rangka penyiapan kehidupan masih belum optimal; dan (d) pembangunan keluarga melalui ketahanan dan pemberdayaan keluarga masih lemah, sehingga pembinaan dan pelestarian akseptor tidak optimal.

Sasaran

Sasaran pengendalian kuantitas penduduk adalah menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk dengan angka kelahiran total (*total fertility rate*/TFR) sebesar 2,37 per perempuan usia reproduktif, yang ditandai dengan meningkatnya persentase pemakaian kontrasepsi (*contraceptive prevalence rate*/CPR) sebesar 60,48 persen, dengan sasaran keluaran *output* antara lain: (a) meningkatnya jumlah peserta KB aktif menjadi sebanyak 29,72 juta akseptor; (b) terlayannya peserta KB baru yang memberikan kontribusi terhadap peserta KB Aktif sebanyak 6,85 juta akseptor; dan (c) meningkatnya pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) menjadi sebesar 20,5 persen dan menurunnya penggunaan kontrasepsi dengan metode jangka pendek dan ketidakberlangsungan (DO) pemakaian kontrasepsi sebesar 24,6 persen.

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk melalui KB dengan: (a) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata dalam sistem JKN; (b) menguatkan advokasi, komunikasi, edukasi, dan informasi

tentang kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga; (c) meningkatkan pembinaan remaja akan pemahaman tentang kependudukan, KB dan kesehatan reproduksi, serta penyiapan kehidupan berkeluarga; (d) pembangunan keluarga dengan penguatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.

Isu Strategis 2: Reformasi Pembangunan Kesehatan

A. Sistem Jaminan Sosial Nasional (*Demand and Supply*)

Pengembangan SJSN dan penguatan kelembagaan BPJS terus diupayakan, namun terdapat beberapa tantangan seperti: a) penyelesaian penyusunan dan harmonisasi peraturan, b) perluasan kepesertaan, termasuk proses pendaftaran dan pengumpulan iuran, c) integrasi jaminan sosial lainnya ke dalam JKN, d) kesiapan pelayanan kesehatan, termasuk distribusi dan sistem rujukan, dan e) menjaga kesinambungan finansial BPJS.

Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan SJSN adalah perlindungan aset dan pendapatan keluarga agar *mencegah kemiskinan* dan *mengurangi kesenjangan*. Jaminan sosial bagi penduduk Indonesia diarahkan untuk menjadi jaring pengaman (*safety net*) yang mencegah kemiskinan saat terjadi guncangan resiko siklus hidup. Secara khusus, sasaran pada tahun 2015 adalah sebagai berikut ini:

1. Jaminan Kesehatan Nasional

- a. Meningkatnya cakupan kepesertaan JKN pada usaha besar dan sedang, usaha kecil dan mikro, serta transformasi peserta Jamkesda/PJKMU.
- b. Meningkatnya jumlah Puskesmas, RS dan klinik mandiri yang bekerjasama dengan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) termasuk pemenuhan tenaga kesehatannya yang terstandardisasi.
- c. Meningkatnya kesiapan pelayanan kesehatan (supply side) antara lain meliputi sarana dan prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan, serta obat dan alat kesehatan.
- d. Meningkatnya kerjasama BPJS Kesehatan dan asuransi swasta untuk meningkatkan manfaat JKN.

- e. Terbentuknya *health technology assesement* (HTA).
- f. Terbentuknya sistem monitoring dan evaluasi terpadu JKN.
- g. Terjaganya keberlanjutan keuangan BPJS Kesehatan.

B. Jaminan Ketenagakerjaan

- a. Beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan dan terlaksananya program jaminan ketenagakerjaan, yang terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
- b. Persentasi kepesertaan baru jaminan ketenagakerjaan mencakup 23,5 persen pekerja sektor formal dan 2,5 persen pekerja bukan penerima upah.
- c. Terbentuknya rambu-rambu pengelolaan, serta skema pemantauan dan evaluasi jaminan ketenagakerjaan.
- d. Terjaganya kesinambungan keuangan BPJS Ketenagakerjaan.

Arah Kebijakan dan Strategi

Merujuk pada sasaran yang ingin dicapai, beberapa arah kebijakan dan strategi pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional ke depan meliputi:

1. Penguatan regulasi dan kelembagaan SJSN, melalui: (i) penguatan regulasi pelaksanaan JKN, termasuk peraturan terkait iuran dan tarif, serta insentif tenaga kesehatan; (ii) penyusunan regulasi pendukung pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk diantaranya peraturan teknis pelaksanaan JKK, JHT, JP, dan JKM, pengaturan manfaat dasar dan tambahan, serta pengelolaan aset dan liabilitas BPJS Ketenagakerjaan; serta (iii) penguatan kelembagaan DJSN dan BPJS.
2. Penyempurnaan strategi perluasan kepesertaan SJSN, melalui: (i) integrasi Jamkesda, serta asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan di luar SJSN secara bertahap ke dalam JKN dan jaminan ketenagakerjaan; (ii) peningkatan peserta penerima bantuan iuran (PBI) JKN pada penduduk rentan tidak teregistrasi; (iii) pengembangan skema insentif dan inovasi proses pendaftaran dan pengumpulan iuran untuk pekerja bukan penerima upah; (iv) penegakkan hukum untuk peningkatan kepesertaan dan kepatuhan pembayaran iuran pada sektor usaha swasta formal; serta (v) unifikasi/sinkronisasi data kepesertaan jaminan sosial dengan data kependudukan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai nomor unik setiap peserta.

3. Penguatan sosialisasi dan edukasi SJSN, melalui: (i) penyiapan materi, strategi, dan pedoman sosialisasi SJSN yang efektif kepada publik; dan (ii) pembangunan, harmonisasi, dan penyelarasan informasi SJSN yang saat ini belum tersusun dengan baik serta bersifat parsial.

4. Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional, melalui: (i) peningkatan kerjasama BPJS Kesehatan dengan penyedia layanan kesehatan non pemerintah; (ii) pengembangan standarisasi fasilitas kesehatan JKN dan sistem rujukan; (iii) pengembangan *Health Technology Assessment* (HTA) untuk kendali mutu dan biaya; (iv) pengembangan sistem monitoring, dan evaluasi terpadu JKN, termasuk *operation research*; (vi) penyusunan skema koordinasi manfaat; dan (vii) pengembangan fasilitas layanan kesehatan primer dan sekunder.

5. Pelaksanaan Jaminan Ketenagakerjaan, melalui: (i) penyusunan kaidah dan prinsip-prinsip tujuan penyelenggaraan program SJSN, melalui kajian teknis sebagai dasar penyusunan peraturan; (ii) penyempurnaan mekanisme pemungutan dan pengumpulan iuran dari pekerja sektor formal; (iii) penyempurnaan mekanisme pemutakhiran data kepesertaan; (iv) pembentukan unit Aktuaris Negara pada Kementerian Keuangan untuk menjaga keberlanjutan keuangan dalam jangka pendek dan jangka panjang; (v) perancangan desain program, sesuai penerapan skema multi pilar agar manfaat yang selama ini diperoleh tidak berkurang; (vi) mengembangkan program yang memberikan manfaat dasar dan menempatkan program tambahan sukarela lainnya sebagai manfaat tambahan sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing individu; (vii) pengembangan skema monitoring dan evaluasi jaminan sosial bidang ketenagakerjaan.

B. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi

Sasaran

Menurunnya angka kematian ibu (AKI) dan menurunnya angka kematian bayi (AKB), yang ditandai dengan :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Anak
3. Meningkatnya Status Gizi Masyarakat dan Pencegahan Masalah Gizi dengan Fokus pada Ibu Hamil, Balita, Anak Sekolah, Remaja

4. Menurunnya Angka Kesakitan akibat Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi, Peningkatan Surveilans, Karantina Kesehatan, dan Kesehatan Matra

5. Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Puskesmas

Arah Kebijakan dan Strategi

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui:

1. Peningkatan pelayanan kesehatan remaja,
2. Peningkatan pelayanan kesehatan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi,
3. Peningkatan pelayanan kesehatan neonatal,
4. Peningkatan pelayanan kesehatan balita,
5. Peningkatan pelayanan kesehatan anak,
6. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar,
7. Peningkatan pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan,
8. Peningkatan peran lintas sektor dalam pembangunan kesehatan ibu, bayi, dan anak
9. Peningkatan sistem pelayanan JKN yang mendorong upaya kesehatan ibu dan anak.
- 10 .Peningkatan pemberian makanan tambahan dan mikronutrien bagi ibu hamil, bayi, dan balita,
- 11 . Peningkatan surveilans epidemiologi faktor risiko dan penyakit,
- 12 Peningkatan perlindungan kelompok berisiko.

Isu Strategis 3: Reformasi Pembangunan Pendidikan

Sasaran

Pembangunan pendidikan masih menghadapi beberapa permasalahan antara lain 1) Belum meratanya pelayanan pendidikan yang ditunjukkan oleh masih terdapatnya kesenjangan partisipasi pendidikan terutama antarkelompok sosial-ekonomi dan antarwilayah baik untuk pendidikan dasar dan menengah; 2) masih belum memadainya kualitas pendidikan menengah, dan masih kurangnya relevansi pendidikan menengah dengan kebutuhan pasar kerja; 3) Masih rendahnya akses, kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi serta masih kurang mampunya pendidikan tinggi dalam mengembangkan iptek melalui penelitian dasar dan terapan,

serta melakukan inovasi dan intervensi; 4) Belum memadainya kompetensi dan profesionalisme pendidik; dan 5) Masih belum efisiennya pemanfaatan anggaran pendidikan dan tatakelola pendidikan. Dari permasalahan tersebut, sasaran pembangunan pendidikan dalam tahun 2015 adalah meningkatkan taraf pendidikan penduduk yang dicerminkan dari rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas menjadi 8,37 tahun dan angka melek aksara kelompok usia yang sama menjadi 94,5 persen. Hal tersebut dapat dicapai jika angka partisipasi pendidikan dapat dicapai.

Arah Kebijakan dan Strategi

Dengan memperhatikan permasalahan yang diuraikan di atas, maka arah kebijakan pembangunan pendidikan pada tahun 2015 yang merupakan tahun pertama RPJMN 2015-2019 diprioritaskan pada hal-hal berikut:

1. Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata. Terkait dengan peningkatan akses, perhatian lebih besar diberikan pada kelompok miskin, anak-anak yang tinggal di wilayah perdesaan dan daerah 3T, serta anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Sementara itu peningkatan kualitas ditekankan pada upaya pemenuhan SPM Pendidikan Dasar yang harus secara sungguh-sungguh diupayakan pada tahun 2015 oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
2. Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah universal (PMU). Peningkatan akses pendidikan menengah baik melalui jalur formal maupun nonformal ditekankan pada daerah 3T dan daerah padat penduduk. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah dilakukan untuk memberikan landasan yang kuat bagi lulusan agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya atau memasuki dunia kerja. Penerapan standar kompetensi lulusan harus diterapkan untuk lebih menjamin keserasian kompetensi lulusan dengan kebutuhan lapangan kerja.
3. Peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi, melalui peningkatan pemerataan layanan dengan memperhatikan keseimbangan jumlah program studi sejalan dengan perkembangan keilmuan dan kebutuhan masyarakat; penguatan otonomi perguruan tinggi dan manajemen pendidikan tinggi, penataan program studi dan bidang keilmuan yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, dan

penguatan kegiatan penelitian dan pengembangan, serta penguatan kemitraan perguruan tinggi, lembaga litbang, dan industri, termasuk lembaga pendidikan internasional, dalam penguatan kelembagaan perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan dan penelitian iptek.

4. Peningkatan profesionalisme dan pembenahan distribusi

guru dan tenaga kependidikan, melalui peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pengembangan profesional berkelanjutan (*continuous professional development*), sertifikasi profesi, dan penyediaan tunjangan, yang didukung dengan pelaksanaan evaluasi kinerja yang berkesinambungan.

5. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan nonformal dan pendidikan informal melalui penguatan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan nonformal, peningkatan pendidikan keterampilan terutama bagi penduduk usia produktif muda yang berpendidikan rendah, dan peningkatan keberaksaraan penduduk melalui pendidikan keaksaraan fungsional di kantong-kantong buta aksara yang diikuti dengan upaya pelestarian kemampuan keberaksaraan dan peningkatan minat baca.

6. Peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan dengan memantapkan pelaksanaan desentralisasi pendidikan, termasuk melalui penguatan kapasitas daerah dalam membangun pendidikan dan memperkuat peran provinsi dalam pembangunan pendidikan, membenahi sistem pengalokasian anggaran pemerintah di tingkat pusat dan daerah yang dapat mendukung upaya peningkatan efisiensi anggaran, dan peningkatan kapasitas satuan pendidikan untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi pendidikan dan akuntabilitas sekolah, termasuk melalui pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS).

7. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan tersebut juga ditujukan untuk mengurangi kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah, antarjenis kelamin, dan antarkelompok sosial.

Isu Strategis 4: Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Sasaran

Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah:

1. Menurunnya angka kemiskinan pada tahun 2015 sebesar 9 – 10 persen;

2. Sasaran program perlindungan sosial pada tahun 2015 difokuskan pada peningkatan kesejahteraan sosial pada individu, rumah tangga, dan komunitas, terutama yang termasuk dalam penduduk miskin dan rentan;
3. Sasaran terkait pemberdayaan UMK dan koperasi yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan di antaranya (1) pertumbuhan wirausaha baru, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi; dan (2) peningkatan proporsi UMK yang dapat mengakses layanan keuangan formal;
4. Terciptanya konsolidasi program penanggulangan kemiskinan dengan menyempurnakan mekanisme pelaksanaan dan koordinasi antar Kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, dan stakeholder lainnya.

Arah Kebijakan dan Strategi

Keberhasilan upaya penanggulangan kemiskinan harus didukung dengan kebijakan ekonomi, kebijakan afirmatif program penanggulangan kemiskinan, dan diperkuat dengan regulasi, sistem dan prosedur, serta data yang menunjang. Dengan demikian kebijakan penanggulangan kemiskinan akan diarahkan pada:

1. Penyempurnaan dan pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif melalui: (i) Peningkatan pelaksanaan program-program bantuan sosial reguler melalui pengembangan pelaksanaan PKH; peningkatan perlindungan sosial anak; lanjut usia, dan penyandang disabilitas; penguatan ekonomi kelompok penduduk rentan; dan peningkatan cakupan penerima bantuan iuran (PBI) JKN pada masyarakat yang belum terdaftar; (ii) Peningkatan dan perbaikan pelaksanaan bantuan sosial temporer meliputi transformasi bantuan beras untuk rumah tangga miskin (Raskin); dan perbaikan pelaksanaan bantuan sosial korban bencana alam, bencana sosial, dan guncangan ekonomi; (iii) Peningkatan efektifitas kelembagaan dan regulasi perlindungan sosial melalui pengembangan sistem rujukan terpadu; penguatan pekerja sosial; standarisasi dan penguatan kapasitas panti; (iv) penguatan inklusivitas termasuk melalui advokasi regulasi dan pendataan khusus penyandang disabilitas; serta (v) peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan reforma agraria yaitu redistribusi tanah dengan pemberian sertifikat tanah, sekaligus bantuan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mengelola dan memanfaatkan tanah bagi kesejahteraan hidup.

2. Peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan melalui: (i) peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar termasuk pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan dasar, pendidikan dan infrastruktur dasar terutama di wilayah kantong-kantong kemiskinan, (ii) penguatan kelembagaan dan sistem pelayanan publik yang berdasarkan akuntabilitas dan berpihak pada masyarakat miskin dan rentan, (iii) pemberdayaan penduduk miskin dalam pendataan sasaran, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kualitas pelayanan dasar, (iv) pengembangan model dan sistem koordinasi dan pengelolaan antarprogram sektoral di tingkat masyarakat terutama di wilayah kantong-kantong kemiskinan, (v) pengembangan sistem insentif bagi penyedia layanan untuk melayani penduduk miskin dan rentan.

3. Kebutuhan untuk meningkatkan sinergi dan manfaat dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan UMK dan koperasi yang semula menjadi bagian dari Klaster 3 Program Penanggulangan Kemiskinan akan dilanjutkan, namun ditransformasikan menjadi bagian dari kebijakan afirmatif yang dilaksanakan melalui strategi pengembangan penghidupan. Strategi ini mencakup berbagai dukungan untuk meningkatkan aset finansial UMK dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi produktif skala mikro dan kecil bagi masyarakat miskin dan rentan. Kegiatan-kegiatan utamanya diarahkan untuk meningkatkan akses ke pembiayaan usaha, peningkatan kapasitas SDM, dukungan akses dan integrasi ke pasar, serta penguatan kelembagaan. Hasilnya diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih paripurna bagi perbaikan kapasitas UMK dan koperasi sehingga dapat menjalankan usaha secara keberlanjutan yang akan berdampak pada perbaikan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

4. Pembenahan aspek kelembagaan penanggulangan kemiskinan melalui harmonisasi regulasi dan program penanggulangan kemiskinan, baik secara horizontal (antar kementerian/lembaga) maupun vertikal (antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah).

Isu Strategis 5: Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas

A. Industri Manufaktur

Sasaran

Pada tahun 2015 industri pengolahan di targetkan tumbuh sebesar 5,5-6,0 persen, dengan demikian industri nonmigas ditargetkan tumbuh 6,2 persen.

Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk dapat mencapai sasaran pengembangan industri pengolahan tahun 2015, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan industri pengolahan sebagai berikut:

1. Pembangunan Perwilayahan Industri

Dalam rangka pembangunan perwilayahan industri pada tahun 2015, strategi pembangunan yang dilakukan sesuai amanat UU 3/2014 tentang Perindustrian Pasal 14 Ayat (3) Huruf c dan d maka akan dilaksanakan:

a. Rintisan Pembangunan Kawasan Industri di Luar Pulau Jawa

b. Lingkungan industri kecil dan menengah di Indonesia Timur

2. Penumbuhan Populasi dan Pemerataan Persebaran Industri

Dalam rangka penumbuhan populasi dan pemerataan persebaran industri, strategi pembangunan yang dilakukan sebagai berikut:

a. Melalui program industri agro akan dilakukan pengembangan fasilitas Tangki Timbun – Industri Sawit di Kawasan Industri Maloy – Kaltim

b. Melalui program industri agro akan dilakukan pengembangan *cluster* industri rotan di Cirebon dan Palu

c. Melalui program peningkatan tata kelola hutan pada 109 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) serta peningkatan produktivitas 120 KPH dengan luas 16,35 juta hektar yang tersebar di luar Pulau Jawa untuk mendukung *forest based industry* di luar Pulau Jawa.

3. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas Industri

Dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas industri, maka ditetapkan strategi pembangunan sebagai berikut:

a. Melalui program dukungan manajemen akan dilakukan peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sekolah Vokasi Industri (menengah dan tinggi)

b. Melalui program basis industri manufaktur akan dilakukan Revitalisasi Permesinan dan Peningkatan Keterampilan SDM Industri Tekstil, Produk Tekstil, Alas Kaki, Elektronika, Kapal/Maritim

c. Melalui program industri unggulan berbasis teknologi tinggi akan dilakukan Pengembangan Pusat *Design Centre* Industri Permesinan dan Industri Perkapalan

- d. Melalui program industri unggulan berbasis teknologi tinggi akan dilakukan Pengembangan fasilitas industri unggulan berbasis teknologi di Bandung dan Solo
- e. Melalui program pengembangan iklim industri akan dilakukan Revitalisasi balai riset dan standardisasi di daerah
- f. Revitalisasi balai-balai layanan teknologi.

B. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sasaran

Pada tahun 2015, sasaran kepariwisataan dan ekonomi kreatif adalah:

- a. Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap kualitas dan kuantitas tenaga kerja nasional yang ditandai dengan jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan ikutan sektor pariwisata sebesar 11,3 juta orang;
- b. Meningkatnya investasi di sektor pariwisata yang ditandai dengan investasi sektor pariwisata sebesar 40,8%;
- c. Meningkatnya devisa dan pengeluaran wisatawan di Indonesia yang ditandai dengan penerimaan devisa wisatawan mancanegara menjadi USD 12,05 miliar dan pengeluaran wisatawan nusantara sebesar Rp 201,5 triliun;
- d. Meningkatnya kuantitas wisatawan mancanegara ke Indonesia menjadi 10,06 juta orang dan jumlah perjalanan wisatawan nusantara sebesar 254 juta perjalanan;
- e. Meningkatnya unit usaha sektor ekonomi kreatif terhadap unit usaha nasional sebesar 9,7%;
- f. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan tinggi pariwisata yang ditandai dengan jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang terserap di pasar kerja sebesar 1.490 orang;
- g. Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditandai dengan jumlah tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang disertifikasi sebesar 10.000 orang;
- h. Meningkatnya kualitas konten dan jejaring pelaku di sektor ekonomi kreatif yang ditandai dengan jumlah pelaku kreatif yang mengalami peningkatan kemampuan kreasi dan produksi sebesar 4.415 orang.

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif adalah:

1. Penguatan sinergitas dan keterpaduan pemasaran dan promosi 18 lokasi destinasi pariwisata antar instansi pemerintah;
2. Penguatan sinergitas dan keterpaduan pemasaran dan promosi 18 lokasi destinasi pariwisata antar instansi pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat;
3. Peningkatan kualitas destinasi pariwisata;
4. Strategi Peningkatan dan pengembangan industri pariwisata;
5. Penguatan sumber daya dan teknologi ekonomi kreatif,
6. Penguatan industri kreatif;
7. Peningkatan akses pembiayaan bagi industri kreatif,;
8. Peningkatan apresiasi dan akses pasar di dalam dan luar negeri bagi industri kreatif.

C. Peningkatan Ekspor

Sasaran

Sasaran dari peningkatan ekspor nonmigas di tahun 2015 adalah pertumbuhan ekspor barang nonmigas sebesar 6,5 persen serta peningkatan rasio ekspor jasa terhadap PDB sebesar 3,1 persen.

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan yang akan ditempuh adalah peningkatan fasilitasi ekspor untuk produk non-migas yang bernilai tambah lebih tinggi serta mendorong ekspor jasa yang kompetitif di pasar internasional.

Untuk, strategi yang akan ditempuh adalah:

1. Fasilitasi pengembangan produk ekspor olahan nonmigas yang bernilai tambah tinggi, sehingga mampu bersaing di pasar internasional;
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas ekspor jasa, terutama diprioritaskan pada sektor jasa yang transportasi, pariwisata dan konstruksi untuk menurunkan defisit neraca perdagangan jasa dan memberikan sumbangan devisa terhadap perekonomian Indonesia;
3. Peningkatan Efektivitas pengamanan Perdagangan, yang lebih diarahkan untuk mendorong efisiensi dan daya saing sisi produksi serta tidak menyebabkan timbulnya rente ekonomi.

D. Penanaman Modal

Sasaran

Sasaran dari peningkatan iklim investasi adalah pertumbuhan investasi (PMTB) sebesar 4,7-6,1 persen.

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan yang ditempuh adalah menciptakan iklim investasi dan iklim usaha di tingkat pusat dan daerah yang lebih berdaya saing, yang dapat mendorong pengembangan investasi dan usaha di Indonesia pada sektor produktif dengan mengutamakan sumber daya lokal.

Adapun strategi pembangunan lintas bidang adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha, yang terutama dilakukan melalui: sinkronisasi peraturan daerah agar sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, penghapusan regulasi dan peraturan di pusat dan daerah yang menghambat dan mempersulit dunia usaha untuk berinvestasi dan berusaha, serta penghapusan rente ekonomi yang menyebabkan tingginya biaya perijinan;
2. Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha di pusat dan daerah, terutama untuk sektor pengolahan dan sektor jasa prioritas (sektor jasa pendukung peningkatan ekspor, yaitu: transportasi, pariwisata, dan konstruksi; serta sektor jasa pendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas ekonomi, yaitu: jasa distribusi, logistik, komunikasi, keuangan, dan perdagangan);
3. Pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perijinan bagi investor dan pengusaha;
4. Pemberian insentif dan fasilitasi investasi (berupa: insentif fiskal dan non fiskal) yang lebih selektif dan memberikan kepastian kepada dunia usaha.
5. Penataan peraturan pertanahan, sehingga dapat memberikan kepastian lokasi usaha dan investasi;
6. Peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif.

Isu Strategis 6: Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja

Sasaran

Sasaran utama peningkatan daya saing tenaga kerja adalah:

1. Memfasilitasi seluruh elemen bangsa agar dapat berkompetisi dalam pasar tenaga kerja, sehingga pengusaha dan pekerja di seluruh segmen dapat mengisi peluang yang tersedia.

2. Meningkatkan jumlah dan rasio tenaga kerja yang kompeten dan profesional yang bisa beradaptasi dalam lingkungan kerja melalui langkah-langkah strategis untuk menjamin kualitas dan keahlian yang dilatihkan benar-benar tercermin pada pekerja.

3. Mempercepat perjanjian saling pengakuan atau *mutual recognition arrangement* (MRA) untuk sektor jasa yang di prioritaskan dalam MEA, dan belum memiliki MRA yaitu sektor transportasi udara, teknologi informasi dan komunikasi (e_asean), dan jasa logistik, serta 7 (tujuh) sektor industri/perdagangan yang juga disepakati namun belum memiliki MRA yaitu produk berbasis pertanian, elektronik, perikanan, produk berbasis karet, tekstil, otomotif, produk berbasis kayu.

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan pembangunan daya saing tenaga kerja adalah:

1. Mengembangkan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha/industri, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang mencakup empat aspek, yaitu: (a) pengembangan standar kompetensi oleh pihak pengguna terutama asosiasi industri dan asosiasi profesi dan bersifat dinamis sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan industri; (b) pengembangan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi melalui kurikulum dan modul pelatihan yang mengacu kepada standar yang dikembangkan industri, merekrut instruktur yang memiliki sertifikat kompetensi sebagai tanda penguasaan materi, (c) pengembangan sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dilisensi oleh BNSP, dan sertifikat kompetensi memiliki masa berlaku (validitas) sesuai ketentuan bidang profesi masing-masing, dan pengembangan kesempatan kerja.

2. Harmonisasi standardisasi dan sertifikasi kompetensi melalui kerjasama lintas sektor, lintas daerah dan lintas negara mitra bisnis, dalam kerangka keterbukaan pasar.

Dalam rangka menunjang pemenuhan tenaga kerja kompeten di sektor/sub-sektor pembangunan, khususnya yang telah disepakati dalam MEA 2015 dan 22 kegiatan ekonomi utama dalam 6 koridor ekonomi, strategi yang dilakukan adalah:

1. Penyusunan pedoman teknis registrasi standar kompetensi internasional dan standar khusus, agar standar yang telah setara dengan

SKKNI dapat diproses, untuk memperoleh rekognisi antar negara dan antar sistem untuk memastikan kesetaraan.

2. Pemetaan area kompetensi 8 bidang yang telah mencapai MRA dengan SKKNI yang telah ditetapkan, dengan menyusun standar yang perlu dikembangkan.
3. Identifikasi bidang-bidang keahlian baru sesuai kecenderungan global, yang perlu diantisipasi menjadi bidang baru yang akan ditetapkan dalam MEA.
4. Pengembangan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi melalui KKNi, okupasi, dan pemaketan klaster dan unit kompetensi.
5. Penguatan kelembagaan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi melalui standarisasi sistem kelembagaan dan standarisasi sarana dan prasarana kelembagaan pendidikan dan pelatihan kerja.
6. Pengelolaan manajemen lembaga pelatihan dan program pelatihan yang komprehensif di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
7. Fasilitasi pembentukan lembaga sertifikasi profesi (LSP) kepada asosiasi industri dan LSP terlisensi dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi untuk percepatan sertifikasi.
8. Penerapan kerjasama saling pengakuan dalam sistem logistik nasional, sistem latihan kerja nasional, dan sistem pendidikan nasional,
9. Pengembangan sistem pengendalian mutu sistem sertifikasi dan sistem pengendalian pelaksanaan sertifikasi
10. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.

Isu Strategis 7: Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi

Sasaran

Sasaran peningkatan daya saing UMKMK pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kontribusi UMKMK dalam perekonomian yang ditandai dengan pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKM sebesar 3,5%; pertumbuhan kontribusi UMKMK dalam pembentukan PDB sebesar 6,0%; pertumbuhan kontribusi UMKMK dalam ekspor non migas sebesar 4,8%; dan pertumbuhan kontribusi UMKMK dalam investasi sebesar 8,4%.
2. Meningkatnya daya saing UMKM yang ditandai dengan pertumbuhan jumlah usaha kecil dan menengah sebesar 5,1%; pertumbuhan

produktivitas UMKM 5,0%; penambahan jumlah UMKM formal yaitu yang berbadan hukum, memiliki izin dan/atau terdaftar (pada tahun 2015 Kementerian Koperasi dan UKM baru akan melakukan registrasi usaha); proporsi UMKM yang mengakses layanan keuangan formal sebesar 18,0%; Proporsi UMKM yang menerapkan teknologi sebesar 25,0%; proporsi UMKM yang menerapkan standardisasi mutu & sertifikasi produk sebesar 15,0%; dan proporsi UMKM yang tergabung dalam kemitraan/jaringan produksi dan pemasaran sebesar 12,3%.

3. Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif yang ditandai dengan proporsi wirausaha baru per jumlah penduduk usia produktif sebesar 1,7% dan pertumbuhan jumlah pelaku usaha di industri kreatif sebesar 11%.

4. Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi yang ditandai dengan pertumbuhan unit koperasi sebesar 6,0%; pertumbuhan anggota koperasi sebesar 7,0%; proporsi koperasi berkualitas sebesar 7,0%; rasio promosi ekonomi anggota di atas 10%; proporsi koperasi yang melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) sebesar 55,0%; dan pertumbuhan volume usaha koperasi sebesar 15,6%.

Arah Kebijakan dan Strategi

Kebijakan peningkatan daya saing UMKM yang akan ditempuh pada tahun 2015 diarahkan untuk memperkuat ketahanan perekonomian domestik dan membangun keunggulan global, yang dilaksanakan melalui lima strategi yaitu:

1. Peningkatan kompetensi SDM UMKM, di antaranya melalui pengembangan kewirausahaan dan *technopreneur*, serta peningkatan kompetensi teknis dan manajemen SDM UMKM yang didukung penyediaan layanan usaha terpadu;
2. Perluasan akses UMKM ke pembiayaan, di antaranya melalui pengembangan skema pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, penyediaan skema penjaminan usaha bagi UMKM, pengembangan sistem informasi debitur yang terintegrasi, serta pengembangan kerja sama pembiayaan antara bank dan lembaga keuangan bukan bank;
3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran UMKM, antara lain melalui pengembangan dan penguatan produk unggulan,

peningkatan inovasi dan penerapan teknologi, standardisasi dan sertifikasi, fasilitasi pengembangan jaringan produksi dan pemasaran, yang didukung penyediaan informasi pasar;

4. Penguatan kelembagaan usaha, di antaranya melalui pengembangan kemitraan usaha yang berbasis rantai nilai

baik yang melibatkan kerja sama antar UMKM, maupun antara UMKM dengan usaha besar/investor; dan

5. Peningkatan iklim usaha yang kondusif, di antaranya melalui penataan regulasi dalam rangka meningkatkan kepastian dan perlindungan usaha bagi UMKM, dan pendaftaran UMKM.

Isu Strategis 8: Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi Sasaran

Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2015 dalam rangka meningkatkan efisiensi sistem distribusi dan logistik adalah: (i) menurunkan rasio biaya logistik nasional terhadap PDB pada tahun 2015 menjadi sebesar 23,6 persen; (ii) menurunkan *dwelling time* menjadi 6 hari; serta (iii) menjaga koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar wilayah dan antar waktu pada kisaran 5-9 persen.

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan peningkatan efisiensi sistem logistik dan distribusi adalah membenahan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai suplai agar lebih efisien dan lebih handal, melalui strategi pembangunan lintas bidang sebagai berikut:

1. Peningkatan efisiensi jalur distribusi bahan pokok dan strategis, terutama untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok;

2. Peningkatan sistem informasi pendukung efisiensi logistik, melalui integrasi layanan secara elektronik untuk proses *pre-clearance* sampai dengan *post clearance*, optimalisasi sistem perijinan ekspor dan impor secara elektronik yang terintegrasi antar sektor, serta pengembangan sistem informasi logistik lainnya untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi biaya;

3. Peningkatan kapasitas SDM dan pelaku logistik, agar dapat bersaing baik di pasar lokal dan internasional;

4. Peningkatan peranan dan kualitas jasa logistik dan jasa distribusi, sebagai penyedia dan penyalur input antara dan produk akhir;

5. Penurunan waktu dan biaya logistik pelabuhan, terutama pengurangan waktu tunggu di pelabuhan dan penghapusan biaya kepelabuhanan yang tidak perlu;
6. Pencegahan perilaku anti persaingan (seperti: praktek monopoli dan kartel) dan penegakan hukum persaingan usaha;
7. Peningkatan efektivitas tata kelola impor, terutama untuk menjaga daya saing bahan pokok domestik dan peningkatan efisiensi logistik bahan baku/penolong yang dibutuhkan untuk proses transformasi industri.

Dimana keluaran utama yang diharapkan dari pelaksanaan strategi tersebut antara lain mencakup: pembangunan Pusat Distribusi Regional, pembangunan Pasar Tradisional Percontohan, penyediaan dan penyelenggaraan sistem informasi pendukung logistik (*i-care*, *NSW*, dan *port-net*), Peningkatan kapasitas SDM dan pelaku logistik, peningkatan peranan dan kualitas jasa logistik, peningkatan efisiensi proses logistik pelabuhan, serta peningkatan koordinasi kebijakan logistik nasional.

Isu Strategis 9: Reformasi Keuangan Negara

Sasaran

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam isu strategis reformasi keuangan negara adalah adalah meningkatnya kemampuan keuangan negara dan meningkatnya kualitas belanja negara yang ditandai dengan (i) meningkatnya penerimaan negara yang meliputi penerimaan perpajakan dan penerimaan bea masuk, bea keluar dan cukai; serta (ii) meningkatnya efisiensi dan efektivitas belanja negara.

Arah Kebijakan dan Strategi

A. Peningkatan Penerimaan Negara

Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan bea dan cukai dalam rangka pembiayaan pembangunan, pengendalian defisit dan menjaga kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*).

Strategi pembangunan yang akan ditempuh adalah: (i) Reformasi Perpajakan Secara Komprehensif antara lain melalui : penambahan pegawai Direktorat Jenderal Pajak minimal 5.000 (lima ribu) orang pegawai per tahun selama 5 (lima) tahun, penambahan 27 (dua puluh tujuh) satuan kerja baru berupa 2 (dua) Kantor Wilayah dan 25 (dua puluh

lima) Kantor Pelayanan Pajak, penambahan 244 (dua ratus empat puluh empat) Seksi Pengawas dan Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak; membenarkan sistem administrasi perpajakan, penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan, pemetaan wilayah potensi penerimaan pajak hasil pemeriksaan; ekstensifikasi dan intensifikasi pajak melalui perluasan basis pajak di sektor minerba dan perkebunan serta penyesuaian tariff; peningkatan efektivitas penyuluhan; penyediaan layanan yang mudah, cepat dan akurat; peningkatan efektivitas pengawasan; dan peningkatan efektivitas penegakkan hukum bagi penyelundup pajak (*tax evasion*); dan (ii) Optimalisasi Penerimaan Bea dan Cukai antara lain melalui : penguatan *legal framework* melalui penyelesaian/ penyempurnaan peraturan di bidang lalu lintas barang dan jasa; peningkatan kualitas sarana dan prasarana operasi serta informasi kepabeanan dan cukai; pengembangan dan penyempurnaan sistem dan prosedur yang meliputi program profiling Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), persiapan *Authorized Economic Operator (AEO)* dan pengembangan Tempat Penimbunan Sementara (TPS); serta ekstensifikasi dan intensifikasi barang kena cukai.

B. Peningkatan Kualitas Belanja Negara

Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara. Dengan strategi pembangunan yang akan ditempuh antara lain : (i) Penyempurnaan Perencanaan Penganggaran Negara antara lain melalui : pengurangan pendanaan bagi kegiatan yang konsumtif dalam alokasi anggaran Kementerian/Lembaga; rancang ulang kebijakan subsidi guna mewujudkan subsidi yang rasional penganggarnya dan tepat sasaran; pemantapan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) untuk meningkatkan disiplin dan kepastian fiskal serta penataan remunerasi aparatur negara dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN); (ii) Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Anggaran antara lain melalui : penyempurnaan dan perbaikan regulasi terkait penyediaan dan penyaluran dana di bidang investasi, pinjaman dan kredit program untuk mendorong pertumbuhan infrastruktur dan iklim investasi pemerintah; pengelolaan kas yang efektif untuk mencapai jumlah likuiditas kas yang ideal untuk membayar belanja pemerintah melalui *Treasury Single Account* dan *cash forecasting* yang handal, serta manajemen

surplus kas yang mampu memberi kontribusi optimal bagi penerimaan negara; dan modernisasi kontrol dan monitoring pelaksanaan anggaran dengan sistem informasi yang terintegrasi; (iii) Peningkatan Pengelolaan Desentralisasi Fiskal dan Keuangan daerah, antara lain melalui percepatan pelaksanaan pengalihan anggaran pusat ke daerah untuk fungsi-fungsi yang telah menjadi wewenang daerah, serta pengalihan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi DAK.

Isu Strategis 10: Peningkatan Kapasitas Iptek

Sasaran

Sasaran pembangunan Iptek adalah:

1. Meningkatnya kapasitas iptek nasional sehingga mampu untuk mendukung:
 - a. peningkatan daya saing sektor produksi barang dan jasa;
 - b. keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam; serta
 - c. penyiapan sosial budaya masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global yang maju dan modern.
2. Meningkatkan ketersediaan faktor input bagi kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek yang mencakup SDM, sarana prasarana, kelembagaan iptek, jaringan, dan pembiayaannya.

Arah Kebijakan dan Strategi

1. Dalam rangka peningkatan dukungan iptek bagi daya saing sektor produksi, maka penelitian, pengembangan dan penerapan iptek (P3-Iptek) diarahkan pada:
 - a. Penyelenggaraan Litbang (Riset): dengan output teknologi / produk baru terdifusi ke sektor produksi;
 - b. Layanan Perencanaan dan Teknologi: dalam bentuk penyediaan sarana perencanaan, disain, dan pengujian;
 - c. Layanan Infrastruktur Mutu: yang mencakup standardisasi, metrologi, kalibrasi, dan pengujian mutu;
 - d. Layanan Pengawasan Tenaga Nuklir: yang mencakup pengawasan penggunaan tenaga nuklir di industri, pertanian, kesehatan, dan energi;
 - e. Pengembangan Teknopreneur: yang difasilitasi *lewat science and technology park*, inkubator, dan modal ventura.

2. Dalam rangka peningkatan dukungan iptek bagi keberlanjutan dan peningkatan kemanfaatan sumber daya alam, maka Arah Kebijakan yang ditetapkan adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek mencakup pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya hayati (*bio-resources*) dan nirhayati, pemanfaatan dan pengoperasian satelit sumberdaya alam serta teknologi mitigasi perubahan iklim.
3. Dalam rangka peningkatan dukungan iptek bagi penyiapan sosial budaya masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global yang maju dan modern, maka penyelenggaraan penelitian sosial budaya dalam hal kesiapan menyongsong fenomena global village yang mencakup seluruh Indonesia melalui 6 simpul penelitian di Perguruan Tinggi Negeri.

Isu Strategis 11: Peningkatan Ketahanan Air

Sasaran

Peningkatan ketahanan air pada daerah aliran sungai difokuskan pada penanganan 36 DAS Prioritas Nasional melalui penyusunan Rencana Pengelolaan sesuai dengan fungsinya. Sedangkan dalam pengelolaan sumber daya air, sasaran umum pembangunan infrastruktur sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin ketahanan air, pangan, dan energi dalam rangka mendukung ketahanan nasional pada tahun 2015 difokuskan pada:

1. Meningkatkan kapasitas tampung air sebesar 58,5 juta m³ akan dipenuhi dengan pembangunan waduk sebanyak 21 buah termasuk di Papua dan Maluku. Pembangunan 21 buah waduk tersebut selain dapat meningkatkan kapasitas tampung perkapita, juga akan meningkatkan keterjaminan sumber air irigasi dari waduk yang selama ini baru mencapai 11%, dan sebagai sumber air baku baik untuk rumah tangga, perkotaan dan industri, serta sebagai sumber tenaga listrik PLTA. Selain itu juga akan dilakukan pembangunan waduk skala kecil, embung, dan bendung gerak yang dibangun sebagai penampung air dalam kapasitas kecil dengan sasaran sebesar 195 buah.
2. Sasaran pembangunan irigasi baru yang ditargetkan untuk mendukung ketahanan pangan adalah 33,3 ribu hektar, yang difokuskan pada daerah di luar Jawa seperti Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Sasaran pembangunan jaringan irigasi tersebut juga untuk mengkompensasi terjadinya alih fungsi lahan sawah yang rata-rata pertahun melebihi 50

ribu hektar. Untuk mendukung ketahanan pangan, selain pembangunan jaringan irigasi juga dilakukan rehabilitasi jaringan irigasi sebesar 38,18 ribu hektar untuk mengurangi laju kerusakan yang terjadi. Selain itu jaringan rawa yang juga potensial sebagai lahan pertanian akan dilakukan pembangunan jaringan rawa baru dan rehabilitasi jaringan rawa dengan target masing-masing 10,16 ribu hektar dan 13,80 ribu hektar.

3. Keberhasilan pengelolaan irigasi juga ditentukan oleh bekerjanya kelembagaan pengelolaan irigasi, oleh karena itu dalam 5 (lima) tahun kedepan perlu dibentuk unit pengelola satuan irigasi sebagai unit yang bertanggung jawab pada satuan irigasi yang diharapkan dapat menjamin kehandalan daerah irigasi. Selain itu penerapan partisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi harus terus didorong yang dalam 5 (tahun) kedepan ditargetkan juga bagi daerah irigasi berskala luas (kewenangan pemerintah pusat).

4. Air baku yang merupakan salah satu input dalam perekonomian seperti industri dan perkotaan, memegang peranan penting dalam kelangsungan industri. Sasaran peningkatan kapasitas dan rehabilitasi saluran pembawa air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri pada tahun 2015 adalah sebesar 2,45m³/det dan 5,46 m³/det

5. Dalam rangka perlindungan terhadap kawasan strategis nasional, pusat pertumbuhan ekonomi, dan pulau-pulau terdepan dari dampak daya rusak air melalui: Pembangunan dan rehabilitasi tanggul sungai/pengendali banjir sepanjang 125,4 Km dan 15,22 km; Pembangunan/rehabilitasi pengendali sedimentasi sungai, waduk dan banjir sedimen sebanyak 20 buah; Pembangunan pengamanan garis pantai dari abrasi sepanjang 22,46 Km; dan dimulainya pembangunan NCICD

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi pembangunan peningkatan pengelolaan DAS ditempuh melalui: 1) Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi DAS; 2) Peningkatan rehabilitasi dan reklamasi DAS; 3) Peningkatan pengelolaan DAS dalam lingkup Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); 4) Peningkatan fungsi konservasi sumber daya air DAS yang bersangkutan.

Sementara itu dalam pengelolaan sumber daya air, arah kebijakan dan strategi pembangunannya didasarkan pada pengelolaan sumber daya air secara terpadu berbasis wilayah sungai, yang merupakan amanat UU

No.7/2004. Basis pengelolaan sumber daya air secara terpadu tersebut, dituangkan dalam Pola dan Rencana pengelolaan wilayah sungai, yang telah mengintegrasikan berbagai sektor dan stakeholder termasuk rencana pengelolaan DAS yang merupakan basis/dasar perencanaan bagi berbagai sektor dan stakeholder. Peningkatan kapasitas tampung perkapita melalui pembangunan waduk, embung, situ, dan long storage serta revitalisasi danau akan dimanfaatkan untuk peningkatan pemenuhan air baku, peningkatan kapasitas dan layanan jaringan irigasi dan pengendalian banjir, serta PLTA. Peningkatan pelayanan pengelolaan sumber daya air antara lain diarahkan untuk peningkatan layanan air baku, Peningkatan layanan jaringan irigasi/raja untuk mendukung ketahanan pangan nasional, perlindungan kawasan strategis nasional, pusat pertumbuhan ekonomi, dan pulau-pulau terdepan terhadap dampak daya rusak air, serta peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air.

Isu Strategis 12: Penguatan Konektivitas Nasional

A. Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah

Sasaran

Dalam rangka meningkatkan keseimbangan pembangunan antar wilayah, maka sasaran umum yang ingin dicapai adalah pemerataan pembangunan kota-kota sesuai peran dan fungsinya dalam rangka mewujudkan Sistem Perkotaan Nasional dan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi. Adapun sasaran khusus yang ingin dicapai, antara lain:

1. Tersusunnya Sistem Perkotaan Nasional melalui revisi PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
2. Tersusunnya rencana percepatan perwujudan 7 (tujuh) KSN perkotaan (metropolitan dan megapolitan) yang berbasis aglomerasi sebagai pusat kegiatan global;
3. Terlaksananya fasilitasi pengembangan Kota Hijau dan Kota Layak Huni menuju kota berkelanjutan;
4. Tersusunnya Rancangan Undang-Undang Perkotaan yang dapat mewujudkan keseimbangan pembangunan antar kota, antar wilayah serta keterkaitan kota dan desa;

5. Terbangunnya jalan nasional yang ditingkatkan kapasitasnya/pelebaran 2.323,8 km jalan nasional; jalan yang dipreservasi 30,197.60 km; jembatan yang dipreservasi 328,504.00 m; dan jalan bebas hambatan 8.68 km.
6. Terbangunnya jalan baru sepanjang 143.1 km; jembatan yang dibangun 4,300.50 m; flyover/underpass yang dibangun 1,206.20 m; jalan/jembatan di kawasan strategis, perbatasan, wilayah terluar dan terdepan yang dibangun 50.60 km.
7. Terbangunnya jalur rel KA baru dan jalur rel ganda KA sepanjang 264.7 km untuk Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi;
8. Terbangunnya 50 pelabuhan penyeberangan di lintas sabuk utara, tengah dan selatan;
9. Pengembangan pelabuhan perintis sebanyak 26 lokasi, terutama untuk wilayah timur; pelabuhan non perintis sebanyak 25 lokasi; dan pelabuhan strategis sebanyak 8 lokasi.
10. Terbangunnya 42 bandar udara yang dikembangkan di daerah perbatasan dan rawan bencana; dan 15 bandar udara baru yang dibangun; serta jumlah bandar udara yang dikembangkan, direhabilitas sebanyak 154 bandara.
11. Pembangunan sarana transportasi meliputi: 75 unit bus perintis, 15 unit kapal perintis laut, peningkatan 8 sarana pendukung keperintisan penyeberangan dan 15 unit Bus Air & Speed Boat, 48 unit Kereta KRDI, dan Kereta Ekonomi (K3, MP3, KRDI) yang dilengkapi fasilitas *responsive gender* sebanyak 41 unit.

Arah Kebijakan dan Strategi

Dalam rangka meningkatkan keseimbangan pembangunan antar wilayah, arah kebijakan dan strategi pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang memenuhi untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk wilayah pedalaman, terdalam dan tertinggal.
2. Memperluas jangkauan pelayanan infrastruktur ke daerah marginal dengan penyediaan angkutan umum murah, penyediaan aksesibilitas dan kegiatan keperintisan baik transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara.
3. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi *backlog* maupun *bottlenecking* kapasitas prasarana

transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda.

B. Pendorong Pertumbuhan Ekonomi

Sasaran

Dalam rangka meningkatkan peran kota-kota di Indonesia sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, maka sasaran umum yang ingin dicapai adalah mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) yang merupakan standar minimum untuk sebuah kota dalam menyediakan layanan bagi masyarakatnya, terutama pembangunan sarana dan prasarana transportasi kota-kota di luar Pulau Jawa. Sedangkan sasaran khusus yang ingin dicapai, antara lain:

1. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi *backlog* maupun *bottleneck* kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi;
2. Meningkatnya Pelayanan dalam rangka Implementasi transportasi antarmoda dan antarpulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda, serta Sistem Logistik Nasional;
3. Keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan
4. Seluruh pulau besar terhubung dengan jaringan tulang punggung serat optik nasional
5. 88% kabupaten/kota terjangkau layanan pitalebar
6. 70% populasi terjangkau layanan pitalebar
7. Indeks e-pemerintah nasional mencapai 3,0 (skala 4,0)
8. Dalam rangka Pemulihan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat terdampak luapan lumpur Sidoarjo serta Pengurangan potensi ancaman luapan lumpur untuk mencegah meluasnya Peta Area Terdampak, sasaran pada tahun 2015 adalah terselesaikannya pembayaran jual beli tanah dan bangunan warga di wilayah terdampak yang menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas/PT Minarak Lapindo Jaya (PAT 22 Maret 2007) dan penyelesaian pembangunan jual beli tanah dan bangunan warga di luar Peta Area Terdampak yang menjadi tanggung jawab Pemerintah (3 Desa, 9 RT, 65 RT) yang mempunyai kesulitan tinggi; dan terjaminnya

operasi pengaliran lumpur ke Kali Porong dan pemeliharaan infrastruktur pengaman luapan lumpur Sidoarjo.

Arah Kebijakan dan Strategi

Dalam rangka meningkatkan peran kota-kota di Indonesia sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi serta membangun infrastruktur dalam rangka menunjang pembangunan sistem logistik nasional diarahkan pada peningkatan konektivitas nasional guna semakin meningkatkan keseimbangan pembangunan, efisiensi dan efektifitasnya, dengan strategi sebagai berikut:

1. Pembangunan sarana dan prasarana penghubung antar dan menuju koridor ekonomi dan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi (jalan, pelabuhan, bandar udara) untuk mendukung kelancaran distribusi bahan pokok kebutuhan masyarakat dan komoditas strategis lainnya dalam upaya mendorong pemulihan perekonomian nasional dari dampak resesi global.
2. Pembangunan sarana dan prasarana yang memenuhi standar dan kompatibilitas global pada koridor regional/global termasuk koridor ASEAN connectivity.
3. Mendorong pengembangan moda angkutan laut, kereta api dan angkutan penyeberangan untuk mendukung pelaksanaan amanat Perpres No 26 tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (termasuk diantaranya pengembangan angkutan Long Distance Ferry (LDF) Jakarta-Surabaya).
4. Mendorong industri nasional untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana termasuk diantaranya industri dirgantara, industri aspal buton untuk memenuhi kebutuhan pembangunan jalan, industri sarana kereta api untuk mendukung angkutan penumpang kelas ekonomi, dan industri perkapalan untuk mendukung angkutan barang dan penumpang.
5. Mentransformasi Kewajiban Pelayanan Universal (*Universal Service Obligation*) menjadi *broadband-ready*.
6. Mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas.
7. Mendorong pembangunan pitalebar akses tetap (*fixed broadband*) termasuk di daerah perbatasan negara
8. Memberikan perlindungan keamanan kepada penyelenggara serta kualitas dan keamanan informasi kepada pengguna layanan.

9. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan data sebagai aset strategis negara
10. Mempercepat implementasi e-pemerintah (*e-government*) dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas, dan cost effective.
11. Pemerintah sebagai katalisator untuk mendorong penggunaan pitalebar.
12. Mendorong tingkat dan kualitas literasi TIK.
13. Mendorong inovasi.
14. Mendorong percepatan penyediaan infrastruktur melalui skema KPS
15. Penanggulangan Luapan Lumpur Sidoarjo. Penanggulangan luapan Lumpur Sidoarjo diarahkan untuk menjaga kapasitas dan keamanan kolam penampung luapan Lumpur Sidoarjo serta mengamankan aset pemerintah yang berupa tanah atas terlaksananya jual beli tanah di luar peta terdampak dengan mempertimbangkan aspek pemanfaatan aset tersebut untuk fungsi lingkungan maupun fungsi ilmu pengetahuan.

C. Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan

Sasaran

Dalam rangka menyiapkan kota-kota metropolitan dan besarsebagai pintu terdepan yang akan menghadapi perdagangan bebas dan kerjasama perekonomian global, maka diperlukan percepatan pembangunan transportasi massal perkotaan. Sasaran umum yang ingin dicapai adalah : Peningkatan Mobilitas Perkotaan serta penurunan angka kemacetan melalui peningkatan pelayanan angkutan massal. Secara spesifik sasaran yang ingin dicapai antara lain :

1. Terbangunnya sistem angkutan umum massal (SAUM) berbasis rel antara lain MRT, monorail, tram dan kereta api di kawasan-kawasan perkotaan (Medan, Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta);
2. Terlaksananya pengembangan sistem angkutan umum BRT di 16 Kota besar.

Arah Kebijakan dan Strategi

Dalam rangka sistem pengembangan transportasi perkotaan, arah kebijakan yang dilakukan meliputi :

1. Pengembangan sistem transportasi berbasis bus di kota metropolitan untuk meningkatkan mobilitas bagi masyarakat melalui revitalisasi angkutan umum dan pembangunan transportasi massal berbasis jalan dan rel di 6 kota metropolitan (Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya,

Makassar, dan Denpasar) termasuk pengembangan semi Bus Rapid Transit (BRT), di 10 kota besar yaitu Batam, Yogyakarta, Semarang, Pekanbaru, Manado, Gorontalo, Palembang, Solo, Ambon, Tangerang.

2. Pengembangan sistem transportasi berbasis rel di kota Jakarta dan Surabaya sebagai tulang punggung jaringan transportasi perkotaan

3. Meremajakan armada transportasi yang telah melewati batas waktu guna layanan. untuk meningkatkan layanan transportasi perkotaan yang berkelanjutan.

4. Memanfaatkan gas sebagai sumber energi transportasi perkotaan untuk mengurangi dampak lingkungan.

Isu Strategis 13: Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar

A. Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional

Rasio elektrifikasi nasional saat ini masih relatif tergolong rendah, terutama di wilayah-wilayah timur Indonesia, yang mana sampai dengan tahun 2013 sekitar 80,51 persen dengan variasi yang berbeda-beda di berbagai wilayah, sementara itu pemanfaatan energi baru terbarukan/EBT belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu, sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Sasaran

Penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik melalui PT. PLN dan IPP sebesar 2.761 MW; Penambahan jaringan transmisi melalui pendanaan APBN 660 kms; Penambahan kapasitas gardu induk melalui pendanaan APBN 870 MVA; Penambahan jaringan distribusi melalui pendanaan APBN 14.082 kms; Penambahan kapasitas gardu distribusi melalui pendanaan APBN 267 MVA; dan Peningkatan rasio elektrifikasi menjadi 83,18 persen.

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan yang ditempuh adalah meningkatkan jangkauan dan kehandalan infrastruktur ketenagalistrikan melalui pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi, jaringan distribusi, serta gardu induk dan distribusi untuk meningkatkan pasokan tenaga listrik termasuk untuk daerah perdesaan, terpencil dan perbatasan, melalui strategi :

1. Percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berdasarkan rencana kerja yang terarah dan terpadu yang diikuti dengan pengembangan kelembagaan guna mendorong peningkatan rasio elektrifikasi dan nilai tambah nasional
2. Peningkatan pemanfaatan gas bumi dan batubara kalori rendah serta energi baru terbarukan (EBT) untuk pembangkit listrik sebagai upaya diversifikasi energi yang diprioritaskan untuk kebutuhan pasokan domestik serta pelaksanaan konservasi energi;
3. Pelaksanaan rasionalisasi tarif dalam kerangka penyesuaian tarif listrik secara bertahap dan terencana jangka menengah guna mengurangi beban subsidi listrik secara bertahap dan subsidi listrik tepat sasaran termasuk subsidi untuk pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT);
4. Fasilitasi sinkronisasi dan penyempurnaan regulasi antar sektor dan antar wilayah serta usaha penyediaan tenaga listrik guna menjamin kepastian hukum, mengurangi hambatan investasi dan pembangunan ketenagalistrikan serta untuk mendorong keikutsertaan badan usaha (BUMN, BUMD, swasta dan koperasi) melalui pelaksanaan kerjasama pemerintah-swasta (KPS) dan IPP (*independent power producer*).

B. Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi

Sasaran

Dalam rangka peningkatan akses air minum dan sanitasi, sasaran umum yang ingin dicapai adalah meningkatnya layanan air minum dan sanitasi layak baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan. Pada tahun 2015, akses penduduk terhadap air minum layak diharapkan dapat meningkat menjadi 70,25% pada tingkat kebutuhan dasar. Selain itu, akses penduduk terhadap fasilitas sanitasi layak juga diharapkan dapat meningkat menjadi 62,4% pada tingkat kebutuhan dasar. Secara spesifik, sasaran yang ingin dicapai di tahun 2015 antara lain:

1. Terbangunnya infrastruktur air limbah di 764 kawasan, infrastruktur drainase perkotaan di 53 kabupaten/kota, infrastruktur tempat pemrosesan akhir sampah di 41 kabupaten/kota, dan infrastruktur tempat pengolahan sampah terpadu/3R di 127 kawasan.
2. Terbangunnya SPAM regional di 6 kawasan regional, SPAM kawasan MBR di 487 kawasan, SPAM Ibu Kota Kecamatan (IKK) di 159 IKK, SPAM Perdesaan di 1.733 desa, dan SPAM Kawasan Khusus di 79 kawasan.

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Kebijakan pemenuhan akses universal air minum dan sanitasi bagi seluruh rakyat Indonesia diarahkan pada penjaminan ketahanan sumber daya air domestik melalui strategi optimalisasi bauran sumber daya air domestik yang meliputi:

(i) Jaga air dengan pengarusutamaan prinsip 4K (Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas dan Keterjangkauan), peningkatan kesadaran masyarakat akan *hygiene* dan sanitasi, pengelolaan sanitasi melalui peningkatan akses layanan pengelolaan air limbah di perdesaan, peningkatan kualitas layanan pengelolaan air limbah sistem setempat (*on-site*) melalui pengelolaan lumpur tinja, perluasan akses layanan pengelolaan air limbah sistem terpusat (*off-site*) di perkotaan baik itu sistem terpusat skala kawasan maupun skala kota (*sewerage system*), peningkatan kualitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) menjadi *sanitary landfill*; (ii) Simpan air, yakni strategi untuk menjaga ketersediaan dan kuantitas air melalui konservasi sumber air baku dan pengumpulan air hujan; (iii) Hemat air dengan mengoptimalkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang telah ada dan meningkatkan efisiensi konsumsi air minum; (iv) Daur ulang air dengan pemanfaatan air yang telah terpakai.

C. Penataan Perumahan/Permukiman

Sasaran

Dalam rangka penataan perumahan dan kawasan permukiman, sasaran umum yang ingin dicapai adalah meningkatnya layanan perumahan bagi seluruh penduduk, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Pada tahun 2015, angka backlog perumahan diharapkan dapat berkurang menjadi 11,5 juta rumah tangga. Selain itu, rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni juga diharapkan berkurang menjadi 3,26 juta rumah tangga. Secara spesifik sasaran yang ingin dicapai di tahun 2015 antara lain :

1. Meningkatnya fasilitasi penyediaan baru hunian layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 20.000 unit
2. Pembangunan Rusunawa untuk masyarakat MBR sebanyak 120 twin block
3. Meningkatnya fasilitasi peningkatan kualitas hunian sebanyak 64.850 unit

Arah Kebijakan dan Strategi

Kebijakan penataan perumahan/permukiman tahun 2015 diarahkan pada peningkatan akses masyarakat berpendapatan rendah (MBR) terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman yang memadai. Perbaikan dalam pengelolaan lahan dan hunian bagi MBR di perkotaan akan meningkatkan efisiensi dalam mobilitas tenaga kerja, lalu lintas, serta mengurangi kesemrawutan kota dan permukiman kumuh. Untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi yang akan diterapkan meliputi: (i) peningkatan peran fasilitasi Pemda dalam menyediakan rumah baru layak huni serta peningkatan kualitas hunian MBR yang berbasis komunitas; (ii) penguatan kapasitas Pemerintah dalam memberdayakan pasar perumahan; (iii) peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian untuk MBR; dan (iv) peningkatan pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan yang aman dan murah serta pengembangan implementasi konsep rumah tumbuh.

Isu Strategis 14: Konsolidasi Demokrasi

Sasaran

Sasaran utama pembangunan Sub Bidang Politik Dalam Negeri adalah terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi. Sasaran utama ini dicapai melalui sasaran-sasaran antara sebagai berikut :

1. Menguatnya kelembagaan politik/demokrasi yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka Indeks Demokrasi Indonesia pada aspek Institusi Demokrasi;
2. Terjaminnya kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka Indeks Demokrasi Indonesia pada aspek kebebasan sipil dan hak-hak politik;
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik;
4. Terjaganya stabilitas sosial dan politik
5. Terjaganya stabilitas sosial politik dari ancaman terorisme

Arah Kebijakan dan Strategi

Merujuk pada sasaran yang ingin dicapai, arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut::

1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi;

2. Meningkatkan pemenuhan hak dan kewajiban politik rakyat;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik;
4. Memperkuat iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan;
5. Menciptakan iklim kondusif untuk penanganan terorisme dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman terorisme.

Arah kebijakan untuk meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Pengembangan kebijakan pemilihan yang demokratis.
2. Pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung proses konsolidasi demokrasi, termasuk peningkatan peran ormas.
3. Fasilitasi dukungan pemberdayaan filantropi masyarakat dan *corporate social responsibility*(CSR) untuk keberlanjutan ormas.
4. Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu.
5. Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan
6. Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi

Arah kebijakan untuk meningkatkan pemenuhan hak dan kewajiban politik rakyat dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

1. Penerapan kebijakan *affirmative action* kepada kelompok marjinal.
2. Peningkatan kapasitas kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal/rentan lainnya.
3. Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marjinal.
4. Pengembangan pusat pendidikan pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif.
5. Penguatan fungsi pendidikan politik oleh parpol

Arah kebijakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik dilakukan dengan strategi:

1. Pengembangan kebijakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik dan *open government*.
2. Penguatan kelembagaan quasi pemerintah di bidang komunikasi dan informasi.
3. Penyediaan konten informasi publik berkualitas.

4. Penguatan *media center*, media komunitas, media tradisional, dan media lainnya yang ada di masyarakat.
5. Penguatan media literasi
6. Pemanfaatan media baru/sosial.
7. Penyebaran dan pemerataan informasi publik tepat waktu, termasuk pemanfaatan media baru/sosial.
8. Pembentukan lembaga rating (pemeringkat) penyiaran nasional.
9. Penguatan SDM komunikasi dan informasi.
10. Penguatan kelembagaan informasi dan komunikasi pemerintah.
11. Penguatan *Government Public Relation* (GPR)

Arah kebijakan untuk menguatkan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Pengembangan kebijakan pemantapan pelaksanaan komitmen kebangsaan.
2. Penyusunan PP sebagai pelaksanaan UU No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
3. Pembangunan pusat pendidikan kebangsaan yang terintegrasi dan komprehensif, serta menjunjung tinggi penghormatan pada multikulturalism
4. Penguatan karakter bangsa
5. Penguatan kelembagaan dialog dalam pemantapan demokrasi dan penanganan konflik.
6. Penguatan kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan konflik
7. Penguatan koordinasi pelaksanaan komitmen kebangsaan

Arah kebijakan untuk menciptakan iklim kondusif untuk penanganan terorisme dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman terorisme dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Penataan regulasi terkait UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
2. Pelembagaan dan pengembangan jaringan Forum Koordinasi Pencegahan Konflik (FKPT).

3. Penguatan penanggulangan terorisme terkait dengan pencegahan dan penindakan
4. Penguatan kerja sama bilateral, regional, dan global tentang counter terrorism
5. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penanggulangan terorisme.

Isu Strategis 15: Percepatan Pembangunan MEF dan Almatsus Polri Dengan Pemberdayaan Industri Pertahanan

Pada akhir tahun 2014, sejumlah peralatan modern akan mewarnai kelengkapan alutsista TNI. Pada posisi ini, daya penggerak militer Indonesia meningkat cukup signifikan dan semakin diperhitungkan oleh kekuatan militer asing. Konsekuensi dari peningkatan kekuatan militer tersebut adalah penyediaan anggaran pemeliharaan dan perawatan alutsistanya. Penyediaan anggaran ini dalam rangka menjaga dan/atau meningkatkan kesiapan operasionalnya.

Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai tahun 2015 adalah terpenuhinya alutsista TNI dan Almatsus POLRI yang didukung industri pertahanan.

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran terpenuhinya alutsista TNI dan Almatsus POLRI yang didukung industri pertahanan, ditempuh dengan :

1. Melanjutkan Pemenuhan MEF;
2. Meningkatkan upaya Pemeliharaan dan Perawatan (harwat);
3. Melanjutkan Pemenuhan Almatsus Polri
4. Meningkatkan Kontribusi Industri Pertahanan bagi Alutsita TNI dan Alut Polri

Isu Strategis 16: Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri

Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka meningkatkan ketertiban dan keamanan dalam negeri adalah: (a) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri; (b) Menguatnya intelijen; dan Menguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba.

Arah Kebijakan dan Strategi

Adapun arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka peningkatan ketertiban dan keamanan dalam negeri adalah :

1. Meningkatkan pelayanan publik
2. Penguatan SDM
3. Pemantapan Manajemen Internal
4. Pemantapan efektivitas operasi intelijen melalui peningkatan profesionalisme personel dan modernisasi peralatan intelijen negara.
5. Meningkatkan upaya terapi dan rehabilitasi korban penyalahguna narkoba (*demand side*).

Isu Strategis 17: Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik

Sasaran

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam isu strategis reformasi birokrasi dan penguatan kapasitas kelembagaan publik adalah meningkatnya kualitas implementasi tata kelola pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan: menguatnya kapasitas kelembagaan pemerintah, penguatan kelembagaan manajemen kinerja pembangunan, kelembagaan pembentukan regulasi; meningkatnya efektivitas transformasi kelembagaan dalam rangka peningkatan dan optimalisasi penerimaan pajak; meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi; meningkatnya kapasitas, profesionalisme dan kinerja ASN; meningkatnya kualitas pelayanan publik; meningkatnya peranan *e-government* untuk mendukung bisnis proses manajemen birokrasi secara modern, akuntabel dan terpadu; meningkatnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan; meningkatnya efektivitas implementasi sistem manajemen kinerja pembangunan; dan peningkatan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Arah Kebijakan dan Strategi

1. Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah guna mewujudkan kelembagaan pemerintah yang efektif dan efisien dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan

Strategi pembangunan yang ditempuh, antara lain: penetapan desain kelembagaan pemerintahan pusat atau arsitektur birokrasi pemerintah;

penataan tata hubungan kelembagaan birokrasi pada berbagai level pemerintahan; penataan fungsi dan struktur organisasi yang mencakup penetapan kebijakan, dan penataan instansi pemerintah yang berfungsi sebagai *central agencies* dan instansi sektoral yang strategis.

Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah akan mencakup penataan fungsi dan struktur organisasi, tata hubungan kerja yang terintegrasi dan harmonis antar fungsi/organisasi, yang ditopang oleh aparatur sipil Negara yang professional. Untuk mendukung pembangunan nasional, penataan kelembagaan mencakup pula peningkatan transformasi kelembagaan perpajakan dalam rangka peningkatan dan optimalisasi penerimaan pajak.

2. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional

Strategi pembangunan yang ditempuh, antara lain: penguatan komitmen pimpinan pemerintahan dalam pelaksanaan RBN; pemantapan koordinasi pelaksanaan RBN, penyempurnaan kebijakan yang mencakup penyempurnaan *Grand Design, Road Map* dan petunjuk pelaksanaannya, dan penguatan kelembagaan pengelola RBN. Strategi lainnya yang ditempuh adalah perluasan dan peningkatan kualitas pelaksanaan RBN pada instansi pemerintah daerah yang mencakup akselerasi asistensi, fasilitasi, dan bimbingan teknis; dan peningkatan kinerja pelayanan publik pada instansi yang telah melaksanakan RBN melalui program *quick wins*.

3. Penerapan manajemen aparatur sipil negara (ASN) berbasis merit

Strategi pembangunan yang ditempuh, antara lain: penyelesaian peraturan pelaksanaan dan kelembagaan pendukung pelaksanaan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; implementasi UU ASN melalui penerapan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi; penataan sistem pengembangan kapasitas dan kompetensi ASN; penataan sistem pengembangan karir ASN yang terintegrasi; pengembangan sistem rekrutmen pejabat ASN secara terbuka; dan penerapan manajemen kinerja yang dikaitkan dengan kompensasi (*performance based reward*). Strategi lainnya; penyelenggaraan diklat atau orientasi kepemimpinan nasional bagi para calon atau pejabat penyelenggara negara, dan penyelenggaraan diklat *Reform Leaders Academy* (RLA) untuk mendukung reformasi birokrasi.

4. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain: penataan organisasi dan kelembagaan pelayanan yang efisien, responsif, dan inovatif; peningkatan kualitas implementasi UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik; peningkatan kompetensi, integritas, dan budaya melayani bagi SDM pelayanan publik; perluasan penerapan *e-service* melalui pemanfaatan ICT; terlaksananya program *quick wins* sebagai pendorong peningkatan kinerja pelayanan publik; peningkatan efektivitas fungsi monev dan penilaian kinerja pelayanan publik nasional; penerapan *reward and punishment* yang dikaitkan dengan kinerja pelayanan publik; penetapan dan penerapan sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah, dan penerapan indikator utama inovasi dan daya saing daerah.

5. Pengembangan e-government untuk mendukung bisnis proses yang sederhana, efisien dan transparan

Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain: penyempurnaan kebijakan yang mengatur *e-government* termasuk pengembangan/ penyempurnaan *master plan* dan *roadmap e-goverment*; pengembangan layanan *e-government* yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintahan/ birokrasi yang didukung oleh perluasan jangkauan dan peningkatan kualitas jaringan infrastruktur TIK; peningkatan kapasitas SDM dan sarana *e-government*; dan peningkatan kualitas penerapan manajemen kearsipan berbasis TIK untuk mendukung kinerja birokrasi yang modern.

6. Penerapan open government

Strategi pembangunan pelaksanaan *open government* ditempuh melalui: peningkatan komitmen badan publik dalam pelaksanaan undang undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), penguatan kelembagaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) baik di pusat dan daerah, serta pelaksanaan pendidikan dan advokasi terkait keterbukaan informasi publik. Kebijakan *mainstreaming open government* akan diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pusat, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan UU KIP di Indonesia meliputi:

pemahaman publik tentang pentingnya keterbukaan informasi publik (*awareness* publik), peningkatan kualitas standar penyediaan informasi publik serta peningkatan partisipasi masyarakat ataupun stakeholders lainnya.

7. Penguatan sistem manajemen kinerja pembangunan nasional

Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain: penyempurnaan dan harmonisasi kebijakan yang mengatur tentang sistem manajemen kinerja pembangunan nasional; peningkatan sinergitas dan keterpaduan dalam manajemen pembangunan nasional yang efektif dan terintegrasi mulai dari aspek perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan termasuk didalamnya antar berbagai level instansi penyelenggaraan pembangunan mulai dari instansi pemerintah pusat (K/L), dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota). Strategi lainnya adalah pengembangan indikator kinerja pembangunan nasional yang integratif, pengembangan sistem *reward and punishment* kinerja pembangunan nasional dan pengembangan manajemen data kinerja pembangunan, pengendalian dan penyusunan laporan, dan penggunaannya secara terpadu dan *on-line*.

8. Peningkatan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah

Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk makin meningkatkan efektifitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Strategi yang ditempuh, antara lain: (1) Peningkatan penetapan APBD tepat waktu; (2) Penyerapan DAK dalam APBD sesuai dengan Petunjuk Teknis; (3) Peningkatan kapasitas keuangan daerah melalui peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah; (4) Penetapan Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu; (5) Penguatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan Daerah; (6) Penguatan kapasitas aparatur Daerah melalui Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah; (7) Penyelesaian Peraturan Daerah yang bermasalah; dan (8) Pelaksanaan Peningkatan Sinergi DPRD dan Pemerintah Daerah untuk Mendukung Kinerja Pemerintahan Daerah.

Isu Strategis 18: Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Sasaran

Sasaran utama pembangunan Bidang Hukum adalah terwujudnya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif.

Arah Kebijakan dan Strategi

Dalam rangka untuk mencapai sasaran pembangunan, arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang korupsi;
2. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan di bidang korupsi;
3. Meningkatkan pencegahan tindak pidana korupsi.

Arah kebijakan untuk meningkatkan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang korupsi dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Penyusunan melalui pembentukan maupun perubahan peraturan perundang-undangan dalam rangka implementasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan peraturan pendukung lainnya;
2. Harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka implementasi UNCAC dan peraturan pendukung lainnya.

Arah kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan di bidang korupsi dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan penanganan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
2. Peningkatan kerjasama hukum antar negara dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi di luar negeri; dan
3. Penguatan koordinasi dan monitoring evaluasi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Arah kebijakan untuk meningkatkan pencegahan tindak pidana korupsi dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan pendidikan anti korupsi bagi penyelenggara negara;
2. Peningkatan pendidikan anti korupsi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Isu Strategis 19: Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan

A. Daerah Tertinggal

Pembangunan daerah tertinggal tahun 2015-2019 ditujukan untuk percepatan pengurangan kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal dengan daerah maju. Pengurangan kesenjangan ini difokuskan pada (1) Pengembangan kelembagaan percepatan pembangunan daerah tertinggal, (2) Pemenuhan pelayanan publik dasar dan pengembangan perekonomian daerah dan (3) Peningkatan konektivitas daerah tertinggal dengan kawasan strategis, diprioritaskan pada ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang peningkatan kinerja pembangunan ekonomi daerah. Khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, perlu ada perhatian khusus karena mempunyai tantangan dan karakteristik yang berbeda dengan daerah tertinggal lainnya.

Sasaran

Memperhatikan permasalahan-permasalahan dan mendukung upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional maka, sasaran pembangunan daerah tertinggal pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal menjadi rata-rata 7,15 persen pada tahun 2015;
2. Berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi rata-rata 15,86 persen pada tahun 2015;
3. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di daerah tertinggal yang ditunjukkan oleh peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi rata-rata 70,48 pada tahun 2015

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal ditujukan pada pemenuhan kebutuhan pelayanan publik dasar dan mengoptimalkan pengembangan perekonomian masyarakat. Arah kebijakan ini selanjutnya ditempuh dengan strategi pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik ketertinggalan suatu daerah, sebagai berikut:

1. Penguatan kapasitas kelembagaan percepatan pembangunan daerah tertinggal, yaitu dengan melakukan sinergi dan sinkronisasi mulai

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antar pelaku pembangunan, baik pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan dunia usaha. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan-perundangan dengan didukung tata kelola pemerintahan yang baik sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan tidak cenderung sektoral dalam pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Pemahaman terhadap kebutuhan daerah tertinggal dengan mendorong upaya afirmatif dari seluruh pemangku kepentingan dan tetap mempertimbangkan karakteristik daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar serta kerawanan dalam bencana alam dan bencana sosial.

2. Peningkatan ketersediaan pelayanan publik dasar dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan diprioritaskan pada bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, air minum, listrik, dan telekomunikasi.

3. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang sesuai dengan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan keterkaitannya dengan pengembangan kawasan strategis lainnya khususnya dalam hal penyediaan prasarana ekonomi, kualitas SDM pelaku usaha, manajemen usaha, jejaring usaha, pemasaran hasil, akses permodalan, kemitraan usaha, akses inovasi teknologi, dan kebijakan yang afirmatif.

4. Peningkatan konektivitas daerah tertinggal dengan kawasan strategis, diprioritaskan pada ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang pada peningkatan kinerja pembangunan ekonomi daerah.

5. Percepatan pembangunan wilayah Papua dan Papua Barat diprioritaskan terhadap: (i) pengembangan ekonomi masyarakat asli Papua; (ii) akselerasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang menjangkau di kampung terisolir; (iii) membuka akses infrastruktur di pegunungan tengah dan wilayah terisolir Papua dan Papua Barat lainnya; (iv) pemihakan terhadap orang asli Papua; dan (v) peningkatan kemampuan kelembagaan pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Papua dan Papua Barat.

B. Kawasan Perbatasan

Agenda pembangunan kawasan perbatasan negara ditujukan untuk mewujudkan halaman depan negara sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga sebagaimana amanat

UU No. 17/2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Sasaran

Sasaran pembangunan kawasan perbatasan negara pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Berkembangnya 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan di sekitarnya.
2. Terwujudnya 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara sebagai simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya dan negara tetangga.
3. Terwujudnya 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara sebagai pintu gerbang internasional.
4. Terwujudnya 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara sebagai pos pemeriksaan lintas batas negara tetangga.

Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan kawasan perbatasan negara, maka arah kebijakannya adalah mempercepat pembangunan kawasan perbatasan negara untuk meningkatkan peran sebagai halaman depan negara yang maju dan berdaulat. Arah kebijakan ini selanjutnya ditempuh dengan strategi pembangunan sebagai berikut:

1. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara berdasarkan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan mempertimbangkan prospek (peluang) pasar negara tetangga. Pengembangan pusat pertumbuhan didukung dengan pembangunan infrastruktur penunjang, seperti transportasi, energi, dan telekomunikasi. Hal ini disertai dengan penguatan kelembagaan BNPP untuk menggerakkan sektor terkait dalam pengembangan kawasan.
2. Membangun sumber daya manusia (SDM) yang handal serta pemanfaatan pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam memanfaatkan dan mengelola potensi lokal, untuk mewujudkan kawasan perbatasan negara yang berdaya saing.
3. Membangun konektivitas simpul transportasi utama Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dengan lokasi prioritas (Kecamatan disekitarnya), Pusat Kegiatan Wilayah (Ibukota Kabupaten), dan Pusat

Kegiatan Nasional (Ibukota Provinsi) melalui jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan strategis nasional. Untuk kabupaten perbatasan laut (kepulauan), maka pelayanan transportasi laut perlu peningkatan kualitas dan intensitas pelayanan. Konektivitas simpul transportasi juga didorong untuk menghubungkan dengan negara tetangga.

4. Membuka akses transportasi darat, sungai, laut, dan udara di dalam maupun menuju Lokasi Prioritas (Lokpri) dengan jalan/moda/dermaga non status dan pelayanan keperintisan.

5. Melakukan transformasi kelembagaan lintas batas negara, yaitu *Custom, Immigration, Quarantine, Security* (CIQS) menjadi satu sistem pengelolaan yang terpadu.

6. Memperkuat pengelolaan batas wilayah negara dan sistem pertahanan dan keamanan yang mendukung pengembangan PKSN.

Isu Strategis 20: Pengelolaan Risiko Bencana

Sasaran

Memperhatikan permasalahan-permasalahan terkait penanggulangan bencana yang muncul dan terjadi selama ini ini dan dalam upaya mendukung sasaran pembangunan nasional, maka sasaran pokok penanggulangan bencana di tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan di pusat dan daerah.

2. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana.

3. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta terbangunnya budaya keselamatan dalam pengurangan risiko bencana.

4. Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola penanggulangan bencana.

Arah Kebijakan dan Strategi

Dengan memperhatikan sasaran penanggulangan bencana sebagai lintas bidang dan pengarusutamaan, maka prinsip dasar arah kebijakan penanggulangan bencana sebagai upaya strategis dan sistematis untuk meminimalkan potensi kerusakan dan kerugian akibat bencana adalah:

1. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana di pusat dan daerah dengan upaya: (i) penguatan kapasitas penanggulangan bencana di pusat dan daerah, terutama pada daerah yang rawan bencana; (ii) peningkatan kapasitas penanganan darurat, melalui penguatan koordinasi dengan

pemangku kepentingan terkait; (iii) penguatan koordinasi dan kapasitas pemulihan pasca bencana; dan penyediaan SPM yang terkait dengan penanggulangan bencana.

2. Peningkatan ketangguhan dalam menghadapi bencana dengan upaya: (i) pengenalan dan pemantauan ancaman bencana, terutama di kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan risiko tinggi terhadap bencana; (ii) pengurangan keterpaparan (*exposures*) dan kerentanan melalui penguatan kapasitas masyarakat dan penyediaan infrastruktur kesiapsiagaan menghadapi bencana; dan (iii) peningkatan kapasitas manajemen risiko sebagai upaya sistematis untuk meminimalkan korban jiwa dan potensi dampak kerusakan.

Isu Strategis 21: Sinergi Pembangunan Perdesaan

Sasaran

Sebagai acuan dasar sinergi pembangunan perdesaan, maka sasaran utama pembangunan perdesaan adalah menurunnya kemiskinan desa dan berkurangnya desa tertinggal, perbatasan, dan terisolir, serta meningkatnya desa-desa berkembang, semakin berketahanan, dan akhirnya menjadi desa mandiri, yang secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Berkurangnya Desa Tertinggal (Desa Tertinggal, Desa-desa di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar) dari 36 persen pada tahun 2011 menjadi 24 persen pada tahun 2015;
2. Meningkatnya jumlah desa berkembang (desa berketahanan ekonomi) dari 53 persen pada tahun 2011 menjadi 61 persen pada tahun 2015.
3. Meningkatnya desa mandiri yaitu desa yang berketahanan pangan, ekonomi, dan mendukung perekonomian kawasan lain dari 11 persen pada tahun 2011 menjadi 15 persen pada tahun 2015.

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan pembangunan perdesaan tahun 2015 adalah memenuhi pelayanan dasar di perdesaan, meningkatkan ketahanan sosial-ekonomi dan ekologi perdesaan, serta membangun keunggulan ekonomi kawasan perdesaan yang mampu meningkatkan daya saing. Arah kebijakan tersebut diwujudkan dalam beberapa strategi pembangunan perdesaan tahun 2015 sebagai berikut:

1. **Menekan tingkat kemiskinan dan kerentanan ekonomi di perdesaan** dengan upaya : (i) mendorong masyarakat desa untuk

mengembangkan perekonomian berbasis potensi wilayah, baik potensi sumber daya alam, maupun potensi sosial-budaya melalui pendampingan berkelanjutan; (ii) membangun mekanisme subsidi bagi kegiatan produktif bagi kegiatan produktif dan jaminan sosial bagi warga miskin di perdesaan; (iii) meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat perdesaan melalui fasilitasi dan pembinaan dalam pengembangan ekonomi perdesaan, bantuan permodalan/kredit, jaminan sosial, dan peningkatan kesempatan berusaha

2. Meningkatkan ketersediaan pelayanan dasar minimum di perdesaan dengan upaya : (i) optimalisasi penetapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Desa dan Indeks Desa; (ii) meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam menunjang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat perdesaan; (iii) meningkatkan ketersediaan pelayanan umum, pelayanan dasar minimum, peningkatan akses dan ketersediaan sarana prasarana transportasi, perumahan, permukiman, sanitasi dan air bersih, listrik, energi, komunikasi, jalan dan irigasi di perdesaan.

3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan dengan upaya meningkatkan fasilitasi dan pendampingan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan dan perlindungan masyarakat adat, termasuk meningkatnya taraf pendidikan, dan status kesehatan.

4. Mewujudkan tata kelola perdesaan yang baik dengan upaya : (i) mempersiapkan peraturan pendukung yang lebih operasional untuk pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; (ii) memfasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan pemerintahan desa, pelaporan dan akuntabilitas terkait kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa, termasuk di dalamnya peningkatan kapasitas dalam hal perencanaan pembangunan; prinsip-prinsip good governance (partisipasi, akuntabilitas dan transparansi); manajemen keuangan dan sistem akunting; serta pengawasan berbasis masyarakat; (iii) memfasilitasi peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga lembaga lainnya di tingkat desa sebagai upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dan penyelenggaraan musyawarah Desa, serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan; (iv) mengumpulkan dan mengkompilasikan data

desa yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun perencanaan dan pembangunan desa.

5. Meningkatkan optimalisasi tata ruang perdesaan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan upaya : (i) pengendalian penataan ruang melalui fasilitasi dalam penyusunan RDTR, monitoring dan law enforcement terhadap lahan pertanian berkelanjutan; (ii) mengembangkan mekanisme insentif kepada daerah (petani) yang berhasil menekan konversi lahan pertanian; (iii) menciptakan mekanisme kelembagaan land bank system; (iv) memfasilitasi peningkatan kesadaran pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan kemandirian pangan serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, dan berwawasan mitigasi bencana.

6. Mendorong keterkaitan desa-kota dengan upaya : (i) Mendorong penyediaan sarana dan prasarana transportasi dan telekomunikasi termasuk ketersediaan jalan poros desa, jalan produksi, moda transportasi, serta jembatan penghubung antardesa dan antara desa dengan pusat pertumbuhan terdekat; (ii) membangun pusat-pusat pembangkit listrik tenaga air, tenaga surya, dan sumber energi terbarukan dari sumberdaya lokal (non PLN), yang menyediakan energi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan produksi, menuju kemandirian energi di perdesaan; (iv) mendorong penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran dalam menunjang kegiatan agribisnis dan industrialisasi di perdesaan; (v) pengembangan 10 Pusat Kawasan Perkotaan Baru menjadi Pusat Pertumbuhan dan Embrio Kota Kecil dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan; (vi) pengembangan 30 persen pusat kawasan Agropolitan/Minapolitan menjadi embrio Kota Kecil.

Isu Strategis 22: Perkuatan Ketahanan Pangan

Sasaran

Sasaran utama pembangunan isu strategis perkuatan ketahanan pangan pada tahun 2015 adalah:

1. Terwujudnya peningkatan produksi bahan pangan utama, yaitu: padi 73,4 juta; kedelai 0,9 juta ton; jagung 20,0 juta

ton; gula 2,9 juta ton; daging sapi 476,8 ribu ton; dan daging unggas 1,1 juta ton.

2. Tercapainya peningkatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
3. Tercapainya produksi hasil ikan (diluar rumput laut) ditargetkan sebesar 13,5 juta ton, yang terdiri dari perikanan tangkap sebesar 6,2 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 7,3 juta ton
4. Tercapainya produksi garam rakyat 2,5 juta ton
5. Tercapainya konsumsi ikan masyarakat sebesar 40,9 kg/kapita/tahun.
6. Tercapainya konsumsi kalori pada tahun 2015 minimal mencapai 2.011 kkal/kapita/hari
7. Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang mencapai 82,9 pada tahun 2015.
8. Tercapainya peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi, irigasi air tanah, rawa dan tambak seluas 628,2 ribu ha.

Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, arah kebijakan perkuatan ketahanan pangan pada tahun 2015, yaitu :

1. Peningkatan Produksi Padi dan Sumber Pangan Protein

Sesuai dengan RPJMN 2015-2019, ketahanan pangan diprioritaskan dari produksi dalam negeri dan impor dilakukan sebagai instrumen penstabil harga apabila produksi dalam negeri terganggu pada waktu-waktu tertentu.

Langkah-langkah utama dalam rangka peningkatan kapasitas produksi pangan di dalam negeri terutama melalui: (1) Pengelolaan Tanaman Terpadu padi seluas 350 ribu ha yang didukung dengan subsidi pupuk dan benih tepat sasaran (petani penerima); (2) Penambahan areal pertanian pangan baru seluas 65 ribu ha di antaranya dengan mendayagunakan lahan transmigrasi; (3) Upaya pengendalian konversi lahan sawah produktif: pemetaan untuk memasukkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah; (4) Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, air tanah dan tambak serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, irigasi air tanah, rawa dan tambak; (5) Peningkatan jumlah dan kapasitas penyuluh pertanian dan perikanan, serta memperkuat kelembagaan penyuluh dan kelembagaan petani; (6) Penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan benih tanaman pangan unggul, dan bibit unggul peternakan dan perikanan; (7) Dukungan penerapan inovasi

teknologi budidaya pertanian dan perikanan yang dapat meningkatkan produktivitas, efisien dan adaptif terhadap perubahan iklim; (8) Pengendalian impor dan ekspor bahan pangan dengan agar tidak mengganggu peningkatan produksi pangan di dalam negeri; (9) Melanjutkan Gerakan Peningkatan Produksi Pangan yang Berbasis Korporasi (GP3K) dan penyusunan rencana swasta/BUMN di bidang pangan melalui pengembangan *food estate*. Selain langkah-langkah yang mendukung secara langsung peningkatan produksi pangan tersebut di atas, maka perlu adanya langkah-langkah yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan petani sebagai insentif/pendorong untuk tetap menjamin keberlanjutan produksi pangan.

Selanjutnya, terkait dengan pengembangan perikanan untuk mendukung ketahanan pangan dilakukan peningkatan produksi, produktivitas, dan kontinuitas produksi perikanan melalui: (1) peningkatan ketersediaan dan kualitas input produksi, mencakup induk dan benih ikan, pakan, dan obat-obatan, (2) pengembangan teknologi budidaya intensif dan ekstensifikasi marikultur di lokasi-lokasi yang tepat, (3) pilot peningkatan pelayanan dan manajemen pelabuhan perikanan sesuai dengan standar internasional, (4) melanjutkan upaya penguatan struktur armada penangkapan ikan dan kemampuan operasionalnya, (5) revitalisasi tambak-tambak dan kolam yang tidak produktif, (6) melanjutkan pengembangan kawasan sentra produksi komoditas perikanan keunggulan, (7) pendayagunaan potensi perairan umum daratan untuk pengembangan perikanan yang ramah lingkungan, (8) peningkatan efektivitas dan peran karantina ikan untuk pengendalian penyakit, jaminan mutu produksi dan keamanan pangan, (9) penguasaan dan inovasi teknologi perbenihan dan pembesaran komoditas perikanan strategis, (10) pengembangan teknologi pembuatan pakan berkualitas dan kompetitif dengan sumber bahan baku lokal, (11) sinergitas pendayagunaan ruang untuk menjamin kepentingan produksi perikanan, dan (12) pengembangan teknologi budidaya perikanan yang ramah lingkungan.

2. Peningkatan Kelancaran Distribusi Pangan dan Penguatan Stok Pangan Dalam Negeri

Dalam rangka memperlancar distribusi produk pangan akan dilakukan langkah-langkah: (1) menjaga dan memantau kelancaran distribusi input produksi dan produk pangan pokok; (2) pemantauan dan pengendalian

harga pangan; (3) peningkatan jumlah cadangan beras pemerintah; (4) peningkatan peran BUMN untuk menjaga ketersediaan pangan pokok di daerah perbatasan; (5) pengelolaan impor bahan pangan untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan (6) pengendalian impor pada saat-saat musim melaut dan produksi perikanan melimpah. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini akan diselaraskan dan untuk mendukung kebijakan Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi.

3. Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat

Perbaikan kualitas pangan dan gizi dilakukan untuk mendukung perbaikan kualitas SDM, akan dilakukan melalui: (1) Peningkatan produksi bahan pangan non padi dan pangan sesuai kondisi lokal; (2) Pendidikan tentang gizi yang seimbang bagi keluarga dengan memanfaatkan fasilitas Posyandu; (3) Peningkatan produksi protein hewani (bagian dari peningkatan produksi sumber pangan protein); (4) Peningkatan komposisi penggunaan bahan pangan lokal dalam industri pangan olahan. (5) Penyediaan dan penyaluran bahan pangan bersubsidi bagi masyarakat yang kurang mampu (RASKIN).

Untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan dilakukan melalui: (1) Pemantauan perkembangan harga pangan pokok dan pengendalian fluktuasi harga dengan menjaga kelancaran distribusi, pengawasan pasar dan operasi pasar jika diperlukan; (2) penyediaan cadangan beras pemerintah, cadangan kedelai dan gula; (3) Peningkatan peranan Perum Bulog dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok di daerah terpencil; (4) Pengaturan impor dan ekspor bahan pangan untuk stabilisasi harga pangan dengan tetap tidak mengganggu produksi; (5) Kerjasama transportasi kapal laut untuk angkutan ternak; perbaikan infrastruktur jalan untuk mendukung kelancaran distribusi input produksi dan hasil produksi pangan.

4. Mitigasi Gangguan Terhadap Ketahanan Pangan

Untuk itu menjaga terhadap dampak dan resiko gangguan perubahan iklim terhadap ketahanan pangan, akan dilakukan: (1) Penyediaan cadangan bantuan input produksi bagi petani yang terkena puso; (2) Penyusunan instrumen pengendalian resiko (kalender tanam, waktu melaut) dan uji coba asuransi pertanian dan fasilitasi asuransi nelayan; (3) Pengembangan benih yang tahan terhadap perubahan iklim; (4)

Perluasan penerapan teknologi hemat air, benih tahan perubahan iklim, dan pola tanam yang sesuai dengan perubahan iklim ekstrim didukung peningkatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; (5) pengembangan sistem perlindungan bagi nelayan yang tidak dapat melaut karena gelombang besar yang berkepanjangan; (6) penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan; (7) penetapan sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan (8) investasi pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T).

Isu Strategis 23: Peningkatan Ketahanan Energi

Sasaran

Sasaran utama prioritas nasional peningkatan ketahanan energi pada tahun 2015 yang ingin dicapai adalah:

1. Produksi minyak bumi sebesar 912 ribu barel per hari.
2. Produksi gas bumi sebesar 1.248 ribu barel setara minyak per hari dengan pemanfaatan di dalam negeri sebesar 50 persen.
3. Produksi batubara sebesar 421 juta ton dengan pemanfaatan di dalam negeri sebesar 97 juta ton.
4. Bauran energi baru dan terbarukan sebesar 6 persen.
5. Rasio elektrifikasi sebesar 83,18 persen.

Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, arah kebijakan peningkatan ketahanan energi pada tahun 2015, yaitu:

1. **Peningkatan cadangan, pasokan energi primer dan bahan bakar**, langkah kebijakan yang akan dilakukan meliputi: (1) membina kerjasama dengan kontraktor KKS dalam melakukan penelitian, kajian kelayakan, dan *pilot project* penerapan EOR; (2) meningkatkan kegiatan survei untuk menyiapkan pengembangan lapangan migas dan identifikasi cadangan minyak dan gas; (3) meningkatkan promosi dan penawaran lapangan migas untuk dikembangkan, termasuk lapangan gas non-conventional, yakni CBM; (4) meningkatkan produksi bahan bakar dan pengelolaan dalam pendistribusian bahan bakar bersudisi; dan (5) mengembangkan bahan bakar sintetik, baik dalam bentuk gas maupun cair yang berasal dari batubara kalori rendah, untuk mensubstitusi bahan bakar minyak.
2. **Peningkatan kapasitas dan tingkat pelayanan infrastruktur energi**, langkah kebijakan yang akan dilakukan meliputi: (1) mempertahankan

kapasitas produksi bahan bakar melalui *up-grading (revamping)* kilang BBM dan BBG yang saat ini sudah beroperasi; (2) meningkatkan kapasitas penyimpanan bahan bakar dan hasil olahan, termasuk cadangan operasional dan penyangga, dan kapasitas pelayanan pendistribusian bahan bakar di daerah-daerah terpencil; dan (3) mengembangkan pemanfaatan gas, terutama untuk rumah tangga dan transportasi.

3. **Efisiensi dalam pengelolaan energi**, melalui: (1) mengembangkan insentif dan mekanisme pendanaan dalam pembiayaan upaya penghematan energi; dan (2) meningkatkan kemampuan teknis manajer dan auditor energi, perusahaan layanan energi (*Energy Service Company – ESCOs*), dan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghematan energi.

4. **Peningkatan peranan EBT di dalam bauran energi**, langkah yang akan dilakukan meliputi: (1) meningkatkan pemanfaatan aneka energi baru dan terbarukan untuk pembangkit listrik; dan (2) meningkatkan pemanfaatan BBN biofuel untuk transportasi, melalui penyediaan bahan baku, pengembangan komoditas yang potensial/varietas unggul, dan penyempurnaan mekanisme *off taker* BBN.

Isu Strategis 24: Percepatan Pembangunan Kelautan

Sasaran

Mengoptimalkan Pemanfaatan Keekonomian dari Potensi Pulau-Pulau Kecil. Untuk kegiatan tersebut, sasaran tahun 2015 adalah: (1) Terwujudnya peningkatan kemandirian Pulau-Pulau Kecil Terluar/Terdepan (PPKT) berpenduduk di 15 lokasi, termasuk memenuhi sarana dan prasarana serta fasilitas dasar dan ekonomi; (2) Terealisasinya pengembangan 3 gugus pulau sebagai sentra wisata bahari; (3) Terlaksananya revitalisasi kawasan pesisir menjadi pusat pengembangan ekonomi di 7 kawasan. (4) peningkatan infrastruktur di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang tertinggal dan terpencil

Penyusunan Rencana Aksi Tata Kelola, Zonasi dan Pengamanan Wilayah Yuridiksi, termasuk Penetapan Batas Wilayah Laut Indonesia, dengan sasaran mencakup : (1) Tersusunnya Roadmap dan Rencana Aksi Nasional Pembangunan Kelautan; (2) Terwujudnya peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan laut dan kawasan konservasi

laut, termasuk memperkuat dan mengembangkan Kerjasama Regional maupun Internasional dalam pengelolaan wilayah laut, seperti program CTI, SSME dan lainnya; (3) Terwujudnya penyelesaian tata batas dengan 9 negara (Malaysia, Singapura, Thailand, India, Australia, Vietnam, Filipina, Palau, Timor Leste) melalui perundingan perbatasan dan penguatan diplomasi; dan (4) Tersusunnya rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum di Laut, dengan sasaran mencakup: (1) Meningkatnya ketaatan pelaku usaha kelautan sebesar 45 persen dan ketaatan pelaku usaha perikanan dalam pemanfaatan sumber daya sebesar 85 persen; (2) meningkatnya cakupan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan menjadi 12,8 persen; (2) Meningkatnya penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan (*illegal fishing*) sebanyak 80 persen.

Peningkatan Konektivitas Laut dan Industri Maritim, dengan sasaran mencakup : (1) Bertambahnya penyediaan 10 kapal laut perintis; (2) Pembangunan/rehabilitasi 26 pelabuhan laut perintis; (3) Tersedianya 80 lintas subsidi perintis angkatan laut; dan (4) Tersusunnya rancangan pengembangan industri maritim dalam pendukung pelaksanaan azas cabotage.

Peningkatan Pengamanan Pesisir dan Konservasi Perairan, dengan sasaran mencakup : (1) Meningkatnya kapasitas pengelolaan yang efektif di 10 kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil; (2) Bertambahnya luas kawasan konservasi seluas 500 ribu Ha atau menjadi 16,5 juta ha; (3) Terwujudnya pemulihan kawasan pesisir yang rusak di sebanyak 7 kawasan; dan (4) Membaiknya kerentanan masyarakat terhadap bencana di 22 kawasan.

Peningkatan Kapasitas SDM Kelautan, Inovasi Iptek Kelautan, Wawasan dan Budaya Bahari, dengan sasaran meliputi : (1) Terwujudnya Pengembangan *pilot project* pemanfaatan sumberdaya kelautan; (2) Tersedianya tenaga kerja terdidik kelautan dan perikanan sebanyak 6.250 orang dan yang terlatih sebanyak 15.000 orang; dan (3) meningkatnya pemahaman dan wawasan bahari.

Arah Kebijakan dan Strategi

1. Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil, terutama Pulau-Pulau Kecil Terluar/ Terdepan. Arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan mencakup (1) Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar, seperti listrik dan air bersih di pulau-pulau kecil terluar berpenduduk dan (2) mengembangkan kerjasama lintas instansi terkait/antar pemda setempat dalam mendukung eksistensi NKRI di pulau-pulau terdepan/terdepan yang berpenduduk dan tidak berpenduduk;

2. Peningkatan Tata Kelola dan Pengamanan Wilayah Juridiksi serta Batas Laut Indonesia. Arah kebijakan dan strategi difokuskan pada: (1) Penyusunan *Roadmap* Pembangunan Kelautan dan Rencana Aksi Nasional Kelautan Indonesia 2015-2019 serta peningkatan koordinasi lintas instansi dalam pelaksanaan pembangunan kelautan; (2) Penyelesaian tata batas laut yang belum tuntas dengan negara tetangga, melalui perundingan perbatasan; (3) Penyelesaian pembakuan nama pulau-pulau ke PBB melalui identifikasi potensi, pemetaan dan penamaan pulau-pulau kecil; (4) Memperkuat dan mengembangkan kerjasama regional maupun internasional dalam pengelolaan dan konservasi wilayah laut, seperti program CTI, SSME dan lainnya; dan (5) penyusunan zonasi wilayah pesisir di beberapa provinsi/kab/kota dan penyusunan peraturan terkait penataan ruang laut.

3. Peningkatan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Pengendalian Kegiatan Ilegal: Arah kebijakan dan strategi difokuskan pada (i) peningkatan sarana prasarana, cakupan pengawasan, jumlah hari operasi, dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengawasan sumber daya kelautan; (ii) peningkatan koordinasi lintas instansi dalam pengawasan wilayah laut dan pengamanan wilayah dari pemanfaatan sumber daya kelautan yang merusak; (iii) mengintensifkan penegakan hukum dan pengendalian *Illegal fishing* serta kegiatan yang merusak di laut; dan (iv) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dari kegiatan yang merusak sumber daya laut

4. Penguatan Konektivitas Laut dan Industri Maritim. Arah kebijakan dan strategi difokuskan pada: (1) Pembangunan pelabuhan perintis dan prasarana pendukungnya dalam kerangkapenguatan konektivitas dengan media laut; (2) Penambahan armada dan moda transportasi perintis di

wilayah-wilayah remote dan potensial; (3) Penambahan rute dan frekuensi transportasi perintis; dan (4) Penguatan kemampuan Industri maritim.

5. Peningkatan Pemanfaatan Bioresources Kelautan , Pengelolaan Pesisir dan Konservasi Perairan. Arah kebijakan dan strategi difokuskan pada: (1) menyempurnakan dan melengkapi sistem perijinan dan investasi di pulau-pulau kecil; (2) pembangunan sarana dan prasarana pendukung pengembangan ekonomi pulau kecil dan kawasan konservasi; (3) penyusunan tata ruang dan zonasi terutama di kawasan konservasi dan pulau-pulau yang akan dikembangkan, termasuk penataan zonasi yang tepat, sejalan dengan kepentingan pengembangan perikanan laut; (4) Meningkatkan data dan informasi terkait dengan ketersediaan dan kondisi sumber daya kelautan lainnya seperti energi laut, keanekaragaman hayati untuk pemanfaatan dalam skala ekonomi; (5) Penambahan luasan kawasan konservasi; dan (6) Rehabilitasi kawasan pesisir yang rusak, pengendalian bencana alam dan mitigasi dampak perubahan iklim, penanaman vegetasi pantai termasuk mangrove, peningkatan kesiapan dan ketahanan desa pesisir dalam menghadapi dampak bencana dan perubahan iklim, serta pengurangan pencemaran wilayah pesisir dan laut.

6. Peningkatan Kapasitas SDM Kelautan, Inovasi Iptek, dan Pengembangan Wawasan dan Budaya Bahari. Arah kebijakan dan strategi difokuskan pada: (1) Pengembangan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait dengan peningkatan wawasan bahari; (2) peningkatan kemampuan inovasi iptek terkait dengan pengelolaan sumberdaya kelautan dan sinergi iptek kelautan; (3) pengembangan riset dan survei kelautan; dan (4) Peningkatan kesadaran dan budaya bahari secara terpadu.

Isu Strategis 25: Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran

1. Terlaksananya pelestarian keanekaragaman hayati pada kawasan lindung, agro-ekosistem dan kawasan nonlindung/ produksi;
2. Terlaksananya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan untuk kegiatan ekonomi;
3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang tercermin di dalam indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 64,5;

4. Menguatnya upaya penanganan perubahan iklim (mitigasi dan adaptasi) dan sistem peringatan dini cuaca dan iklim;

Arah Kebijakan dan Strategi

1. Mengembangkan upaya konservasi dan rehabilitasi keanekaragaman hayati: hutan, pertanian, laut dan pesisir, karst (in-situ dan ex-situ), dan pengetahuan tradisional;

2. Mengembangkan kebijakan pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati yang bernilai tambah (bio-prospecting) melalui riset, valuasi ekonomi, dan pengembangan insentif dan disinsentif: pangan, farmasi (termasuk pengembangan jamu), energi, material, jasa lingkungan, dan industri kerahayuan;

3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melalui: pengendalian pencemaran lingkungan; penurunan beban pencemaran air, udara, dan tanah; identifikasi dan penilaian kawasan ekosistem rusak; fasilitasi pemulihan tutupan lahan/hutan, kawasan bekas tambang, kawasan terkontaminasi B3, kawasan pesisir dan laut; pemulihan badan air (danau, sungai, situ/embung, waduk); peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup di daerah; penegakan hukum lingkungan; serta penguatan pemantauan dan data serta informasi lingkungan hidup.

4. Memperkuat penanganan perubahan iklim dan sistem peringatan dini cuaca dan iklim: penurunan emisi GRK di bidang pertanian, kehutanan dan lahan gambut, energi dan transportasi, industri, dan pengelolaan limbah; penguatan pelaksanaan REDD+; pengembangan percontohan upaya adaptasi perubahan iklim di wilayah rentan; Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS); dan Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS).

Strategi untuk melaksanakan arah kebijakan di atas adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan upaya konservasi dan rehabilitasi keanekaragaman hayati, meliputi:

- a. Kebijakan penetapan kawasan konservasi dan pelestariannya;
- b. Penataan ruang dan perencanaan pengelolaan kawasan konservasi dan rehabilitasi;

- c. Kebijakan perlindungan pengetahuan tradisional;
 - d. Kerjasama pengembangan kebun keanekaragaman hayati dengan pemerintah daerah.
2. Mengembangkan kebijakan pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati, melalui:
- a. Gerakan penyadaran pentingnya pengelolaan keanekaragaman hayati untuk mendukung pembangunan di bidang pangan, bioenergi, kosmetika, obat-obatan (termasuk jamu), dan jasa lingkungan.
 - b. Meningkatkan pemanfaatan potensi keanekaragaman hayati yang sudah terbukti bermanfaat, melalui pengembangan riset dan teknologi yang ramah lingkungan; pengelolaan informasi; pengembangan kerjasama antara industri dan lembaga riset Indonesia.
 - c. Meningkatkan upaya perlindungan keanekaragaman hayati (spesies, ekosistem, dan genetik), melalui pelestarian secara in-situ maupun eks-situ; penangkaran flora dan fauna yang terancam punah.
 - d. Mengembangkan kerjasama pemerintah, swasta, masyarakat, institusi penelitian, dan perguruan tinggi untuk melakukan akselerasi pengembangan ekonomi berbasis keanekaragaman hayati.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melalui:
- a. Pengembangan dan penguatan pemantauan dan sistem informasi lingkungan hidup, serta penyempurnaan indeks kualitas lingkungan hidup;
 - b. Pengembangan metodologi perhitungan dan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan daerah;
 - c. Penguatan kriteria Adipura dan perluasan cakupan PROPER;
 - d. Penegakan hukum lingkungan di tingkat nasional dan daerah;
 - e. Fasilitasi pelaksanaan pemulihan ekosistem rusak dengan pemerintah daerah dan pihak swasta.
4. Memperkuat penanganan perubahan iklim dan sistem peringatan dini cuaca dan iklim, melalui:
- a. Standardisasi kegiatan RAN/RAD-GRK dan *review baseline* dan proyeksi penurunan emisi beserta metodologinya dalam rangka pelaksanaan kaji ulang RAN-GRK;
 - b. Penguatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN/RAD-GRK;
 - c. Melaksanakan kajian kerentanan di daerah prioritas dan pengembangan daerah percontohan RAN-API;

- d. Pengembangan indikator adaptasi untuk pemantauan dan evaluasi;
- e. Pengadaan dan pemeliharaan sarana untuk menunjang kerapatan, kecepatan dan ketepatan MEWS dan CEWS.

4.2.3. Isu Strategis Pembangunan Provinsi

4.2.3.1. Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir (2009 - 2012) menunjukkan kinerja yang selalu meningkat bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi Nasional. Gejolak perekonomian global yang terjadi tahun 2013 mempengaruhi melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional termasuk juga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut selayaknya juga diikuti dengan kualitas pertumbuhan yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan penurunan disparitas antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selayaknya juga diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia yang diindikasikan dari meningkatnya nilai IPM. Berdasar beberapa indikator tersebut kualitas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berada pada kategori "memuaskan" .

Kualitas pertumbuhan yang terkategori memuaskan belum sepenuhnya merepresentasikan maksimalnya kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dibutuhkan kinerja yang lebih sinergis terutama pada peningkatan daya beli masyarakat dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

4.2.3.2. Peningkatan kemampuan dan daya saing Koperasi dan UMKM

Isu strategis yang mengemuka pada urusan Koperasi dan UMKM dalam 5 tahun kedepan adalah peningkatan skala usaha UMKM yang meliputi (a) Peningkatan produktivitas UMKM terkait dengan kualitas SDM, akses ke

pembiayaan dan layanan keuangan lainnya); (b) Peningkatan inovasi dan standarisasi; (c) penguatan kelembagaan usaha UMKM (kemitraan) dan (d) perluasan pemasaran. Sedangkan terkait dengan pemberdayaan koperasi, peningkatan tata kelola usaha koperasi menjadi isu yang strategis yaitu peningkatan kontribusi anggota dalam memajukan usaha koperasi dan penataan tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi.

4.2.3.3. **Disparitas Wilayah**

Adanya disparitas wilayah yang Antara lain dapat dilihat dari PDRB Perkapita kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, yaitu antara Kabupaten/Kota yang memiliki PDRB perkapita besar yaitu Kota Kediri, Wilayah Utara (Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo), dan Kota Malang dengan Kabupaten/Kota yang memiliki nilai PDRB perkapita kecil ada di Wilayah Selatan (Pacitan, Trenggalek, Ponorogo), Tapal Kuda (Bondowoso, Jember), Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep).

4.2.3.4. **Infrastruktur**

Isu strategis terkait infrastruktur terdiri dari:

1. Potensi terjadinya kecelakaan penerbangan (Hazzard) akibat tingginya kepadatan lalu-lintas Sisi Udara Bandara Juanda Enclave yang sudah mencapai 1 menit 20 detik serta inefisiensi dari maskapai penerbangan akibat kurangnya kapasitas runway dan taxiway.
2. Dibutuhkan Pengembangan Bandara Internasional Sipil/komersial yang lebih luas sebagai Multiple Airport melalui investasi swasta (KPS) dengan Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk mengantisipasi pertumbuhan perkotaan wilayah Surabaya-Sidoarjo.
3. Dibutuhkan penyusunan Rencana Induk Provinsi (RIP) terkait pengembangan transportasi Darat, Laut dan Udara dalam konteks integrasi pelayanan antar moda untuk meningkatkan perencanaan dan penanganan transportasi antar kota guna mengantisipasi permasalahan kompleks dan sistemik akibat bertambahnya populasi penduduk, perpindahan serta pergerakan barang dan jasa
4. Peningkatan efisiensi distribusi angkutan barang melalui perpanjangan Rel Kereta Api Double Track Dari dermaga pelabuhan Tj. Perak menuju

- Pelabuhan Tj. Tembaga Probolinggo, hingga Pelabuhan Tj. Wangi yang perlu segera di masukkan dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.
5. Dibutuhkan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas di Jawa Timur untuk mengundang investasi internasional melalui pelabuhan.
 6. Peningkatan harmonisasi Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Provinsi) berupa Pembangunan fasilitas sisi darat diantaranya pembangunan Pergudangan pada area reklamasi Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo, pembangunan VVIP di terminal di Bandara Abd Saleh serta pengembangan kawasan SURAMADU oleh BPWS dan Pemerintah Daerah.
 7. Kebutuhan akan pertambahan panjang jalan Nasional (Tol dan Non Tol), Jalan Provinsi maupun Jalan Kabupaten/Kota.
 8. Percepatan pembangunan Flyover yang sudah dilakukan pengukuran dan menjadi perhatian masyarakat namun belum ada tindak lanjut, seperti Flyover Medaeng, Flyover Perempatan Raya Gedangan, Flyover Pasar Induk Agrobisnis dan Flyover Kertosono.
 9. Peningkatan Percepatan Pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur terkait percepatan penggantian penggunaan lahan perhutani tuntas 2016;
 10. Peningkatan dan pembangunan jalan Raya Gresik untuk mendukung aksesibilitas kegiatan kepelabuhanan Teluk Lamong yang merupakan pengembangan kapasitas dari Pelabuhan Tanjung Perak.
 11. Percepatan Pembangunan Jalan Tembus Lawang-Batu.
 12. Guna mereduksi bencana banjir dan kekeringan masih diperlukan gagasan realistis dan strategis antara lain dengan pengalihan sebagian debit banjir dengan cara sudetan dan pembangunan waduk lapangan dengan lapisan Geomembran.
 13. Selain infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat masih memerlukan perhatian dan percepatan, antara lain ketersediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan serta sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman.
 14. Pengembangan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan air minum dan persampahan secara regional melalui penyediaan Sistim Pengelolaan Air Minum (SPAM) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota.

15. Dalam pengelolaan sumber daya air di Jawa Timur terdapat permasalahan-permasalahan antara lain, lahan kritis pada daerah aliran sungai, terjadinya pencemaran pada sumber-sumber air, bencana banjir dan kekeringan yang terjadi setiap tahun, kurangnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air.

4.2.3.5. **Pengangguran**

Isu strategis terkait pengangguran di Jawa Timur masih menyimpan masalah ketenagakerjaan yang cukup serius, diantaranya yakni: upah pekerja yang masih rendah, jaminan/perlindungan sosial tenaga kerja, dan skil/keahlian tenaga kerja yang masih minim.

Selain masalah di atas, pengangguran juga memiliki korelasi dengan perubahan struktur perekonomian. Pergeseran aktivitas sektor industri yang lebih dominan juga memainkan peran terhadap perubahan tenaga kerja. Pengembangan industri pada dasarnya memiliki tujuan meningkatkan kualitas hidup bangsa agar menjadi bangsa yang modern dan maju serta meningkatkan kemandirian. Untuk itu, kebijakan pengembangan industri akan dititikberatkan pada:

- industri yang bertumpu pada sumberdaya alam dalam negeri agar mampu memberikan nilai tambah yang lebih karena dampak gandanya juga akan terlihat dari pembangunan ekonomi nasional.
- industri yang padat karya, karena kita tahu sendiri bahwa bangsa kita memiliki jumlah penduduk yang banyak dengan pertumbuhan penduduk yang juga tinggi dan dapat dimobilisasi dengan berbagai program untuk meningkatkan kualitas.
- industri yang padat teknologi sebagai landasan bangsa untuk memasuki era perkembangan teknologi maju serta andalan masa depan dalam penguasaan teknologi yang lebih maju.

Selain itu, sekitar 42,5 persen dari seluruh tenaga kerja Jawa Timur terserap di sektor pertanian, namun sektor ini memiliki produktivitas paling rendah dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya. Untuk mengurangi kemiskinan di Jawa Timur, pemerintah provinsi butuh strategi untuk menarik pekerja ke sektor yang memiliki produktivitas lebih tinggi. Strategi juga dibutuhkan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian, serta mempromosikan usaha non-tani seperti industri pedesaan skala kecil.

4.2.3.6. **Energi**

Ratio ketersediaan listrik Jawa Timur sebesar 70,53 persen. Selebihnya sebesar 29 persen adalah ketersediaan listrik yang sudah dan dalam proses diusahakan sendiri (captive power) untuk berbagai kepentingan baik swasta maupun masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan gaya hidup, maka kebutuhan energy juga akan meningkat.

Kontribusi pertambangan sebesar 2,08 persen terhadap total PDRB Jawa Timur. Eksploitasi sumber daya mineral tersebut belum semuanya sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti tanpa ijin atau belum sesuai dengan ketentuan teknik/tata cara penambangan yang tepat yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Sampai dengan Tahun 2012, pertambangan tanpa ijin di Jawa Timur seluas 1.438,08 hektar tersebar di 20 Kabupaten, dengan upaya penertiban per tahun berkisar 213,23 hektar.

4.2.3.7. **Lingkungan Hidup**

Sehubungan dengan pelaksanaan RAN-GRK, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Peraturan Gubernur No. 67 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK), sebagai salah satu upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Pada periode sebelumnya, pelaksanaan aksi adaptasi dan perubahan iklim di Provinsi Jawa Timur telah dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berdasarkan amanah Pergub dimaksud, direncanakan program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim akan dilaksanakan secara terpadu dan lebih intensif, dalam rangka menurunkan emisi GRK di Jawa Timur, yakni melalui 6 (enam) sector utama yaitu kehutanan, pertanian, energy, transportasi, perindustrian dan pengelolaan limbah. Hasil perhitungan emisi GRK Jawa Timur pada Tahun 2010 adalah 77 juta ton eq CO₂. Seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, proyeksi emisi GRK Jawa Timur pada Tahun 2020 adalah sebesar 121 juta ton CO₂ eq. Berdasarkan upaya adaptasi dan mitigasi sebagaimana dimuat dalam RAD GRK Jawa Timur, maka diperkirakan akan dapat menurunkan

emisi GRK Jawa Timur sebesar 28,9% atau menjadi sebesar 108 juta ton CO₂ eq.

Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, di dalam dan luar kawasan hutan serta kawasan pesisir dan laut, disebabkan aktivitas manusia dan dampak perubahan iklim. Dampak yang dirasakan adalah hilang atau tidak berfungsinya sumber mata air, kekeringan di musim kemarau dan longsor/banjir di musim hujan. Sumber mata air DAS Brantas seluruhnya semula berjumlah 1.577 sumber mata air. Berdasarkan hasil identifikasi di Malang Raya dan Kota Batu, dari 703 sumber mata air, yang berfungsi 344 sumber mata air. Adapun yang memiliki debit 5 liter/detik hanya 13 sumber mata air saja (diolah dari berbagai sumber, Tahun 2012). Selanjutnya kualitas air sungai dimaksud, telah mengalami pencemaran dari limbah domestic dan limbah industry. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air Sungai Brantas, telah tercapai penurunan beban pencemaran sesuai target RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009-2014. Namun kualitas air dimaksud belum memenuhi Baku Mutu Lingkungan (BML) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

4.2.3.8. **IPM**

Kondisi IPM di Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perbaikan yang cukup baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa persoalan yang sekiranya perlu diperhatikan agar IPM mengalami peningkatan yang lebih baik. Sebagai contoh, pada komponen angka harapan hidup, ini masih perlu ditingkatkan mengingat kondisi kesehatan di masyarakat masih cukup rendah. Dari data BPS dapat dilihat bahwa masih sekitar setengah dari jumlah penduduk yang menggunakan tempat pembuangan tinja dengan septik tank. Artinya, banyak penduduk yang belum benar-benar memperhatikan kesehatan. Masalah ini jika tidak diperhatikan secara serius maka akan berdampak pada penurunan angka harapan hidup yang akhirnya berdampak pada nilai IPM.

Kenaikan IPM dikarenakan adanya berbagai program pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota, seperti program di bidang kesehatan, pendidikan maupun ekonomi dan peningkatan kualitas sarana prasarana

masyarakat lainnya. Keberhasilan program tersebut juga tergantung pada pola pikir masyarakat setempat dalam pemanfaatan sarana. Perlu disadari bahwa investasi pembangunan dalam rangka pembangunan manusia yang dipotret dalam angka IPM, hasilnya tidak langsung berdampak di tahun berikutnya. Sebagai contoh usaha peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS) yang dimanifestasikan dalam program wajar dikdas 9 tahun (pendidikan dasar), maka hasilnya akan terasa pada beberapa tahun kemudian.

4.2.3.9. **Ketahanan Pangan dan Pertanian**

Jawa Timur memiliki luasan lahan sawah sebesar 1.017549,73 hektar. Sebaran pemanfaatan potensi ini terwujud dalam bentuk surplus komoditas pangan yaitu beras sebesar 4,48juta ton . Meskipun demikian secara umum Jawa Timur sudah mampu mewujudkan sebagai provinsi yang berdaulat pangan, tetapi belum mampu untuk menentukan sepenuhnya kebijakan dan strategi produksi, distribusi dan konsumsi pangan yang sehat, dan sesuai sumber daya dan budaya dengan metode yang ramah lingkungan, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan memberikan perhatian khususnya kepada mayoritas petani dan nelayan kecil penghasil pangan, pedagang kecil dan rakyat miskin rawan pangan.

Adapun beberapa Isu Strategis pada sektor pertanian di Provinsi Jawa Timur adalah :

1. Masih tingginya penduduk miskin yang tinggal di pedesaan; sebanyak 4,98 juta rumah tangga pada tahun 2013;
2. Fenomena perubahan iklim global memberikakan dampak terhadap capaian produksi dan produktivitas pertanian;
3. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian serta terjadinya degradasi sumber daya alam;
4. Belum optimalnya peran Kelembagaan petani;
5. Lemahnya akses petani terhadap permodalan, dan terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida, alsintan) pendukung pengembangan system agribisnis;
6. Ketahanan Pangan;
 - a. Ketergantungan beras sebagai komoditas pangan pokok masih cukup tinggi;

- b. Pola konsumsi masyarakat masih belum beragam, bergizi, seimbang dan aman.
7. Fluktuasi harga produk pertanian akibat ketersediaan bahan pangan tidak kontinyu sepanjang tahun serta lemahnya tata niaga produk pertanian dan panjangnya rantai distribusi produk pertanian.

4.2.3.10. **Kemiskinan**

Program-program Penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Jawa Timur dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan peran masyarakat serta fungsi lembaga-lembaga desa, untuk mendorong kesadaran kaum miskin dalam memperbaiki nasibnya. Program-program mengentaskan kemiskinan dilaksanakan melalui dua cara, yaitu (i) mengurangi beban biaya bagi Rumah Tangga Sangat Miskin, seperti misalnya : biaya pendidikan, biaya kesehatan, infrastruktur seperti air bersih, jalan desa dan sebagainya, (ii) meningkatkan pendapatan Rumah Tangga Miskin dan Hampir Miskin dengan jalan antara lain pelatihan ekonomi produktif, usaha ekonomi, stimulan modal kerja/ usaha, pasar desa, dan kegiatan pemberdayaan ekonomi lokal serta peningkatan produksi melalui teknologi tepat guna.

Capaian penurunan jumlah penduduk miskin di Jawa timur yang terus menunjukkan perbaikan, menggambarkan kesungguhan pemerintah bersama stake holder dalam upaya penanganan masalah kemiskinan. Berdasarkan data BPS (BRS 2 Januari 2014), pada tahun 2012 per bulan september jumlah penduduk miskin Jawa Timur sebanyak 4.960.540 jiwa atau 13,08%, kemudian menurun menjadi 4.865.820 jiwa atau 12,73% pada September tahun 2013, mengalami penurunan sebesar 0,35 poin persen. Meskipun demikian, capaian persentase penduduk miskin Jawa Timur ini masih diatas persentase nasional. Persentase penduduk miskin nasional pada september 2012 mencapai 11,66% dan menjadi 11,47% pada tahun 2013.

Garis kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 12,30% yakni dari 243.783 rupiah per kapita per bulan pada September 2012 menjadi 273.758 rupiah per kapita per bulan. Dari sisi kualitas penanganan kemiskinan, diantaranya dapat dilihat dari Indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan, yakni indeks kedalaman kemiskinan dalam satu semester 2013 menunjukkan kenaikan dari 1,84 pada bulan Maret 2013 menjadi 2,07 pada

September 2014, sedangkan indeks keparahan mengalami kenaikan dari 0,43 pada bulan Maret 2013 menjadi 0,5 pada bulan September 2013. Peningkatan kedua indeks ini memberikan indikasi bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan atau semakin membutuhkan upaya yang besar untuk mengangkat mereka menjadi lebih berdaya.

4.2.3.11. **Kerjasama Daerah**

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah efektif dilaksanakan sejak tahun 2001, hal ini meningkatkan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memberikan alternatif pemecahan inovatif dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi dan mengembangkan potensi daerah dengan lebih optimal. Disamping itu dapat menjadi solusi alternatif bagi pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai keterbatasan baik keterbatasan sumberdaya alam, sumberdaya manusia maupun ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam menghadapi perekonomian global maka kerjasama daerah dengan Luar Negeri menjadi sangat penting, baik dalam rangka perluasan pasar ekspor maupun kerjasama investasi. Disamping itu maju mundurnya suatu daerah juga tergantung daerah-daerah lain yang berdekatan, sehingga kerjasama antar daerah dapat menjadi suatu jembatan yang dapat meminimalisir potensi konflik kepentingan antar daerah menjadi potensi pembangunan yang saling menguntungkan.

4.2.3.12. **Komunikasi dan Informatika**

Implementasi e-Government yang mulai berkembang di Jawa Timur dalam lima tahun terakhir dinilai oleh pihak pusat sebagai provinsi yang berhasil dengan baik. Namun secara substantif masih banyak hal yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu didorong terus agar implementasi e-Government semakin mengarah pada substansi yang semestinya khususnya mencakup tata kelola TIK, data center, infrastruktur, konten, aplikasi dan sumberdaya manusia.

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Saat ini masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus

berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadikan tantangan besar bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksanakannya serta menjadi wajib hukumnya bagi badan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat membuat masyarakat kini tak lagi hanya sekedar konsumen informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Namun masyarakat kini adalah sumber (*source*), saluran (*channel*) dan penerima (*receiver*) informasi itu sendiri. Hal ini kemudian menjadikan paradigma penyampaian informasi yang *top-down* tidak lagi relevan untuk diterapkan. Sebab pola komunikasi sosial yang kini hadir tidak lagi bersifat singular tapi sudah berbentuk sirkuler. Dengan demikian, masyarakat harus dipandang sebagai khalayak aktif yang mampu memproduksi, menyampaikan dan mengkonsumsi informasi sekaligus. Hal ini mau tidak mau menjadikan paradigma penyampaian informasi yang *bottom-up* adalah yang paling relevan untuk diterapkan saat ini.

Paradigma baru komunikasi sosial ini mengandung konsekuensi logis yaitu masyarakat harus diberdayakan agar mampu menjadi agen penyebarluasan informasi tepat sasaran, produsen informasi yang sehat dan konsumen informasi yang cerdas. Disinilah peran strategis pemerintah untuk menjalankan program pemberdayaan (*empowering*) tersebut dengan menggali potensi masyarakat, penyediaan fasilitas komunikasi dan menghimpun serta menciptakan jejaring antar kelompok-kelompok komunikasi sosial yang tersebar di masyarakat.

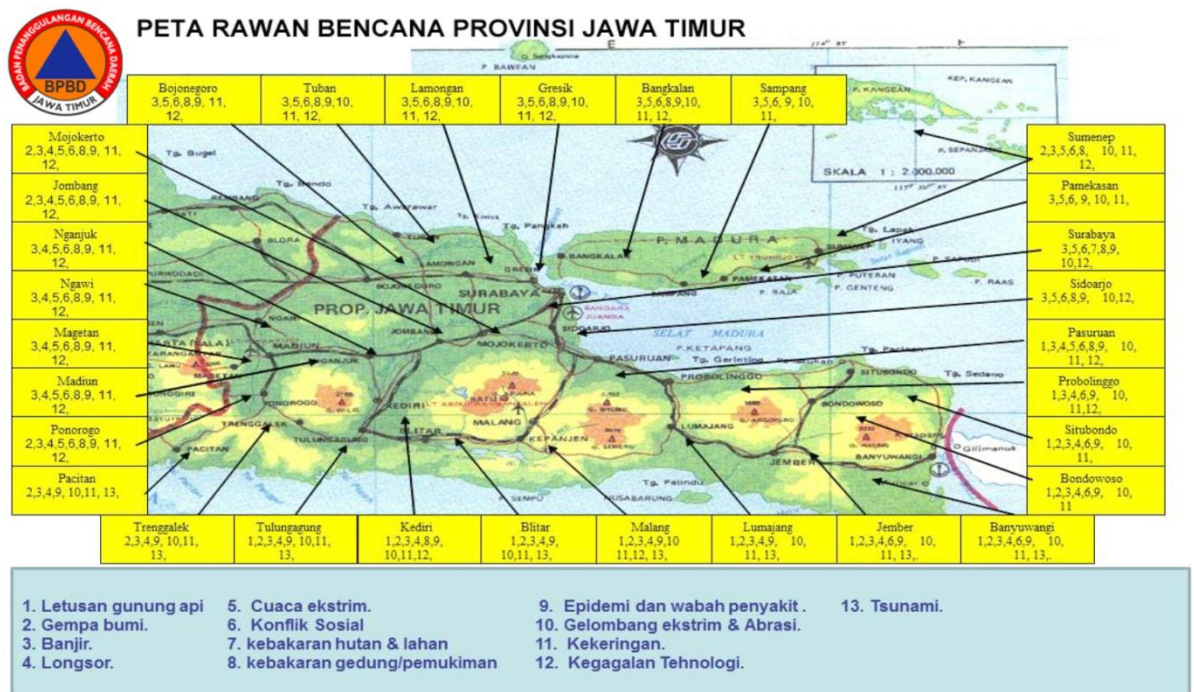
4.2.3.13. **Penanggulangan Bencana**

Provinsi Jawa Timur, seperti halnya daerah lain di Indonesia, merupakan wilayah yang rawan bencana; baik yang berupa bencana alam maupun bencana sosial. Di dalam Perda 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031, kawasan rawan bencana alam di wilayah Provinsi Jawa Timur dikelompokkan ke dalam: kawasan rawan bencana tanah longsor, kawasan rawan bencana gelombang pasang, kawasan rawan bencana banjir dan kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan angin kencang. Dokumen yang sama juga mengklasifikasikan beberapa area

sebagai kawasan rawan bencana alam geologi sebagai bagian dari kawasan lindung geologi.

Jika menilik tipe bencana yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; hasil identifikasi menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur telah dan berpotensi terkena 13 jenis bencana (baik bencana alam maupun bencana sosial), yaitu: banjir, kekeringan, tsunami, gempa bumi, letusan gunung api, longsor, cuaca ekstrim (angin puting beliung) gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran gedung dan permukiman, konflik sosial/kerusakan, epidemi dan wabah penyakit dan kegagalan teknologi.

Gambar 4.5
Peta Rawan Bencana Provinsi Jawa Timur



Adapun beberapa Isu Strategis pada terkait kebencanaan di Provinsi Jawa Timur antara lain:

1. Penanganan di masalah bencana yang rutin terjadi di wilayah-wilayah tertentu, banjir bandang, gunung api, tsunami dan gempa bumi, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan, kebakaran;
2. Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang kebencanaan dan cara-cara menghadapinya;
3. Keterbatasan sumber daya manusia dengan kompetensii kebencanaan dalam upaya penanggulangan bencana;

4. Keterbatasan sarana prasarana sebagai pendukung kegiatan dan pelaksanaan program penanggulangan bencana;
5. Pola pembangunan yang masih mengabaikan resiko bencana dan belum menjadikan masalah bencana ke dalam prioritas pembangunan;

Kebijakan pembangunan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana tersebut di atas, tentunya akan membawa pengaruh sosial, ekonomi, politik dan penyelenggaraan pembangunan di Kota Malang. Permasalahan krusial di Kota Malang yang masih ada pada saat ini dan diprediksikan masih menjadi tantangan pada tahun 2015, cenderung sama dibandingkan dengan tahun 2014. Tantangan yang dihadapi tahun 2014 di Kota Malang antara lain pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi agar mampu mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan ketersediaan infrastruktur.

4.2.4. Prioritas pembangunan Kota Malang

Selanjutnya strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Walikota Malang dalam kerangka pelaksanaan pembangunan sesuai RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018 yang diselaraskan dengan RKP dan RKPD Provinsi Jawa Timur, maka tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

“ Penguatan Daya Saing Perekonomian Daerah untuk Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Masyarakat dengan Didukung oleh Pelayanan Publik yang Semakin Baik”

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Malang merupakan integrasi kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan capaian kinerja program daerah serta permasalahan tantangan yang harus dihadapi.

Mengacu kepada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang dan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi tersebut

di atas, serta dengan memperhatikan kondisi, aspirasi dan kebutuhan masyarakat kota Malang, maka Pemerintah Kota Malang pada tahun 2015 menetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemerataan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat;
2. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial beragama;
3. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum untuk mendukung terciptanya ketertiban dan ketentraman masyarakat;
4. Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
5. Meningkatnya kualitas layanan publik kepada masyarakat;
6. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah;
7. Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan publik;
8. Meningkatnya kualitas dan legitimasi peraturan daerah;
9. Meningkatnya kualitas perencanaan daerah;
10. Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan perusakan lingkungan hidup;
11. Meningkatnya daya dukung tata ruang terhadap pembangunan;
12. Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan;
13. Meningkatnya semangat profesionalitas pemuda dan budaya prestasi di kalangan pemuda;
14. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan;
15. Meningkatnya kesehatan ibu dan anak;
16. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat;
17. Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
18. Meningkatnya kelestarian seni budaya dan kearifan lokal, yang antara lain ditujukan guna meningkatkan daya tarik wisata;
19. Meningkatnya ragam dan kualitas obyek wisata alam dan buatan;
20. Meningkatnya produktivitas dan daya saing pelaku usaha kecil menengah;
21. Meningkatnya produktivitas dan daya saing pelaku usaha mikro;
22. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Koperasi di Kota Malang;
23. Meningkatnya daya saing produk pangan daerah;

24. Meningkatnya produk pangan lokal sebagai pendukung ketahanan pangan daerah;
25. Meningkatnya nilai investasi untuk pengembangan industri berskala besar;
26. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja industri;
27. Terintegrasinya sentra industri kecil menengah;
28. Meningkatnya fungsi sarana transportasi;
29. Meningkatnya daya dukung sistem transportasi dan sarana perhubungan untuk menunjang mobilitas masyarakat;
30. Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketersediaan infrastruktur pemukiman dan drainase.

4.2.5. Sasaran Pembangunan Daerah ;

Sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi pada tahun 2015 adalah ;

Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2015

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	RENCANA TAHUN	PROYEKSI TAHUN	KETERANGAN
		2014	2015	
1	2	3	4	5
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi			
1.1.	Pertumbuhan PDRB	0,9 - 0,11	0,9 - 0,11	
1.2.	Pertumbuhan Ekonomi	7,2 - 7,50	7,25 - 7,57	
1.3.	Laju Inflasi	7,9 - 7,7	5,7 - 5,4	
1.4.	IPM	78,35 - 78,99	79,00 - 79,20	
1.5.	Kemiskinan	5,10 - 4,5	4,5 - 4,3	
1.6.	Pengangguran Terbuka	7,66 - 7,5	7,55 - 7,4	

Sedangkan sasaran pembangunan untuk mencapai Misi Walikota Malang adalah sebagai berikut ;

1. Sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan untuk menciptakan masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis, toleran dan setara pada tahun 2015 sebagai berikut ;

Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

MISI 1 : Menciptakan Masyarakat Yang Makmur, Berbudaya dan Terdidik Berdasarkan Nilai-Nilai Spiritual yang Agamis, Toleran dan Setara

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TAHUN	PROYEKSI TAHUN	SKPD
				2014	2015	
1	2	3	4	5	6	8
1	Terwujudnya kualitas kesejahteraan sosial bagi masyarakat	Meningkatnya pemerataan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat	<p>Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terklasifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ODHA - Korban NAPZA - Pengemis - Gelandangan - Tunasusila - Anak Jalanan - Lanjut Usia Terlantar <p>Jumlah relawan sosial terlatih pendamping PMKS</p> <p>Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya</p> <p>Persentase (%) PMKS skala Kabupaten/ kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar</p> <p>Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial</p> <p>Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.</p> <p>Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima iaminan sosial</p> <p>Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat</p> <p>Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap</p> <p>Ratio ketersediaan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial pada panti sosial (panti asuhan, panti jompo, panti rehab cacat dll)</p> <p>Jumlah lembaga yang membantu pelaksanaan kesejahteraan sosial</p> <p>Persentase (%) penurunan angka kemiskinan</p>	<p>315</p> <p>46</p> <p>166</p> <p>50</p> <p>32</p> <p>204</p> <p>157</p> <p>8</p> <p>0,80%</p> <p>61,6%</p> <p>65%</p> <p>0%</p> <p>32%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>65%</p> <p>5,10%</p>	<p>284</p> <p>41</p> <p>149</p> <p>45</p> <p>28</p> <p>184</p> <p>141</p> <p>12</p> <p>4,30%</p> <p>62,0%</p> <p>76%</p> <p>20%</p> <p>54%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>76%</p> <p>5%</p>	<p>DINAS SOSIAL</p> <p>BADAN KELUARGA</p>

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TAHUN	PROYEKSI TAHUN	SKPD	
				2014	2015		
1	2	3	4	5	6	8	
			Cakupan masyarakat/kelompok masyarakat miskin yang mendapat pelatihan ketrampilan	0,88%	1,18%	BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
			Cakupan masyarakat/kelompok masyarakat miskin yang mendapat bantuan sarana dan prasarana usaha	0,44%	0,59%		
			Cakupan masyarakat/kelompok masyarakat miskin yang terfasilitasi dalam memperoleh modal usaha	38,25%	39,73%		
			Cakupan penerbitan Kartu tanda Penduduk (KTP)	98,04	98,05		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
			Cakupan penerbitan akta kelahiran	87,8	89,6		
			Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	700	700		
			Jumlah dokumen perencanaan kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan serta laporan pertanggung jawaban kinerja keuangan sesuai ketentuan	100%	100%		
			Waktu penyelesaian dokumen perencanaan dan laporan pertanggung jawaban kependudukan dan pencatatan sipil yang tepat waktu.	Tepat waktu	Tepat waktu		
			% pemenuhan sarana dan prasarana penunjang	100%	100%		
			% pemenuhan pelayanan administrasi secara cepat dan % kepemilikan Akta Kelahiran.	100%	100%		
			% kepemilikan Akta Kelahiran.	878	896		
			% kenaikan tingkat kepuasan dari masyarakat berkurang .	8,8	8,16		
			% penurunan jumlah pengaduan dari masyarakat berkurang .	8,8	8,16		
			% pemanfaatan data base kependudukan .	100%	100%		
			Jumlah penduduk rentan dan orang asing yang sudah / belum memenuhi hak / kewajiban adminduk.	250	300		
			Jumlah Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan.	400	400		
2	Terwujudnya dan tumbuhnya kehidupan beragama yang berkualitas dan toleran	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial beragama	Ratio Tempat ibadah per satuan penduduk	1710/ ...	1720/ ...	BAGIAN KESRA	
			Cakupan tempat ibadah yang menerima bantuan perbaikan	76/1786	75/1786		
			Cakupan modin penerima tunjangan	1088/1088	1088/1088		
			Cakupan pendidik keagamaan penerima tunjangan	6252/6252	6750/6750		
			Cakupan peningkatan kapasitas bagi pendidik keagamaan	350/6252	500/6750		

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TAHUN	PROYEKSI TAHUN	SKPD	
				2014	2015		
1	2	3	4	5	6	8	
3	Terwujudnya kehidupan sosial masyarakat yang tertib dan berkesadaran hukum.	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum untuk mendukung terciptanya ketertiban dan ketentraman	Rasio penanganan konflik/kekerasan berbasis SARA	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN	
			Jumlah kegiatan dialog dan kerjasama yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lintas agama dan kevakinan				
			Cakupan jumlah organisasi/lembaga keagamaan penerima bantuan keagamaan				
			Rasio keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif	12	12		
			Jumlah partisipasi pemilih dalam Pemilu	691260	673323		BAKESBANGPOL , KEC DAN KEL
			Jumlah partisipasi pemilih dalam Pilpres	639934	671290		BAKESBANGPOL , KEC DAN KEL
			Jumlah partisipasi pemilih dalam Pemilukada	643197	675357		BAKESBANGPOL , KEC DAN KEL
			Rasio Pos kamling per jumlah 100 KK	0,49	0,5		SATPOL PP DAN KEL
			Rata-rata Prosentase keaktifan RW dalam mengadakan siskamling	55%	60%		SATPOL PP DAN KEL
			Rasio Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	0,35	0,45		SATPOL PP DAN KEL
			Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	0,016	0,017		SATPOL PP DAN KEC
			Jumlah Satuan Linmas	4044	5055		
			Jumlah RT	4044	4044		
4	Terwujudnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Prosentase keaktifan koordinasi Muspika	100%	100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Rasio konflik yang termediasi (konflik/perkelahian antar kelompok pemuda, pelajar/mahasiswa, antar kampung)	100%	100%		
			Prosentase jumlah organisasi antisipasi/siaga bencana yang memiliki SDM terlatih dan perlengkapan standar penanganan bencana	100%	100%		
			Jumlah organisasi perempuan	30	30		
			Jumlah fasilitasi kegiatan organisasi perempuan	4	4		
			Jumlah organisasi/kelompok yang mengembangkan pembinaan keluarga	309	346		
			Jumlah fasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan fungsi keluarga	22	25		
Jumlah lembaga perlindungan anak	5	5	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
Jumlah fasilitasi terselenggaranya kegiatan/forum anak	11	13					

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TAHUN	PROYEKSI TAHUN	SKPD
				2014	2015	
1	2	3	4	5	6	8
			Rasio penanganan kasus tindakan KDRT Rasio penanganan kasus tindakan asusila (Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu)	10 50	10 60	

2. Sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, terukur dan akuntabel pada tahun 2015 sebagai berikut ;

Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
MISI 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Adil, Terukur dan Akuntabel

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TAHUN	PROYEKSI TAHUN	SKPD
				2014	2015	
1	2	3	4	5	6	8
1	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Prima	a) Meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat;	<p>Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah daerah</p> <p>Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media massa seperti majalah, radio, dan televisi 12 kali/tahun</p> <p>Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media baru seperti website (media online) setiap hari</p> <p>Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media tradisional seperti pertunjukan rakyat 12 kali/tahun</p> <p>Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/ diskusi, dan lokakarya 12 kali/tahun setiap kecamatan</p> <p>Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho 12 kali/tahun</p> <p>Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di Tingkat kecamatan</p> <p>Adanya SOP pelayanan informasi publik</p> <p>Cakupan pengguna informasi publik yang terlavani</p> <p>Rasio informasi publik yang bisa diakses publik melalui website pemerintah daerah</p> <p>Prosentase jumlah Media Massa yang dpt bermitra</p> <p>Prosentase Lembaga Penyiaran yang memenuhi persyaratan dan Peraturan</p> <p>Data Infrastruktur SKPD yang memenuhi Standar</p> <p>Kebutuhan kapasitas internet SKPD setiap tahun</p> <p>Jumlah SKPD memanfaatkan OSS dan operating system yg legal</p> <p>Berfungsinya infrastruktur telematika SKPD</p> <p>SKPD yang memahami prosedur dan kebijakan layanan LPSE</p> <p>Jumlah Wartel, Warnet dan Jasa titipan yang berijin</p> <p>Jumlah menara telekomunikasi Pemkot yang sesuai standart</p>	<p>25</p> <p>11</p> <p>365</p> <p>2</p> <p>4</p> <p>3 kali 4.000 lbr</p> <p>9 Kel di 5 Kec</p> <p>1</p> <p>44 Informasi Publik SKPD</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>101 SKPD</p> <p>3 mbps 7 mbps (share)</p> <p>101 SKPD</p> <p>101 SKPD</p> <p>101 SKPD</p> <p>40 warnet 25 jasa titipan</p> <p>1 menara rangka, 12 menara triangle</p>	<p>25</p> <p>12</p> <p>365</p> <p>12</p> <p>8</p> <p>6 kali 4.000 lb</p> <p>30 Kel di 5 Kec</p> <p>1</p> <p>101 Informasi Publik SKPD</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>101 SKPD</p> <p>512 mbps 3 mbps (share)</p> <p>44 SKPD</p> <p>101 SKPD</p> <p>101 SKPD</p> <p>8 warnet 5 jasa titipan</p> <p>1 menara rangka, 1 menara triangle</p>	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TAHUN	PROYEKSI TAHUN	SKPD
				2014	2015	
1	2	3	4	5	6	8
			Peningkatan PAD melalui retribusi menara Tersedianya sarana utilitas infrastruktur telekomunikasi terpadu	770 jt sarana utilitas infrastruktur telekomunikasi terpadu 10 simda (100%)	550 jt 1 paket perencanaan 4 simda/ 10 simda 40 %	
			Rasio Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pemerintah daerah yang terintegrasi terhadap jumlah SIM (Jumlah Sistem Informasi Manajemen) Pemerintah daerah) Peningkatan penggunaan SIM	10 simda (100%)	50 % setiap SKPD menerapkan 5	
			Terlaksananya operasional UPT LPSE	12 bulan	12	
			Meningkatnya Standarisasi LPSE (Pelayanan, Keamanan, SDM dan Infrastruktur	50%	10%	
			Jumlah SDM yang mampu memahami sistem pengadaan secara e-proc melalui LPSE	99 SKPD, 30 (penyedia)	99 SKPD, 30 (penyedia)	
			Adanya SOP Standarisasi Layanan dan Keamanan LPSE	1	1	
			Jumlah gangguan terhadap Keamanan Data dan Informasi	0%	10%	
			Aplikasi layanan Publik	100%	12	
			Prosentase pelaksanaan administrasi perkantoran	100%	12	
			Prosentase pelaksanaan sarana dan prasarana aparatur	100%	12	
			Prosentase pelaksanaan administrasi capaian kinerja keuangan	Ada	Ada	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
			Adanya sistem pengelolaan data dan arsip daerah yang bisa diakses oleh masyarakat			BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
			Prosentase meningkatnya jumlah Izin Terbit IMB	21%	22%	
			Lamanya proses penerbitan izin IMB, IG, Trayek dan IUJK			
			Lamanya proses penerbitan izin IMB			
			- Langsung Proses di BP2T	4 Hari	4 Hari	
			- Rekomendasi perhitungan konstruksi	8 Hari	8 Hari	
			Lamanya proses penerbitan izin IG	9 Hari	9 Hari	
			Lamanya proses penerbitan izin Trayek	4 Hari	4 Hari	
			Lamanya proses penerbitan izin IUJK baru	8 Hari	8 Hari	
			- her registrasi	2 Hari	2 Hari	
			- perpanjangan	8 hari	8 hari	
			- rusak / hilang	4 hari	4 hari	
			Prosentase terselesainya penanganan pengaduan	100%	100%	
			Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	85,50%	86,00%	
				267346	273863	
			Rasio Ijin Trayek	1 : 266	1 : 265	
			Prosentase tercapainya target retribusi IMB, IG dan trayek	100,00%	100,00%	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TAHUN	PROYEKSI TAHUN	SKPD
				2014	2015	
1	2	3	4	5	6	8
		c) Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan publik	Jumlah PNS yang naik pangkat	1322 org	1544 org	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Jumlah PNS pensiun dan MPP	Pensiun : 355 org MPP : 14 org ADA	Pensiun : 337 org MPP : 13 org ADA	
			Adanya mekanisme rekrutmen jabatan yang akuntabel jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas	100 org	150 org	
			jumlah peningkatan ketrampilan dan profesionalisme	diklat teknis : 20 org diklat fungsional : 25 org bimtek brg/jasa : 40 org	diklat Teknis : 20 org diklat Fungsional : 15 org bimtek brg/jasa : 40 org diklat Manajemen Kepegawaian : 80 org	
			jumlah PNS yang sedang tugas belajar	10 org	10 org	
			Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat MOT	1	1	
			Jumlah pegawai yang mengikuti ADUM/diklatpim tingkat IV	PIM IV : 30	PIM IV : 80	
			Jumlah pegawai yang mengikuti SPAMA/diklatpim tingkat III	PIM III : 0	PIM III : 40	
			Jumlah pegawai yang mengikuti SPAMEN/diklatpim tingkat II	PIM II : 1	PIM II : 5	
			Jumlah pegawai yang mengikuti diklat prajabatan golongan I	16	35	
			Jumlah pegawai yang mengikuti diklat prajabatan golongan II	3	122	
			Jumlah pegawai yang mengikuti diklat prajabatan golongan III	0	131	
			Jumlah pegawai yang mengikuti diklat administrasi pemerintahan Kelurahan	0	60	
			Jumlah pegawai yang mengikuti diklat manajemen	0	40	
			Jumlah pegawai yang mengikuti diklat penatausahaan keuangan daerah	40	40	
			Adanya sistem evaluasi kinerja pemerintah daerah	Ada	Ada	INSPEKTORAT DAERAH
			Rasio pejabat yang mengisi dan menyerahkan LHKPN	100%	100%	
			Persentase SKPD menyelenggarakan Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan	9,09% (7 SKPD dari 77 SKPD)	29,87% (23 SKPD dari 77 SKPD)	
			Persentase SPIP SKPD yang dievaluasi	69	75	
			Persentase SKPD menyusun LAKIP sesuai dengan ketentuan	20% dari 99 SKPD	20% dari 99 SKPD	
			3) Persentase meningkatnya kinerja perangkat daerah	20% dari 99 SKPD	20% dari 99 SKPD	
			1) Persentase SKPD yang menindaklanjuti temuan pengawasan	100%	100%	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TAHUN	PROYEKSI TAHUN	SKPD
				2014	2015	
1	2	3	4	5	6	8
			2) Jumlah SKPD yang diperiksa berdasarkan PKPT	69	75	
			3) Jumlah penyusunan laporan pemeriksaan tepat waktu	35	37	
			4) Persentase Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal dan internal	10%	10%	
			5) Persentase penurunan kasus pelanggaran hukum oleh aparat pemkot (pemeriksaan kasus)	35%	40%	
			6) Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	
			7) Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan dilaporkan tepat waktu	100%	100%	
			8) Jumlah Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	1	1	
			1) Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan APFP lain	55 kali	55 kali	
			Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	82,07%	83,01%	
		b) Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah	Adanya hasil pemetaan mengenai potensi peningkatan pendapatan daerah	Ada	Ada	DINAS PENDAPATAN DAERAH
			Adanya proyeksi peningkatan pendapatan daerah	Ada	Ada	
			Prosentase peningkatan pendapatan daerah	19,00%	8,00%	
			Peningkatan penerimaan pajak daerah	250 M	270 M	
			Prosentase penurunan tunggakan Pajak Daerah	5%	5%	
			Adanya pelaksanaan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008	Ada	Ada	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	81,30	82,00	
			Prosentase pelaksanaan administrasi perkantoran	100%	100%	
			Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	
			Prosentase pelaksanaan administrasi capaian kinerja keuangan	100%	100%	
			Hasil audit WTP	WTP	WTP	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BAGIAN ORGANISASI
			Prosentase kasus tumpang tindih fungsi dan tugas yang terselesaikan	100%	100%	
			Prosentase SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan	20%	40%	
			Rasio perda yang melibatkan partisipasi masyarakat	100 % (18 Perda)	100 % (18 Perda)	SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah Perda Inisiatif masyarakat	10 Perda	20 Perda	
			Cakupan anggota DPRD yang telah mengikuti program peningkatan kapasitas SDM	25 Workshop (45 Anggota)	28 Workshop (45 Anggota)	
			Rasio keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, penyusunan dan evaluasi perda	100%	100%	
			Jumlah hasil penelitian perencanaan pembangunan ekonomi	5 penelitian	1 penelitian	BAPPEDA

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TAHUN	PROYEKSI TAHUN	SKPD
				2014	2015	
1	2	3	4	5	6	8
			Jumlah hasil penelitian perencanaan pengembangan kota	2 penelitian	2 penelitian	
			Jumlah penelitian perencanaan sosial budaya	0	1 penelitian	
			Jumlah publikasi hasil musrenbang kelurahan	57	57	BAPPEDA DAN KELURAHAN
			Jumlah publikasi hasil musrenbang kecamatan	5	5	BAPPEDA DAN KECAMATAN
			Prosentase tingkat kehadiran peserta Musrenbang	150 orang/ 100%	150 orang/ 100%	BAPPEDA
			Jumlah Musrenbangcam yang memiliki tingkat kehadiran di atas 80%	5	5	BAPPEDA DAN KECAMATAN
			Jumlah Musrenbangkel yang memiliki tingkat kehadiran di atas 80%	57	57	BAPPEDA DAN KELURAHAN
			Tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan musrenbang kota	45 orang/ 30%	45 orang/ 30%	BAPPEDA
			Jumlah Musrenbangcam yang memiliki tingkat partisipasi perempuan minimal 30%	5	5	BAPPEDA DAN KECAMATAN
			Jumlah Musrenbangkel yang memiliki tingkat partisipasi perempuan minimal 30%	57	57	BAPPEDA DAN KELURAHAN
			Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran	100%	100%	SEMUA SKPD
			Persentase pelaksanaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	SEMUA SKPD
			Persentase pelaksanaan administrasi capaian kinerja keuangan	100%	100%	SEMUA SKPD
			Jumlah kegiatan pembinaan sosial keagamaan	---	1 kegiatan	SEKRETARIAT DAERAH
			Jumlah kegiatan sarana dan prasarana sosial keagamaan	1 kegiatan	---	
			Jumlah kajian/analisis kebijakan di bidang kesejahteraan sosial	---	1 kegiatan	
			Ratio tempat ibadah per satuan penduduk	1710/ ...	1720/ ...	
			Cakupan tempat ibadah yang menerima bantuan perbaikan	76/1786	75/1786	
			Cakupan modin penerima tunjangan	1088/1088	1088/1088	
			Cakupan pendidik keagamaan penerima tunjangan	6252/6252	6750/6750	
			Cakupan peningkatan kapasitas bagi pendidik keagamaan	350/6252	500/6750	
			Tersedianya pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah secara tepat waktu dan tepat sasaran	1 rakernas, 1 muskomwil	1 rakernas, 1 muskomwil	
			Jumlah peserta rapat koordinasi unsur muspida	15 orang	15 orang	
			Jumlah pilar batas wilayah terhadap kebutuhan dan kejelasan batas wilayah di Kota Malang	1 kegiatan	1 kegiatan	
			Jumlah dokumen pelaporan yang dapat diselesaikan tepat waktu	3 dokumen	3 dokumen	
			Prosentase pencapaian pelaporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 kajian dan saran tindak 100%	1 kajian dan saran tindak 100%	
			Jumlah kebijakan tentang organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan pemerintah	---	1 Ranperda	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TAHUN	PROYEKSI TAHUN	SKPD
				2014	2015	
1	2	3	4	5	6	8
3	Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan daerah	<p>Jumlah kebijakan tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja SKPD</p> <p>Jumlah kebijakan tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja UPT di SKPD</p> <p>Prosentase kasus tumpang tindih fungsi dan tugas yang terselesaikan</p> <p>Prosentase SOP administrasi pemerintahan yang diterapkan</p> <p>Jumlah kebijakan tentang unit pelaksana daerah dan lembaga lain yang sesuai dengan peraturan pemerintah</p> <p>Jumlah kebijakan di bidang tata laksana</p> <p>Jumlah perangkat daerah yang telah memiliki standar pelayanan</p> <p>Jumlah perangkat daerah yang telah memilikistandar operasional prosedur (SOP)</p> <p>Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan pelayanan berstandar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>Jumlah unit pelayanan yang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)nva meningkat</p> <p>Jumlah SPM yang telah dilaksanakan penerapannya</p> <p>Jumlah SKPD yang sudah dilakukan analisa jabatan dan analisa beban kerja</p> <p>Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan</p> <p>Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan</p> <p>Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan standar manaiemen mutu</p> <p>Jumlah kebijakan di bidang perencanaan</p> <p>Jumlah dokumen pelaporan yang dapat diselesaikan tepat waktu</p> <p>Pengendalian pelaksanaan administrasi pembangunan daerah secara efektif melalui penyusunan standar satuan harga</p> <p>Jumlah surat kabar lokal/nasional (dari humas)</p> <p>Jumlah penyiaran radio/TV lokal</p> <p>Jumlah kegiatan publikasi pada Media massa</p> <p>Jumlah siaran pers</p> <p>Jumlah sambutan walikota</p>	<p>5 Perwal</p> <p>---</p> <p>100%</p> <p>20%</p> <p>---</p> <p>47 Perwal</p> <p>80 SKPD</p> <p>80 SKPD</p> <p>80 SKPD</p> <p>80 SKPD</p> <p>60 SKPD</p> <p>100%</p> <p>92 SKPD</p> <p>1 kali, 62 org</p> <p>1 kali, 4625 RT/RW</p> <p>6 SKPD</p> <p>1 Keputusan Sekda</p> <p>1 set dokumen</p> <p>12 laporan</p> <p>10 jenis surat kabar lokal/nasional</p> <p>2 radio x4 kali x 12 bulan 2 TV x 1 kali x 12 bulan</p> <p>49 media x 2 kali x 12 bulan</p> <p>275 siaran pers, 24 jilid buku</p> <p>400 sambutan, 24 jilid buku</p>	<p>34 Perwal</p> <p>20 Perwal</p> <p>100%</p> <p>40%</p> <p>2 Ranperda</p> <p>52 Perwal</p> <p>85 SKPD</p> <p>85 SKPD</p> <p>85 SKPD</p> <p>65 SKPD</p> <p>100%</p> <p>93 SKPD</p> <p>1 kali, 62 org</p> <p>1 kali, 4625 RT/RW</p> <p>7 SKPD</p> <p>1 Keputusan Sekda</p> <p>1 set dokumen</p> <p>12 laporan</p> <p>10 jenis surat kabar lokal/nasional</p> <p>2 radio x4 kali x 12 bulan 2 TV x 1 kali x 12 bulan</p> <p>49 media x 2 kali x 12 bulan</p> <p>275 siaran pers, 24 jilid buku</p> <p>400 sambutan, 24 jilid buku</p>	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TAHUN	PROYEKSI TAHUN	SKPD
				2014	2015	
1	2	3	4	5	6	8
			Jumlah dokumentasi visual & audio visual kegiatan	3600 dokumentasi visual, 90 dokumentasi audio visual, 48 dokumentasi digital	3600 dokumentasi visual, 90 dokumentasi audio visual, 48 dokumentasi digital	
			Jumlah pemberitaan tentang pemerintah kota di media massa	2750 klipings, 28 jilid buku	2750 klipings, 28 jilid buku	
			Terukurnya laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	10 buku (pertumbuhan ekonomi 7,2%)	10 buku (pertumbuhan ekonomi 7,3%)	
			Prosentase surat terkirim setiap tahun	100%	100%	
			Prosentase jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terbavarkan	100%	100%	
			Jumlah kendaraan dinas yang laik jalan dari segi administrasi dan fisik	806 unit	806 unit	
			Perbaikan peralatan kerja dan perlengkapan gedung kantor	78 unit	78 unit	
			Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	15 jenis alat listrik	15 jenis alat listrik	
			Jumlah tamu dinas yang terlayani	30 tamu	30 tamu	
			Prosentase kegiatan insidentil yang terlayani	100%	100%	
			Jumlah kegiatan / upacara	1 kegiatan	1 kegiatan	
			Peringatan HUT Kota Malang yang dapat diselenggarakan dengan sewa peralatan	1 kegiatan	1 kegiatan	
			Jumlah kegiatan / upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional yang dapat diselenggarakan dengan sewa peralatan	1 kegiatan	1 kegiatan	
			Jumlah kegiatan / upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang dapat diselenggarakan dengan sewa peralatan	1 kegiatan	1 kegiatan	
			Jumlah kegiatan / upacara Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI yang dapat diselenggarakan dengan sewa peralatan	2 kegiatan	2 kegiatan	
			Jumlah kegiatan Bulan Ramadhan yang dapat diselenggarakan dengan sewa peralatan	5 kegiatan	5 kegiatan	
			Jumlah kegiatan Takbir dan Halal Bilhalal yang dapat diselenggarakan dengan sewa peralatan	1 kegiatan	1 kegiatan	
			Jumlah kegiatan / upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang dapat diselenggarakan dengan sewa peralatan	1 kegiatan	1 kegiatan	
			Jumlah kegiatan / upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda yang dapat diselenggarakan dengan sewa peralatan	1 kegiatan	1 kegiatan	
			Jumlah kegiatan / upacara Peringatan Hari Pahlawan yang dapat diselenggarakan dengan sewa peralatan	1 kegiatan	1 kegiatan	
			Jumlah kegiatan / upacara Peringatan Hari Ibu yang dapat diselenggarakan dengan sewa peralatan	1 kegiatan	1 kegiatan	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TAHUN	PROYEKSI TAHUN	SKPD
				2014	2015	
1	2	3	4	5	6	8
2	Terwujudnya Peningkatan kualitas peraturan daerah	Meningkatnya kualitas dan legitimasi peraturan daerah	<p>Prosentase pelaksanaan Jasa administrasi keuangan</p> <p>Jumlah layanan keprotokolan dan korps musik</p> <p>Penyediaan dan penunjang kerja alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</p> <p>Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</p> <p>Prosentase pemenuhan belanja kendaraan jabatan</p> <p>Prosentase pemenuhan belanja kendaraan dinas operasional</p> <p>Prosentase pemenuhan perlengkapan rumah jabatan</p> <p>Jumlah sarana mebelair yang diperbaiki</p> <p>Jumlah Perda yang disetujui legislatif tahun berjalan</p> <p>Jumlah kegiatan pelaksanaan asistensi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</p> <p>Jumlah kegiatan pelaksanaan workshop Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD</p> <p>jumlah usulan rancangan Peraturan Walikota/rancangan Keputusan Walikota dari SKPD yang telah diproses/ditetapkan</p> <p>Jumlah kegiatan peningkatan pengetahuan Masyarakat di Bidang Hukum</p> <p>Jumlah kegiatan peningkatan pengetahuan Aparatur Pemerintah di Bidang Hukum</p> <p>Jumlah Sidang Yustisi dalam rangka penegakan Perda/Perwal</p> <p>Jumlah penanganan perkara di Badan Peradilan</p> <p>Meningkatnya PAD Kota Malang dari Perusahaan Daerah</p> <p>Jumlah perjanjian kerja sama daerah yang diselesaikan</p> <p>Tersedianya bahan perumusan kebijakan perekonomian daerah</p> <p>Terfasilitasinya kegiatan pasar murah di bulan Ramadhan</p> <p>Terfasilitasinya penataan sektor ekonomi informal</p> <p>Terfasilitasinya penyediaan permodalan bagi UMKM melalui pemberdayaan Satgas KKMB</p> <p>Terwujudnya langkah-langkah pengembangan ekonomi daerah</p> <p>Langkah-langkah pemecahan permasalahan perekonomian dan terkendalinya tingkat inflasi</p>	<p>100%</p> <p>6 org x 12 bulan</p> <p>508 layanan keprotokolan 15 kali upacara, 48 kali latihan korps musik</p> <p>35 macam barang</p> <p>15 macam cetakan</p> <p>60 rapat dan konsultasi</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>391 buah</p> <p>30 Perda</p> <p>30 asistensi</p> <p>15 kali</p> <p>60 Perwal/500 Kepwal</p> <p>20 kali</p> <p>2 kali</p> <p>22 sidang</p> <p>5 perkara</p> <p>1 paket, PAD 11,58 M</p> <p>1 paket</p> <p>15 buku, 1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>10 buku (inflasi 4%-6%±1)</p>	<p>100%</p> <p>6 org x 12 bulan</p> <p>508 layanan keprotokolan 15 kali upacara, 48 kali latihan korps musik</p> <p>35 macam barang</p> <p>15 macam cetakan</p> <p>60 rapat dan konsultasi</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>391 buah</p> <p>30 Perda</p> <p>30 asistensi</p> <p>15 kali</p> <p>60 Perwal/500 Kepwal</p> <p>20 kali</p> <p>2 kali</p> <p>22 sidang</p> <p>5 perkara</p> <p>1 paket, PAD 11,68 M</p> <p>1 paket</p> <p>15 buku, 1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>10 buku (inflasi 4%-6%±1)</p>	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TAHUN	PROYEKSI TAHUN	SKPD
				2014	2015	
1	2	3	4	5	6	8
			Jumlah kebijakan di bidang kerja sama	Buku Ranperda	Nota kesepahaman Pemerintah daerah di Malang Raya	
			Terjalin MOU Malang Raya	1 MOU	1 MOU	
			Tersusunnya naskah akademik dan Ranperda tentang kerja sama	Naskah akademik dan Ranperda tentang kerja sama daerah	0	
			Jumlah perjanjian kerja sama daerah yang diselesaikan	Perjanjian kerja sama	Perjanjian kerja sama	
			Tersedianya hasil monev perjanjian kerja sama	Data monev	Data monev	
			Tersedianya analisis ekonomi dan kajian Perda Perjanjian Kerja Sama	Kajian dan saran tindak	Kajian dan saran tindak	
			Jumlah kebijakan di bidang penanaman modal	---	Perda/Perwal	
				---	Forum Investasi Daerah	
				---	Integritas sistem berbasis GIS	
			Program CSR dunia usaha / lembaga	1 paket	1 paket	
			Adanya kebijakan daerah yang mendukung masuknya investasi baru	Ada	Ada	
			Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	Ada	Ada	
			Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	Ada	Ada	
			Jumlah investor baru skala nasional	10	11	
			Jumlah investor baru skala daerah	3.935,40	4.132,17	

3. Sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan untuk mengembangkan potensi daerah dengan wawasan lingkungan yang berkesinambungan, adil dan ekonomis pada tahun 2015 sebagai berikut ;

Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
MISI 3 : Mengembangkan potensi daerah dengan wawasan lingkungan yang berkesinambungan, adil dan ekonomis

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TAHUN	PROYEKSI TAHUN	SKPD
				2014	2015	
1	2	3	4	5	6	8
1	Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	a) Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan perusakan lingkungan hidup	Jumlah Perda di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup	3	2	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
			Adanya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	0	1	
			Adanya Kajian Lingkungan Hidup Stratejis	0	0	
			Prosentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya	5	5	
			Prosentase jumlah kabupaten/ kota yang dipantau kualitas udara ambiennya dan diinformasikan mutu udara ambiennya	50	100	
			Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	100	
			Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	100	100	
			Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	60	60	
			Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara	5	10	
			Prosentase luasan lahan dan/atau untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	100	100	
			Rasio pemantauan terhadap penanganan air limbah	75	100	
			Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	75	100	
			Rasio Industri yang memiliki AMDAL/izin lingkungan	100	100	
			Rasio perumahan yang memiliki izin lingkungan	100	100	
			Rasio kegiatan ekonomi yang memiliki dokumen lingkungan/izin lingkungan	100	100	
			Jumlah monitoring pelaksanaan AMDAL setiap tahun	15	15	
		b) Meningkatnya daya dukung tata ruang terhadap pembanaunan	Prosentase luasan ruang terbuka hijau	30	30	
			Peningkatan kualitas air, udara, tanah (%)	75	80	
			Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan	10	20	
			Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	100	
			Rasio pasukan kuning per 100 KK	0,36	0,33	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
			Rasio gerobak pengangkut sampah per 100 KK	0,88	0,77	
			Rasio kontainer di setiap TPS per 1000 KK	0,49	0,36	
			Rasio Jumlah tempat pembuangan sampah sementara per 1000 KK	0,26	0,26	
			Luasan TPA terbangun	50 Ha	30,5 Ha	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TAHUN	PROYEKSI TAHUN	SKPD	
				2014	2015		
1	2	3	4	5	6	8	
			Prosentase volume sampah yang tertangani	96%	96%	DPUPPB	
			Jumlah kelompok masyarakat yang memanfaatkan sampah	609	709		
			Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.	31%	31%		
			Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.	65%	65%		
			Rasio taman kota terpelihara	100%	100%		
			Rasio Penerangan Jalan Umum kota terpelihara	100%	100%		
			Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	70,36%	65%		
			Jumlah kerjasama dengan pihak lain dalam pemeliharaan taman kota	2	3		
			Jumlah ruas jalan ter hijaukan	119	169		
			Jumlah kawasan ter hijaukan	1766,85 Ha	1759.15 Ha		
			Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.	16,05%	15,98%		
			Jumlah Tempat Pemakaman Umum	11 TPU	9 TPU		
			Luas lahan Tempat Pemakaman Umum	466.596 m2	447.396 m2		
			Rasio luas lahan Tempat Pemakaman Umum / 1.000 orang	365,25 m2	487,14 m2		
			Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.	60%	60%		
			Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	6,41%	6,01%		
			Persentase penurunan pelanggaran tata ruang	20%	19%		
			Jumlah Penanganan pengaduan terhadap pelanggaran lingkungan hidup dan tata ruang	400	425		
			Adanya hasil inventarisasi tanah dan bangunan aset daerah	Ada (1200 obyek)	Ada (1200 obyek)		BPKAD
			Persentase lahan aset yang sudah bersertipikat	87%	89%		
			Rasio penyelesaian sengketa lahan aset daerah	4 : 15	3 : 13		
			Rasio bidang lahan aset daerah penyumbang pendapatan asli daerah				
			Jumlah pendapatan asli daerah dari pemanfaatan bidang lahan aset daerah	3.477.835.000	3.527.835.000		

4. Sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Kota Malang sehingga bisa bersaing di era global pada tahun 2015 sebagai berikut ;

Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
MISI 4 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Malang sehingga Bisa Bersaing di Era Global

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TAHUN	PROYEKSI TAHUN	SKPD
				2014	2015	
1	2	3	4	5	6	8
1	Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan yang dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat	Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan	<p>Prosentase sekolah yang memiliki renstra sekolah (RKAS)</p> <p>Prosentase sekolah yang berhasil mengimplementasikan renstra sekolah</p> <p>Prosentase kehadiran pengawas ke satuan pendidikan Intensitas kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan</p> <p>Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka:</p> <p>a) Kelas I – II : 18 jam per minggu; b) Kelas III : 24 jam per minggu; c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu; atau d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu;</p> <p>Rasio satuan pendidikan dasar yang menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku</p> <p>Rasio Kepala sekolah yang melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester</p> <p>Rasio Kepala sekolah atau madrasah yang menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kota Malang atau Kantor Kementerian Agama Kota Malang pada setiap akhir semester</p> <p>Rasio satuan pendidikan dasar yang menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)</p> <p>Rasio Kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 dan telah memiliki sertifikat pendidik</p> <p>Rasio kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 dan telah memiliki sertifikat pendidik</p> <p>Rasio pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik</p> <p>Rasio guru yang menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik</p> <p>Rasio guru tetap yang bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan</p> <p>Rasio guru yang mampu menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>85%</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>98,74</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>95,60</p> <p>97,17</p> <p>98,37</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>95%</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>	DINAS PENDIDIKAN

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TAHUN	PROYEKSI TAHUN	SKPD
				2014	2015	
1	2	3	4	5	6	8
			Rasio Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV perjenjang pendidikan			
			- SD/MI	85,45	85,45	
			- SMP/MTS	94,44	94,44	
			- SMA/MA/SMK	96,15	96,15	
			Jumlah guru yang dikirim untuk mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas guru atau sejenisnya	5409	5409	
			Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah			
			- SD/MI	1:237	1:237	
			- SMP/MTS	1:314	1:314	
			- SMA/MA/SMK	1:409	1:409	
			Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang.			
			Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta tenaga kependidikan			
			- SD/MI	50,63	50,63	
			- SMP/MTS	67,48	67,48	
			Jumlah SD/MI dengan Kondisi bangunan baik	60,69	60,69	
			Jumlah SMP/MTs dengan kondisi baik	69,11	69,11	
			Jumlah SMA/MA/SMK dengan kondisi bangunan baik	56,36	56,36	
			Ketersediaan ruang lab IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik pada setiap SMP/MTs	75,61	75,61	
			Prosentase jumlah SMA/MA yang memiliki ruang lab Bahasa yang dilengkapi peralatan multimedia	50,85	52,54	
			Prosentase jumlah SMA/MA yang memiliki ruang lab IPA	40,68	44,07	
			Prosentase jumlah SMK yang memiliki ruang kerja praktek setiap jurusan	95,92	97,96	
			Ketersediaan satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru SD/MI			
			Meja	100	100	
			Kursi	100	100	
			Ketersediaan satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru SMP/MTS			
			Meja	100/123	106/123	
			Kursi	123/123	123/123	
			Ketersediaan ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru di setiap SMP/MTs	95,93495935	97,56097561	
			Ketersediaan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik pada setiap SD/MI	71,39034055	78,62631367	
			Ketersediaan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik pada setiap SMP/MTs	59,3641093	67,44532552	
			Ketersediaan 1 (satu) set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA pada setiap SD/MI	36,25	43,75	
			Rasio sekolah memiliki fasilitas penunjang berupa kamar mandi siswa laki-laki dan perempuan	87,54716981	88,67924528	
			Rasio sekolah yang memiliki fasilitas olah raga yang layak	58,11	58,11	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TAHUN	PROYEKSI TAHUN	SKPD
				2014	2015	
1	2	3	4	5	6	8
			Ketersediaan sarana IT dalam penyelenggaraan pendidikan	81,13207547	83,01886792	
			Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	100	100	
			Angka partisipasi murni			
			- APM SD/MI/Paket A	102,44	102,44	
			- APM SMP/MTS/Paket B	75,38	75,38	
			- APM SMA/MA/SMK/Paket C	81,88	81,88	
			Rasio SD/MI per jumlah total SD/MI			
			- Klojen	10,08	10,08	
			- Kedungkandang	26,61	26,61	
			- Blimbing	19,75	19,75	
			- Lowokwaru	20,56	20,56	
			- Sukun	21,77	21,77	
			Rasio SMP/MTs per jumlah total SMP/MTs			
			- Klojen	24,39	24,39	
			- Kedungkandang	21,95	21,95	
			- Blimbing	18,69	18,69	
			- Lowokwaru	20,32	20,32	
			- Sukun	14,63	14,63	
			Rasio SMA/MA/SMK per jumlah total SMA/MA/SMK			
			- Klojen	30	30	
			- Kedungkandang	16,36	16,36	
			- Blimbing	13,64	13,64	
			- Lowokwaru	24,55	24,55	
			- Sukun	15,45	15,45	
			Angka Partisipasi Kasar (APK)			
			- APK SD/MI	114,78	114,78	
			- APK SMP/MTS	104,19	104,19	
			- APK SMA/MA/SMK	112,32	112,32	
			Angka melek huruf masyarakat	100%	100%	
			Angka Putus Sekolah (APS)			
			- APS SD/MI	0,05	0,05	
			- APS SMP/MTS	0,19	0,19	
			- APS SMA/SMK/MA	0,72	0,72	
			Angka Kelulusan			
			- AL SD/MI	99,21	99,21	
			- AL SMP/MTs	99,63	99,63	
			- AL SMA/SMK/MA	99,08	99,08	
			Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTS	105,49	105,49	
			Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA	141,81	141,81	
			Jumlah sekolah berpredikat Adiwiyata			
			- SD/MI	11	12	
			- SMP/MTS	6	7	
			- SMA/MA/SMK	8	9	
			Jumlah lembaga PAUD setiap RW	1,18	1,18	
			Jumlah peserta PAUD	19132	19182	
			Rasio peserta PAUD/ anak usia PAUD	37,89	37,89	
			Jumlah lembaga bimbingan belajar	202	203	
			Jumlah LSM yang bergerak di bidang pendidikan non-formal	2	2	
			Jumlah pameran karya siswa	-	2	
			Jumlah karya siswa yang terpublikasi secara lokal, regional, nasional dan internasional	-	2	
			Jumlah siswa yang memiliki karya inovatif	-	1	
			Jumlah siswa yang diberi <i>reward</i> atas karya inovatif mereka	-	1	
			Rasio guru / murid per kelas			
			- SD/MI	1,63	1,63	
			- SMP/MTS	2,20	2,20	
			- SMA/MA	2,69	2,69	
			- SMK	2,35	2,35	
			Ketersediaan 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan pada SD/MI	81,88	81,88	
			Ketersediaan 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D-IV di SD/MI	70,31	70,31	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TAHUN	PROYEKSI TAHUN	SKPD
				2014	2015	
1	2	3	4	5	6	8
			<p>Ketersediaan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik pada setiap SD/MI</p> <p>Ketersediaan guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik pada setiap SMP/MTs</p> <p>Ketersediaan guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing dua orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris pada setiap SMP/MTs</p> <p>Rasio guru / murid</p> <ul style="list-style-type: none"> - SD/MI 18,33 - SMP/MTS 13,23 - SMA/MA 9,37 - SMK 7,22 <p>Jumlah bantuan yang diberikan pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) - 4</p> <p>Rasio SLB/ jumlah ABK 52,13</p> <p>Rasio guru/jumlah ABK 19,57</p> <p>Jumlah kerjasama dengan pihak lain dalam hal pemerataan akses pendidikan bagi keluarga miskin</p> <p>Jumlah siswa keluarga miskin yang memperoleh beasiswa dari pihak swasta 50</p> <p>Rasio fasilitas kendaraan antar jemput sekolah/jumlah siswa miskin 5</p> <p>jumlah pengunjung perpustakaan keliling pertahun 9000</p> <p>Cakupan perpustakaan kelurahan 112 perpustakaan binaan</p> <p>Cakupan perpustakaan kelurahan 112 perpustakaan binaan</p> <p>jumlah pengunjung perpustakaan kota 250.000</p> <p>Jumlah judul buku di perpustakaan kota 1000 judul</p> <p>Jumlah buku di perpustakaan kota 4500 buku</p> <p>fasilitas virtual library di perpustakaan kota 1 paket</p> <p>jumlah sarana perpustakaan keliling 1 unit</p> <p>jumlah Taman Baca Masyarakat (TBM) 10</p> <p>Rasio sekolah yang melakukan audit independen oleh KAP - 2</p> <p>Rasio sekolah yang mempublikasikan laporan keuangan secara terbuka - 2</p> <p>Rasiopenanganan terhadap pengaduan masyarakat terkait penyalahgunaan biaya penyelenggaraan pendidikan 100</p> <p>Adanya kebijakan sebagai pencegahan penyalahgunaan dana pendidikan Ada</p>			
2	Terwujudnya peningkatan peran pemuda dalam pembangunan daerah	Meningkatnya semangat profesionalitas pemuda dan budaya prestasi di kalangan pemuda	<p>Jumlah pelatihan pemberdayaan pemuda 3</p> <p>Jumlah kegiatan partisipasi-inisiatif mahasiswa dan pemuda dalam pemberdayaan sosial masyarakat 8</p> <p>Jumlah organisasi mahasiswa dan pemuda 232</p> <p>Prosentase keaktifan organisasi karang taruna tingkat kelurahan 22%</p> <p>Jumlah fasilitasi kegiatan organisasi mahasiswa dan pemuda 234</p> <p>Jumlah fasilitasi kegiatan pemuda dan olahraga 1</p>			<p>KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH</p> <p>DINAS PENDIDIKAN</p> <p>DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</p>

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TAHUN	PROYEKSI TAHUN	SKPD
				2014	2015	
1	2	3	4	5	6	8
			Jumlah even olahraga tingkat kota			
			Jumlah Kegiatan olahraga tingkat kota	4	5	
			Jumlah partisipasi event olahraga di tingkat Jawa Timur	3	2	
			Jumlah partisipasi event olahraga di tingkat nasional	1	1	
			Jumlah prestasi olahraga di tingkat Jawa Timur	20	22	
			Jumlah pemuda berprestasi di tingkat Jawa Timur	4	5	
			Jumlah prestasi olahraga di tingkat Nasional	0	1	
			Jumlah pemuda berprestasi di tingkat Nasional	1	1	
			Jumlah fasilitasi Pembinaan olahraga	-	1	
			Jumlah lapangan olahraga	20	22	
			Jumlah pembangunan lapangan olahraga	2	2	
			Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga	70,0%	22,7%	

5. Sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kota Malang baik fisik, maupun mental untuk menjadi masyarakat yang produktif pada tahun 2015 sebagai berikut ;

Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
MISI 5 : Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Malang baik Fisik, maupun Mental untuk Menjadi Masyarakat yang Produktif

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TAHUN	PROYEKSI TAHUN	SKPD
				2014	2015	
1	2	3	4	5	6	8
1	Terwujudnya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	a) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah kota	1	1	DINAS KESEHATAN
			Jumlah puskesmas yang memiliki fasilitas VCT, HCT dan IMS	3	4	
			Jumlah rujukan penderita HIV AIDS di Puskesmas	3	4	
			Layanan rumah sakit yang telah terakreditasi	14	15	
			Rasio Rumah Sakit terhadap penduduk (tiap 10.000 penduduk)	1 : 55000	1 : 54500	
			Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (tiap 1000 penduduk)			
			% persediaan obat di sarana kesehatan pemerintah	100%	100%	
		b) Meningkatnya kesehatan ibu dan anak	Rasio posyandu per 100 balita	1 : 103	1 : 103	
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	95%	95%	
			Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	70%	80%	
			Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	82%	85%	
			Cakupan pelayanan Ibu Nifas	89,5%	90%	
			Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani.	40%	50%	
			Cakupan kunjungan bayi.	80%	85%	
			Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI).	85%	90%	
			Cakupan pelayanan anak balita.	60%	62,5%	
			Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100%	100%	
		c) Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam.	100%	100%	
			Cakupan Desa Siaga Aktif	98,2%	98,2%	
			Persentase balita gizi buruk	0,49%	0,48%	
			Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%	
			Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI	100%	100%	
			Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan	100%	100%	
			Rasio dokter puskesmas terhadap penduduk (tiap 1.000 penduduk)	0,04	0,05	
			Rasio tenaga paramedis puskesmas terhadap penduduk (tiap 1.000 penduduk)	316	316	
			Rasio dokter umum per 100.000 penduduk	92	93	
			Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk	54	52	
			Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk	29	27	
			Rasio tenaga paramedis per 100.000 penduduk (bidan, perawat, tenaga farmasi, tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat, sanitasi, teknis medis, keterampilan psikiater)	11	11	
			% persediaan obat di sarana kesehatan pemerintah	100%	100%	
			% peningkatan pengawasan sarana peredaran obat	100%	100%	
			% peningkatan pengawasan sarana peredaran kosmetik	65%	70%	
			Jumlah kader posyandu	5.712	5.712	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TAHUN	PROYEKSI TAHUN	SKPD
				2014	2015	
1	2	3	4	5	6	8
			Rasio kader posyandu aktif	5.712	5.712	
			% Posyandu Purnama dan Mandiri	81,55%	81,55%	
			Jumlah kerjasama dengan perguruan tinggi kesehatan dalam pelaksanaan bakti sosial kesehatan	1	1	
			Jumlah masyarakat yang terlayani oleh bakti sosial perguruan tinggi kesehatan	110 orang	110 orang	
			Jumlah LSM di bidang kesehatan masyarakat	1	1	
			Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin.	100%	100%	
			Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	74%	75%	
			Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	45%	40%	
		d) Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga	Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB Aktif sebesar 73,25% (PUS dibagi KB Aktif x 100%)	75,85%	75,90%	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
			Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	
			Rasio akseptor KB	0,82	0,82	
			Cakupan peserta KB Aktif	75,85%	75,90%	
			Rasio peserta KB Aktif	0,82	0,82	
			Keluarga Pra Sejahtera dan Kel. Sejahtera I	49908	44917	
			Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya usia di bawah 20 tahun 3,5 % pada 2014	0,92%	0,83%	
			Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB Aktif 65 % pada 2014	65%	75,90%	
			Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5 % pada 2014	5%	11,25%	
			Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB 70 % pada 2014	70%	70,50%	
			Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87% pada 2014	87%	87,10%	
			Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) Kelurahan	1:02	1:02	
			Rasio petugas Pembantu Pembina KB Kelurahan (PPKBL) 1 Petugas di setiap Kelurahan	1:01	1:01	
			Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	30%	30%	
			Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Kelurahan 100% setiap tahun	100%	100%	
			Jumlah penyandang penyakit reproduksi remaja	0	0	
			Intensitas sosialisasi KIE	865	867	
			Ketersediaan alat kontrasepsi	16.169	16.169	
			Jumlah dan jenis layanan KB	7	7	
			Jumlah pria ikut KB	298	310	
			Jumlah Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama aktif mendukung program KB	860	860	
			Cakupan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Siaga Aktif			

6. Sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan untuk membangun Kota Malang sebagai kota tujuan wisata yang aman, nyaman, dan berbudaya pada tahun 2015 sebagai berikut ;

Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
MISI 6 : Membangun Kota Malang sebagai Kota Tujuan Wisata yang Aman, Nyaman, dan Berbudaya

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TAHUN	PROYEKSI TAHUN	SKPD
				2014	2015	
1	2	3	4	5	6	8
1	Terwujudnya pengembangan pariwisata berbasis kebudayaan, lingkungan, dan kreativitas masyarakat	a) Meningkatnya kelestarian seni budaya dan kearifan lokal, yang antara lain ditujukan guna meningkatkan daya tarik wisata	Adanya hasil pemetaan tentang khazanah seni budaya khas Kota Malang	35%	40%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Cakupan kajian seni 50% pada 2014	60%	70%	
			Jumlah kelompok kebudayaan yang masih aktif	13	14	
			Jumlah pembinaan terhadap kelompok-kelompok kebudayaan	249	274	
			Jumlah event pariwisata/budaya yang diadakan oleh budayawan dan masyarakat	2	3	
			Jumlah penghargaan yang diterima oleh budayawan/seniman, baik di tingkat lokal, regional, nasional, dan	5	6	
			Jumlah Objek cagar budaya	214	216	
			Rasio objek Cagar Budaya yang terawat	94	103	
			Rasio penanganan terhadap pelanggaran Konservasi Cagar Budaya	-	-	
			Jumlah media promosi wisata budaya Kota Malang	6 KORAN LOKAL 11 TV LOKAL	7 KORAN LOKAL 12 TV LOKAL	
			Jumlah keikutsertaan budayawan dalam event-event wisata	4	5	
			Jumlah event promosi wisata budaya	7	8	
			Jumlah kerjasama dengan pihak lain untuk mempromosikan pariwisata kebudayaan kota Malang	4	5	
			Jumlah penggunaan Gedung Kesenian untuk kegiatan seni budaya	21	22	
			Adanya Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPPDA)	1	0	
			Rata-rata prosentasi tingkat okupansi hotel	52.5%	55%	
			Jumlah restoran/rumah makan	196	201	
			Jumlah obyek wisata aset daerah yang direvitalisasi	0	0	
			Jumlah penyedia jasa transportasi wisata	123	128	
			Jumlah pusat informasi wisata	5	6	
			Jumlah media promosi wisata	8	8	
			Jumlah kelompok/ komunitas sadar wisata	5	8	
			Jumlah taman kota dan hutan kota sebagai lokasi rekreasi murah masyarakat	0	13	
			Rasio lokasi rekreasi murah per 100.000 penduduk	0,4	0,5	
		b) Meningkatnya ragam dan kualitas obyek wisata alam dan buatan	Jumlah kerjasama dengan pihak lain untuk merevitalisasi taman dan hutan kota menjadi lokasi rekreasi murah	0	2	
			Jumlah kerjasama dengan pihak lain untuk mempromosikan lokasi wisata murah masyarakat	0	2	
			Jumlah kegiatan masyarakat yang menunjang pariwisata	15	20	
			Adanya kalender wisata kreatif berbasis kegiatan masyarakat	15	20	

7. Sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan untuk mendorong pelaku ekonomi sektor informal dan UKM agar lebih produktif dan kompetitif pada tahun 2015 sebagai berikut ;

Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
MISI 7 : Mendorong Pelaku Ekonomi Sektor Informal dan UKM agar Lebih Produktif dan Kompetitif

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TAHUN	PROYEKSI TAHUN	SKPD	
				2014	2015		
1	2	3	4	5	6	8	
1	Terwujudnya Produktivitas dan Daya Saing Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	a) Meningkatnya produktivitas dan daya saing pelaku usaha kecil menengah	Jumlah kebijakan daerah yang melindungi perkembangan UKM	0	1	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
			Jumlah UKM	10.723	12.567		
			Jumlah asosiasi pengusaha UKM	1	1		
			Jumlah wirausaha baru yang aktif	240	278		
			Adanya database dan profiling UKM di Kota Malang	1	1		
			Jumlah perizinan usaha UKM	559	597		
			Jumlah kerjasama UKM dengan pasar modern	1	2		
			Jumlah penyerapan produk unggulan UKM di pasar modern (minimarket dan supermarket)	15	35		
			Jumlah tenaga kerja UKM	44.458	45.323		
			Jumlah perputaran modal UKM	31 milyar	32 milyar		
			Jumlah promosi pameran daerah dalam 1 tahun yang diikuti UKM	8	12		
			Nilai transaksi dalam tiap promosi UKM	20 jt	25 jt		
			jumlah pusat konsultasi bisnis	1	1		
			Jumlah pelatihan manajemen keuangan baai pelaku UKM	10	15		
			Cakupan pelaku UKM yang mengikuti pelatihan manajemen keuangan	2%	5%		
			Besaran kredit yang disalurkan pada sektor UKM	350 milyar	370 milyar		
			Tingkatan pengembalian kredit UKM	82%	85%		
			Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UKM tingkat kota dengan pengusaha tingkat provinsi	1	1		
			Prosentase (%) penurunan angka kemiskinan	5,1-5,45%	4,5 - 4,3%		BKBPM
			Cakupan masyarakat/kelompok masyarakat miskin yang mendapat pelatihan ketrampilan	0,88%	1,18%		
			Cakupan masyarakat/kelompok masyarakat miskin yang mendapat bantuan sarana dan prasarana usaha	0,44%	0,59%		
		Cakupan masyarakat/kelompok masyarakat miskin yang terfasilitasi dalam memperoleh modal usaha	38,25%	39,73%			
		Adanya hasil pemetaan mengenai jumlah dan titik sebaran PKL sebelum dilakukan penertiban	20%	20%	DINAS PASAR		
		Jumlah kawasan khusus PKL	1	1			
		Jumlah PKL yang mendapatkan KUR	50	50			
		Besar kredit yang dikucurkan oleh kalangan perbankan	0	0			
		Tingkatan pengembalian kredit PKL	0	0			
		Adanya kebijakan daerah yang melindungi keberadaan pasar tradisional	1	1			
		Jumlah pasar tradisional	28	28			
		Jumlah paguyuban pedagang pasar tradisional	30	30			
		Cakupan pedagang tradisional yang menerima manfaat dari program pemberdayaan	6000	6500			
		Jumlah infrastruktur bangunan pasar tradisional/ pasar tradisional yang direhabilitasi	9	9			
		Jumlah kerjasama dengan pihak lain dalam kegiatan pemberdayaan pedagang pasar tradisional	3	3			
Jumlah infrastruktur pasar tradisional yang direhabilitasi melalui kerjasama dengan pihak lain	3	3					

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TAHUN	PROYEKSI TAHUN	SKPD		
				2014	2015			
1	2	3	4	5	6	8		
2	Terwujudnya peningkatan pengelolaan potensi pangan	c) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Koperasi di Kota Malang	Jumlah KSP / USP sehat	287	310	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH		
			jumlah koperasi berkategori sehat / baik / yang sudah menerapkan sistem pencatatan sesuai Standart Akuntansi Indonesia	156	176			
			Jumlah koperasi berprestasi	2	2			
		a) Meningkatnya daya saing produk pangan daerah	Rasio permasalahan perkoperasian yang tertangani	63%	65%	DINAS PERTANIAN		
			Nilai produksi hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan					
			- tanaman pangan	2 %	2 %			
			- hortikultura	3%	3%			
			- peternakan	10%	10%			
			- perikanan	7,50%	7,50%			
			Jumlah kelompok pelaku ekonomi produktif	149	149			
			Jumlah kegiatan pelatihan keterampilan kepada pelaku ekonomi produktif	9	9			
			Jumlah pelaku ekonomi produktif penerima akses permodalan	-	-			
			b) Meningkatnya produk pangan lokal sebagai pendukung ketahanan pangan daerah	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita 90% pada 2015	75%		90%	KANTOR KETAHANAN PANGAN
				Penguatan Cadangan Pangan 60% pada 2015	55%		60%	
				Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	75%		90%	
				Penanganan Daerah Rawan Pangan	55%		60%	
				Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	60%		80%	
Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	80%	90%						
Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	80%	90%						

8. Sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan untuk mendorong produktivitas industri dan ekonomi skala besar yang berdaya saing, etis dan berwawasan lingkungan pada tahun 2015 sebagai berikut ;

Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
MISI 8 : Mendorong Produktivitas Industri dan Ekonomi Skala Besar yang Berdaya Saing, Etis dan Berwawasan Lingkungan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TAHUN	PROYEKSI TAHUN	SKPD
				2014	2015	
1	2	3	4	5	6	8
1	Terwujudnya Pertumbuhan industri-industri baru guna peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah	a) Meningkatnya nilai investasi untuk pengembangan industri berskala besar	Adanya kebijakan daerah yang mendukung masuknya investasi baru	Ada	Ada	BAGIAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL
			Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	Ada	Ada	
			Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	Ada	Ada	
			Jumlah investor baru skala nasional	10	11	
			Jumlah investor baru skala daerah	3.935,40	4.132,17	
			Jumlah Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	375	413	
			Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	50%	60%	
			Rasio Pencari kerja yang ditempatkan dibandingkan jumlah pencari kerja yang terdaftar	50%	60%	
			Jumlah lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal	1035	1035	
			Angka partisipasi angkatan kerja	15,00%	20,00%	
		Jumlah pengangguran terbuka	7073	6967		
		Tingkat partisipasi angkatan kerja	15,00%	20,00%		
		Rasio daya serap tenaga kerja	60,00%	65,00%		
		Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	30%	45%		
		Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	75%	78%		
		Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	32%	48%		
		Jumlah Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	50804	50804		
		Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	30%	40%		
		Upah Minimum Kota (UMK)	20%	20%		
		Jumlah perusahaan yang menerapkan SPM ketenagakerjaan	707	725		
Rasio Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	80%	82%				
Jumlah kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	85%	89%				
Jumlah kasus Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	35	31				
Besaran Pemeriksaan Perusahaan	70%	75%				
Jumlah Pengujian Peralatan di Perusahaan	30%	35%				
Jumlah kerjasama alih TTG dengan	8	8				
Jumlah IKM penerima alih TTG	300	300				
Cakupan IKM penerima hibah sarana produksi	300	300				
Jumlah kerjasama produksi antar IKM yang telah dibina	2	2				
Rasio IKM yang mengembangkan kerjasama produksi	15	20				
Jumlah kerja sama pelaku usaha lokal (IDKM) dengan pelaku usaha besar	1	2				
Cakupan pengawasan produk yang memenuhi persyaratan K3L, SNI Wajib, NPIK dan layanan purna jual	50%	60%				
2	Terwujudnya kawasan industri terintegrasi yang memperhitungkan daya dukung lingkungan	Terintegrasinya sentra industri kecil menengah	Jumlah kerja sama pelaku usaha lokal (IDKM) dengan pelaku usaha besar	1	2	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Cakupan pengawasan produk yang memenuhi persyaratan K3L, SNI Wajib, NPIK dan layanan purna jual	50%	60%	

9. Sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan untuk mengembangkan sistem transportasi terpadu dan infrastruktur yang nyaman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada tahun 2015 sebagai berikut ;

Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
MISI 9 : Mengembangkan Sistem Transportasi Terpadu dan Infrastruktur Yang Nyaman Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TAHUN	PROYEKSI TAHUN	SKPD				
				2014	2015					
1	2	3	4	5	6	8				
1	Terwujudnya daya dukung transportasi	Meningkatnya fungsi sarana transportasi	Jumlah titik rawan macet	28 titik	23 titik	DINAS PERHUBUNGAN				
			Rasio titik rawan macet yang berhasil diurai	15%	21%					
			Adanya tempat pengujian kendaraan bermotor	1 UNIT	1 UNIT					
			Cakupan kendaraan wajib uji kir yang terlayani	17000 kendaraan	17000 kendaraan					
2	Terwujudnya Pengembangan sistem transportasi perkotaan terpadu yang menjamin kelancaran mobilitas masyarakat	Meningkatnya daya dukung sistem transportasi dan sarana perhubungan untuk menunjang mobilitas masyarakat	Rasio infrastruktur perlengkapan jalan	60%	83%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PPB				
			Jumlah titik parkir di tepi jalan umum	432	452					
			Jumlah penertiban parkir di tepi jalan umum	432	452					
			Jumlah penertiban angkutan umum tanpa ijin trayek	0	0					
			angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan 75% untuk 2014	70%	70%					
			Jumlah ijin trayek angkutan	2216 ijin	2216 ijin					
			Rasio halte dalam kondisi baik	37	37					
			Jumlah penertiban parkir di tepi jalan umum	432	452					
			Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/kota	100%	100%					
			Jumlah organisasi/paguyuban angkutan darat	2	2					
			Jumlah rekomendasi Forum Lalu Lintas untuk penyelesaian persoalan lalu lintas	6 REKOM	6 REKOM					
			3	Terwujudnya ketersediaan infrastruktur perkotaan di bidang pemukiman dan drainase	Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketersediaan infrastruktur pemukiman dan drainase		Jumlah peralatan perawatan jalan yang cukup			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PPB
							Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	80%	80%	
							Rasio kondisi jalan yang baik	94%	95%	
							Rasio jembatan standar (lebar minimal 6 M) yang dilalui kendaraan Roda 4	49%	50%	
							Jumlah pembangunan jalan baru	0	1	
							Jumlah Pembangunan Jembatan Baru	1	0	
Jumlah pembangunan pedestrian yang ramah terhadap pejalan kaki dan penyandang cacat	4 Lokasi	5 Lokasi								
Adanya peta wilayah kawasan kumuh	Ada	Ada								
Prosentase penurunan kawasan kumuh	15%	14%								
Jumlah wilayah kawasan kumuh yang tidak terjangkau sarana air bersih	15%	14%								
Jumlah wilayah kawasan kumuh yang tidak bersanitasi	15%	14%								
Rata-rata prosentase rumah tinggal bersanitasi di wilayah kumuh	16%	17%								
Prosentase rumah layak huni di wilayah kumuh	16%	17%								
Cakupan gedung daerah/Fasilitas Umum/Fasilitas Sosial yang memenuhi standar	65%	70%								
Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih di wilayah kumuh	16%	17%								
Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	329 Unit	200 Unit								
Jumlah Rumah tangga pengguna air bersih	95%	96%								
Jumlah Rumah tangga pengguna listrik	95%	96%								
Jumlah Rumah tangga ber-Sanitasi sehat	85%	86%								
Prosentase rumah layak huni	84%	85%								

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TAHUN	PROYEKSI TAHUN	SKPD
				2014	2015	
1	2	3	4	5	6	8
			Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100 Unit	0	
			Cakupan rumah layak huni yang terjangkau	96%	97%	
			Prosentase rumah tinggal (RT) layak huni yang menggunakan air bersih	95%	96%	
			Jumlah Tempat Pemakaman Umum	9 TPU	10 TPU	
			Luas lahan Tempat Pemakaman Umum	447.396 m2	456.996 m2	
			Rasio luas lahan Tempat Pemakaman Umum / 1.000 orang	487,14 m2	458,19 m2	
			Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota 25% pada 2015	80%	81%	
			Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	10-15 menit	10-15 menit	
			Panjang drainase baru yang dibangun	250 km	275 km	
			Rasio pemeliharaan drainase	80%	81%	
			Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	3 Jaringan	2 Jaringan	
			Luasan PSU yang dibangun pihak ketiga	11%	12%	
			Rasio Luasan PSU yang diserahkan ke pemkot dibanding luasan PSU yang ada	11%	12%	

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Prioritas pembangunan Kota Malang sebagaimana dijelaskan pada Bab IV, pada bab ini dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan prioritas daerah, beserta tolok ukur dan target yang ingin dicapai termasuk pula pagu indikatifnya. Program dan kegiatan prioritas daerah dimaksud selanjutnya merupakan acuan bagi masing-masing SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD. Tabel rencana program dan kegiatan prioritas daerah di dalam RKPD Kota Malang Tahun 2015, adalah sebagai berikut :

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2015**

SKPD : DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				lokasi	target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		BELANJA LANGSUNG				154.312.590.000,00			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				3.603.835.800,00			
1	1.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan, 6 UPTD, Pengawas, 6 sekolah	12 bulan	1.600.471.400,00			
2	1.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik.	Terpenuhinya kebutuhan telephone, air dan listrik Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan, 6 UPTD, Pengawas, 6 sekolah	12 bulan	600.864.400,00			
3	1.01.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan kinerja dan tertib administrasi keuangan	Dinas Pendidikan	12 bulan	100.000.000,00			
4	1.01.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.	Peningkatan kebersihan kantor di lingkup Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan, 6 UPTD, Pengawas, 6 sekolah	12 bulan	175.000.000,00			
5	1.01.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan, 6 UPTD, Pengawas, 6 sekolah	12 bulan	160.000.000,00			

6	1.01.01.0	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tercukupinya kebutuhan listrik/penerangan bangunan kantor dengan pengadaan komponen listrik	Dinas Pendidikan, 6 UPTD, Pengawas, 6 sekolah	12 bulan	337.500.000,00		
7	1.01.01.0	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan (koran, majalah) di lingkup Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan, 6 UPTD, Pengawas, 6 sekolah	12 bulan	30.000.000,00		
8	1.01.01.0	01	17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Tercukupinya kebutuhan makan dan minum rapat dan tamu di lingkup Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan, 6 UPTD, Pengawas, 6 sekolah	12 bulan	150.000.000,00		
9	1.01.01.0	01	18	Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Peningkatan kinerja Dinas Pendidikan melalui rapat koordinasi dan konsultasi	Dinas Pendidikan	600 kali perjalanan dlm 12 bulan	300.000.000,00		
10	1.01.01.0	01	20	Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang Dan Jasa	Tercukupinya kebutuhan pengadaan barang dan jasa (monitoring dan honor)	Dinas Pendidikan	20 kali	50.000.000,00		
11	1.01.01.0	01		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya jasa keamanan kantor sehingga kantor menjadi lebih aman	Dinas Pendidikan	4 orang	100.000.000,00		
II	1.01.01.0	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				2.177.217.900,00		
12	1.01.01.0	02		Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Peningkatan kenyamanan penggunaan gedung kantor	Dinas Pendidikan	Gedung Dinas Pendidikan	250.000.000,00		
13	1.01.01.0	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Peningkatan kenyamanan dan kelancaraan penggunaan kendaraan dinas	Dinas Pendidikan, SKB	4 kendaraan dinas, 5 bus sekolah	222.117.900,00		

14	1.01.01.0	02	33	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor.	Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai	Dinas Pendidikan	Mebeluer kantor dan sarana penunjang lainnya	250.000.000,00		
15	1.01.01.0	02	48	Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Pendidikan Kota Malang	Peningkatan kenyamanan penggunaan gedung kantor	Dinas Pendidikan	1 Gedung Kantor	150.000.000,00		
16	1.01.01.0	02	71	Pemeliharaan Sarana Kantor	Terwujudnya sarana kantor yang baik	Dinas Pendidikan	Alat-alat kantor	10.100.000,00		
17	1.01.01.0	02	81	Pengadaan Sarana Prasarana Rusunawa	Tersedianya sarana dan prasarana Rusunawa yang memadai	Dinas Pendidikan	Meubeleur dan penambahan daya listrik	150.000.000,00		
18	1.01.01.0	02	87	Rehabilitasi Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Pada Dinas Pendidikan Kota Malang	Terwujudnya Gedung sanggar yang layak dan memadai	SKB Dinas Pendidikan Kota Malang	1 Gedung SKB	200.000.000,00		
19	1.01.01.0	02		Pengadaan Kendaraan Kantor	Tersediannya sarana transportasi darat yang memadai	Dinas Pendidikan	15 Kendaraan Dinas roda dua	95.000.000,00		
20	1.01.01.0	02		Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan Kota Malang	Tersedianya gedung kantor	Dinas Pendidikan	1 Gedung Kantor	850.000.000,00		
III	1.01.01.0	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				100.000.000,00		
21	1.01.01.0	06	64	Pemutahiran Database Sertifikasi dan Gaji	Peningkatan keakuratan data base sertifikasi dan gaji	Dinas Pendidikan	5000 PNS Dinas Pendidikan	100.000.000,00		
IV	1.01.01.0	15		Program Pendidikan Anak Usia Dini				2.136.600.000,00		
22	1.01.01.0	15		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa	Tersedianya sarana pendidikan	Dinas Pendidikan	4 lembaga	250.000.000,00		
23	1.01.01.0	15	68	Rehabilitasi Gedung TK	Tersedianya gedung TK yang representatif	Lembaga TK	7 lembaga	1.000.000.000,00		
24	1.01.01.0	15		Pengadaan Mebeulaer Sekolah	Tersedianya sarana prasarana pendidikan	Lembaga TK	1 paket meja dan kursi	100.000.000,00		

25	1.01.01.0	15	72	Gebyar Siswa PAUD	Terlaksananya gebyar siswa PAUD	Dinas Pendidikan	Siswa, guru	180.000.000,00		
26	1.01.01.0	15	73	Pelaksanaan Lomba Gugus PAUD	Terselenggaranya Lomba Gugus PAUD Tk.Kecamatan, Tk. Kota Malang, Tk. Prov dan Naional dan Pembinaan Gugus PAUD	Dinas Pendidikan	50 orang dan 8 lembaga	150.000.000,00		
27	1.01.01.0	15	77	Seleksi dan Pembinaan Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi	Terlaksananya seleksi dan pembinaan apresiasi PTK PAUDNI berprestasi	Dinas Pendidikan	40 orang	15.000.000,00	banprov	
28	1.01.01.0	15		Hari Anak Nasional (PAUD)	Terlaksananya Hari Anak Nasional	Dinas Pendidikan	100 orang	150.000.000,00		
29				Pelaksanaan Pembinaan Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Non Formal dan Informal	Terlaksananya pembinaan PTK dalam rangka Jambore PTK PAUD Nor Formal dan Informal	Dinas Pendidikan	1 Kegiatan	10.000.000,00	banprov	
30	1.01.01.0	15		Pendampingan Kurikulum 2013	Terselenggaranya pendampingan kurikulum 2013 satuan pendidikan PAUD Formal	Lembaga PAUD Dinas Pendidikan Kota Malang	100 Lembaga PAUD	100.000.000,00		
31	1.01.01.0	15		Sistem Informasi Manajemen PAUDNI	Tersedianya manajemen pendataan PAUDNI	Dinas Pendidikan	Database PAUDNI	100.000.000,00		
	1	1.0 1.0 1	15	Bantuan Operasional Sekolah TKLB	136 siswa TKLB , Rp.50.000, selama 12 bulan	Dinas Pendidikan	Operasional belajar mengajar menjadi lancar	81.600.000,00		
V	1.01.01.0	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				113.472.417.700,00		
32	1.01.01.0	16	19	Pengadaan Mebeluer SD	Tersedianya Mebeluer yang memadai	Lembaga SD	1400 Set	-		

33	1.01.01.0	16	63	Penyediaan biaya operasional sekolah daerah (SD)	Jumlah Siswa yang diberi Bantuan	Lembaga SD	59607 siswa	29.754.477.500,00		
34	1.01.01.0	16	131	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI	Terbinanya Siswa Berprestasi dibidang Olahraga	Dinas Pendidikan	10 Cabang Olahraga	600.000.000,00		
35	1.01.01.0	16	143	Penyelenggaraan Ujian Sekolah (SD/MI/PK)	Penyelenggaraan Ujian Sekolah	Lembaga SD	14.240 Siswa	1.106.040.000,00		
36	1.01.01.0	16	168	Peningkatan Akademis Pada Pusat Layanan Autis	Jumlah Tenaga Pendidik dan Non Pendidik	Pusat Layanan Autis Dinas Pendidikan	4 Tenaga Medis, 1 Manager, 25 Guru/Terapis, 1 Ka. TU, 1 Staf TU, 1 Tukang	690.000.000,00		
37	1.01.01.0	16	191	Rehab Sedang/Berat Gedung SD	Tersedianya Gedung Sekolah yang Memadai	Lembaga SD	50 Lembaga SD	7.866.087.000,00	DID	
38	1.01.01.0	16	195	Olimpiade MIPA SD/MI	Terbinanya siswa berprestasi dibidang MIPA	Dinas Pendidikan	600 Siswa	290.000.000,00		
39	1.01.01.0	16	197	Minat Bakat Dan Kreativitas SD/MI	Terbinanya siswa berprestasi dibidang FLS2N, Seni Pelajar, Kader Triwisada dan Siswa Teladan	Dinas Pendidikan	600 Siswa	500.000.000,00		
40	1.01.01.0	16	198	Minat Bakat dan Kreativitas PK	Terbinanya siswa berprestasi dibidang FLS2N, OSN, O2SN	Dinas Pendidikan	300 Siswa	200.000.000,00		
41	1.01.01.0	16	199	Pendampingan Pendidikan Inklusif	Penyelenggaraan Pendampingan Pendidikan Inklusif	Lembaga Sekolah Inklusif	100 orang	200.000.000,00		
42	1.01.01.0	16	200	Lomba Manajemen Klub Olah raga SD	Penyelenggaraan Lomba Manajemen Klub OR SD	Klub Olahraga SD	41 Gugus	300.000.000,00		

43	1.01.01.0	16	205	Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Tingkat SD	Penyelenggaraan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Satuan Pendidikan (SD)	Lembaga SD	150 Orang	150.000.000,00		
44	1.01.01.0	16	206	Penyediaan Sarana Sekolah bagi Siswa Prasejahtera SMP	Tersedianya sarana sekolah bagi siswa prasejahtera SMP	Lembaga SMP	600 siswa	180.000.000,00		
45	1.01.01.0	16	207	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah (SMP)	Tersedianya bantuan operasional untuk siswa	SMP, SMPLB Negeri/ Swasta	12.496 siswa	25.563.481.000,00		
46	1.01.01.0	16	208	Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan SMP	Tersedianya bangunan SMP yang memadai	Lembaga SMP	8 lembaga	1.553.661.000,00	DID	
47	1.01.01.0	16	209	Minat Bakat dan Kreativitas SMP, MTS	Terciptanya kompetisi kreatifitas Siswa SMP, MTs	Dinas Pendidikan	20 lomba	200.000.000,00		
48	1.01.01.0	16	210	Lomba Penelitian Karya Ilmiah (LPIR) SMP	Terciptanya kompetisi siswa dalam bidang penulisan karya tulis ilmiah	Dinas Pendidikan	75 siswa	100.000.000,00		
49	1.01.01.0	16	213	Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 tingkat SMP	Kurikulum 2013 dapat diimplementasikan dengan baik	SMP, SMPLB Negeri/ Swasta	190 orang	100.000.000,00		
50	1.01.01.0	16		Minat Bakat dan Kreativitas Pendidikan Agama	Penyelenggaraan Minat, Bakat dan Kreativitas Keagamaan	Dinas Pendidikan	5 Lomba	100.000.000,00		
51	1.01.01.0	16	215	Lomojari SMP Terbuka	Terlaksananya lomojari	5 SMP Terbuka	200 siswa	150.000.000,00		
52	1.01.01.0	16	216	Sosialisasi Dapodik SD, SMP	Terselenggaranya sosialisasi Dapodik	Lembaga SD dan SMP	1 Kegiatan	300.000.000,00		
53	1.01.01.0	16	218	Try Out Sekolah Dasar	Pelaksanaan Try Out Ujian Sekolah	Lembaga SD/MI	14240 siswa	350.000.000,00		
54	1.01.01.0	16	220	Kantin Kejujuran SD/PK	Tersedianya Kantin Kejujuran SD	Lembaga SD	1 Lembaga	7.405.000,00	banprov	
55	1.01.01.0	16	223	Pengadaan Alat Peraga SMP	Tersedianya Alat Peraga SMP	Lembaga SMP	27 Lembaga SMP	2.984.634.000,00	DID	

56	1.01.01.0	16	224	Pengadaan Alat Peraga SD	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan SD yang Bermutu	Lembaga SD	196 Lembaga	15.680.000.000,00	DID	
57	1.01.01.0	16	227	Kantin Kejujuran SMP	Tersedianya Kantin Kejujuran SMP	Lembaga SMP	1 Lembaga	10.000.000,00	banprov	
58	1.01.01.0	16	229	Bantuan Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera SD (Sekolah Gratis)	Jumlah Siswa yang diberi Bantuan	Lembaga SD	2500 Siswa	1.000.000.000,00		
59	1.01.01.0	16	230	Bantuan Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera SMP (Sekolah Gratis)	Tersedianya bantuan operasional untuk siswa Prasejahtera SMP	Lembaga SMP	1432 Siswa	0,00		
60	1.01.01.0	16	231	Sosialisasi Penanganan ABK	Terwujudnya Peningkatan Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus	Dinas Pendidikan	20 Guru	200.000.000,00		
61	1.01.01.0	16	232	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah (SD)	siswa SD Swasta		Tercukupinya kebutuhan Operasional sekolah bagi siswa	7.150.830.000,00		
62	1.01.01.0	16	233	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah (SMP)	siswa SMP Swasta		Tercukupinya kebutuhan Operasional sekolah bagi siswa	10.545.802.200,00		
63	1.01.01.0	16	234	Insentif Madin dan Guru Swasta (BPPDGS)	Peningkatan SDM Pendidik	Dinas Pendidikan	siswa eningkatkan kesejahteraan pendidik di lembaga SD dan SMP Swasta	5.640.000.000,00		
VI	1.01.01.0	17		Program Pendidikan Menengah				10.433.500.000,00		
64	1.01.01.0	17	102	Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran 2014/2015	Pelayanan Penerimaan Siswa Baru yang prima dan akuntabel	Kota Malang	54 lembaga	650.000.000,00		
65	1.01.01.0	17	157	Beasiswa Prestasi SMA Leadership Academy	Siswa Kota Malang yang berprestasi dari keluarga kurang mampu	Kota Malang	125 siswa	1.562.500.000,00		

66	1.01.01.0	17	158	Beasiswa bagi Siswa Prasejahtera SMK Taruna 13	Siswa Kota Malang yang berprestasi dari keluarga kurang mampu	SMKN 13	200 siswa	850.000.000,00	
67	1.01.01.0	17	187	Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Bagi SMA/ SMK/MA	Terlaksananya program bantuan siswa miskin	SMA, SMK, SMALB, MA Negeri, Swasta	153.800 siswa	3.510.000.000,00	
68	1.01.01.0	17	191	Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Jenjang SLTA				1.092.000.000,00	Banprov
69	1.01.01.0	17	200	Minat Bakat dan Kreativitas SMA, SMK, MA	Terselenggaranya kompetisi kreatifitas antar siswa SMA, MA dan SMK	Kota Malang	25 Lomba	350.000.000,00	
70	1.01.01.0	17	201	Pembinaan Prestasi Siswa untuk Olimpiade	Meningkatnya kompetisi siswa dalam bidang sains	Kota Malang	13 Lomba	300.000.000,00	
71	1.01.01.0	17	202	Lomba Olimpiade Penelitian Siswa (OPSI) SMA, SMK, MA	Terciptanya kompetisi siswa dalam bidang penulisan karya tulis ilmiah	Kota Malang	100 siswa	100.000.000,00	
72	1.01.01.0	17	204	Sosialisasi Dapodik SMA,SMK,SMLB	Tersosialisasinya aplikasi dapodik SMA, SMK	Kota Malang	210 orang	250.000.000,00	
73	1.01.01.0	17	211	Community College / Akademi Komunitas (AK)/ Pendidikan Vokasi				40.000.000,00	Banprov
74	1.01.01.0	17	216	Pengadaan Mebeleur SMK	Tersedianya mebeleur yang memadai untuk SMK	Kota Malang	1 lembaga	175.000.000,00	
75	1.01.01.0	17	217	Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Tingkat SMA/SMK	Terselenggaranya pendampingan implementasi kurikulum 2013 dengan lancar	Kota Malang	1 lembaga	150.000.000,00	
76	1.01.01.0	17	221	Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Bagi SMA/ SMK/MA	2400 Siswa	Kota Malang	Terpenuhinya bantuan bagi siswa prasejahtera	1.404.000.000,00	
VII	1.01.01.0	18		Program Pendidikan Non Formal				3.532.500.000,00	
77	1.01.01.0	18	38	Penyelenggaraan Ujian Paket A, B dan C	Terselenggaranya Ujian Paket A, B dan C Periode I dan II	Kota Malang	220 siswa/Warga Belajar	200.000.000,00	

78	1.01.01.0	18	61	Hari Aksara Internasional (HAI)	Terpromosikannya dan terpamerkan hasil kreatifitas dan Inovasi keberhasilan hidup PNFI	Kota Malang	1 stand Pameran, 10 Macam Produk (pameran)	150.000.000,00		
79	1.01.01.0	18	76	Seleksi dan Pembinaan Paskibraka Kota Malang	Terbentuknya Tim Pasukan Pengibar Bendera yang cinta NKRI	Kota Malang	80 Orang Paskibraka Kota Malang	650.000.000,00		
80	1.01.01.0	18		Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Terciptanya sekolah yang berstandart sekolah sehat	Kota Malang	9 sekolah yang menjadi pemenang lomba UKS	150.000.000,00		
81	1.01.01.0	18	88	Seleksi dan Pembinaan Gita Bahana Kota Malang	Terbinanya Tim Paduan suara Gita Bahana untuk Penunjang kegiatan upacara PHBN di kota Malang	Kota Malang	100 siswa	75.000.000,00		
82	1.01.01.0	18	89	Pembinaan dan Penyediaan Sarana Prasarana Sekolah Adiwiyata	Terciptanya sekolah yang berstandart adiwiyata	Kota Malang	50 lembaga	150.000.000,00		
83	1.01.01.0	18	90	Peningkatan Kesejahteraan Tutor, Pamong, dan Tenaga Kependidikan Non Formal	Meningkatnya Kesejahteraan Pendidik	Kota Malang	100 Tutor	200.000.000,00		
84	1.01.01.0	18	92	Lomba Kreatifitas Sekolah dan Lingkungan (Ecopark School)	Tersedianya sarana prasarana sekolah yang ramah lingkungan	Kota Malang	150 lembaga	750.000.000,00		
85	1.01.01.0	18		Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup Bagi Keluarga Prasejahtera SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) (Inovasi)	Meningkatnya kecakapan Hidup Bagi keluarga Prasejahtera	Kota Malang	1 lab	250.000.000,00		
86	1.01.01.0	18		Pelatihan Bahasa Inggris bagi Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C) di SKB (Sanggar Kegiatan Belajar)	Meningkatnya Warga Belajar Pendidikan kesetaraan	Kota Malang	Pelatihan buat 40 warga binaan	100.000.000,00		
87	1.01.01.0	18		Pekan Seni Pelajar	Peningkatan prestasi siswa di bidang seni	Kota Malang	Pelajar	200.000.000,00		

88	1.01	01.0	18		Peringatan Hardiknas	Terselenggaranya Peringatan Hardiknas dengan lancar	Kota Malang	1 paket kegiatan	400.000.000,00		
89	1.01	01.0	18		Operasi Sayang	Meningkatnya siswa di sekolah yang memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Kota Malang	20 lembaga	250.000.000,00		
90	1.01	01.0	18		Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Provinsi	Terlaksananya Peringatan Hari Aksara Internasional			7.500.000,00	Banprov	
VIII	1.01	01.0	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				12.928.520.000,00		
91	1.01	01.0	20	14	Diklat Calon Kepala Sekolah	Jumlah yang lulus seleksi, mengikuti diklat		Tersedianya calon kepala sekoah yang berkompeten	375.000.000,00		
92	1.01	01.0	20	29	Bimbingan Teknis Penghitungan Kenaikan Pangkat Guru Melalui Angka Kredit	Menguasai prosedur penetapan angka kreit jabatan fungsional dan cara penghitungannya	SMA N 09	Guru bisa menghitung angka kreditnya masing-masing untuk kenaikan pangkatnya	100.000.000,00		
93	1.01	01.0	20	46	Bantuan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS	Peningkatan SDM pendidik dan tenaga kependidikan	DINAS PENDIDIKAN	Meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan non PNS	11.207.520.000,00		
94	1.01	01.0	20	55	Pelatihan Guru Dalam Penulisan Karya Ilmiah, Penelitian Tindakan Kelas dan Lomba	Terlatihnya SDM Guru dalam pembuatan karya tulis	SMK N 02	Guru mampu dan mahir membuat karya tulis ilmiah	125.000.000,00		
95	1.01	01.0	20	66	BOP Madin	Terlaksananya dana bantuan operasional dan tambahan kesejahteraan guru swasta	SMA N 09	Terlaksananya penyaluran dana bantuan penyelenggaraan madin dan guru swasta	76.000.000,00		

96	1.01	01.0	20	90	Pelatihan Olimpiade Guru MIPA SD dan SMP	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik di bidang MIPA SD dan SMP	SMK N 02	Tersedianya guru SD dan SMP di bidang MIPA yang siap berkompetensi	150.000.000,00		
97	1.01	01.0	20	91	Pelatihan Olimpiade Guru MIPA SMA	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik di bidang MIPA SMA	SMK N 02	Tersedianya guru SMA di bidang MIPA yang siap berkompetensi	125.000.000,00		
98	1.01	01.0	20	92	Penyelenggaraan Lomba Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Berprestasi TK, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB	Meningkatnya mutu pengetahuan guru, Kepala Sekolah dan Pengawas berprestasi	SMA N 04	Terpilihnya guru, kepala sekolah dan pengawas yang berprestasi	250.000.000,00		
99	1.01	01.0	20	93	Seleksi Dan Pembinaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Berprestasi				20.000.000,00	Banprov	
100	1.01	01.0	20	95	Pembinaan KKG	Meningkatnya kompetensi guru SD	SMK N 02	Meningkatnya kemampuan guru dan pendidikan	300.000.000,00		
101	1.01	01.0	20	96	Pembinaan MGMP	Meningkatnya kompetensi guru SMP/SMA/SMK	SMK N 02	Meningkatnya kemampuan guru dan pendidikan	200.000.000,00		
IX	1.01	01.0	22		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				4.046.998.600,00		
102	1.01	01.0	22	16	Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan DPKM dan Komite Sekolah	Peningkatan manajemen DPKM dan Komite sekolah	Dinas Pendidikan	4 kegiatan (300 peserta)	300.000.000,00		
103	1.01	01.0	22		Monitoring dan Evaluasi Kurikulum 2013	Peningkatan pelaksanaan kurikulum 2013	Lembaga sekolah	Lembaga sekolah SD/SMP/SMA/SMK	150.000.000,00		
104	1.01	01.0	22	17	Pemutahiran Data Pendidikan	Adanya data pokok pendidikan	Dinas Pendidikan	Data Pokok Pendidikan	300.000.000,00		
105	1.01	01.0	22	32	Publikasi Informasi/ Layanan pendidikan	Peningkatan informasi/layanan pendidikan melalui media publikasi	Dinas Pendidikan	Setiap Bulan	625.600.000,00		
106	1.01	01.0	22	35	Pendataan Aset	Peningkatan keakuratan data aset Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	.. SD, ... SMP, ... SMA, ... SMK, 5 UPTD, Dinas Pendidikan	350.000.000,00		

107	1.01	01.0	22	36	Pelatihan dan Lokakarya Pengembangan Multimedia Interaktif	Peningkatan kemampuan guru dalam mengembangkan Multimedia interaktif	Lembaga Sekolah	60 Guru SD/SMP/SMA/SMK	400.000.000,00		
108	1.01	01.0	22	...	Peningkatan Prestasi Siswa Berprestasi (Siswa dan Guru)	Meningkatnya prestasi siswa	Siswa yang mengikuti lomba	Siswa yang berprestasi	100.000.000,00		
109	1.01	01.0	22	...	Lokakarya Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan	Peningkatan kemampuan manajemen sekolah dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan disekolah	Lembaga Sekolah Dasar dan menengah	.. SD, ... SMP, ... SMA, ... SMK, 5 UPTD, Dinas Pendidikan	300.000.000,00		
110	1.01	01.0	22	...	Penyusunan Jurnal Ilmiah dan Profil Dewan Pendidikan Kota Malang	Peningkatan informasi/layanan pendidikan melalui media jurnal dan profil	Dinas Pendidikan	4 jurnal, 1 profil	100.000.000,00		
111	1.01	01.0	22		Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	Peningkatan pengawasan terhadap kinerja bidang pendidikan	Dinas Pendidikan	4 bulan sekali	75.000.000,00		
112					Try Out Kejujuran	Peningkatan kejujuran siswa	Lembaga Sekolah	Siswa Tingkat terakhir SD/SMP/SMA/SMK, 2 kali	252.562.500,00		
113	1.01	01.0	22		Audit Sekolah oleh lembaga Independent (KAP)	Adanya management sekolah yang transparan dan akuntabel	Lembaga Sekolah	6 lembaga	70.000.000,00		
114	1.01	01.0	22		Pembinaan dan Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan	terlaksananya pembinaan penyusunan analisis jabatan dan beban kerja	Dinas Pendidikan	.. SD, ... SMP, ... SMA, ... SMK, 5 UPTD, Dinas Pendidikan	150.000.000,00		
115					Sosialisasi Sadar Hukum	Peningkatan kesadaran hukum peserta didik di lingkup Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	500 siswa SD, SMP, SMA, SMK	223.836.100,00		

116					Lokakarya Pengelolaan Jaringan Komputer di Sekolah	Peningkatan kemampuan teknis jaringan komputer di sekolah	Lembaga sekolah	20 lembaga	350.000.000,00		
117					Sosialisasi Manajemen Bank Soal di Sekolah	Adanya bank soal di sekolah	Lembaga SMP/SMA/SMK	40 lembaga	300.000.000,00		
X	1.01.01.0	25			Program Pengembangan Politeknik				1.881.000.000,00		
118	1.01.01.0	25	04		Peningkatan Akademis Mahasiswa	Peningkatan layanan mahasiswa pra sejahtera	Poltekkom	Peningkatan layanan mahasiswa pra sejahtera	1.881.000.000,00		

SKPD : DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				lokasi	target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
I	1.01.01.0	01				86.678.445.000,00			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				21.319.986.700,00			
1	1.01.01.0	01 02	100%	Kota Malang	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	325.875.500,00			
2	1.01.01.0	01 03	100%	Kota Malang	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	17.325.000,00			
3	1.01.01.0	01 07	100%	Kota Malang	Penyediaan jasa administrasi keuangan	125.114.000,00			
4	1.01.01.0	01 08	100%	Kota Malang	Penyediaan jasa kebersihan kantor	59.070.000,00			
					Honor tukang kebun / taman di gudang farmasi, Dinas Kesehatan dan penjaga gudang farmasi				

5	1.01.01.0	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	100%	Kota Malang	Alat tulis kantor	99.000.000,00		
6	1.01.01.0	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	Kota Malang	Form, blanko kegiatan administrasi perkantoran, jilid buku, fotocopy	37.950.000,00		
7	1.01.01.0	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	100%	Kota Malang	Penyediaan komponen listrik	7.590.000,00		
8	1.01.01.0	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Kota Malang	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.239.000,00		
9	1.01.01.0	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga/ bahan pembersih	100%	Kota Malang	Peralatan rumah tangga	23.001.000,00		
10	1.01.01.0	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	Kota Malang	Penyediaan bahan bacaan / koran	5.412.000,00		
11	1.01.01.0	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	100%	Kota Malang	Penyediaan makanan dan minuman tamu dan rapat dinas	39.600.000,00		
12			18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	Kota Malang	Perjalanan dinas rapat dan konsultasi dalam dan luar daerah	125.000.000,00		
13	1.01.01.0	02	20	Kegiatan penunjang pengadaan barang dan jasa	100%	Kota Malang	Proses pengadaan barang jasa sesuai dengan Perpres No. 54 Th 2010 dan Pepres No. 70 Th 2012	100.000.000,00		
14	1.01.01.0	02	35	Operasional Puskesmas Kedungkandang	100%	Kota Malang	Penunjang operasional puskesmas	325.560.000,00		
15	1.01.01.0	02	37	Operasional Puskesmas Kendalsari	100%	Kota Malang	Penunjang operasional puskesmas	245.043.500,00		
16	1.01.01.0	02	38	Operasional Puskesmas Arjuno	100%	Kota Malang	Penunjang operasional puskesmas	512.624.000,00		
17	1.01.01.0	02	39	Operasional Puskesmas Bareng	100%	Kota Malang	Penunjang operasional puskesmas	265.640.000,00		
18	1.01.01.0	02	40	Operasional Puskesmas Pandanwangi	100%	Kota Malang	Penunjang operasional puskesmas	305.770.000,00		
19	1.01.01.0	02	41	Operasional Puskesmas Cisadea	100%	Kota Malang	Penunjang operasional puskesmas	247.620.000,00		

20	1.01.01.0	02	42	Operasional Puskesmas Kendalkerep	100%	Kota Malang	Penunjang operasional puskesmas	400.000.000,00
21	1.01.01.0	02	43	Operasional Puskesmas Mojolangu	100%	Kota Malang	Penunjang operasional puskesmas	280.000.000,00
22	1.01.01.0	02	44	Operasional Puskesmas Dinoyo	100%	Kota Malang	Penunjang operasional puskesmas	534.267.700,00
23	1.01.01.0	02	45	Operasional Puskesmas Janti	100%	Kota Malang	Penunjang operasional puskesmas	275.730.000,00
24	1.01.01.0	02	46	Operasional Puskesmas Ciptomulyo	100%	Kota Malang	Penunjang operasional puskesmas	229.770.000,00
25	1.01.01.0	02	47	Operasional Puskesmas Mulyorejo	100%	Kota Malang	Penunjang operasional puskesmas	268.357.000,00
26	1.01.01.0	02	48	Operasional Puskesmas Arjowinangun	100%	Kota Malang	Penunjang operasional puskesmas	467.734.000,00
27	1.01.01.0	15	49	Operasional Puskesmas Gribig	100%	Kota Malang	Penunjang operasional puskesmas	258.180.000,00
28	1.01.01.0	15	50	Operasional Laboratorium Kesehatan	100%	Kota Malang	Penunjang operasional Labkes	130.000.000,00
29	1.01.01.0	15	52	Operasional UPT P3K	100%	Kota Malang	Penunjang operasional UPT P3K	65.820.000,00
30	1.01.01.0	15	53	Operasional Rumah Bersalin	100%	Kota Malang	Penunjang operasional Rumah Bersalin	482.467.000,00
31	1.01.01.0	15	54	Operasional Puskesmas Rampal Celaket	100%	Kota Malang	Penunjang operasional puskesmas	300.000.000,00
32	1.01.01.0	15	55	Operasional Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga (PPKO)	100%	Kota Malang	Penunjang operasional UPT PPKO	216.616.000,00
33	1.01.01.0	15	80	Operasional rumah sakit	100%	Kota Malang	Penunjang operasional RS	2.237.131.000,00
34	1.01.01.0	02	82	Pengelolaan administrasi perkantoran	100%	Kota Malang	Honor lembur tenaga administrasi	60.720.000,00
35	1.01.01.0	02	89	Operasional Puskesmas Arjuno (Dana Kapitasi JKN)	100%	Kota Malang	Penunjang operasional puskesmas (kapitasi JKN)	758.880.000,00

36	1.01.01.0	15	90	Operasional Puskesmas Bareng (Dana Kapitasi JKN)	100%	Kota Malang	Penunjang operasional puskesmas (kapitasi JKN)	528.696.000,00		
37	1.01.01.0	02	91	Operasional Puskesmas Rampalcelaket (Dana Kapitasi JKN)	100%	Kota Malang	Penunjang operasional puskesmas (kapitasi JKN)	487.368.000,00		
38	1.01.01.0	02	92	Operasional Puskesmas Cisadea (Dana Kapitasi JKN)	100%	Kota Malang	Penunjang operasional puskesmas (kapitasi JKN)	610.200.000,00		
39	1.01.01.0	02	93	Operasional Puskesmas Kendalkerep (Dana Kapitasi JKN)	100%	Kota Malang	Penunjang operasional puskesmas (kapitasi JKN)	1.062.720.000,00		
40	1.01.01.0	02	94	Operasional Puskesmas Pandanwangi (Dana Kapitasi JKN)	100%	Kota Malang	Penunjang operasional puskesmas (kapitasi JKN)	950.400.000,00		
41	1.01.01.0	16	95	Operasional Puskesmas Kedungkandang (Dana Kapitasi JKN)	100%	Kota Malang	Penunjang operasional puskesmas (kapitasi JKN)	1.258.856.000,00		
42	1.01.01.0	16	96	Operasional Puskesmas Gribig (Dana Kapitasi JKN)	100%	Kota Malang	Penunjang operasional puskesmas (kapitasi JKN)	793.296.000,00		
43	1.01.01.0	16	97	Operasional Puskesmas Arjowinangun (Dana Kapitasi JKN)	100%	Kota Malang	Penunjang operasional puskesmas (kapitasi JKN)	740.808.000,00		
44	1.01.01.0	16	98	Operasional Puskesmas Janti (Dana Kapitasi JKN)	100%	Kota Malang	Penunjang operasional puskesmas (kapitasi JKN)	1.510.104.000,00		
45	1.01.01.0	16	99	Operasional Puskesmas Ciptomulyo (Dana Kapitasi JKN)	100%	Kota Malang	Penunjang operasional puskesmas (kapitasi JKN)	657.520.000,00		
46	1.01.01.0	16	100	Operasional Puskesmas Mulyorejo (Dana Kapitasi JKN)	100%	Kota Malang	Penunjang operasional puskesmas (kapitasi JKN)	613.368.000,00		

47	1.01.01.0	16	101	Operasional Puskesmas Dinoyo (Dana Kapitasi JKN)	100%	Kota Malang	Penunjang operasional puskesmas (kapitasi JKN)	835.056.000,00		
48	1.01.01.0	16	102	Operasional Puskesmas Mojolangu (Dana Kapitasi JKN)	100%	Kota Malang	Penunjang operasional puskesmas (kapitasi JKN)	608.400.000,00		
49	1.01.01.0	16	103	Operasional Puskesmas Kendalsari (Dana Kapitasi JKN)	100%	Kota Malang	Penunjang operasional puskesmas (kapitasi JKN)	745.488.000,00		
50	1.01.01.0	16	104	Operasional Rumah Bersalin (Dana Kapitasi JKN)	100%	Kota Malang	Penunjang operasional RB (kapitasi JKN)	21.600.000,00		
II	1.01.01.0	16		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				2.020.000.000,00		
51	1.01.01.0	16	22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	100%	Kota Malang	Gedung kantor Dinas Kesehatan	90.000.000,00		
52	1.01.01.0	16	24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	100%	Kota Malang	Kendaraan dinas / operasional Dinas Kesehatan	180.000.000,00		
53	1.01.01.0	16	71	Renovasi pagar gedung dinas	100%	Kota Malang	Pagar gedung kantor Dinas Kesehatan	100.000.000,00		
54	1.01.01.0	16	72	Renovasi gedung dinas	100%	Kota Malang	Gedung kantor Dinas Kesehatan	150.000.000,00		
55	1.01.01.0	16	73	Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan olahraga	50%	Kota Malang	sarana dan prasarana kesehatan olahraga	500.000.000,00		
56	1.01.01.0	16	75	Pengadaan mobil operasional untuk fogqing	5 mobil	Kota Malang	mobil operasional fogqing	1.000.000.000,00		
III	1.01.01.0	16		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				135.000.000,00		
57	1.01.01.0	16	21	Sertifikasi pengadaan barang dan jasa	100%	Kota Malang	Pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan	75.000.000,00		
58	1.01.01.0	16	31	Penyusunan SOP Dinas Kesehatan	100%	Kota Malang	Dokumen SOP	10.000.000,00		
59	1.01.01.0	16	33	Peningkatan kapasitas SDM	80%	Kota Malang	Pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan	50.000.000,00		
IV	1.01.01.0	16		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				280.000.000,00		

60	1.01.01.0	16	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	80%	Kota Malang	Dokumen LAKIP Dinas Kesehatan	20.000.000,00		
61	1.01.01.0	16	18	Penyediaan Jaringan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	100%	Kota Malang	jaringan internet di Dinkes Kota Malang	10.000.000,00		
62	1.01.01.0	16	19	Pengembangan Sistem Informasi Puskesmas Elektronik (SIMPUSTRONIK)	40%	Kota Malang	Sistem Informasi Puskesmas Elektronik	200.000.000,00		
63	1.01.01.0	16	20	Penyusunan IKM Dinas Kesehatan	1 dokumen	Kota Malang	Dokumen IKM	10.000.000,00		
64	1.01.01.0	16	28	Penyusunan Profil Kesehatan Kota Malang	80%	Kota Malang	Buku Profil Kesehatan Kota Malang	40.000.000,00		
V	1.01.01.0	16		Program obat dan perbekalan kesehatan				3.211.385.500,00		
65	1.01.01.0	16	01	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	3 paket	Kota Malang	Obat, bahan kimia dan perbekalan kesehatan	2.434.485.500,00		
66	1.01.01.0	16	14	Pengadaan obat penunjang	1 paket	Kota Malang	Obat penunjang	400.000.000,00		
67	1.01.01.0	16	17	Pengadaan bahan radiologi	6 item	Kota Malang	bahan kimia untuk pelayanan radiologi di puskesmas	100.000.000,00		
68	1.01.01.0	16	26	Pengadaan bahan laboratorium kesehatan	100%	Kota Malang	Bahan kimia untuk pelayanan di laboratorium kesehatan	80.000.000,00		
69	1.01.01.0	16	27	Bimbingan teknis sistem informasi pelaporan narkotika dan psikotropika (SIPNAP)	90%	Kota Malang	Apoteker penanggungjawab apotek / puskesmas / ruang farmasi / instalasi farmasi	48.400.000,00		
70	1.01.01.0	16	28	Bimbingan teknis manajemen obat bagi petugas pengelola obat di puskesmas/ RB/ RS/ Gudang Farmasi	100%	Kota Malang	apoteker dan tenaga teknis kefarmasian puskesmas / RB / RS / Gudang farmasi	102.000.000,00		
71	1.01.01.0	16	29	Bimbingan teknis pemakaian obat secara rasional bagi tenaga kesehatan di puskesmas/ RB/ RS	85%	Kota Malang	apoteker, dokter, perawat, bidan, petugas pengelola obat	16.500.000,00		
72	1.01.01.0	16	30	Bimbingan teknis peningkatan pelayanan farmasi komunitas bagi apoteker dan tenaga teknis kefarmasian	150 orang	Kota Malang	apoteker, tenaga teknis kefarmasian apotek/ puskesmas / ruang farmasi / instalasi farmasi	30.000.000,00		
VI	1.01.01.0	16		Program upaya kesehatan masyarakat				13.276.688.000,00		

73	1.01.01.0	16	01	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya	100%	Kota Malang	Masyarakat miskin Kota Malang	10.000.000.000,00
74	1.01.01.0	16	19	Penyelenggaraan perizinan sarana dan tenaga kesehatan	80%	Kota Malang	sarana dan tenaga kesehatan	85.000.000,00
75	1.01.01.0	17	20	Pemilihan tenaga kesehatan teladan Kota Malang	75%	Kota Malang	tenaga kesehatan puskesmas	55.000.000,00
76	1.01.01.0	17	26	Penilaian kinerja puskesmas Kota Malang	15 puskesmas	Kota Malang	pukesmas	85.000.000,00
77	1.01.01.0	17	37	Pemantapan program kesehatan indera	15 puskesmas	Kota Malang	tenaga kesehatan puskesmas	40.000.000,00
78	1.01.01.0	17	55	Pemantapan Program Kesehatan Jiwa di Puskesmas	15 puskesmas	Kota Malang	tenaga kesehatan puskesmas	30.536.000,00
79	1.01.01.0	17	62	Pemantapan Program Kesehatan Olahraga di Puskesmas	50%	Kota Malang	tenaga medis / paramedis dan pengelola program	50.000.000,00
80	1.01.01.0	17	74	Pemilihan puskesmas berprestasi	75%	Kota Malang	15 puskesmas	92.000.000,00
81			78	Peningkatan Pelayanan Spesialistik di Puskesmas di Kota Malang	1 orang	Kota Malang	dokter spesialis	6.500.000,00
82	1.01.01.0	17	79	Akreditasi tenaga kesehatan	80%	Kota Malang	tenaga fungsional di puskesmas dan Dinas Kesehatan	97.000.000,00
83	1.01.01.0	17	80	Penyusunan distric health account (DHA)	1 paket	Kota Malang	Lintas sektor	29.000.000,00
84	1.01.01.0	17	87	Pengembangan taman posyandu	1 paket	Kota Malang		38.152.000,00
85	1.01.01.0	17	88	Pemantapan pengelolaan program JKN		Kota Malang	Lintas sektor	70.000.000,00
86	1.01.01.0	17	89	Pelayanan kesehatan masyarakat Kota Malang yang rawat inap di puskesmas dan jaringannya serta RSB	1 paket	Kota Malang	Pemeriksaan medis pasien JKN	1.600.000.000,00
87	1.01.01.0	17	90	Pertemuan pembinaan sarana dan tenaga kesehatan	75%	Kota Malang	sarana dan tenaga kesehatan di Kota Malang	70.000.000,00
88	1.01.01.0	17	91	Pelatihan GELS (general emergency life support) bagi petugas IGD	40 orang	Kota Malang	tenaga medis dan paramedis	93.500.000,00
89	1.01.01.0	17	92	Sosialisasi akreditasi puskesmas dan laboratorium	puskesmas dan 1 la	Kota Malang	puskesmas dan labkes	50.000.000,00
90	1.01.01.0	17	93	Akreditasi puskesmas dan laboratorium kesehatan	4 puskesmas	Kota Malang	puskesmas	200.000.000,00
91	1.01.01.0	17	94	Sosialisasi puskesmas BLUD	15 puskesmas	Kota Malang	puskesmas	40.000.000,00
92	1.01.01.0	17	95	Revitasasi pelayanan di puskesmas menjadi BLU	20 orang	Kota Malang	puskesmas	100.000.000,00
93	1.01.01.0	17	96	Pelatihan BCLS	40 orang	Kota Malang	tenaga medis, paramedis	50.000.000,00
94	1.01.01.0	17	97	Pelatihan BTLS	40 orang	Kota Malang	tenaga medis, paramedis	60.000.000,00
95	1.01.01.0	17	98	Pelatihan Flebotomi untuk tenaga laboratorium kesehatan	30 orang	Kota Malang	tenaga paramedis, analis	90.000.000,00

96	1.01.01.0	17	99	Bimbingan teknis petugas pemegang program kesehatan olahraga di puskesmas	15 orang	Kota Malang	pengelola program kesehatan olah raga	20.000.000,00		
97			100	Pelatihan CHN	40 orang	Kota Malang	pengelola program CHN	80.000.000,00		
98	1.01.01.0	17	101	Pertemuan kesehatan olahraga	100%	Kota Malang	pengelola program kesehatan olah raga	50.000.000,00		
99	1.01.01.0	17	102	Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Kota Malang	tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas	95.000.000,00		
VII				Program pengawasan obat dan makanan				350.000.000,00		
100			14	Pengawasan dan pembinaan sarana farmasi	80%	Kota Malang	apotek / intalasi farmasi / ruang farmasi / puskesmas	10.000.000,00		
101	1.01.01.0	18	16	Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang keamanan produk pangan	2 x 50 orang	Kota Malang	masyarakat	30.000.000,00		
102	1.01.01.0	18	17	Penyuluhan bahaya kosmetika ilegal bagi masyarakat dan pengelola salon	2 x 50 orang	Kota Malang	pengelola salon kecantikan dan masyarakat	30.000.000,00		
103	1.01.01.0	18	18	Penyuluhan keamanan pangan kepada industri rumah tangga pangan dalam rangka sertifikasi	4 x 60 orang	Kota Malang	industri rumah tangga pangan	60.000.000,00		
104	1.01.01.0	18	19	Peningkatan pengetahuan siswa sekolah tentang keamanan jajanan anak sekolah	3 x 200 orang	Kota Malang	siswa sekolah	30.000.000,00		
105	1.01.01.0	18	20	Pengambilan dan pengujian laboratorium sampel kosmetika	50 sampel	Kota Malang	kosmetika yang beredar di masyarakat	40.000.000,00		
106	1.01.01.0	18	21	Pertemuan petugas pengelola alat kesehatan puskesmas dan UPT Dinas Kesehatan	65%	Kota Malang	petugas pengelola alat kesehatan puskesmas dan UPT Dinas Kesehatan	50.000.000,00		
107	1.01.01.0	18	23	Pertemuan dan pembinaan pengelola salon kecantikan	2 x 50 orang	Kota Malang	pengelola salon kecantikan	40.000.000,00		
108	1.01.01.0	18	24	Sosialisasi pengobatan diri sendiri (swa medika) kepada masyarakat	2 x 75 orang	Kota Malang	masyarakat	26.000.000,00		
109	1.01.01.0	18	25	Bimtek petugas puskesmas dalam rangka pengawasan keamanan pangan	1 kali	Kota Malang	petugas puskesmas	12.000.000,00		
110	1.01.01.0	18	26	Pelatihan IRTP untuk pembuatan produk pangan tanpa bahan berbahaya	50 orang	Kota Malang	industri rumah tangga pangan	22.000.000,00		
VIII	1.01.01.0	18		Program pengembangan obat asli Indonesia				32.000.000,00		

111	1.01.01.0	18	08	Pengawasan dan pembinaan obat tradisional, salon dan toko kosmetik	200 sarana	Kota Malang	pengelola obat tradisional, salon dan toko kosmetika	12.000.000,00		
112	1.01.01.0	18	10	Pertemuan dan pembinaan pengelola jamu dan toko jamu	2 x 50 orang	Kota Malang	pengelola jamu dan masyarakat	20.000.000,00		
IX	1.01.01.0	18		Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masvarakat				795.000.000,00		
113	1.01.01.0	18	14	Pemantapan program bina kesehatan bersumberdaya masyarakat	148 orang	Kota Malang	pengelola program lansia, UKBM, UKS	15.000.000,00		
114			17	Pelatihan kader kesehatan remaja	350 orang	Kota Malang	siswa SMP dan SMA	70.000.000,00		
115			32	Pembinaan anggota saka bakti husada	165 orang	Kota Malang	anggota Saka Bakti Husada	17.000.000,00		
116	1.01.01.0	20	36	Temu kader posyandu	500 orang	Kota Malang	Kader posyandu	75.000.000,00		
117	1.01.01.0	20	37	Pelatihan kader kelurahan siaga	250 orang	Kota Malang	Kader Kelurahan Siaga	38.000.000,00		
118	1.01.01.0	20	38	Pemeriksaan dan Pendataan Tingkat Kebugaran Masyarakat Kota Malang	100%	Kota Malang	masyarakat kota malang	50.000.000,00		
119	1.01.01.0	20	46	Penyebaran informasi kesehatan melalui media cetak dan elektronik	5 paket	Kota Malang	cetak leafleat, lembar balik, poster berbingkai, buku saku serta siaran TV (ikaln layanan masvarakat)	125.000.000,00		
120	1.01.01.0	20	50	Rehab Baliho	100%	Kota Malang	8 baliho	250.000.000,00		
121	1.01.01.0	20	51	Seminar kesehatan olahraga	100%	Kota Malang	masyarakat	30.000.000,00		
122	1.01.01.0	20	52	Bimbingan teknis pada guru olahraga tentang kesehatan di sekolah	25%	Kota Malang	Guru olahraga	50.000.000,00		
123	1.01.01.0	20	53	Bimbingan teknis pada petugas KBIH tentang kesehatan olahraga pada jamaah haji	50 orang	Kota Malang	petugas KBIH	50.000.000,00		
124	1.01.01.0	20	54	Pemeriksaan kebugaran pada calon jamaah haji	100%	Kota Malang	Calon Jamaah Haji	25.000.000,00		
X	1.01.01.0	20		Program perbaikan gizi masyarakat				13.642.000.000,00		
125	1.01.01.0	20	04	Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi	6.704 keluarga	Kota Malang	Keluarga yang belum berperilaku sadar gizi dan mempunyai balita dengan berat badan kurang	110.000.000,00		
126	1.01.01.0	20	07	Penanggulangan kekurangan energi protein/ gizi buruk dan kurang	165 balita	Kota Malang	Balita menderita gizi buruk atau sangat kurus	600.000.000,00		

127	1.01.01.0	20	08	Penanggulangan anemia gizi besi	546 bumil	Kota Malang	Ibu hamil menderita anemia gizi besi dan kekurangan energi kronis	200.000.000,00		
128	1.01.01.0	20	09	Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium	1.000 orang	Kota Malang	Wanita usia subur menderita gangguan akibat kekurangan yodium dan kekurangan energi kronis	400.000.000,00		
129	1.01.01.0	20	10	Penanggulangan Kekurangan Vitamin A	600 bayi	Kota Malang	Bayi menderita kekurangan vitamin A	300.000.000,00		
130	1.01.01.0	20	11	Revitalisasi pelayanan gizi pada posyandu	654 posyandu, 7.057 kader posyandu, 55.000 balita	Kota Malang	Balita yang ditimbang di posyandu dan kader posyandu yang aktif	10.000.000.000,00		
131	1.01.01.0	20	15	Revitalisasi Pemberian Makanan Pendamping Air susu ibu Dalam Rangka Kewaspadaan Pangan dan Gizi	3.988 balita	Kota Malang	Balita usia 6 - 24 bulan dari keluarga miskin	600.000.000,00		
132	1.01.01.0	20	19	Pelayanan Gizi Penderita TB dan HIV AIDS	2.245 orang	Kota Malang	Penderita TB dan HIV AIDS	500.000.000,00		
133	1.01.01.0	20	21	Pemantapan Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk dan Gizi Kurang	45 orang	Kota Malang	Dokter, nustrisionis dan perawat	100.000.000,00		
134	1.01.01.0	20	22	Pembentukan dan Penyelenggaraan Pusat Pemulihan Gizi Terpadu	3 UPT Puskesmas	Kota Malang	Balita mengalami masalah gizi	200.000.000,00		
135	1.01.01.0	20	23	Penyuluhan Gizi dan Diet pada Usia Lanjut	1.000 orang	Kota Malang	Lanjut usia mengalami masalah gizi	300.000.000,00		
136	1.01.01.0	20	24	Pengadaan pemberian makanan tambahan pemulihan bagi balita gizi buruk	1 paket	Kota Malang	Balita mengalami masalah gizi	12.000.000,00		
137	1.01.01.0	20	25	Pemantapan Konselor Menyusu dan Air Susu Ibu Eksklusif	45 orang	Kota Malang	Nutrisionis, bidan dan perawat	110.000.000,00		
138	1.01.01.0	20	27	Pemantapan Pelatihan Pemberian Makanan Bayi dan Anak	45 orang	Kota Malang	Nutrisionis, bidan dan perawat	100.000.000,00		
139	1.01.01.0	20	28	Pemantapan Pemantauan Pertumbuhan Balita Standar WHO 2005	45 orang	Kota Malang	Nutrisionis, bidan dan perawat	110.000.000,00		
XI	1.01.01.0	22		Program pengembangan lingkungan sehat				573.400.000,00		
139	1.01.01.0	22	02	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	200 orang	Kota Malang	tenaga penjamah makanan	49.800.000,00		
140			04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan program pengembangan lingkungan sehat	81%	Kota Malang	petugas sanitasi puskesmas, kepala puskesmas	27.340.000,00		

141	1.01.01.0	22	09	Pelaksanaan verifikasi dan evaluasi program kota sehat	7 tatanan	Kota Malang	tim verifikasi, SKPD terkait	100.000.000,00		
142	1.01.01.0	22	13	Peningkatan hygiene sanitasi TTU/ TPM	TTU MS = 35 TPM MS = 40	Kota Malang	Hotel, rumah makan / restoran, jasa boga, Rumah Sakit Air PDAM	9.300.000,00		
143	1.01.01.0	22	21	Pemantauan kualitas air minum dan air bersih	900 sampel	Kota Malang		12.101.000,00		
144	1.01.01.0	22	22	Pertemuan jejaring program pasar sehat	100 orang	Kota Malang	lintas sektor, gugus tugas	18.000.000,00		
145			24	Peningkatan kapasitas tim gugus tugas pasar sehat	20 orang	Kota Malang	gugus tugas pasar	17.790.000,00		
146			27	Pertemuan penyelenggaraan air minum	100 orang	Kota Malang	penanggungjawab HIPAM, DAM	18.000.000,00		
147			33	Pengembangan program kota sehat di Kecamatan Klojen	11 kel	Kota Malang	pokja kecamatan, kelurahan sehat di wilayah Kecamatan Klojen	9.654.900,00		
148			34	Pengembangan program kota sehat di Kecamatan Blimbing	11 kel	Kota Malang	pokja kecamatan, kelurahan sehat di wilayah Kecamatan Blimbing	9.211.800,00		
149	1.01.01.0	25	35	Pengembangan program kota sehat di Kecamatan Sukun	11 kel	Kota Malang	pokja kecamatan, kelurahan sehat di wilayah Kecamatan Sukun	9.327.200,00		
150	1.01.01.0	25	36	Pengembangan program kota sehat di Kecamatan Kedungkandang	12 kel	Kota Malang	pokja kecamatan, kelurahan sehat di wilayah Kecamatan Kedungkandang	9.300.900,00		
151			37	Pengembangan program kota sehat di Kecamatan Lowokwaru	12 kel	Kota Malang	pokja kecamatan, kelurahan sehat di wilayah Kecamatan Lowokwaru	9.320.300,00		
152			38	Peningkatan kapasitas pengurus Forum Malang Kota Sehat	95 orang	Kota Malang	pengurus Forum Kota Sehat	63.554.900,00		
153	Belanja Tidak		41	Pelaksanaan fasilitasi Stop BABS	3 kelompok & 9 orang bantuan USRI	Kota Malang	kelompok masyarakat DAS dan sekitarnya	23.169.000,00		
154	1.01.01.0	15	45	Pemantauan kualitas air limbah puskesmas	5 puskesmas	Kota Malang	air limbah puskesmas	5.000.000,00		
155	1.01.01.0	16	46	Lomba kebersihan UPT Dinas Kesehatan Kota Malang	18 UPT	Kota Malang	UPT, Dinas Kesehatan	18.440.000,00		
156	1.01.01.0	16	48	Workshop penyusunan rencana kerja program kota sehat	12 kel	Kota Malang	Pokja kecamatan, kelurahan sehat, pengurus forum, SKPD terkait	54.500.000,00		

157	1.01	01.0	20	51	Peningkatan sumber daya manusia program pengembangan lingkungan sehat	23 orang	Kota Malang	sanitarian	26.250.000,00		
158	1	02	21	52	Penyusunan Peraturan Walikota tentang Kawasan Tanpa Rokok	30 orang	Kota Malang	SKPD terkait	31.600.000,00		
159	1	02	21	53	Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok	100 orang peserta, 4 narasumber	Kota Malang	SKPD, pelaku pariwisata, sopir, penanggungjawab sarana kebersihan	33.500.000,00		
160	1	02	21	54	Monitoring Pelaksanaan Peraturan Walikota tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok	30 orang, 4 orang petugas monitoring	Kota Malang	terminal, rumah sakit, hotel, puskesmas	18.240.000,00		
XII	1	02	22		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular				1.380.540.000,00		
161	1	02	22	01	Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk	50/100.000	Kota Malang	masyarakat	205.000.000,00		
162	1	02	22	04	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	90%	Kota Malang	bayi, balita, petugas	66.700.000,00		
163	1	02	22	05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	100%	Kota Malang	tenaga medis dan pramedis (petugas puskesmas, rumah sakit)	45.000.000,00		
164	1	02	22	08	Peningkatan imunisasi	90%	Kota Malang	masyarakat, petugas	33.400.000,00		
165	1	02	22	09	Peningkatan surveillence epidemiologi dan penanggulangan wabah	85%	Kota Malang	petugas puskesmas, swasta	62.100.000,00		
166	1	02	22	12	Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS	<5%	Kota Malang	masyarakat dan ODHA	56.200.000,00		
167	1	02	22	14	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit TB paru	>85%	Kota Malang	masyarakat dan penderita TB	83.200.000,00		
168	1	02	22	17	Pertemuan konsultasi penanganan KIPPI	100%	Kota Malang	petugas puskesmas	24.700.000,00		
169	1	02	22	18	Pemberdayaan pokjanel DBD	50/100.000	Kota Malang	anggota pokjanel DBD	30.000.000,00		
170	1	02	22	19	Kolaborasi TB HIV	100%	Kota Malang	puskesmas, RS dan LSM	30.000.000,00		
171	1	02	22	20	Peningkatan pelayanan laboratorium penyakit TB paru	<5%	Kota Malang	petugas laboratorium di puskesmas dan RS	87.200.000,00		
172	1	02	22	21	Rakerda Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA)	100%	Kota Malang	anggota KPA Kota Malang	40.000.000,00		
173	1	02	22	22	Peningkatan jejaring pelayanan penanggulangan HIV/AIDS	100%	Kota Malang	puskesmas, RS dan LSM	67.500.000,00		
174	1	02	22	23	Peningkatan kualitas hidup ODHA (orang dengan HIV/AIDS)	100%	Kota Malang	ODHA dan OHIDHA	30.000.000,00		
175	1	02	22	25	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit kusta	< 1/10.000 penduduk	Kota Malang	petugas puskesmas dan RS	40.000.000,00		

195	1	02	25	137	Rehab gedung dan pagar Pustu Mergosono	100%	Kota Malang	Gedung Pustu Mergosono	200.000.000,00		
196	1	02	25	138	Rehab Puskesmas Gribig	100%	Kota Malang	Gedung Puskesmas Gribig	750.000.000,00		
197	1	02	25	139	Rehab gedung Pustu Polowijen	100%	Kota Malang	Gedung Pustu Polowijen	200.000.000,00		
198	1	02	25	140	Rehab lantai Puskesmas Mulyorejo	100%	Kota Malang	Gedung Puskesmas Mulyorejo	600.000.000,00		
199	1	02	25	141	Pembangunan gedung labkes dan PPKO	100%	Kota Malang	Gedung Laboratorium Kesehatan dan PPKO	2.328.582.800,00		
200	1	02	25	142	Rehab Puskesmas Kedungkandang rawat inap	100%	Kota Malang	Gedung Rawat Inap Puskesmas Kedungkandang	500.000.000,00		
201	1	02	25	143	Rehab Puskesmas Kedungkandang rawat jalan	100%	Kota Malang	Gedung Rawat Jalan Puskesmas Kedungkandang	1.500.000.000,00		
202	1	02	25	144	Rehab Rumah Bersalin Pemkot Malang	100%	Kota Malang	Gedung Rumah Bersalin Pemkot Malang	600.000.000,00		
203	1	02	25	146	Rehab gedung dan pagar Pustu Tanjungrejo	100%	Kota Malang	Pagar Pustu Tanjungrejo	200.000.000,00		
204	1	02	25	147	Rehab Puskesmas Cisadea	100%	Kota Malang	Gedung Puskesmas Cisadea	200.000.000,00		
205	1	02	25	148	Rehab Puskesmas Arjuno	100%	Kota Malang	Gedung Puskesmas Arjuno	800.000.000,00		
206	1	02	25	149	Pembangunan gudang obat Puskesmas Kendalsari	100%	Kota Malang	Gudang Obat Puskesmas Kendalsari	300.000.000,00		
207	1	02	25	150	Rehab Puskesmas Kendalsari rawat inap	100%	Kota Malang	Gedung Puskesmas Kendalsari	100.000.000,00		
208	1	02	25	151	Rehab taman Puskesmas Kendalsari	100%	Kota Malang	Taman Puskesmas Kendalsari	50.000.000,00		
XIV	1	02	26		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paruanu/ rumah sakit mata				17.619.162.000,00		
210	1	02	26	18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	50%	Kota Malang	alat - alat kesehatan	4.300.404.000,00		
211	1	02	26	21	Pengadaan mebeleur rumah sakit	100%	Kota Malang	mebeleur	750.250.000,00		
212	1	02	26	22	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundrv, ruana tunaaq, dll)	100%	Kota Malang	peralatan rumah tangga	568.508.000,00		

213	1	02	26	41	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok Melalui Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Perawatan Penyakit Paru dan Jantung di Rumah Sakit Pemkot Malang (DBH Cukri)	100%	Kota Malang	Alat kesehatan	10.000.000.000,00		
214	1	02	26	43	Penyediaan fasilitas Rumah Sakit	1 paket	Kota Malang	Gedung Rumah Sakit Pemkot Malang	2.000.000.000,00		
XV	1	02	31		Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan				85.000.000,00		
215	1	02	31	05	Pengambilan dan pengujian laboratorium sampel makanan dan minuman	34%	Kota Malang	makanan dan minuman yang beredar di masyarakat	60.000.000,00		
216	1	02	31	06	Pengawasan dan pembinaan sarana pangan	34%	Kota Malang	IRTP di Kota Malang	25.000.000,00		
XVI	1	02	32		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak				280.000.000,00		
217	1	02	32	11	Upaya peningkatan PMTCT (prevention mother to child transmission) HIV/ AIDS	100%	Kota Malang	15 puskesmas dan 30 RS / RB	30.000.000,00		
218	1	02	32	13	Audit maternal perinatal (AMP)	100%	Kota Malang	15 puskesmas dan 30 RS / RB	40.000.000,00		
219	1	02	32	30	Upaya pemantapan hasil pelayanan program kesehatan ibu dan anak	100%	Kota Malang	15 puskesmas dan 30 RS / RB	100.000.000,00		
220	1	02	32	31	Upaya penguatan penggunaan dan pengisian buku KIA	100%	Kota Malang	15 puskesmas dan 30 RS / RB	80.000.000,00		
221	1	02	32	34	Sosialisasi SRS (system registration sample)	100%	Kota Malang	15 puskesmas	30.000.000,00		
XVII	1	02	33		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular				414.700.000,00		
222	1	02	33	01	Pelatihan skreening faktor risiko penyakit tidak menular bagi kader/ petugas	43 orang	Kota Malang	petugas puskesmas	125.000.000,00		
223	1	02	33	02	Sosialisasi penyakit tidak menular kepada masyarakat	60%	Kota Malang	masyarakat	50.000.000,00		
224	1	02	33	03	Pencegahan pengendalian penyakit kanker	60%	Kota Malang	masyarakat	39.100.000,00		
225	1	02	33	04	Pencegahan pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah	60%	Kota Malang	masyarakat	60.000.000,00		

4	1.0 3	1.0 3	01.0 1	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1 paket	DPUPPB	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	95.437.600,00		
5	1.0 3	1.0 3	01.0 1	10	Penyediaan jasa alat tulis kantor	1 paket	DPUPPB	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	99.445.600,00		
6	1.0 3	1.0 3	01.0 1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	DPUPPB	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	11.280.500,00		
7	1.0 3	1.0 3	01.0 1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	DPUPPB	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	422.234.800,00		
8	1.0 3	1.0 3	01.0 1	17	Penyediaan makanan dan minuman	1 paket	DPUPPB	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	113.424.000,00		
9	1.0 3	1.0 3	01.0 1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 paket	DPUPPB	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	236.500.000,00		
10	1.0 3	1.0 3	01.0 1	71	Pembuatan Interior ruang kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan pengawasan bangunan	1 paket	DPUPPB	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	201.800.000,00		
11	1.0 3	1.0 3	01.0 1	73	Pemeliharaan Taman	1 paket	DPUPPB	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	61.200.000,00		
12	1.0 3	1.0 3	01.0 1	74	Pameran Bidang ke-Puan	1 paket	DPUPPB	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	25.000.000,00		
II	1.0 3	1.0 3	01.0 2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				815.631.800,00		
13	1.0 3	1.0 3	01.0 2		Peningkatan ketrampilan dan kemampuan teknis aparatur	1 paket	DPUPPB	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	136.062.000,00		
14	1.0 3	1.0 3	01.0 2		Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / operasional	1 paket	DPUPPB	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	654.569.800,00		

15	1.0 3	1.0 3	01.0 2		Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	1 paket	DPUPPB	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	25.000.000,00		
III	1.0 3	1.0 3	01.0 6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				258.904.200,00		
16	1.0 3	1.0 3	01.0 6		Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	1 paket	Kota Malang	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	26.966.300,00		
17	1.0 3	1.0 3	01.0 6		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1 paket	Kota Malang	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	28.320.300,00		
18	1.0 3	1.0 3	01.0 6		Penyusunan RKA/DPA	1 paket	Kota Malang	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	25.398.800,00		
19	1.0 3	1.0 3	01.0 6		Penyusunan SPM dan IKM DPUPPB	1 paket	Kota Malang	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	30.828.500,00		
20	1.0 3	1.0 3	01.0 6		Rapat koordinasi ke - PU an se Kota Malang	1 paket	Kota Malang	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	58.728.500,00		
21	1.0 3	1.0 3	01.0 6		Sosialisasi DED hasil Musrenbang Kota Malang	1 paket	Kota Malang	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	38.661.800,00		
22	1.0 3	1.0 3	01.0 6		Pendataan aset DPUPPB	1 paket	Kota Malang	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	50.000.000,00		
IV	1.0 3	1.0 3	01.1 6		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong				12.470.000.000,00		
23	1.0 3	1.0 3	01.1 6	1	Lanjutan pembangunan saluran Jl. Patimura RW 02- RW 03 Kel. Klojen	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	200.000.000,00	Musrenbang	
24	1.0 3	1.0 3	01.1 6	2	Pembangunan gorong-gorong dan pintu air Jl. JA. Suprpto Gg. IIE Kel. Samaan	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	250.000.000,00	Musrenbang	

25	1.0 3	1.0 3	01.1 6	3	Pembangunan gorong-gorong Jl. Aris Munandar Kel. Sukoharjo	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	350.000.000,00	Musrenbang
26	1.0 3	1.0 3	01.1 6	4	Pembangunan drainase tertutup Jl. Tanimbar RT 04 RW 08 Kel. Kasin	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	315.000.000,00	Musrenbang
27	1.0 3	1.0 3	01.1 6	5	Pembangunan crossing jalan RW 12 JL. P. Suroso ke Jl. Cibuni Kel. Purwantoro	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	275.000.000,00	Musrenbang
28	1.0 3	1.0 3	01.1 6	6	Perbaiki saluran air RT 04 Rw 01 Kel. Kesatrian	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	250.000.000,00	Musrenbang
29	1.0 3	1.0 3	01.1 6	7	Perbaiki saluran air dan penutup saluran Jl. Raya Puntodewo RW 04 dan RW 03 Kel. Polehan	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	285.000.000,00	Musrenbang
30	1.0 3	1.0 3	01.1 6	8	Pembangunan plengsengan sungai bangau RT 03 RW 05 kel. Arjosari	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	300.000.000,00	Musrenbang
31	1.0 3	1.0 3	01.1 6	9	Pembangunan plengsengan , pelebaran jalan dan peninggian jalan RW 03 RW 04 Kel Purwodadi	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	315.000.000,00	Musrenbang
32	1.0 3	1.0 3	01.1 6	10	Pembangunan gorong-gorong RW 03,04 dan RW 05 Kelurahan Mergosono	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	305.000.000,00	Musrenbang
33	1.0 3	1.0 3	01.1 6	11	Pembangunan drainase RW 02 Kel. Bumiayu	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	275.000.000,00	Musrenbang
34	1.0 3	1.0 3	01.1 6	12	Lanjutan pembangunan saluran drainase RW 01, 02 dan RW 03 Kel. Wonokoyo	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	250.000.000,00	Musrenbang
35	1.0 3	1.0 3	01.1 6	13	Pembangunan saluran drainase RW 01, RW 03 RW 07,05 , 09 Kel. Arjowinangun	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	250.000.000,00	Musrenbang

36	1.0 3	1.0 3	01.1 6	14	Pembangunan saluran drainase Jl. Sekarsari indah RW 01 dan RW 02 Kel. Tlogowaru	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	250.000.000,00	Musrenbang
37	1.0 3	1.0 3	01.1 6	15	Pembangunan drainase , grill dan pengaspalan jalan Joyo agung- Joyo Asri Kel. Merjosari	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	450.000.000,00	Musrenbang
38	1.0 3	1.0 3	01.1 6	16	Lanjutan pembangunan drainase RW 03, 05 , RW 01 dan RW 04 Kel. Sumbersari	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	300.000.000,00	Musrenbang
39	1.0 3	1.0 3	01.1 6	17	Perbaikan saluran air Jl. Srigading dalam RT 02 dan rt 03 Kel. Jatimulyo	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	250.000.000,00	Musrenbang
40	1.0 3	1.0 3	01.1 6	18	Lanjutan gorong-gorong dan drainase Gg. 21 sd terminal Kel. Gadang	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	300.000.000,00	Musrenbang
41	1.0 3	1.0 3	01.1 6	19	Pembangunan drainase Jl. Raya Bandulan RW 03 Kel. Bandulan	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	300.000.000,00	Musrenbang
42	1.0 3	1.0 3	01.1 6	20	Pembangunan Drainase Jalan Kyai Tamin	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	1.000.000.000,00	
43	1.0 3	1.0 3	01.1 6	21	Pemeliharaan Rutin Drainase	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	3.000.000.000,00	
44	1.0 3	1.0 3	01.1 6	22	Pemeliharaan Insidentil Drainase	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	3.000.000.000,00	
V	1	1	01.1 7		Program Pembangunan Turap/Talud/Broniong				3.255.000.000,00	
45	1	1	01.1 7	1	Pembangunan plengsengan RW 04,05,06,07 Jl. Embong Brantas Kel. Kidul Dalem	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	300.000.000,00	Musrenbang
46	1	1	01.1 7	2	Pembangunan plengsengan kali kasin RT 01,02RW 05 RT 01,04,06 RW 08 Kel. Kauman	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	315.000.000,00	Musrenbang

47	1	1	01.1 7	3	Pembangunan plengsengan RW 02,04 dan 08 Kel. Bareng	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	305.000.000,00	Musrenbang
48	1	1	01.1 7	4	Pembangunan plengsengan RT 06 Kel. Jodipan	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	300.000.000,00	Musrenbang
49	1	1	01.1 7	5	Pembangunan plengsengan DAS RT 09 RW 04 Kelurahan Kotalama	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	365.000.000,00	Musrenbang
50	1	1	01.1 7	6	Pembangunan plengsengan RW 11 Kelurahan Cemorokandang	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	305.000.000,00	Musrenbang
51	1	1	01.1 7	7	Pembangunan plengsengan RW 05 dan RW 14 Kel. Tulusrejo	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	315.000.000,00	Musrenbang
52	1	1	01.1 7	8	Pembangunan plengsengan Rw 10 Kelurahan Bandungrejosari	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	300.000.000,00	Musrenbang
53	1	1	01.1 7	9	Lanjutan pembangunan plengsengan sungai sukun dan kutuk RW 01, 02 dan RW 04 Kelurahan Sukun	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	250.000.000,00	Musrenbang
54	1	1	01.1 7	10	Pembangunan plengsengan sungai metro RW 10 kel. Tanjungrejo	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	250.000.000,00	Musrenbang
55	1	1	01.1 7	11	Pembangunan plengsengan sungai RW 01 dan RW 03 Kel. Karangbesuki	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	250.000.000,00	Musrenbang
VI	1.0	1.0	01.1		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan				57.067.298.500,00	
57	3	3	01.1 8	01	Stimulan Aspal	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	2.000.000.000,00	
58	1	1	01.1 8	02	Pemeliharaan Rutin Jalan	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	2.000.000.000,00	

59	1	1	01.1 8	03	Pemeliharaan Insidentil Jalan	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	2.189.286.500,00		
60	1	1	01.1 8	04	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	1.002.012.000,00		
61	1	1	01.1 8	05	Pemeliharaan Insidentil Jembatan	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	1.000.000.000,00		
62	1	1	01.1 8	06	Peningkatan Jl. Gede Kec . Klojen	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	400.000.000,00		
63	1	1	01.1 8	07	Peningkatan jalan RW 03,04,06,07,09 dan RW 11 Kel. Madyopuro	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	450.000.000,00		
64	1	1	01.1 8	08	Peningkatan Jl. Galunggung Utara Kec. Sukun	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	600.000.000,00		
65	1	1	01.1 8	09	Peningkatan Jl. Candi IIIIF, Jl. Terusan sigura-gura, Jl. Candi VI Kel. Karang Besuki	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	800.000.000,00		
66	1	1	01.1 8	10	Peningkatan Jl. Indragiri (Hutan Taman Kota) Kel. Purwantoro	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	315.000.000,00		
67	1	1	01.1 8	11	Peningkatan Jl. Niaga Kelurahan Ciptomulyo Kec. Sukun	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	380.000.000,00		
68	1	1	01.1 8	12	Peningkatan Jl. Teluk Bayur Kelurahan Pandanwangi Kec. Blimbing	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	360.000.000,00		
69	1	1	01.1 8	13	Peningkatan Jl. Terusan Sulfat	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	300.000.000,00		

70	1	1	01.1 8	14	Pembangunan Pedestrian Jl. M. Wiyono Kec. Blimbing	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	2.000.000.000,00			
71	1	1	01.1 8	15	Penataan dan peningkatan Jalur Lambat Jagung Suprpto-Sutoyo	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	2.000.000.000,00			
72	1	1	01.1 8	16	Peningkatan Jalan Babatan - Tambakasri Kel. Arjowinangun	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	750.000.000,00			
73	1	1	01.1 8	17	Pembangunan jembatan penghubung RW 04 - RW 05 Kelurahan Bandulan	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	311.000.000,00			
74	1	1	01.1 8	18	Perbaiki Jembatan RW 05 Kel. Mergosono	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	360.000.000,00			
75	1	1	01.1 8	19	Peningkatan Jembatan Jl. Slamet Kel. Cemoro Kandang	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	500.000.000,00			
76	1	1	01.1 8	20	Pembangunan jembatan penghubung wilayah RW 04 Kel Tanjungrejo dengan RW 01 Kel.	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	400.000.000,00			
77	1	1	01.1 8	21	Pembangunan Jembatan Jl. KH Malik Dalam RT 02 RW 04 Kel. Buring	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	550.000.000,00			
78	1	1	01.1 8	22	Peningkatan Jembatan Kali Turi Jl. Atletik Kel. Tasikmadu	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	700.000.000,00			
79	1.0 3	1.0 3	01.1 8	23	Pembangunan Jembatan Kedungkandang	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	30.000.000.000,00	50.000.000.000	multi years total DED 79.800.882.0 00,00	
80	1	1	01.1 8	24	Peningkatan Jl. JA. Suprpto Gg. III RW 01 Kel. Rampal Celaket	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	400.000.000,00	musrenbang		

81	1	1	01.1 8	25	Pembangunan pedestrian Jl. Galunggung Rw 01 Kel. Gadingkasri	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan	410.000.000,00	musrenbang		
82	1.0 3	1.0 3	01.1 8	26	Pelebaran jalan dan jembatan Jl. RW 14 dan RW 15 Kel. Bunulrejo	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan	525.000.000,00	musrenbang		
83	1	1	01.1 8	27	Peningkatan jalan RW 02,05,09 dan 11 Kelurahan Lesanpuro	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan	400.000.000,00	musrenbang		
84	1	1	01.1 8	28	Peningkatan jl. Seruling, jl. Harmonika, Jl. Angklung, Jl. Akordion , Jl. Sasando dan simpang akordion kel. Tunggulwulung	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan	450.000.000,00	musrenbang		
85	1.0 3	1.0 3	01.1 8	29	Peningkatan Jalan di Kelurahan Ketawang gede	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan	950.000.000,00	musrenbang		
86	1	1	01.1 8	30	Peningkatan jl. Mawar GG II RW 08 , RW 04, RW 13 , RW 15 dan RW 03 Kel. Lowokwaru	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan	450.000.000,00	musrenbang		
87	1	1	01.1 8	31	Peningkatan jalan Atletik , Jl. KH Yusuf , Jl. Simpang KH. Yusuf , Jl renang dan jl. Loncat indah Kel. Tasikmadu	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan	650.000.000,00	musrenbang		
88	1	1	01.1 8	32	Peningkatanjl. Hotmix RW 05 Kel. Ciptomulyo	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan	400.000.000,00	musrenbang		
89	1.0 3	1.0 3	01.1 8	33	Peningkatan Jl. Hotmix RW 02, RW 03 dan RW 04 Kel. Pisangcandi	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan	415.000.000,00	musrenbang		
90	1	1	01.1 8	34	Penyusunan DED Underpass Jl.A.Yani- S. Parman	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan	300.000.000,00			
91	1	1	01.1 8	35	Peningkatan Jalan Kayan	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	200.000.000,00			

92	1.0 3	1.0 3	01.1 8	36	Peningkatan Jalan Sekayan	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	450.000.000,00		
93	1	1	01.1 8	37	Peningkatan Jalan Pisang Kipas	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	800.000.000,00		
94	1	1	01.1 8	38	Peningkatan Jalan Kembang Turi	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	200.000.000,00		
95	1	1	01.1 8	39	Peningkatan Jalan Kembang Kertas	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	200.000.000,00		
96	1	1	01.1 8	40	Peningkatan Jalan Pelabuhan Ketapang I	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	300.000.000,00		
97	1.0 3	1.0 3	01.1 8	41	Peningkatan Jalan Ketapang Kel. Kasin	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota	200.000.000,00		
VII	1.0 3	1.0 3	01.2 3		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebina Margaan				3.890.000.000,00		
98	1.0 3	1.0 3	01.2 3		Pengadaan alat-alat berat (Eskavator)	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya pelayanan dan peningkatan pendapatan asli daerah	1.500.000.000,00		
99	1.0 3	1.0 3	01.2 3		Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya pelayanan dan peningkatan pendapatan asli daerah	250.000.000,00		
100	1.0 3	1.0 3	01.2 3		Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya pelayanan dan peningkatan pendapatan asli daerah	70.000.000,00		
101	1.0 3	1.0 3	01.2 3		Rehabilitasi / pemeliharaan alat-alat angkut dan kendaraan operasional	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya pelayanan dan peningkatan pendapatan asli daerah	70.000.000,00		

102	1.0 3	1.0 3	01.2 3		Pembangunan bengkel alat-alat berat dan kendaraan operasional	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya pelayanan dan peningkatan pendapatan asli daerah	2.000.000.000,00		
VIII	1.0 4	1.0 3	01.1 6		Program Lingkungan Sehat				#####		
					Perumahan						
103	1.0 4	1.0 3	01.1 6	1	Pengaspalan Jalan di RW. 04 Kelurahan Kedungkandang	1 paket	Kota Malang		776.062.000,00		
104	1.0 4	1.0 3	01.1 6	2	Perbaikan Drainase di RT. 05 dan 06 RW. 02 Kelurahan Sawojajar	1 paket	Kota Malang		622.849.600,00		
105	1.0 4	1.0 3	01.1 6	3	Pengaspalan Jalan di Wilayah Bareng Tengah RW. 03 Kel. Bareng	1 paket	Kota Malang		520.708.000,00		
106	1.0 4	1.0 3	01.1 6	4	Pembangunan Kantor Kelurahan Tunjungsekar	1 paket	Kota Malang		434.000.000,00		
107	1.0 4	1.0 3	01.1 6	5	Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih RW 05 Kel. Kedungkandang	1 paket	Kota Malang		1.282.000.000,00		
108	1.0 4	1.0 3	01.1 6	6	Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih RT. 05 RW. 01 Kel. Balearjosari	1 paket	Kota Malang		1.176.000.000,00		
109	1.0 4	1.0 3	01.1 6	7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih RW. 01 Kel. Mulyorejo	1 paket	Kota Malang		1.286.770.000,00		
110	1.0 4	1.0 3	01.1 6	9	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kel. Ciptomulyo	1 paket	Kota Malang		1.494.000.000,00		
111	1.0 4	1.0 3	01.1 6	10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih RT. 05 RW. 04 Kel. Tlogowaru	1 paket	Kota Malang		1.150.000.000,00		
112	1.0 4	1.0 3	01.1 6	11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih RW. 06 Kel. Cemorokandang	1 paket	Kota Malang		352.000.000,00		
113	1.0 4	1.0 3	01.1 6	12	Lanjutan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Air Minum beserta Sarana Penunjangnya di RW. 06 Kel. Bumiayu	1 paket	Kota Malang		222.000.000,00		
114	1.0 4	1.0 3	01.1 6	13	Lanjutan Pembangunan Sarana Air Bersih beserta Sarana Penunjangnya di RT. 01 RW. 06 Kel. Tunjungsekar	1 paket	Kota Malang		580.000.000,00		
115	1.0 4	1.0 3	01.1 6	14	Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna di RW. 05 Supit Urang Kel. Mulyorejo	1 paket	Kota Malang		352.000.000,00		
116	1.0 4	1.0 3	01.1 6	15	Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna di RW. 07 Kel. Bareng	1 paket	Kota Malang		523.000.000,00		
117	1.0 4	1.0 3	01.1 6	16	Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna di RW. 12 Kel. Pandanwangi	1 paket	Kota Malang		352.000.000,00		
118	1.0 4	1.0 3	01.1 6	17	Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna di RW. 06 Kel. Merjosari	1 paket	Kota Malang		238.000.000,00		
119	1.0 4	1.0 3	01.1 6	18	Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna di RW. 03 Kel. Kotalama	1 paket	Kota Malang		466.000.000,00		

120	1.0	1.0	01.1	19	Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna di RW. 01 Kel. Sumbersari	1 paket	Kota Malang	580.000.000,00		
121	1.0	1.0	01.1	20	Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna di RW. 14 Kel. Bunulrejo	1 paket	Kota Malang	409.000.000,00		
122	1.0	1.0	01.1	21	Lanjutan Pembangunan Gedung Posyandu dan MCK di RW. 03 Kel. Kotalama	1 paket	Kota Malang	238.000.000,00		
123	1.0	1.0	01.1	22	Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna di RW. 01 Kel. Merjosari	1 paket	Kota Malang	238.000.000,00		
124	1.0	1.0	01.1	23	Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna di RW. 10 Kel. Lowokwaru	1 paket	Kota Malang	352.000.000,00		
125	1.0	1.0	01.1	24	Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna Kantor Kel. Lowokwaru	1 paket	Kota Malang	434.000.000,00		
126	1.0	1.0	01.1	25	Pembangunan Gedung Serba Guna di RW. 06 Kel. Tasikmadu	1 paket	Kota Malang	487.000.000,00		
127	1.0	1.0	01.1	26	Pembangunan Gedung Serba Guna di RW. 08 Kel. Merjosari	1 paket	Kota Malang	434.000.000,00		
128	1.0	1.0	01.1	27	Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Kec. Klojen	1 paket	Kota Malang	409.000.000,00		
129	1.0	1.0	01.1	28	Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna Kantor Kel. Kedungkandang	1 paket	Kota Malang	352.000.000,00		
130	1.0	1.0	01.1	34	Pembangunan Gapura dan Pagar Kantor Kel. Karang Besuki	1 paket	Kota Malang	238.000.000,00		
131	1.0	1.0	01.1	35	Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna di RW. 09 Kel. Kauman	1 paket	Kota Malang	238.000.000,00		
132	1.0	1.0	01.1	36	Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna di RW. 18 Kel. Mojolanqu	1 paket	Kota Malang	238.000.000,00		
133	1.0	1.0	01.1	37	Renovasi Gedung Serba Guna Kantor Kel. Bandungrejosari	1 paket	Kota Malang	466.000.000,00		
134	1.0	1.0	01.1	38	Lanjutan Pembangunan Gedung Posyandu RW. 08 Kel. Buring	1 paket	Kota Malang	238.000.000,00		
135	1.0	1.0	01.1	39	Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna RW. 01 Kel. Polehan	1 paket	Kota Malang	238.000.000,00		
136	1.0	1.0	01.1	40	Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Buzem Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan	1 paket	Kota Malang	238.000.000,00		
137	1.0	1.0	01.1	41	Pembangunan Gedung Islamic Center	1 paket	Kota Malang	34.210.000.000,00		
138	1.0	1.0	01.1	42	Pemeliharaan Insidentil Gedung	1 paket	Kota Malang	4.570.000.000,00		
139	1.0	1.0	01.1	43	Pemeliharaan Insidentil Sarana Prasarana Permukiman	1 paket	Kota Malang	7.990.000.000,00		
140	1.0	1.0	01.1	44	Pemeliharaan Insidentil Sarana Prasarana Air Bersih	1 paket	Kota Malang	1.720.000.000,00		
141	1.0	1.0	01.1	45	Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana Permukiman	1 paket	Kota Malang	6.850.000.000,00		

142	1.0	1.0	01.1	46	Pemeliharaan Rutin Air Bersih	1 paket	Kota Malang	1.500.000.000,00		
	4	3	6							
143	1.0	1.0	01.1	47	Pemeliharaan Rutin Gedung	1 paket	Kota Malang	4.000.000.000,00		
	4	3	6							
144	1.0	1.0	01.1	48	Inventarisasi Aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di Perumahan Formal	1 paket	Kota Malang	60.000.000,00		
	4	3	6							
145	1.0	1.0	01.1	49	Penaksiran Aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di Perumahan Formal	1 paket	Kota Malang	160.000.000,00		
	4	3	6							
146	1.0	1.0	01.1	50	Pembinaan Rutin Hippiam Kota Malang dan Study Banding Ke Luar Daerah	1 paket	Kota Malang	310.000.000,00		
	4	3	6							
147	1.0	1.0	01.1	51	Penunjang Program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) Tahun 2015	1 paket	Kota Malang	300.000.000,00		
	4	3	6							
148	1.0	1.0	01.1	52	Penyusunan Data Perkembangan Tata Ruang	1 paket	Kota Malang	410.000.000,00		
	4	3	6							
149	1.0	1.0	01.1	53	Penyusunan Data Bangunan Gedung Milik Pemerintah	1 paket	Kota Malang	110.000.000,00		
	4	3	6							
150	1.0	1.0	01.1	54	Sosialisasi SLF dan Instrumen Pendukungnya	1 paket	Kota Malang	110.000.000,00		
	4	3	6							
151	1.0	1.0	01.1	55	Monitoring PSU Perumahan Formal Kota Malang	1 paket	Kota Malang	110.000.000,00		
	4	3	6							
152	1.0	1.0	01.1	56	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan PSU Perumahan Formal Kota Malang	1 paket	Kota Malang	210.000.000,00		
	4	3	9							
	1.0	1.0	01.1	57	Penyusunan Perencanaan Teknis (DED) Musrenbang Bidang Perumahan dan Tata Ruang					
	4	3	9							
153	1.0	1.0	01.1	58	- Kec. Blimbing	1 paket	Kota Malang	60.000.000,00		
	4	3	9							
154	1.0	1.0	01.1	59	- Kec. Lowokwaru	1 paket	Kota Malang	60.000.000,00		
	4	3	9							
155	1.0	1.0	01.1	60	- Kec. Klojen	1 paket	Kota Malang	60.000.000,00		
	4	3	9							
156	1.0	1.0	01.1	61	- Kec. Sukun	1 paket	Kota Malang	60.000.000,00		
	4	3	9							
157	1.0	1.0	01.1	62	- Kec. Kedungkandang	1 paket	Kota Malang	60.000.000,00		
	4	3	9							
158	1.0	1.0	01.1	63	Pengadaan Stimulan Pavingstone	1 paket	Kota Malang	2.000.000.000,00		
	4	3	9							
159	1.0	1.0	01.1	64	DAK Bidang Air Bersih	1 paket	Kota Malang	5.000.000.000,00		
	4	3	9							
160	1.0	1.0	01.2	65	Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Kumuh se Kota Malang	1 paket	Kota Malang	8.550.000.000,00		
	4	3	1							
161	1.0	1.0	01.2	66	Pembangunan Pagar, taman dan pavingisasi RUSUNAWA Buring 2	1 paket	Kota Malang	1.036.000.000,00		
	4	3	1							
162	1.0	1.0	01.2	67	Pembangunan pos jaga RUSUNAWA Buring 2	1 paket	Kota Malang	124.000.000,00		
	4	3	1							

163	1.0	1.0	01.2	68	Penyambungan Air PDAM RUSUNAWA Buring 2	1 paket	Kota Malang	124.000.000,00		
164	1.0	1.0	01.2	69	Peningkatan Gedung Serba Guna RT. 09 RW. 06 Kel. Karang Besuki	1 paket	Kota Malang	580.000.000,00		
165	1.0	1.0	01.2	70	Peningkatan Gedung Kantor Kelurahan Tlogomas	1 paket	Kota Malang	865.000.000,00		
166	1.0	1.0	01.2	71	Perbaikan Jalan Jalan Wilayah RW. 02 Kel. Lowokwaru	1 paket	Kota Malang	217.600.000,00		
167	1.0	1.0	01.2	72	Perbaikan Jalan Jalan Wilayah RW. 15 Kel. Lowokwaru	1 paket	Kota Malang	217.600.000,00		
168	1.0	1.0	01.2	73	Perbaikan Jalan di RW. 06 Kel. Cemorokandang	1 paket	Kota Malang	217.600.000,00		
169	1.0	1.0	01.2	74	Perbaikan Jalan di RW. 06 Kel. Sawojajar	1 paket	Kota Malang	217.600.000,00		
170	1.0	1.0	01.2	75	Perbaikan Jalan di RW. 10 Kel. Tulusrejo	1 paket	Kota Malang	217.600.000,00		
171	1.0	1.0	01.2	76	Perbaikan Jalan di RW. 14 Kel. Tulusrejo	1 paket	Kota Malang	217.600.000,00		
172	1.0	1.0	01.2	77	Pavingisasi Jalan Membramo VI RT. 04 RW. 14 Kel. Bunulrejo	1 paket	Kota Malang	217.600.000,00		
173	1.0	1.0	01.2	78	Perbaikan Jalan RT. 02 RW.01 Kel. Kesatrian	1 paket	Kota Malang	217.600.000,00		
174	1.0	1.0	01.2	79	Perbaikan Jalan RT. 09 RW.01 Kel. Kesatrian	1 paket	Kota Malang	217.600.000,00		
175	1.0	1.0	01.2	80	Pavingisasi Jalan Joyo Utumo II RW. 04 Kel. Merjosari	1 paket	Kota Malang	217.600.000,00		
176	1.0	1.0	01.2	81	Pengaspalan Jalan Bukit Hijau Blok B RT. 01 RW. 09 Kel. Tlogomas	1 paket	Kota Malang	217.600.000,00		
177	1.0	1.0	01.2	82	Pengaspalan Jalan Bukit Hijau Blok C RT. 01 RW. 09 kel. Tlogomas	1 paket	Kota Malang	217.600.000,00		
178	1.0	1.0	01.2	83	Perbaikan Jalan Penghubung RT. 01 RW. 09 Kel. Tlogomas	1 paket	Kota Malang	217.600.000,00		
179	1.0	1.0	01.2	84	Pengaspalan Jalan Raya Tlogomas Gg. III RW.06 Kel. Tlogomas	1 paket	Kota Malang	217.600.000,00		
180	1.0	1.0	01.2	85	Perbaikan Jalan RT.09 RW. 07 Kel. Mojolangu	1 paket	Kota Malang	400.000.000,00		
181	1.0	1.0	01.2	86	Perbaikan Jalan RW. 16 Kel. Tulusrejo	1 paket	Kota Malang	217.600.000,00		
182	1.0	1.0	01.2	87	Perbaiakn Jalan RW. 04 Kel. Tasikmadu	1 paket	Kota Malang	217.600.000,00		
183	1.0	1.0	01.2	88	Perbaikan Jalan Jl. Simpang Kh . Yusuf RW. 05 Kel. Tasikmadu	1 paket	Kota Malang	217.600.000,00		
184	1.0	1.0	01.2	89	Perbaikan jalan dan Pelebaran Jl. Simpng Kh . Yusuf RW. 06 Kel. Tasikmadu	1 paket	Kota Malang	217.600.000,00		
185	1.0	1.0	01.2	90	Permohonan pavingisasi wilayah rw 06 tasikmadu	1 paket	Kota Malang	217.600.000,00		

186	1.0	1.0	01.2	91	Pengaspalan RW. 01 Kel. Bandungrejosari	1 paket	Kota Malang	217.600.000,00	
187	1.0	1.0	01.2	92	Rabat Jalan Kampung RT. 01, 02, 03, 04, 05 RW. 02 Kel. Kauman	1 paket	Kota Malang	350.000.000,00	Musrenbang
188	1.0	1.0	01.2	93	Pengaspalan Jalan JL. Klompok Kasri RW. 02 Kel. Gading Kasri	1 paket	Kota Malang	217.600.000,00	Musrenbang
189	1.0	1.0	01.2	94	Perbaikan Jalan di RW. 03 Kel. Cemorokandang	1 paket	Kota Malang	500.000.000,00	Musrenbang
190	1.0	1.0	01.2	95	Perbaikan Jalan di RW. 01 Kel. Cemorokandang	1 paket	Kota Malang	500.000.000,00	Musrenbang
191	1.0	1.0	01.2	96	Perbaikan Jalan di RW. 11 Kel. Cemorokandang	1 paket	Kota Malang	500.000.000,00	Musrenbang
192	1.0	1.0	01.2	97	Perbaikan Jalan di RW. 05 Kel. Cemorokandang	1 paket	Kota Malang	500.000.000,00	Musrenbang
193	1.0	1.0	01.2	98	Pavingisasi Jalan Kampung Baru RT. 07 & RT. 01 RW. 01 Kel. Madyopuro	1 paket	Kota Malang	217.600.000,00	Musrenbang
194	1.0	1.0	01.2	99	Perbaikan Jalan di RW. 01 Kel. Jatimulyo	1 paket	Kota Malang	500.000.000,00	Musrenbang
195	1.0	1.0	01.2	100	Perbaikan Jalan di RW. 08 Kel. Jatimulyo	1 paket	Kota Malang	500.000.000,00	Musrenbang
196	1.0	1.0	01.2	101	perbaikan jalan dan saluran jalan peltu sudjono gg. Anggrek RT. 07, 09, 08, 12 RW.02 Kel. Ciptomulyo	1 paket	Kota Malang	217.600.000,00	Musrenbang
197	1.0	1.0	01.2	102	Rabat Jalan Kampung RT. 01, 02, 03, 04, 05 RW. 02 Kel. Kauman	1 paket	Kota Malang	217.600.000,00	Musrenbang
198	1.0	1.0	01.2	103	Perbaikan Jalan Kampung RT. 03, 04, 05, 08, 09 RW. 05 Kel. Kauman	1 paket	Kota Malang	217.600.000,00	Musrenbang
199				104	Perbaikan Jalan di RT. 01 RW. 14 Teluk Grajakan Kel. Pandanwangi	1 paket	Kota Malang	217.600.000,00	
200	1.0	1.0	01.1	105	Perbaikan Jalan Klayatan di RW. 01 Kel. Bandungrejosari	1 paket	Kota Malang	500.000.000,00	
201	1.0	1.0	01.1	106	Perbaikan Jalan Klayatan di RW. 03 Kel. Bandungrejosari	1 paket	Kota Malang	500.000.000,00	
202	1.0	1.0	01.1	107	Pasangan Drainase Pinggir Jalan Badut Jl. Candi Agung IV RT.003 RW.I	1 paket	Kota Malang	217.600.000,00	
203	1.0	1.0	01.1	108	Pembuatan Saluran Kiri Kanan Jalan Jl. Siborut Gq.IV RT.003 RW.XIII	1 paket	Kota Malang	217.600.000,00	
204	1.0	1.0	01.1	109	Normalisasi Saluran Jl. Ters.Candi Mendut RT.004 dan RT.005 RW.XIV	1 paket	Kota Malang	217.600.000,00	
205	1.0	1.0	01.1	110	Saluran Drainase Jl. Sudimoro RW.V, RW.VI, RW.VII dan RW.XVII	1 paket	Kota Malang	217.600.000,00	
206	1.0	1.0	01.1	111	Pembangunan Saluran air RW. 05 - 04 Kel. Tasikmadu	1 paket	Kota Malang	217.600.000,00	
207	1.0	1.0	01.1	112	Pembangunan dan normalisasi drainase RW. 03, 04, 05, 07, 06, 08 Kel. Sukun	1 paket	Kota Malang	217.600.000,00	
208	1.0	1.0	01.1	113	Pembangunan dan normalisasi drainase RW. 07, 06, 08 Kel. Sukun	1 paket	Kota Malang	217.600.000,00	

209	1.0	1.0	01.1	114	Pembangunan Drainase RT.04 RW.12 Kel.Bandungrejosari	1 paket	Kota Malang		217.600.000,00
210	1.0	1.0	01.1	115	Pembangunan Drainase RT.04,05 RW.01 Kel.Bandungrejosari	1 paket	Kota Malang		217.600.000,00
211	1.0	1.0	01.1	116	Pembangunan Drainase RT.06,07 RW.01 Kel.Bandungrejosari	1 paket	Kota Malang		217.600.000,00
212	1.0	1.0	01.1	117	Pembangunan Drainase RT.03 RW.01 Kel.Bandungrejosari	1 paket	Kota Malang		217.600.000,00
213	1.0	1.0	01.1	118	Pembangunan Drainase RW.05 Kel.Mulyorejo	1 paket	Kota Malang		217.600.000,00
214	1.0	1.0	01.1	119	Pembangunan Drainase RT.07,08,09 Kel.Bandungrejosari	1 paket	Kota Malang		217.600.000,00
215	1.0	1.0	01.1	120	Perbaikan Gorong - gorong RT. 01 - RT. 06 RW. 10 Kel. Kauman	1 paket	Kota Malang		500.000.000,00
216	1.0	1.0	01.1	121	Pembangunan Plengsengan di RT. 03 RW. 09 Kel. Kotalama	1 paket	Kota Malang		217.600.000,00
217	1.0	1.0	01.1	122	Pembangunan Plengsengan Sungai RW. 06 Janti Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun	1 paket	Kota Malang		300.000.000,00
218	1.0	1.0	01.1	123	Perbaikan Saluran Air RW. 6 Kel. Buring	1 paket	Kota Malang		217.600.000,00
219	1.0	1.0	01.1	124	Pembangunan Saluran Air di RW. 01 dan 02 Kel. Tlogomas	1 paket	Kota Malang		217.600.000,00
220	1.0	1.0	01.1	125	Pembangunan Plengsengan di RW. 01 Kel. Tlogomas	1 paket	Kota Malang		217.600.000,00
221	1.0	1.0	01.1	126	Pembangunan Plengsengan di RW. 03 Kel. Tlogomas	1 paket	Kota Malang		217.600.000,00
222	1.0	1.0	01.1	127	Pembangunan Plengsengan Jalan Menuju Makam Jl. Simpang Akordion di RT. 04 RW. 01 Kel. Tunqgulwulung	1 paket	Kota Malang		217.600.000,00
223	1.0	1.0	01.1	128	Pembangunan Gorong-Gorong di RW. 07 Kel. Purwantoro	1 paket	Kota Malang		217.600.000,00
224	1.0	1.0	01.1	129	Pembangunan Saluran Air di RW. 08 Kel. Purwodadi	1 paket	Kota Malang		217.600.000,00
225	1.0	1.0	01.1	130	Pembangunan Plengsengan di RT. 08 RW. 07 Kel. Tanjungrejo	1 paket	Kota Malang		217.600.000,00
226	1.0	1.0	01.1	131	Pembangunan Saluran Air di RT. 08 RW. 02 Kel. Mulyorejo	1 paket	Kota Malang		217.600.000,00
227	1.0	1.0	01.1	132	Pembangunan Saluran Air di RT. 13 RW. 04 Kel. Bandulan	1 paket	Kota Malang		217.600.000,00
228	1.0	1.0	01.1	133	Identifikasi rencana jalan Kec. Blimbing	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	53.000.000,00
229	1.0	1.0	01.1	134	Identifikasi rencana jalan Kec. Sukun	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	53.000.000,00

A	1	05		BELANJA LANGSUNG				6.750.000.000,00			
				Penataan Ruang				1.265.000.000,00			
I	1	05	15	Program Perencanaan Tata Ruang				600.000.000,00			
1	1	05	15	Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 Paket	Kota Malang	Tersusunnya Naskah Akademis	200.000.000,00			
2	1	05	15	Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Walikota tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 Paket	Kota Malang	Tersusunnya Naskah Akademis	200.000.000,00			
3	1	05	15	Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	1 Paket	Kota Malang	Tersusunnya Naskah Akademis	200.000.000,00			
II	1	05	17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang				665.000.000,00			
4	1	05	17	Penyusunan Rencana Aksi Pencapaian RTH Publik dan Sistem Informasi Capaian RTH Publik	1 Paket	Kota Malang	Tersusunnya Rencana Aksi Pencapaian RTH Publik dan Sistem Informasi Capaian RTH Publik	200.000.000,00			
5	1	05	17	Pembuatan Sistem informasi Penataan Ruang Kota Malang	1 Paket	Kota Malang	Terwujudnya Sistem informasi Penataan Ruang Kota Malang	350.000.000,00			
6	1	05	17	Proses Persetujuan RDTRK	1 Paket	Kota Malang	Tersusunnya RDTRK	115.000.000,00			
		5									
B	1	06		Perencanaan Pembangunan				5.335.000.000,00			
III	1	06	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				545.287.000,00			
7	1	06	01	Penyediaan jasa surat menyurat		Kota Malang		31.240.000,00			
8	1	06	01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kota Malang		12.000.000,00			
9	1	06	01	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Kota Malang		46.000.000,00			
10	1	06	01	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Kota Malang		41.408.000,00			
11	1	06	01	Penyediaan alat tulis kantor		Kota Malang		40.645.000,00			
12	1	06	01	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Kota Malang		37.500.000,00			
13	1	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Kota Malang		2.224.000,00			

14	1	06	01	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Kota Malang		82.900.000,00	
15	1	06	01	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Kota Malang		4.620.000,00	
16	1	06	01	Penyediaan makanan dan minuman		Kota Malang		21.750.000,00	
17	1	06	01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Kota Malang		170.000.000,00	
18	1	06	01	Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa		Kota Malang		55.000.000,00	
IV	1	06	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				483.956.000,00	
19	1	06	02	Pengadaan kendaraan dinas/operasional		Kota Malang		40.000.000,00	
20	1	06	02	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Kota Malang		78.116.000,00	
21	1	06	02	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Kota Malang		3.840.000,00	
22	1	06	02	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		Kota Malang		200.000.000,00	
23	1	06	02	Pemasangan WiFi/abonemen		Kota Malang		12.000.000,00	
24	1	06	02	Pembuatan jaringan online		Kota Malang		150.000.000,00	
V	1	06	05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				26.900.000,00	
25	1	06	05	Pendidikan dan pelatihan formal		Kota Malang		26.900.000,00	
VI	1	06	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				232.857.000,00	
26	1	06	06	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Kota Malang		5.000.000,00	
27	1	06	06	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran		Kota Malang		4.000.000,00	
28	1	06	06	Penatausahaan keuangan		Kota Malang		23.857.000,00	
29	1	06	06	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan	4 Laporan	Kota Malang	Terpantaunya penggunaan dana DAK dan TP	100.000.000,00	
30	1	06	06	Sosialisasi ketentuan Dibiidang Cukai	1 Paket	Kota Malang	Terlaksananya sosialisasi	100.000.000,00	
VII	1	06	19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar				289.000.000,00	

31	1	06	19	Kajian Strategi Pembangunan Daerah Berbasis Pelestarian Lingkungan	1 Paket	Kota Malang		154.000.000,00		
32	1	06	19	Sinkronisasi Program-program Bidang Tata Kota	1 Paket	Kota Malang		60.000.000,00		
33	1	06	19	Pengembangan Web Tata Kota	1 Paket	Kota Malang		75.000.000,00		
VIII	1	06	20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah				1.248.000.000,00		
34	1	06	20	Fasilitasi Dewan Riset Daerah	1 Paket	Kota Malang		750.000.000,00		
35	1	06	20	Penyusunan Ranperda dan Pembentukan BUMD Kabel DUKTING Kota Malang	1 Paket	Kota Malang		210.000.000,00		
36	1	06	20	Kajian Pemanfaatan Pelaksanaan Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	1 Paket	Kota Malang		175.000.000,00		
27	1	06	20	Kegiatan Publikasi Perencanaan dan Kajian	1 Paket	Kota Malang		59.000.000,00		
28	1	06	20	Penyusunan Aplikasi E-MONEV kegiatan Pembangunan	1 Paket	Kota Malang		54.000.000,00		
IX	1	06	21	Program perencanaan pembangunan daerah				950.000.000,00		
29	1	06	21	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	1 Paket dan 75 Dokumen RKPD	Kota Malang	Terselenggarakannya Musrenbang dan Tersusunnya RKPD	225.000.000,00		
30	1	06	21	Penyusunan KU Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD 2014	150 Dokumen KUPA-PPAS-PAPBD dan 150 Dokumen Nota Kesepakatan KUPA-PPAS-PAPBD	Kota Malang	Tersusunnya Dokumen KUPA-PPAS-PAPBD	200.000.000,00		
31	1	06	21	Penyusunan KU APBD dan PPAS APBD 2015	150 Dokumen KUA-PPAS APBD dan 150 Dokumen Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD	Kota Malang	Tersusunnya Dokumen KUA-PPAS	250.000.000,00		
32	1	06	21	Penyusunan Perubahan RKPD 2014	75 Dokumen Perubahan RKPD	Kota Malang	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKPD	150.000.000,00		

33	1	06	21		Penyusunan hasil evaluasi Renja SKPD	75 Dokumen Hasil Evaluasi Renja SKPD	Kota Malang	Tersusunnya hasil evaluasi Renja SKPD	125.000.000,00		
X	1	06	22		Program perencanaan pembangunan ekonomi				914.000.000,00		
34	1	06	22		Kajian Industri Kreatif Masyarakat sebagai Penunjang Sektor Pariwisata		Kota Malang		165.000.000,00		
35	1	06	22		Penyusunan Naskah Akademis dan Ranperwal Penataan UMKM di Kota Malang		Kota Malang		175.000.000,00		
36	1	06	22		Penyusunan Ranperwal Review Fasilitasi dan Insentif pendukung kepada investor di Kota Malang		Kota Malang		125.000.000,00		
37	1	06	22		Koordinator Bidang Ekonomi		Kota Malang		124.000.000,00		
38	1	06	22		Analisa Keamanan Pangan		Kota Malang		75.000.000,00		
39	1	06	22		Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif		Kota Malang		125.000.000,00		
40	1	06	22		Analisa PDRB Kota Malang dan Perhitungan PDRB Kota Malang		Kota Malang		125.000.000,00		
XI	1	06	23		Program perencanaan sosial budaya				645.000.000,00		
41	1	06	23		Penyusunan Analisa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota		Kota Malang		50.000.000,00		
42	1	06	23		Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Malang		Kota Malang		150.000.000,00		
43	1	06	23		Koordinasi dan Laporan capaian MDGs Kota Malang TA. 2015		Kota Malang		100.000.000,00		
44	1	06	23		Koordinasi dan Dukungan Pengembangan Kota Layak Anak		Kota Malang		120.000.000,00		
45	1	06	23		Analisa Situasi Ibu dan Anak Kota Malang		Kota Malang		75.000.000,00		
46	1	06	23		Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Kota Malang		Kota Malang		150.000.000,00		
C	1	23			Statistik				150.000.000,00		
XII	1	23	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				150.000.000,00		
47	1	23	15		Penyusunan Profil Kota Malang	75 Dokumen Profil Kota Malang	Kota Malang	Tersusunnya Dokumen Profil Kota Malang	150.000.000,00		

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							lokasi	target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2				3	4	4	5	6	7	8	9
					BELANJA LANGSUNG				14.750.000.000,00			
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				3.757.820.000,00			
1	1	1.0	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	Kota Malang	Lancarnya pelayanan administrasi surat menyurat	280.000.000,00			
2	1	1.0	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	Kota Malang	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	2.000.000.000,00			
3	1	1.0	01	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	100%	Kota Malang	Terlaksananya jasa jaminan barang milik daerah	50.000.000,00			
4	1	1.0	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100%	Kota Malang	Peningkatan kemampuan administrasi keuangan	118.800.000,00			
5	1	1.0	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100%	Kota Malang	Kebersihan kantor yang layak dan nyaman	180.000.000,00			
6	1	1.0	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	100%	Kota Malang	Peralatan kantor terpelihara dengan baik	52.500.000,00			
7	1	1.0	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	Kota Malang	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	110.000.000,00			

8	1	1.0 7.0 1	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	Kota Malang	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran yang optimal	110.000.000,00		
9	1	1.0 7.0 1	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	Kota Malang	Terpenuhinya komponen Instalasi listrik penerangan bangunan kantor	54.500.000,00		
10	1	1.0 7.0 1	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	Kota Malang	Peningkatan pengetahuan SDM	22.020.000,00		
11	1	1.0 7.0 1	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	Kota Malang	Kesejahteraan dan kelancaran tugas kantor	52.500.000,00		
12	1	1.0 7.0 1	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	100%	Kota Malang	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	202.500.000,00		
13	1	1.0 7.0 1	01	20	Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa	100%	Kota Malang	Kelancaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	75.000.000,00		
14	1	1.0 7.0 1	01	79	Wahana Tata Nugraha	100%	Kota Malang	Peningkatan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas	450.000.000,00		
II	1	1.0 7.0 1	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.323.500.000,00		
15	1	1.0 7.0 1	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Dinas	100%	Kota Malang	Kelancaran pelayanan dan keciatan dinas	85.000.000,00		
16	1	1.0 7.0 1	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100%	Kota Malang	Prasarana dan fasilias kantor dinas sesuai kebutuhan	150.000.000,00		
17	1	1.0 7.0 1	02	24	Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100%	Kota Malang	Kendaraan dinas/operasional dinas perhubungan	1.088.500.000,00		
III	1	1.0 7.0 1	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				75.000.000,00		
18	1	1.0 7.0 1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	100%	Kota Malang	Peningkatan disiplin aparatur	75.000.000,00		

IV	1	1.0	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					187.830.000,00	
19	1	1.0	06	01	Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	Kota Malang	Kinerja SKPD		90.000.000,00	
20	1	1.0	06	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	100%	Kota Malang	Menyediakan laporan keuangan semesteran		83.000.000,00	
21	1	1.0	06	03	Penyusunan RKA, DPA, dan DPPA	100%	Kota Malang	Tersedianya Dokumen Anggaran SKPD		14.830.000,00	
V	1.0	1.0	15		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan					330.000.000,00	
22	1.0	1.0	15	08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perlengkapan Jalan	100%	Kota Malang	Peningkatan keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalulintas dan anokutan ialan		40.000.000,00	
23	1.0	1.0	15	12	Penyusunan Naskah Akademik Tataran Transportasi Lokal	100%	Kota Malang	Tersedianya Dokumen Lalulintas (Terintegrasi jaringan LLAJ sesuai TATRAWIL Prop. Jatim		175.000.000,00	Sebagai penjabaran Pergub Prop. Jatim No. 4 Tahun 2013 ttg. Tatrakil.
24	1.0	1.0	15	13	Penyusunan Naskah Akademik Pedoman Teknis Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalulintas (Andalalin)	100%	Kota Malang	Tersedianya Dokumen Lalulintas		58.000.000,00	Penjabaran dari Perda No. 7 Th. 2010 tentang Andalalin
25	1.0	1.0	15	14	Penyusunan Naskah Akademis dan Ranperwal Penyediaan Fasilitas Lalulintas		Kota Malang	Dokumen fasilitas lalulintas		57.000.000,00	
VI	1	1.0	16		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ					570.000.000,00	
26	1	1.0	16	05	Kegiatan Insidentil Lalulintas	100%	Kota Malang	Prasarana dan fasilitas Perlengkapan LLAJ terpelihara dengan baik		125.000.000,00	

27	1	1.0 7.0 1	16	06	Rehabilitasi Box lampu Traffic light dan Jaringan instalasi kabel Traffic light	100%	Kota Malang	Prasarana dan fasilitas Perlengkapan LLAJ terpelihara dengan baik	445.000.000,00		
VII	1	1.0 7.0 1	17		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan				2.388.188.395,00		
28	1	1.0 7.0 1	17	03	Kegiatan Pembinaan Pengelola Angkutan umum guna Meningkatkan keselamatan Penumpang	100%	Kota Malang	Meningkatnya keselamatan berlalu lintas	310.000.000,00		
29	1	1.0 7.0 1	17	19	Penyelenggaraan Angkutan Lebaran	100%	Kota Malang	Keamanan, ketertiban, kenyamanan selama pelaksanaan Angkutan Hari Raya Idul Fitri 1434 H	215.000.000,00		
30	1	1.0 7.0 1	17	26	Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan	100%	Kota Malang	Meningkatkan keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan	200.000.000,00		
31	1	1.0 7.0 1	17	27	Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Natal dan tahun baru	100%	Kota Malang	Keamanan, ketertiban, kenyamanan selama pelaksanaan Angkutan Nata dan Tahun Baru	100.000.000,00		
32	1	1.0 7.0 1	17	34	Pengawasan Ketertiban Kegiatan Car Free Day	100%	Kota Malang	Ketertiban dan kelancaran lalu lintas pengguna jalan	184.850.000,00		
33	1	1.0 7.0 1	17	35	Pembinaan petugas parkir	100%	Kota Malang	Ketertiban dan kelancaran lalu lintas	488.068.000,00		
34	1	1.0 7.0 1	17	37	Operasi Penertiban Laik jalan kendaraan angkutan umum dan angkutan Khusus	100%	Kota Malang	Ketertiban pengguna jalan	183.000.000,00		
35	1	1.0 7.0 1	17	38	Pemantauan dan Pengendalian Arus Lalulintas	100%	Kota Malang	Kelancaran dan keselamatan pengguna jalan	457.270.395,00		
36	1	1.0 7.0 1	17	39	Pengadaan sistem jaringan terintegrasi	100%	Kota Malang	Meningkatkan Kelancaran, ketertiban, dan keselamatan pengguna jalan	100.000.000,00		

37	1	1.0 7.0 1	17	41	Study Penataan dan Evaluasi Jalur Angkutan Kota di Kota Malang		Kota Malang	Meningkatkan Kelancaran, ketertiban, dan keselamatan penduana ialan	150.000.000,00		
VIII	1	1.0 7.0 1	18		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan				4.297.661.605,00		
39	1	1.0 7.0 1	18	04	Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	100%	Kota Malang	Prasarana dan fasiitas kantor dinas sesuai kebutuhan	4.122.661.605,00		
40	1.0 7	1.0 7.0 1	18	02	Pengadaan Halte	100%	Kota Malang	Prasarana dan fasiitas perlengkapan jalan sesuai kebutuhan	175.000.000,00		
IX	1	1.0 7.0 1	19		Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas				1.070.000.000,00		
41	1	1.0 7.0 1	19	01	Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu lalu lintas	100%	Kota Malang	Prasarana dan fasiitas LLAJ sesuai kebutuhan	200.000.000,00		
42	1	1.0 7.0 1	19	02	Pengadaan Marka Jalan	100%	Kota Malang	Prasarana dan fasiitas LLAJ sesuai kebutuhan	400.000.000,00		
43	1	1.0 7.0 1	19	04	Pengadaan bola lampu lalulintas	100%	Kota Malang	Prasarana dan fasiitas LLAJ sesuai kebutuhan	30.000.000,00		
44	1	1.0 7.0 1	19	09	Pengecatan Jalur Sepeda	100%	Kota Malang	Prasarana dan fasiitas LLAJ sesuai kebutuhan	220.000.000,00		
45	1	1.0 7.0 1	19	10	Pembangunan Taman Lalulintas	100%	Kota Malang	Prasarana dan fasiitas LLAJ sesuai kebutuhan	220.000.000,00		
X	1	1.0 7.0 1	20		Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor				600.000.000,00		
46	1	1.0 7.0 1	20	05	Pelayanan jasa operasional pengujian kendaraan bermotor	100%	Kota Malang	Kelaikan kendaraan bermotor	600.000.000,00		
XI	1	1.0 7.0 1	21		Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				150.000.000,00		

47	1	1.0 7.0 1	21	01		Intensifikasi retribusi pelayanan parkir	100%	Kota Malang	Peningkatan PAD	150.000.000,00		
----	---	-----------------	----	----	--	--	------	-------------	-----------------	----------------	--	--

SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
								lokasi	target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2					3	4	4	5	6	7	8	9
						BELANJA LANGSUNG				4.000.000.000,00			
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				500.000.000,00			
1	1	08	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 surat	Kota Malang	Lancarnya Pelayanan Administrasi Surat Menyurat	15.000.000,00			
2	1	08	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Pesawat	Kota Malang	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	33.000.000,00			
3	1	08	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	6 jabatan	Kota Malang	Terwujudnya peningkatan kinerja yang optimal	40.500.000,00			
4	1	08	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Kota Malang	Kebersihan Kantor yang Layak dan Nyaman	30.000.000,00			
5	1	08	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 bulan	Kota Malang	Peralatan kantor Terpelihara Baik	15.000.000,00			
6	1	08	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 paket	Kota Malang	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	40.000.000,00			

7	1	08	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	Kota Malang	Kelancaran pelayanan Administrasi Perkantoran	17.000.000,00		
8	1	08	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	Kota Malang	Terwujudnya Pelayanan Prima kepada Masyarakat	10.000.000,00		
9	1	08	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	Kota Malang	Tersedianya bahan bacaan di kantor	5.000.000,00		
10	1	08	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	Kota Malang	Kesejahteraan dan Kelancaran Tugas Kantor	25.000.000,00		
11	1	08	01	01	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	21 kali	Kota Malang	Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor	180.000.000,00		
12	1	08	01	01		Pengembangan SDM (Worshop, Pelatihan dll)	21 kali	Kota Malang	Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor	89.500.000,00		
II	1	08	01	16		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				2.195.000.000,00		
13	1	08	01	16		Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup	1 paket	Kota Malang	Pencegahan Pencemaran Air dan Udara, Penanganan Pengaduan Pencemaran LH, serta Pengendalian Kerusakan Lahan	25.000.000,00		
14	1	08	01	16		Pengaduan Masyarakat bidang Lingkungan Hidup	1 paket	Kota Malang	Pelaku Usaha dan masyarakat di Kota Malang	15.000.000,00		
15	1	08	01	16		Kajian Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Malang dan Penyusunan Naskah Akademis Draf Ranperda RPPLH Kota Malang	1 Dokumen	Kota Malang	Tersedianya dokumen Rencana RPPLH	250.000.000,00		
16	1	08	01	16		Kajian Daya Dukung Lingkungan Kota Malang dan Penyusunan Draf Ranperwal Daya Dukung dan Daya Tampung di Kota Malang	1 Dokumen	Kota Malang	Tersedianya Dokumen Daya Dukung Daya Tampung di Kota Malang	250.000.000,00		
18	1	08	01	16		Pemantauan dan Pengujian Kualitas Air Badan Air(ABA) di Kota Malang	1 Paket	Kota Malang	Titik Pantau di DAS Brantas di Wilayah Kota Malang	90.000.000,00		
19	1	08	01	16		Pemantauan dan Pegujian Kualitas Limbah Domestik di Kota Malang	1 Paket	Kota Malang	IPAL KOMUNAL di Kota Malang	90.000.000,00		

20	1	08	01	16	Pemantauan dan Pengujian Kualitas Limbah Infeksius di Kota Malang	1 Paket	Kota Malang	Rumah Sakit,Klinik kesehatan dan dan Laboratorium Medis di Kota Malana	90.000.000,00		
21	1	08	01	16	Pengawasan Ketaaan Kegiatan/Usaha terhadap Pengelolaan Lingkungan di Kota Malang	1 Paket	Kota Malang	Semua Kegiatan dan/atau Usaha di Kota Malang Usaha/Kegiatan di Malana	90.000.000,00		
22	1	08	01	16	Pengelolaan Kualitas Udara Ambient di Kota Malang	1 Paket	Kota Malang	Titik Pantau Udaraa Ambient Kota Malang	80.000.000,00		
23	1	08	01	16	Pengelolaan Kualitas Udara Emisi di Kota Malang	1 Paket	Kota Malang	Titik Pantau Udara Emisi Kota Malang	85.000.000,00		
24	1	08	01	16	Peningkatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kota Malang	1 Paket	Kota Malang	Kegiatan Usaha Yang Menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	80.000.000,00		
25	1	08	01	16	Penyusunan Management Mutu Laboratorium	1 paket	Kota Malang		75.000.000,00		
26	1	08	01	16	Operasioanal UPT Laboratorium	1 paket	Kota Malang	Terwujudnya lingkungan yang bebas polusi	175.000.000,00		
27	1	08	01	16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium	1 paket	Kota Malang	Terwujudnya lingkungan yang bebas polusi	100.000.000,00		
28	1	08	01	16	Penyusunan Laporan Ketaatan Lingkungan IHT	1 Dokumen	Kota Malang	Tersedianya Dokumen Pelaporan Ketaatan Lingkungan IHT	200.000.000,00		
29	1	08	01	16	Pemantauan Kualitas Udara di kawasan Industri Rokok di Kota Malang	1 paket	Kota Malang	Pabrik rokok dan Sekitarnya	125.000.000,00		
30	1	08	01	16	Pemantauan Pengelolaan Lingkungan di Kawasan Industri Rokok di Kota Malang	1 paket	Kota Malang	Memantau Pengelolaan Lingkungan Sebagaimana Tercantum dalam dokumen	125.000.000,00		
31	1	08	01	16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium UPT berupa Pengadaan Alat Uji Udara	1 paket	Kota Malang	Inklungan Tersedianya Sarana dan Prasarana Laboratorium UPT berupa Pengadaan Alat Uji Udara	250.000.000,00		

III	01	08	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				360.000.000,00		
32	01	08	01	02	24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3 buah	Kota Malang	Sarana Kendaraan Bermotor Layak Pakai	80.000.000,00		
34	01	08	01	02		Penyedia Peralatan Perlengkapan Kantor		Kota Malang	Terwujudnya peningkatan kinerja yang optimal	60.000.000,00		
35	1	08	01	02	42	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor UPT Laboratorium Lingkungan	1 Paket	Kota Malang	Terciptanya Pelayanan masyarakat secara baik	40.000.000,00		
36	1	08	01	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Pick Up	1 Paket	Kota Malang	Tersedianya Kendaraan Operasional yg Lavak Pakai	180.000.000,00		
IV	01	08	01	06		Program Peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan				45.000.000,00		
37	01	08	01	06		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 buku	Kota Malang	Tersedianya Dokumen LAKIP BLH	15.000.000,00		
38	01	08	01	06		Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran	60 buku	Kota Malang	Tersedianya Laporan Keuangan	10.000.000,00		
39	01	08	01	06		Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	12 buku	Kota Malang	Tersedianya Dokumen RKA DAN DPPA	10.000.000,00		
40	01	08	01	06		Penyusunan IKM	12 buku	Kota Malang	Tersedianya Laporan IKM	5.000.000,00		
41	01	08	01	06		Penyusunan SOP	12 buku	Kota Malang	Tersusunnya Dokumen SOP BLH	5.000.000,00		
V	01	08	01	17		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam				75.000.000,00		
42	01	08	01	17		Sosialisasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim pada Jajaran Kader Lingkungan di Kota Malang		Kota Malang	Meningkatkan Pemahaman terhadap Skema Mitigasi dan Adaptasi untuk menghadapi fenomena Perubahan Iklim	25.000.000,00		

					BELANJA LANGSUNG						72.329.000.000,00		
I	1	03	1.08	23	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN						14.925.000.000,00		
1	1	03	1.08	23	20 Pengadaan Lampu, Komponen dan Aksesoris PJU	100%	Kota Malang	Mewujudkan fungsi penerangan jalan umum (PJU) kota yang lebih optimal			600.000.000,00		
2	1	03	1.08	23	22 Penataan Jaringan PJU/Dekorasi Kota	100%	Kota Malang	Mewujudkan fungsi penerangan jalan umum (PJU) dan Dekorasi Kota (DK) kota yang lebih optimal			125.000.000,00		
3	1	03	1.08	23	28 Pemeliharaan Dekorasi Kota	100%	Kota Malang	Mewujudkan fungsi dekorasi kota yang lebih optimal			100.000.000,00		
4	1	03	1.08	23	30 Pengadaan Lampu, Komponen dan Aksesoris Dekorasi Kota	100%	Kota Malang	Mewujudkan fungsi dekorasi kota yang lebih optimal			200.000.000,00		
5	1	03	1.08	23	33 Pemeliharaan PJU	100%	Kota Malang	Mewujudkan fungsi dekorasi kota yang lebih optimal			150.000.000,00		
6	1	03	1.08	23	38 Penataan Penerangan Jalan Lingkungan (PJJ) Kota Malang	100%	Kota Malang	Mewujudkan fungsi penerangan jalan umum (PJU) kota yang lebih optimal			3.000.000.000,00		
7	1	03	1.08	23	39 Pembangunan dan Penataan PJU Kota Malang	100%	Kota Malang	Mewujudkan fungsi penerangan jalan umum (PJU) kota yang lebih optimal			8.250.000.000,00		
8	1	03	1.08	23	40 Pembangunan dan Penataan Dekorasi Gerbang Masuk Kota	100%	Kota Malang	Mewujudkan fungsi dekorasi kota yang lebih optimal			1.500.000.000,00		
9	1	03	1.08	23	41 Pembangunan dan Penataan Dekorasi Kota	100%	Kota Malang	Mewujudkan fungsi dekorasi kota yang lebih optimal			1.000.000.000,00		
II	1	04	1.08	16	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN		Kota Malang				70.000.000,00		
10	1	04	1.08	16	02 Sosialisasi sanitasi Air Limbah Domestik	100%	Kota Malang	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah rumah tangga			70.000.000,00		

III	1	04	1.08 .02	20	PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN					1.185.000.000,00		
11	1	04	1.08 .02	20	01 Pengadaan lahan TPU	100%	Kota Malang	Mewujudkan Pelayanan Pemakaman yang memadai bagi kenyamanan dan pelayanan publik				
12	1	04	1.08 .02	20	02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	100%	Kota Malang	Mewujudkan Pelayanan Pemakaman yang memadai bagi kenyamanan dan pelayanan publik	300.000.000,00			
13	1	04	1.08 .02	20	03 Penyediaan peralatan dan bahan pemakaman prodeo	100%	Kota Malang	Mewujudkan Pelayanan Pemakaman terhadap jenazah yang tidak dikenal atau tidak diakui keluarganya	35.000.000,00			
14	1	04	1.08 .02	20	05 Pembangunan Drainase dan Pagar TPU Sukun Nasrani	100%	Kota Malang	meningkatkan keindahan dan kenyamanan lokasi TPU	150.000.000,00			
15	1	04	1.08 .02	20	06 Pemeliharaan Gedung Kantor Bidang Pemakaman	100%	Kota Malang	meningkatkan keindahan dan kenyamanan lokasi TPU	100.000.000,00			
16	1	04	1.08 .02	20	07 Renovasi Gedung Kantor Bidang Pemakaman	100%	Kota Malang	meningkatkan keindahan dan kenyamanan lokasi TPU	200.000.000,00			
17	1	04	1.08 .02	20	08 Pembangunan Pagar TPU Sukorejo	100%	Kota Malang	meningkatkan keindahan dan kenyamanan lokasi TPU	150.000.000,00			
18	1	04	1.08 .02	20	09 Pembangunan Pagar TPU Samaan	100%	Kota Malang	meningkatkan keindahan dan kenyamanan lokasi TPU	150.000.000,00			
19	1	04	1.08 .02	20	10 Renovasi Kantor TPU Mergosono	100%	Kota Malang	meningkatkan keindahan dan kenyamanan lokasi TPU	100.000.000,00			

IV	1	08	1.08	01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN				23.262.355.600,00		
20	1	08	1.08 .02	01	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	Kota Malang	Mewujudkan Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur	250.000.000,00		
21	1	08	1.08 .02	01	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	100%	Kota Malang	Mewujudkan Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur	21.400.000.000,00		
22	1	08	1.08 .02	01	06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	100%	Kota Malang	Meningkatkan kualitas operator/pengemudi kendaraan operasional	250.000.000,00		
23	1	08	1.08 .02	01	07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100%	Kota Malang	Mewujudkan kualitas kinerja aparatur	165.000.000,00		
24	1	08	1.08 .02	01	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100%	Kota Malang	Mewujudkan kualitas lingkungan kantor	27.500.000,00		
25	1	08	1.08 .02	01	09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	100%	Kota Malang	Meningkatkan daya guna sarana dan prasarana	75.000.000,00		
26	1	08	1.08 .02	01	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	Kota Malang	Mewujudkan kuantitas dan kualitas layanan publik	82.500.000,00		
27	1	08	1.08 .02	01	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	Kota Malang	Mewujudkan kuantitas dan kualitas layanan publik	175.000.000,00		
28	1	08	1.08 .02	01	13 Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	100%	Kota Malang	Mewujudkan kuantitas dan kualitas layanan publik	170.000.000,00		
29	1	08	1.08 .02	01	17 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Kota Malang	Mewujudkan kuantitas dan kualitas layanan publik	412.355.600,00		
30	1	08	1.08 .02	01	18 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	Kota Malang	Mewujudkan kuantitas dan kualitas layanan publik	50.000.000,00		

31	1	08	1.08 .02	01	20	Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	Kota Malang	Mewujudkan Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur	55.000.000,00		
32	1	08	1.08 .02	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah/Negeri	100%	Kota Malang	Mewujudkan koordinasi terlaksananya tupoksi lebih optimal	150.000.000,00		
V	08	1.0 8.0 2	02			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				3.525.000.000,00		
33	08	1.0 8.0 2	02	05	05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	100%	Kota Malang	Meningkatkan pelayanan publik lebih optimal	610.000.000,00		
34	08	1.0 8.0 2	02	22	22	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100%	Kota Malang	Mewujudkan berjalannya pelayanan angkutan sampah secara kontinu	1.700.000.000,00		
35	08	1.0 8.0 2	02	24	24	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	100%	Kota Malang	Mewujudkan Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur	250.000.000,00		
36	08	1.0 8.0 2	02	28	28	Pengadaan Kontainer Sampah	100%	Kota Malang	Meningkatkan Sarana angkutan sampah secara optimal	500.000.000,00		
37	08	1.0 8.0 2	02	30	30	Perbaikan Kontainer Sampah	100%	Kota Malang	Meningkatkan Sarana angkutan sampah secara optimal	200.000.000,00		
38	08	1.0 8.0 2	02	53	53	Pemeliharaan Repeater	100%	Kota Malang	Mewujudkan Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur	100.000.000,00		
39	08	1.0 8.0 2	02	59	59	Penyusunan Database Dinas Kebersihan dan Pertamanan	100%	Kota Malang	Mewujudkan Database Dinas Kebersihan dan Pertamanan secara optimal	100.000.000,00		
40	08	1.0 8.0 2	02	80	80	Pendataan Aset DKP	100%	Kota Malang	Mewujudkan Pendataan Aset Dinas Kebersihan dan Pertamanan secara optimal	65.000.000,00		

VI	1	08	1.08	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR					1.050.000.000,00
41	1	08	1.08	03	03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	100%	Kota Malang	Meningkatnya kenyamanan dan keamanan kerja bagi petugas di lapangan		700.000.000,00
42	1	08	1.08	03	04 Pengadaan pakaian kerja lapangan utk petugas kebersihan RW	100%	Kota Malang	Meningkatnya kenyamanan dan keamanan kerja bagi petugas di wilayah RW		200.000.000,00
43	1	08	1.08	03	05 Pengadaan pakaian kerja lapangan utk kader lingkungan dan BSM	100%	Kota Malang	Meningkatnya kenyamanan dan keamanan kerja bagi kader lingkungan dan BSM		150.000.000,00
VII	1	08	1.08	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN					44.500.000,00
44	1	08	1.08	06	01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	Kota Malang	Meningkatnya kualitas laporan kinerja Aparatur perangkat daerah		8.000.000,00
45	1	08	1.08	06	02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	100%	Kota Malang	Meningkatnya ketepatan waktu pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah		6.000.000,00
46	1	08	1.08	06	04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	100%	Kota Malang	Meningkatnya ketepatan waktu pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah		6.000.000,00
47	1	08	1.08	06	11 Penyusunan RKA dan DPA	100%	Kota Malang	Mewujudkan RKA dan DPA		10.000.000,00
48	1	08	1.08	06	39 Penyusunan SOP (Standart Operational Procedure)	100%	Kota Malang	Mewujudkan SOP DKP		7.500.000,00
49	1	08	1.08	06	45 Penyusunan Pelaporan Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	Kota Malang	Meningkatnya ketepatan waktu pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah		7.000.000,00

VIII	1	08	1.08	15	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				15.135.000.000,00		
50	1	08	1.08	15	02	Peningkatan Kebersihan Kota	100%	Kota Malang	Meningkatkan pengelolaan sampah dari sumber sampah, TPS dan TPA	5.220.000.000,00	
51	1	08	1.08	15	104	Penyediaan Gerobak Sampah untuk Petugas Sampah RW	100%	Kota Malang	Meningkatkan angkutan sampah pada wilayah RW	200.000.000,00	
52	1	08	1.08	15	105	Penyediaan Gerobak Sampah untuk Pengelolaan Persampahan	100%	Kota Malang	Meningkatkan angkutan sampah dari jalan raya ke TPS	200.000.000,00	
53	1	08	1.08	15	108	Pemasangan Pergola Penutup TPS	100%	Kota Malang	Mewujudkan Pengelolaan sampah di TPS secara optimal	150.000.000,00	
54	1	08	1.08	15	109	Rehabilitasi dan peningkatan TPS	100%	Kota Malang	Mewujudkan Pengelolaan sampah di TPS secara optimal	300.000.000,00	
55	1	08	1.08	15	110	Pengadaan lahan TPA	100%	Kota Malang	Meningkatkan pengelolaan sampah di TPA Supit Urang		
56	1	08	1.08	15	13	Peningkatan Peran Serta Masyarakat	100%	Kota Malang	Meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap peraturan di bidang persampahan dan nertamanan	55.000.000,00	
57	1	08	1.08	15	30	Sosialisasi Kebijakan dan Pengelolaan Fungsi DKP	100%	Kota Malang	Meningkatkan pemahaman tentang fungsi-fungsi yang dilakukan DKP	110.000.000,00	
58	1	08	1.08	15	31	Lomba Kebersihan	100%	Kota Malang	Meningkatkan kesadaran mayarakat terhadap pengelolaan lingkungan	570.000.000,00	
59	1	08	1.08	15	32	Pelatihan Pengolahan Sampah Melalui 3R	100%	Kota Malang	Mewujudkan pengurangan sampah dan peningkatan kesejahteraan warga	100.000.000,00	

60	1	08	1.08 .02	15	35	Penyediaan Tong Komposter	100%	Kota Malang	Meningkatkan pengolahan sampah pada tingkat hulu	50.000.000,00		
61	1	08	1.08 .02	15	72	Modernisasi Komposting Gadang	100%	Kota Malang	Meningkatkan pengolahan sampah di lokasi TPS 3R	950.000.000,00		
62	1	08	1.08 .02	15	79	Peningkatan Komposting Sawojajar	100%	Kota Malang	Meningkatkan pengolahan sampah di lokasi TPS 3R	80.000.000,00		
63	1	08	1.08 .02	15	84	Operasional Komposting	100%	Kota Malang	Meningkatkan pengolahan sampah di lokasi TPS 3R	100.000.000,00		
64	1	08	1.08 .02	15	85	Penyediaan Tong Sampah	100%	Kota Malang	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah sesuai jenisnya (sampah basah dan sampah kering)	200.000.000,00		
65	1	08	1.08 .02	15	87	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	100%	Kota Malang	Meningkatkan pengolahan sampah pada sumber sampah, TPS dan TPA	550.000.000,00		
66	1	08	1.08 .02	15	88	Peningkatan Sarana Operasional Angkutan Sampah	100%	Kota Malang	Meningkatkan dan menjaga kestabilan angkutan sampah setiap harinya	2.535.000.000,00		
67	1	08	1.08 .02	15	89	Peningkatan Sarana Operasional Kebersihan Jalan dan TPS	100%	Kota Malang	Meningkatkan pengelolaan kebersihan di jalan-jalan raya	610.000.000,00		
68	1	08	1.08 .02	15	97	Pengelolaan TPA Supiturang	100%	Kota Malang	Meningkatkan pengelolaan sampah di TPA Supit Urang	2.000.000.000,00		
69	1	08	1.08 .02	15	98	Pembangunan Jalan Beton di TPA Supit Urang	100%	Kota Malang	Mewujudkan Pengelolaan sampah di TPA secara optimal	500.000.000,00		
70	1	08	1.08 .02	15	99	Penghijauan di TPA Supit Urang	100%	Kota Malang	Mewujudkan sarana prasarana di TPA secara optimal	50.000.000,00		
71	1	08	1.08 .02	15	100	Pembangunan Drainase di TPA Supit Urang	100%	Kota Malang	Mewujudkan sarana prasarana di TPA secara optimal	200.000.000,00		

72	1	08	1.08 .02	15	101	Pemasangan Instalasi Penangkapan Gas Metan TPA Supit Urang	100%	Kota Malang	Mewujudkan sarana prasarana di TPA secara optimal	100.000.000,00		
73	1	08	1.08 .02	15	102	Peningkatan Sambungan Rumah (SR) Pemanfaat Gas Metan TPA Supit Urang	100%	Kota Malang	Mewujudkan sarana prasarana pada lingkungan sekitar TPA secara optimal	100.000.000,00		
74	1	08	1.08 .02	15	103	Operasional Instalasi Lumpur Tinja (IPLT)	100%	Kota Malang	Meningkatkan pengelolaan lumpur tinja	40.000.000,00		
75	1	08	1.08 .02	15	104	Monitoring dan Pemantauan IPAL MODULAR SEWERAGE SYSTEM (MSS)	100%	Kota Malang	Meningkatkan fungsi IPAL MSS secara optimal	15.000.000,00		
76	1	08	1.08 .02	15	105	Hibah Kelengkapan SR (Sambungan Rumah) IPAL Komunal	100%	Kota Malang	Optimalisasi Fungsi IPAL Komunal	100.000.000,00		
77	1	08	1.08 .02	15		Peningkatan Peran Serta Pengelolaan Persampahan	100%	Kota Malang	Meningkatkan pengelolaan sampah dari sumber sampah, TPS dan TPA	50.000.000,00		
IX	1	08	1.08 .02	16		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				700.000.000,00		
79	1	08	1.08 .02	16	45	Program Malang Kota Bersih	100%	Kota Malang	Meningkatkan pengolahan sampah dari sumber sampah, TPS dan TPA	700.000.000,00		
X	1	08	1.08 .02	19		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP				400.000.000,00		
79	1	08	1.08 .02	19	18	Pemilihan Putri Lingkungan Hijau sebagai Duta Lingkungan Hidup Kota Malang	100%	Kota Malang		250.000.000,00		
80	1	08	1.08 .02	19	19	Focus Group Discussion Penataan Taman Kota	100%	Kota Malang	Meningkatnya kesadaran warga kota terutama para pihak swasta tentang pentingnya penataan Taman Kota	100.000.000,00		

81	1	08	1.08 .02	19	20	Pembinaan Komunitas Hijau	100%	Kota Malang	Meningkatnya pengetahuan warga kota tentang RTH	50.000.000,00		
XI	1	04	1.08 .02	20		PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU				12.032.144.400,00		
82	1	04	1.08 .02	20	11	Penyediaan Bahan / Bibit Tanaman Untuk Penyulaman Taman Kota	100%	Kota Malang	Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hiiu perkotaan	200.000.000,00		
83	1	04	1.08 .02	20	110	Pengadaan Pohon Pule di wilayah Kota Malang	100%	Kota Malang	Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hiiu perkotaan	200.000.000,00		
84	1	04	1.08 .02	20	111	Penyulaman Taman Median Jl. Soekarno Hatta	100%	Kota Malang	Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hiiu perkotaan	200.000.000,00		
85	1	04	1.08 .02	20	113	Penyulaman Taman Jl. Raya Langsep	100%	Kota Malang	Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hiiu perkotaan	200.000.000,00		
86	1	04	1.08 .02	20	114	Penyulaman Taman Jl. Veteran	100%	Kota Malang	Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hiiu perkotaan	200.000.000,00		
87	1	04	1.08 .02	20	115	Penyulaman Taman Jl. Urip Sumoharjo	100%	Kota Malang	Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hiiu perkotaan	175.000.000,00		
88	1	04	1.08 .02	20	116	Penyulaman Taman Jl. Raden Intan	100%	Kota Malang	Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hiiu perkotaan	150.000.000,00		
89	1	04	1.08 .02	20	117	Penataan Taman Median Jalur Lambat Jl. JA. Suprpto	100%	Kota Malang	Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hiiu perkotaan	200.000.000,00		
90	1	04	1.08 .02	20	118	Penyulaman Taman Dieng, Depan Kantor BPN Kabupaten dan Segitiga Wilis	100%	Kota Malang	Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hiiu perkotaan	200.000.000,00		
91	1	04	1.08 .02	20	119	Penataan Taman Median Jalan	100%	Kota Malang	Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hiiu perkotaan	445.000.000,00		

92	1	04	1.08 .02	20	120	Penataan Taman Ramah Lingkungan Mojolangu	100%	Kota Malang	Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hiiu perkotaan	750.000.000,00		
93	1	04	1.08 .02	20	121	Penataan RTH Hutan Kota Tunggul Wulung	100%	Kota Malang	Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hiiu perkotaan	400.000.000,00		
94	1	04	1.08 .02	20	122	Pembangunan RTH Kecamatan	100%	Kota Malang	Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hiiu perkotaan	500.000.000,00		
95	1	04	1.08 .02	20	123	Pra Desain Penataan Taman - Taman Kota	100%	Kota Malang	Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hiiu perkotaan	50.000.000,00		
96	1	04	1.08 .02	20	124	Pembangunan RTH Tematik	100%	Kota Malang	Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hiiu perkotaan	500.000.000,00		
97	1	04	1.08 .02	20	125	Sayembara pengembangan atribut Kota Hijau	100%	Kota Malang	Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hiiu perkotaan	100.000.000,00		
98	1	04	1.08 .02	20	126	Pemeliharaan Rutin Taman Kota	100%	Kota Malang	Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hiiu perkotaan	1.491.248.000,00		
99	1	04	1.08 .02	20	127	Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau & Penghijauan	100%	Kota Malang	Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hiiu perkotaan	683.456.400,00		
100	1	04	1.08 .02	20	128	Penyediaan Bahan / Bibit Tanaman Untuk Penyulaman Jalur Hijau Dan Penghijauan	100%	Kota Malang	Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hiiu perkotaan	200.000.000,00		
101	1	04	1.08 .02	20	33	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau dan Penghijauan	100%	Kota Malang	Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hiiu perkotaan	198.000.000,00		
102	1	04	1.08 .02	20	35	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Taman Kota	100%	Kota Malang	Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hiiu perkotaan	275.000.000,00		

103	1	04	1.08 .02	20	58	Pemeliharaan dan Pengecatan Lisban Taman - Taman Kota	100%	Kota Malang	Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hiiu perkotaan	200.000.000,00		
104	1	04	1.08 .02	20	59	Pemeliharaan Rutin Hutan Kota	100%	Kota Malang	Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hijau perkotaan	83.440.000,00		
105	1	04	1.08 .02	20	88	Pembangunan Sumur Resapan dan Biopori	100%	Kota Malang	Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hiiu perkotaan	200.000.000,00		
106	1	04	1.08 .02	20	92	Pembangunan Jaringan Sumur Penyiraman Taman	100%	Kota Malang	Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hiiu perkotaan	100.000.000,00		
107	1	04	1.08 .02	20	93	Pembangunan Sumur Penyiraman	100%	Kota Malang	Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hiiu perkotaan	200.000.000,00		
108	1	04	1.08 .02	20	94	Pengendalian & Pemeliharaan Pohon Penghijauan	100%	Kota Malang	Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hiiu perkotaan	36.000.000,00		
109	1	04	1.08 .02	20	95	Penataan RTH Lingkungan	100%	Kota Malang	Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hiiu perkotaan	500.000.000,00		
110	1	04	1.08 .02	20	96	Pemagaran Hutan Kota Jalan Kediri	100%	Kota Malang	Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hiiu perkotaan	100.000.000,00		
111	1	04	1.08 .02	20	97	Vertikal garden dan pergola di jembatan	100%	Kota Malang	Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hiiu perkotaan	2.250.000.000,00		
112	1	04	1.08 .02	20	98	Pemeliharaan Kebun Pembibitan Tanaman	100%	Kota Malang	Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hiiu perkotaan	410.000.000,00		
113	1	04	1.08 .02	20	99	Pembangunan Green House di Kebun Pembibitan Tanaman	100%	Kota Malang	Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hiiu perkotaan	160.000.000,00		

114	1	04	1.08 .02	20	100	Perbaikan Pagar di Kebun Bibit Jalan Garbis Sisi Timur	100%	Kota Malang	Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hiiu perkotaan	100.000.000,00		
115	1	04	1.08 .02	20	101	Pembangunan Landasan Truk di Kebun Bibit Jalan Garbis	100%	Kota Malang	Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hiiu perkotaan	100.000.000,00		
116	1	04	1.08 .02	20	102	Pembangunan Gudang Peralatan di Kebun Pembibitan Jalan Garbis	100%	Kota Malang	Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hiiu perkotaan	100.000.000,00		
117	1	04	1.08 .02	20	103	Pembangunan Penyangga Pergola	100%	Kota Malang	Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hiiu perkotaan	50.000.000,00		
118	1	04	1.08 .02	20	104	Penyediaan bahan/bibit tanaman hias untuk penyulaman pot gantung dan vertikal garden	100%	Kota Malang	Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hiiu perkotaan	75.000.000,00		
119	1	04	1.08 .02	20		Pembangunan kerangka tanaman rambat di tiang PJU	100%	Kota Malang	Meningkatkan kuantitas dan Kualitas lingkungan hiiu perkotaan	50.000.000,00		

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				lokasi	target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
I	1.1010.1	01	BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			4.250.000.000,00 1.224.406.500,00			
1	1.1010.1	01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	100 %	Kota Malang	Belanja benda pos dan premi asuransi 20.400.000,00			

2	1.1010.1	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	Kota Malang	- belanja materai =2.700.000,- Premi Asuransi Kendaraan : - Avanza 1 bh = 4.500.000,- - Panther 2 bh @. 6.600.000,- = 13.200.000,- Bayar rekening telepon dan fax Bayar Telp / Fax . 12 bulan .	3.960.000,00		
3	1.1010.1	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	100 %	Kota Malang	Terwujudnya laporan keuangan yang akuntabel Hr. PPA, Hr. PPK, Hr. bendahara. Hr.	46.980.000,00		
4	1.1010.1	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	100 %	Kota Malang	Terwujudnya lingkungan tempat kerja yg sehat dan nyaman Honorarium Non PNS : -Pengemudi ; 1 org x 10 bln x 1.500.000,- = 15.000.000 -Tng.kbersihan ; 2 org x 10 bln x 1.500.000,- = 30.000.000 - belanja fumigasi = 50.000.000,- - belanja jasa kebersihan = 6.200.000	101.200.000,00		
5	1.1010.1	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	100 %	Kota Malang	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan peralatan dan mesin: - Service komputer set, printer, scanner,	95.000.000,00		

6	1.1010.1	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	100 %	Kota Malang	belanja bahan pakai habis (alat tulis kantor) Belanja ATK = 171.880.500,- Hr. PPK : 1 org = 1.200.000,- Hr. PPTK : 1 org = 1.000.000,- Hr. PP : 1 org = 1.000.000,-	175.080.500,00		
7	1.1010.1	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100 %	Kota Malang	Belanja cetakan dokumen negara belanja penggandaan .	60.000.000,00		
8	1.1010.1	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	Kota Malang	belanja alat listrik dan elektro	5.000.000,00		
9	1.1010.1	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Kota Malang	Terwujudnya pelayanan prima R. rapat disekat untuk percetakan KTP-el dan Pencatatan	483.990.000,00		
10	1.1010.1	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	Kota Malang	belanja surat kabar	2.796.000,00		
11	1.1010.1	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	100 %	Kota Malang	Terwujudnya kebutuhan mamin untuk rapat dan tamu minuman dan snack untuk tamu dan rapat .	15.000.000,00		
12	1.1010.1	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100 %	Kota Malang	Perjalanan dinas baik ke luar daerah maupun ke dalam daerah	215.000.000,00		
II	1.1010.1	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				191.170.000,00		
13	1.1010.1	02	05	Pengadaan kendaraan Dinas / Operasional	100 %	Kota Malang Kota Malang	Terwujudnya pelayanan prima belanja 2 unit kendaraan roda dua @ . 20.000.000 = 40.000.000	40.000.000,00		

14	1.10	10.1	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	100 %	Kota Malang	Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor Pengecatan	12.000.000,00		
15	1.10	10.1	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100 %	Kota Malang	Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas service 3 unit kendaraan roda 4 , belanja pengganti suku cadang dan belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas sepeda motor roda 2	139.170.000,00		
III	1.10	10.1	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				44.995.000,00		
16	1.10	10.1	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP)	100 %	Kota Malang	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja	9.995.000,00		
17	1.10	10.1	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	100 %	Kota Malang	Masyarakat Kota Malang	11.000.000,00		
18	1.10	10.1	06	05	Penyusunan RKA dan DPA	100 %	Kota Malang	Tersusunnya RKA dan DPA	7.000.000,00		
19	1.10	10.1	06	26	Penyusunan SP dan SOP	100 %	Kota Malang	Tersusunnya SP dan SOP	11.000.000,00		
20	1.10	10.1	06	37	Penyusunan IKM dan LPPD	100 %	Kota Malang	Masyarakat Kota Malang	6.000.000,00		
IV	1.10	10.1	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan				2.789.428.500,00		
21	1.10	10.1	15	13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi kependudukan	100 %	Kota Malang	Terwujudnya tertib adminduk	70.000.000,00		
22	1.10	10.1	15	20	Pemeliharaan serta Perawatan Sarana dan Prasarana Register Akta-Akta Catatan Sipil	100 %	Kota Malang	Terwujudnya pemeliharaan arsip akta catatan sipil pemeliharaan kearsipan = 80.428.500,- Hr. Petugas Penata Kearsipan(SMA) dan Arsiparis (S1) :	150.028.500,00		

23	1.10	10.1	15	21	Penyusunan arsip Digital Catatan Sipil	100 %	Kota Malang	S1. 2 orang x 10 bulan x Rp. 1.980.000 = 39.600.000 SMA/K . 2 orang x 10 bulan x Rp. 1.500.000 = 30.000.000 Terwujudnya penataan arsip bidang pencatatan sipil penyusunan kearsipan = 100.000.000.- Hr. Petugas pendokumentasian (tenaga alih media) :	175.000.000,00
24	1.10	10.1	15	23	Pendataan WNA dan Rentan ADMINDUK	100 %	Kota Malang	5 orang x 10 bulan x Rp. 1.500.000 = 75.000.000 Pendataan penduduk rentan adminduk .	100.000.000,00
25	1.10	10.1	15	29	Penyebaran informasi adminduk .	100 %	Kota Malang	belanja rol benner, brosur dan bookled .	150.000.000,00
26	1.10	10.1	15	30	Pengembangan relasi pencatatan akta kelahiran	100 %	Kota Malang	Hr PNS. Dan belanja modal .	180.000.000,00
27	1.10	10.1	15	42	Pengelolaan Maintenance Jaringan dan alat-alat Pelayanan Administrasi kependudukan	100 %	Kota Malang	Pelayanan prima pengelolaan maintenance = 60.000.000.- Hr. Petugas untuk Trouble Shooting (Non PNS) : 3 orang x 10 bulan x Rp. 1.980.000 = 59.400.000.-	119.400.000,00
28	1.10	10.1	15	46	Penyusunan Profil, Analisis Dampak dan Perkembangan Kependudukan	100 %	Kota Malang	Terwujudnya pelayanan prima	65.000.000,00
29	1.10	10.1	15	Penataan ruang server	100 %	Kota Malang	Terwujudnya pelayanan prima	150.000.000,00
30	1.10	10.1	15	Pelayanan administrasi kependudukan .	100 %	Kota Malang	Terwujudnya pelayanan prima	830.000.000,00

I	1	11	01		BELANJA LANGSUNG				7.500.000.000,00			
					Program Pelayanan administrasi perkantoran				740.000.000,00			
1	1	11	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5200	Kota Malang	Surat keluar dan surat masuk	42.000.000,00			
2	1	11	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 rek	Kota Malang	Rek. Telp, air, listrik	55.000.000,00			
3	1	11	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8 org	Kota Malang	Administrasi keuangan	66.000.000,00			
4	1	11	01	08	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2 org	Kota Malang	Kebersihan Kantor	24.000.000,00			
5	1	11	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	47 unit	Kota Malang	Peralatan kerja di BKBPM	30.000.000,00			
6	1	11	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	15 jenis atk	Kota Malang	Penyediaan ATK di BKBPM	45.000.000,00			
7	1	11	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10 jenis	Kota Malang	barang cetakan dan penggandaan	35.000.000,00			
8	1	11	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23 unit	Kota Malang	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	195.000.000,00			
9	1	11	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	3 koran dan 6 peraturan	Kota Malang	bahan bacaan dan perundang - undangan di BKBPM	20.000.000,00			
10	1	11	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	33 ok	Kota Malang	Makan minum rapat dinas dan tamu dinas	56.000.000,00			
11	1	11	01	18	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	140 ok	Kota Malang	undangan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	148.000.000,00			
12	1	11	01	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	2 org	Kota Malang	Keamanan Kantor	24.000.000,00			
II	1	11	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				464.500.000,00			
13	1	11	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional BKBPM dan UPT	4 mobil, 70 spd motor	Kota Malang	kendaraan dinas/operasional pegawai BKBPM	394.500.000,00			
14	1	11	02	42	Pemeliharaan gedung	1 paket	Kota Malang	Gedung kantor BKBPM	70.000.000,00			
III	1	11	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				107.000.000,00			

15	1	11	05	10	Pelaksanaan Pertimbangan Penetapan Angka Kredit	2 keg, 75 orang	Kota Malang	JFT di lingkungan BKBPM	32.000.000,00		
16	1	11	05	xx	Fasilitasi peringatan hari - hari besar	2 kegiatan	Kota Malang	HUT Kota Malang, HUT RI	25.000.000,00		
17	1	11	05	xx	Peningkatan Teknologi Informasi BKBPM Kota Malang	22 org	Kota Malang	PNS BKBPM Kota Malang	50.000.000,00		
IV	1	11	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan				51.500.000,00		
18	1	11	06	01	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 buku	Kota Malang	Program kerja dan pelaksanaannya	7.500.000,00		
19	1	11	06	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	12 buku	Kota Malang	penyusunan Lap. Keuangan semesteran	5.000.000,00		
20	1	11	06	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	15 buku	Kota Malang	Penyusunan Lap. Keuangan akhir tahun 2015	8.000.000,00		
21	1	11	06	11	Penyusunan Pelaporan Indeks Kepuasan Masyarakat	15 buku	Kota Malang	Masyarakat Kota Malang	13.000.000,00		
22	1	11	06	23	Penyusunan Kerangka Logis	10 buku	Kota Malang	Program kegiatan BKBPM	5.000.000,00		
23	1	11	06	65	Penyusunan P.RPKA dan DPPA	15 buku	Kota Malang	Kegiatan BKBPM	5.000.000,00		
24	1	11	06	05	Penyusunan RKA dan DPA	25 buku	Kota Malang	Kegiatan BKBPM	8.000.000,00		
V	1	11	17		Program Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan				2.017.000.000,00		
25	1	11	17	22	KIE Pemberdayaan Perempuan (Dharma wanita)	300 org	Kota Malang	Anggota Dharma Wanita	250.000.000,00		
26	1	11	17	26	Fasilitasi Organisasi Wanita (GOW)	100 org	Kota Malang	Anggota GOW	100.000.000,00		
27	1	11	17	xx	Sosialisasi PUG (Pengarus Utamaan Gender)	100 org	Kota Malang	Perempuan di Kota Malang	75.000.000,00		
28	1	11	17		Fasilitasi PPT Perlindungan Anak dan Perempuan	5 lembaga	Kota Malang	WCC, LPA, PPA Polresta, Korban KDRT	100.000.000,00		
29	1	11	17	11	Fasilitasi Pemberdayaan PKK	Kota = 1 orag, Kec = 5 org, kel = 57 org, RW= 544 ora	Kota Malang	Ketua TP.PKK Kota, Kecamatan,Kelurahan, RW	497.000.000,00		

30	1	11	17	xx	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan ketrampilan disain dan motif batik malang	250 orang	Kota Malang	Perempuan sekitar pabrik rokok	252.000.000,00	DBHCHT
31	1	11	17	xx	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan membuat kue kering dan aneka makanan	250 org	Kota Malang	Perempuan sekitar pabrik rokok	248.000.000,00	DBHCHT
32	1	11	17	xx	Fasilitasi Forum Anak	200 org	Kota Malang	Anak - anak se Kota Malang	125.000.000,00	
33	1	11	17	xx	Penguatan Telepon Sahabat Anak (TESA)	75 org	Kota Malang	Anak sekolah dan Guru BK	50.000.000,00	
34	1	11	17	xx	Fasilitasi Kota Layak Anak (KLA)	2 keg	Kota Malang	SKPD Terkait	100.000.000,00	
35	1	11	17	xx	Fasilitasi Lembaga Perlindungan Anak	2 keg	Kota Malang	LPA dan LSM	50.000.000,00	
36	1	11	17	xx	Fasilitasi Hari Kesatuan Gerak PKK	1 keg	Kota Malang	pelaku usaha informal	70.000.000,00	
37	1	11	17	xx	Fasilitasi penunjang Pemberdayaan perempuan	3 hari	Kota Malang	kegiatan Tim Penggerak PKK Kota	100.000.000,00	
VI	1	12	15		Program Keluarga Berencana				995.000.000,00	
38	1	12	15	13	Penguatan Pelaksana KB	969 org	Kota Malang	PPKBD, Sub PPKBD, PKB/PPLKB	325.000.000,00	
39	1	12	15	22	Bina Kesertaan Ber-KB	300 org	Kota Malang	Masyarakat Kota Malang	225.000.000,00	
40	1	12	15	xx	Penggerakan KB bagi Lini Lapangan	75 org	Kota Malang	PKB/PLKB/UPT	50.000.000,00	
41	1	12	15	xx	Peningkatan Kualitas Provider (petugas medis)	60 biden	Kota Malang	Bidan Puskesmas/Klinik	50.000.000,00	
42	1	12	15	xx	Fasilitasi Peningkatan Keluarga Berencana	50 org	Kota Malang	Kader KB	85.000.000,00	
43	1	12	15	23	Pencatatan Pelaporan Klinik	60 klinik , 3 kali kegiatan	Kota Malang	Petugas RR Klinik	45.000.000,00	
44	1	12	15	xx	Peningkatan Pelayanan KIE KB bagi TOGA/TOMAS	114 org	Kota Malang	TOGA, TOMAS	50.000.000,00	
45	1	12	15	xx	Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang KB melalui Media Elektronik dan Luar Ruang	media cetak dan elektronik	Kota Malang	Masyarakat Kota Malang	75.000.000,00	
46	1	11	01	20	Fasilitasi Penunjang Kegiatan UPT KB Kecamatan Klojen	rapat 33 kali, atk 13 jenis	Kota Malang	UPT KB Kecamatan Klojen	18.000.000,00	

47	1	11	01	21	Fasilitasi Penunjang Kegiatan UPT KB Kecamatan Blimbing	rapat 33 kali, atk 13 jenis	Kota Malang	UPT KB Kecamatan Blimbing	18.000.000,00		
48	1	11	01	22	Fasilitasi Penunjang Kegiatan UPT KB Kecamatan Kedungkandang	rapat 33 kali, atk 13 jenis	Kota Malang	UPT KB Kecamatan Kedungkandang	18.000.000,00		
49	1	11	01	23	Fasilitasi Penunjang Kegiatan UPT KB Kecamatan Sukun	rapat 33 kali, atk 13 jenis	Kota Malang	UPT KB Kecamatan Sukun	18.000.000,00		
50	1	11	01	24	Fasilitasi Penunjang Kegiatan UPT KB Kecamatan Lowokwaru	rapat 33 kali, atk 13 jenis	Kota Malang	UPT KB Kecamatan Lowokwaru	18.000.000,00		
VII	1	12	25		Program Pemberdayaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja				340.000.000,00		
51	1	12	25	xx	Penguatan Program Saka Kencana	100 Org	Kota Malang	PIK Remaja , Saka Kencana	50.000.000,00		
52	1	12	25	xx	Pembentukan PIK Remaja/Mahasiswa se Kota Malang	10 PIK	Kota Malang	PIK Remaja, PIK Mahasiswa	50.000.000,00		
53	1	12	25	04	Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya	75 org	Kota Malang	PIK Remaja, PIK Mahasiswa	50.000.000,00		
54	1	12	25	xx	Desiminasi kesehatan reproduksi remaja	41 kelompok PIK	Kota Malang	PIK Remaja, PIK Mahasiswa	40.000.000,00		
55	1	12	25	xx	Fasilitasi Kelompok PIK Remaja / Mahasiswa se Kota Malang	41 paket	Kota Malang	PIK Remaja, PIK Mahasiswa	50.000.000,00		
56	1	12	25	xx	Sosialisasi PIK R-M bagi Guru BK SMP, SMA, SMK Kota Malang	98 org	Kota Malang	Guru BK SMP, SMA, SMK	50.000.000,00		
57	1	12	25	xx	Pemilihan PIK R-M dan Duta Remaja Unqqulan	PIK R-M, Duta 6 org	Kota Malang	PIK Remaja dan Mahasiswa	50.000.000,00		
VIII	1	12	23		Program Penyiapan tenaga Pendamping kelompok Bina keluarga				1.425.000.000,00		
58	1	12	23	xx	Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga	200 kader	Kota Malang	Keluarga di Kota Malang	150.000.000,00		
59	1	12	23	54	Penguatan Pokjanal Posyandu Kota Malang	100 org	Kota Malang	Posyandu	75.000.000,00		
60	1	12	23	34	Pemberdayaan tribina	200 org	Kota Malang	BKB, BKR, BKL	150.000.000,00		
61	1	12	23	xx	Gebyar Hari Keluarga	300 org	Kota Malang	Masyarakat	175.000.000,00		
62	1	12	23	57	Fasilitasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PUSYANGATRA) Di Kota Malang	75 org	Kota Malang	Masyarakat	75.000.000,00		
63	1	12	23	xx	Pengembangan BKR - PIK Remaja Integratif	75 org	Kota Malang	Remaja	50.000.000,00		

64	1	12	23	xx	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan pengolahan makanan berbahan dasar kentang dan tempe	400 org	Kota Malang	Masyarakat	225.000.000,00	DBHCHT		
65	1	12	23	xx	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan kuliner	150 org	Kota Malang	Masyarakat	275.000.000,00	DBHCHT		
66	1	11	05	xx	Monitoring dan evaluasi dana hibah PKK		Kota Malang	Dana Hibah PKK	250.000.000,00			
IX	1	22	20		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan				1.360.000.000,00			
67	1	22	20	164	Kegiatan Penunjang Pasca PNPM Mandiri	5 Kec dan 57 kel	Kota Malang	Pelaku PNPM Mandiri di 5 Kec dan 57 Kel	100.000.000,00			
68	1	22	20	163	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pengelola IPAL Komunal Program USRI	54 titik	Kota Malang	KPP USRI	100.000.000,00			
69	1	22	20	168	Fasilitasi Kegiatan Penunjang Pengentasan Kemiskinan Prov. Jatim	5 program	Kota Malang	Pelaku Pokmas Penca, PPKM dan UPKU	40.000.000,00			
70	1	22	20	xx	Fasilitasi Kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna	1 tehnologi	Kota Malang	Pelaku TTG Kota Malang terpilih	90.000.000,00			
71	1	22	20	215	Fasilitas kegiatan PLPBK	5 Kelurahan	Kota Malang	Pelaku PLPBK di 5 lokasi	200.000.000,00			
72	1	22	20	170	Pendayagunaan Data Profil Kelurahan	57 kel	Kota Malang	Pokja Profil	100.000.000,00			
73	1	22	20	xx	Fasilitasi Kegiatan DPD LPMK Kota Malang	200 org	Kota Malang	Pelaku Pemberdayaan Masyarakat	90.000.000,00			
74	1	22	20	xx	Fasilitasi Pencanaan Bulan Bakti Gotong Royong	1 keg	Kota Malang	Pelaku Pemberdayaan Masyarakat	75.000.000,00			
75	1	22	20	xx	Fasilitasi Bimtek Kader Pemberdayaan Masyarakat	57 org	Kota Malang	Kader Pemberdayaan Masyarakat	65.000.000,00			
76	1	22	20	xx	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan ketrampilan usaha kriva kavu		Kota Malang	KUBE	265.000.000,00	DBHCHT		

77	1	22	20	xx	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan ketrampilan usaha makanan herbahan daering		Kota Malang	KUBE	235.000.000,00	DBHCHT		
----	---	----	----	----	---	--	-------------	------	----------------	--------	--	--

SKPD : DINAS SOSIAL

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				lokasi	target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		BELANJA LANGSUNG				5.816.500.000,00			
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS				796.867.500,00			
1	1	13.015 02 02	Pelatihan kewirausahaan bagi keluarga miskin dan pengadaan sarana prasarana pendukung usaha bidang perdagangan mll KUBE	85 orang	Kota Malang	Fakir Miskin	210.638.500,00		
2	1	13.015 02 03	Pelatihan kewirausahaan bagi keluarga miskin dan pengadaan sarana prasarana pendukung usaha bidang percetakan mll KUBE	35 orang	Kota Malang	Fakir Miskin	77.100.000,00		
3	1	13.015 02 04	Pelatihan kewirausahaan bagi keluarga miskin dan pengadaan sarana prasarana pendukung usaha bidang konveksi mll KUBE	50 orang	Kota Malang	Fakir Miskin	110.607.000,00		

4	1	13.015	09	09	Pelatihan kewirausahaan bagi keluarga miskin dan pengadaan sarana prasarana pendukung usaha bidang kuliner mll KUBE	80 orang	Kota Malang	Fakir Miskin	178.044.500,00		
5	1	13.015	10	10	Penanganan PMKS, Pembinaan, Bimbingan Sosial mll Pelatihan ketrampilan musik bagi Anak Jalanan	20 org	Kota Malang	Anak Jalanan	68.900.500,00		
6	1	13.015	11	11	Penanganan PMKS, Pembinaan, Bimbingan Sosial mll Pelatihan ketrampilan Potong Rambut	30 org	Kota Malang	Fakir Miskin	88.701.000,00		
7					Penanganan PMKS, Pembinaan, Bimbingan Sosial mll Pelatihan ketrampilan Pijat Refleksi	20 org	Kota Malang	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	62.876.000,00		
II	1	13.016			PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL				1.536.578.300,00		
8	1	13.016	13	13	Pemulangan orang terlantar kedaerah asal	200 org	Kota Malang	Orang Terlantar di Kota Malang	13.941.000,00		
9	1	13.016	15	15	Operasional LBK Pandanwangi/peningkatan mjd LIPONSOS	Ketersediaan rumah singgah/penampungan sementara bagi PMKS	Kota Malang	PMKS	72.089.500,00		
10	1	13.016	22	22	Operasional Tuna Wisma Karya (TWK) Sukun		Kota Malang	Gelandangan dan Gelandangan Psikotik	66.823.500,00		
11	1	13.016	36	36	Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)	6217 org	Kota Malang	KSM	175.085.000,00		
12	1	13.016	45	45	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni	48 rumah	Kota Malang	KSM	498.199.000,00		
13	1	13.016	49	49	Rehabilitasi Sosial, Bimbingan Sosial, Penanganan bagi Penyandang Cacat Berat	100 org	Kota Malang	Fakir Miskin, Penyandang Cacat Berat	69.903.500,00		
14	1	13.016	50	50	Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial PMKS	200 org	Kota Malang	PMKS dan PSKS	55.500.000,00		
15	1	13.016	51	51	Operasional Kegiatan Razia bagi PMKS		Kota Malang		132.798.000,00		
16	1	13.016	55	55	Bimbingan sosial/pembinaan/ bantuan	100 org	Kota Malang		110.922.500,00		
17	1	13.016	56	56	Validasi dan Verifikasi Data Kepesertaan	31.345 org	Kota Malang	Fakir Miskin, PMKS	341.316.300,00		
III	1	13.021			PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL			PSM, TKSK	906.756.500,00		

18	1	13.021	17	17	Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan TKSK Kota Malang	72 org	Kota Malang	PSM, TKSK	131.700.000,00		
19	1	13.021	18	18	Operasional TMP Suropati dan Monumen TRIP		Kota Malang		48.120.000,00		
20	1	13.021	38	38	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, sarasehan dan temu kangen	200 org	Kota Malang	Perintis Kemerdekaan, Legiun Veteran dan DHC 45	58.836.500,00		
21	1	13.021	50	50	Pemberdayaan Karang Werdha Kota Malang	1000 org	Kota Malang	Karang Werdha	118.207.500,00		
22	1	13.021	52	52	Pemberdayaan PSKS/ peningkatan	90 org	Kota Malang	TAGANA	105.153.000,00		
23	1	13.021	76	76	Penyuluhan / Sosialisasi Pencegahan Korban Tindak Kekerasan bagi Anak dan Perempuan	100 org	Kota Malang	PKK. Tokoh masyarakat	50.915.000,00		
24	1	13.021	81	81	Sosialisasi /pembinaan UGB dan PUB	100 org	Kota Malang	Pengusaha, Orsos dan Tokoh Masyarakat	79.235.500,00		
25	1	13.021	83	83	Pemberdayaan Karang Taruna Kota Malang	57 org	Kota Malang	Karang Taruna	102.808.000,00		
			88	88	Pembentukan dan pembinaan Komite Penanganan PMKS	40 Orang	Kota Malang	Instansi terkait	27.966.000,00		
26	1	13.021	100	100	Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Kegiatan Pemerintah Lainnya	120 org	Kota Malang	Pengiriman PSKS (TAGANA, KarTar)	124.700.000,00		
27	1	13.021	101	101	Pembinaan PSKS/Penguatan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	70 org	Kota Malang	LK3S	59.115.000,00		
IV	1	13.001			PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			Layanan administrasi perkantoran	758.271.200,00		
28	1	13.001	01	01	Penyediaan surat menyurat		Kota Malang		303.354.000,00		
29	1	13.001	02	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik		Kota Malang		93.693.550,00		
30	1	13.001	07	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Kota Malang		47.060.000,00		
31	1	13.001	08	08	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor		Kota Malang		37.766.550,00		
32	1	13.001	09	09	Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja		Kota Malang		20.675.000,00		
33	1	13.001	10	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Kota Malang		27.192.100,00		
34	1	13.001	11	11	Penyediaan Barang Cetak dan pengqandaan		Kota Malang		20.050.000,00		
35	1	13.001	12	12	Operasional Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa		Kota Malang		24.350.000,00		
36	1	13.001	13	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kota Malang		45.000.000,00		
37	1	13.001	15	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Kota Malang		6.720.000,00		

38	1	13.001	17	17	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Malang		43.310.000,00		
39	1	13.001	18	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Malang		89.100.000,00		
V	1	13.002			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			1.671.626.500,00		
40	1	13.002	07	07	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Kota Malang	Peningkatan fasilitas penanganan PMKS	337.630.000,00		
41	1	13.002	22	22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Kota Malang		122.860.000,00		
42	1	13.002	23	23	Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana TMP Suropati	Kota Malang		193.582.500,00		
43	1	13.002	24	24	Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana Prasarana TWK Sukun	Kota Malang		209.000.000,00		
44	1	13.002	25	25	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Malang		131.600.000,00		
45	1	13.002	27	257	Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana Gedung Kantor	Kota Malang		676.954.000,00		
VI	1	13.005			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR		Pelaksanaan sarana dan prasarana aparatur	76.300.000,00		
46	1	13.005	01	01	Peningkatan kinerja PNS melalui study banding tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Kota Malang		76.300.000,00		
VII	1	13.006			PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan	70.100.000,00		
47	1	13.006	01	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Kota Malang		15.019.500,00		
48	1	13.006	02	02	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Malang		5.710.500,00		
49	1	13.006	05	05	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Kota Malang		16.770.000,00		
50	1	13.006	11	11	Penyusunan IKM	Kota Malang		5.690.500,00		
51	1	13.006	25	24	Penyusunan SOP, SP	Kota Malang		15.657.500,00		
52	1	13.006	25	25	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Kota Malang		11.252.000,00		

SKPD : DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
						Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	lokasi	target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2				3	4	4	5	6	7	8	9
					BELANJA LANGSUNG				45.763.508.000,00			
1	1	14.	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 paket	Kota Malang		440.443.800,00			
1	1	14.	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2700 surat	Kota Malang	Disnakertrans	52.000.000,00			
2	1	14.	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16 jenis alat/rekening telepon	Kota Malang	Disnakertrans	14.575.000,00			
3	1	14.	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	9 orang	Kota Malang	Disnakertrans	45.000.000,00			
4	1	14.	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	33 jenis alat kebersihan	Kota Malang	Disnakertrans	27.500.000,00			
5	1	14.	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 mesin ketik / 10 komputer / 20 printer / 2 AC / 1 mesin foto copy / 2 UPS	Kota Malang	Disnakertrans	20.000.000,00			
6	1	14.	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	50 jenis ATK	Kota Malang	Disnakertrans	33.000.000,00			
7	1	14.	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14 jenis cetakan	Kota Malang	Disnakertrans	30.000.000,00			
8	1	14.	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 jenis peralatan	Kota Malang	Disnakertrans	100.000.000,00			
9	1	14.	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	1 kali rapat tahunan/2 kali rapat semesteran/6 kali rapat rutin	Kota Malang	Disnakertrans	8.368.800,00			

10	1	14.01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 kali (13 orang) perjalanan dinas dalam daerah dan 4 kali (6 orang) perjalanan dinas luar daerah	Kota Malang	Disnakertrans	110.000.000,00		
II	1	14.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2 unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2	Kota Malang		342.000.000,00		
11	1	14.01	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 unit kendaraan bermotor roda empat	Kota Malang	Disnakertrans	320.000.000,00		
12	1	14.01	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2 unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2	Kota Malang	Disnakertrans	22.000.000,00		
III	1	14.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 paket	Kota Malang		389.064.200,00		
16	1	14.01	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen / 40 buku	Kota Malang	Disnakertrans	28.856.200,00		
17	1	14.01	06	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	2 dokumen/1 thn	Kota Malang	Disnakertrans	25.000.000,00		
18	1	14.01	75	Penyusunan SPP, IKM, SPM dan SOP SKPD	4 dokumen / 40 buku	Kota Malang	Disnakertrans	50.000.000,00		
19	1	14.01	06	Pembuatan Web Server dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan	1 paket	Kota Malang	Disnakertrans	55.208.000,00		
20	1	14.01	06	Penyebarluasan informasi ketenagakerjaan dan transmigrasi melalui website	1 paket	Kota Malang	Disnakertrans	5.000.000,00		
21	1	14.01	06	Publikasi informasi ketenagakerjaan dan transmigrasi	1 paket	Kota Malang	Disnakertrans	25.000.000,00		
22	1	14.01	06	Peningkatan Kinerja PNS	1 paket	Kota Malang	Disnakertrans	200.000.000,00		

IV	1	14.01	15		Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	1 paket	Kota Malang		42.367.000.000,00		
23	1	14.01	15	22	Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan Bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau (dalam rangka Pembangunan Balai Latihan Kerja)	1 paket	Kota Malang	Pencari Kerja	42.000.000.000,00		
24	1	14.01	15	28	Pendidikan dan Pelatihan Pengolahan Makanan	14 orang	Kota Malang	Pencari Kerja	115.000.000,00		
25	1	14.01	15		Pendidikan dan Pelatihan Menjahit	14 orang	Kota Malang	Pencari Kerja	127.000.000,00		
26	1	14.01	15		Pendidikan dan Pelatihan Salon Kecantikan	14 orang	Kota Malang	Pencari Kerja	125.000.000,00		
V	1	14.01	16		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1 paket	Kota Malang		910.000.000,00		
27	1	14.01	16	10	Penyusunan Database Tenaga Kerja Daerah	1 paket	Kota Malang	Tersedianya database ketenagakerjaan se-Kota Malang	85.000.000,00		
28	1	14.01	16		Sosialisasi Perlindungan CTKI dan PPTKIS	1 paket	Kota Malang	CTKI dan PPTKIS	200.000.000,00		
29	1	14.01	16		Penyebarluasan informasi Bursa Tenaga Kerja(Job Market Fair)	50 perusahaan	Kota Malang	Pencari Kerja	250.000.000,00		
30	1	14.01	16		Pembinaan TKI di Luar Negeri	1 paket	Kota Malang	TKI	150.000.000,00		
31	1	14.01	16		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	1 paket	Kota Malang	Disnakertrans	25.000.000,00		
32	1	14.01	16		Penyusunan Perda Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	1 paket	Kota Malang	Disnakertrans	200.000.000,00		
VI	1	14.01	17		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakeriaan	1 paket	Kota Malang		1.315.000.000,00		
33	1	14.01	17	13	Intensifikasi Pembinaan dan Pengawasan Norma Kerja	1008 perusahaan	Kota Malang	Pekerja dan pengusaha di Kota Malang	150.000.000,00		
34	1	14.01	17	15	Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Kader Norma Ketenagakerjaan	50 orang	Kota Malang	Pekerja dan pengusaha di Kota Malang	100.000.000,00		
35	1	14.01	17	53	Pembahasan Usulan UMK Malang Tahun 2015	1 paket	Kota Malang	Pekerja dan pengusaha di Kota Malang	300.000.000,00		
36	1	14.01	17	54	Sosialisasi UMK Kota Malang Tahun 2015	150 orang	Kota Malang	Pekerja dan pengusaha di Kota Malang	70.000.000,00		

37	1	14.01	17	55	Bulan Bakti Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	1 paket	Kota Malang	Pekerja dan pengusaha di Kota Malang	200.000.000,00		
38	1	14.01	17	56	Pengawasan Norma Kerja Malam Wanita	30 perusahaan	Kota Malang	Pekerja dan pengusaha di Kota Malang	50.000.000,00		
39	1	14.01	17	59	Penyuluhan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba bagi pekerja di Perusahaan	75 orang	Kota Malang	Pekerja dan pengusaha di Kota Malang	50.000.000,00		
40	1	14.01	17		Pembinaan tentang Pemahaman dan Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100 orang	Kota Malang	Pekerja dan pengusaha di Kota Malang	65.000.000,00		
41	1	14.01	17		Monitoring Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	50 perusahaan	Kota Malang	Pekerja dan pengusaha di Kota Malang	50.000.000,00		
42	1	14.01	17		Pembinaan tentang pemahaman Permenakertrans nomor 19 tahun 2012, Syarat-syarat kerja dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan tentang HI	150 orang	Kota Malang	Pekerja dan pengusaha di Kota Malang	100.000.000,00		
43	1	14.01	17		Pembinaan LKS Tripartit Kota Malang dan Pemantauan UMK dan THR	5 kali rapat dan 2 kali pemantauan	Kota Malang	Pekerja dan pengusaha di Kota Malang	80.000.000,00		
44	1	14.01	17		Pembinaan dan Perlindungan Norma Kerja	150 orang	Kota Malang	Pekerja dan pengusaha di Kota Malang	100.000.000,00		

SKPD : DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				lokasi	target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
1	15 01	BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%	3.107.000.000,00 374.934.000,00			
1	15 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.000 surat	Kota Malang		3.000.000,00			

2	1	15	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bln	Kota Malang		37.000.000,00	
3	1	15	01	03	Penyediaan jasa administrasi keuangan	21 kegiatan	Kota Malang		52.510.000,00	
4	1	15	01	04	Penyediaan jasa kebersihan kantor	21 jenis 1 kantor	Kota Malang		35.000.000,00	
5	1	15	01	05	Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	14 jenis	Kota Malang		12.000.000,00	
6	1	15	01	06	Penyediaan alat tulis kantor	27 jenis	Kota Malang		34.424.000,00	
7	1	15	01	07	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25 buku	Kota Malang		30.000.000,00	
8	1	15	01	08	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3 jenis	Kota Malang		5.500.000,00	
9	1	15	01	09	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 jenis	Kota Malang		40.000.000,00	
10	1	15	01	10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 jenis	Kota Malang		10.000.000,00	
11	1	15	01	11	Penyediaan Makanan Minuman	48 kali	Kota Malang		15.500.000,00	
12	1	15	01	12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	72 kali	Kota Malang		75.000.000,00	
13	1	15	01	13	Peringatan hari besar nasional	12 bln	Kota Malang		25.000.000,00	
II	1	15	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	127.000.000,00	
14	1	15	02	01	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 gedung	Kota Malang		50.000.000,00	
15	1	15	02	02	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 kendaraan	Kota Malang		77.000.000,00	
III	1	15	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan			100%	35.066.000,00	
16	1	15	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 dokumen	Kota Malang		7.000.000,00	
17	1	15	06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	20 dokumen	Kota Malang		6.566.000,00	
18	1	15	06	03	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	20 dokumen	Kota Malang		6.500.000,00	
19	1	15	06	04	Penyusunan Pelaporan Indeks Kepuasan Masyarakat	20 dokumen	Kota Malang		15.000.000,00	
IV	1	15	16		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			80%	100.000.000,00	
20	1	15	16	01	Sosialisasi Peningkatan Kemitraan Usaha baqi UMKM	1 kali	Kota Malang		50.000.000,00	

21	1	15	16	02	Sosialisasi Peningkatan Fasilitas Kemudahan Legalitas Badan Usaha UMKM	1 kali	Kota Malang	50.000.000,00		
V	1	15	17		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Kecil Menengah			80%	2.125.000.000,00	
22	1	15	17	01	Fasilitasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan Koperasi	1 kali	Kota Malang	100.000.000,00		
23	1	15	17	02	Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk UMKM di Dalam Kota	1 kali	Jawa Timur	450.000.000,00		
24	1	15	17	03	Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk UMKM di Dalam Provinsi	3 kali	Jawa Timur	100.000.000,00		
25	1	15	17	04	Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk UMKM di Luar Provinsi	2 kali	Nusantara	100.000.000,00		
26	1	15	17	05	Bimbingan Teknis Standar Operasional Prosedur dan Standar Operasional Managemen baai koperasi	1 kali	Kota Malang	100.000.000,00		
27	1	15	17	06	Validasi Data UKM	12 bulan	Kota Malang	75.000.000,00		
28	1	15	17	07	Workshop Kesehatan Koperasi	1 kali	Kota Malang	100.000.000,00		
29	1	15	17	08	Workshop Pengembangan Usaha Koperasi di Sektor Riil	1 kali	Kota Malang	100.000.000,00		
30	1	15	17	09	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Bunga Kerinci			225.000.000	DBHCHT	
31	1	15	17	10	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Olahan Jamur			175.000.000	DBHCHT	
32	1	15	17	11	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Kuliner			150.000.000	DBHCHT	
33	1	15	17	12	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Dress Painting			250.000.000	DBHCHT	
34	1	15	17	13	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Anvaman Pandan			200.000.000	DBHCHT	
VI	1	15	18		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			80%	345.000.000,00	

35	1	15	18	01	Fasilitasi Pembentukan, Perubahan dan Pembubaran Koperasi	12 bulan	Kota Malang		50.000.000,00		
36	1	15	18	02	Pembinaan, Pengawasan dan Penilaian Koperasi Berkualitas	12 bulan	Kota Malang		50.000.000,00		
37	1	15	18	03	Sosialisasi Perkoperasian bagi Pelaku Ekonomi Produktif	1 kali	Kota Malang		75.000.000,00		
38	1	15	18	04	Monitoring Perkembangan Kelembagaan Koperasi	12 bulan	Kota Malang		45.000.000,00		
39	1	15	18	05	Seminar Jati Diri Koperasi dalam rangka Peringatan HUT Koperasi ke 68	1 kali	Kota Malang		75.000.000,00		
40	1	15	18	06	Fasilitasi Kegiatan Jambore Koperasi siswa dan Penilaian Koperasi Siswa Berprestasi	1 kali	Kota Malang		50.000.000,00		

SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	lokasi	target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		BELANJA LANGSUNG				6.304.560.000,00			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				725.560.000,00			
1	1	17 01 01	100%	Kota Malang	surat dinas dan naskah dinas	35.000.000,00			
2	1	17 01 02	100%	Kota Malang	rekening telepon, air dan listrik	50.000.000,00			
3	1	17 01 07	100%	Kota Malang	honorarium bendahara	65.760.000,00			
4	1	17 01 08	80%	Kota Malang	jasa dan bahan kebersihan	88.000.000,00			
5	1	17 01 09	80%	Kota Malang	barang barang dinas/modal	26.000.000,00			
6	1	17 01 10	100%	Kota Malang	peralatan tulis kantor	50.000.000,00			
7	1	17 01 11	80%	Kota Malang	buku dan naskah dinas	50.000.000,00			

8	1	17	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	75%	Kota Malang	barang inventaris/modal kantor	75.000.000,00		
9	1	17	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	90%	Kota Malang	buku dan naskah dinas	25.000.000,00		
10	1	17	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	100%	Kota Malang	makanan dan minuman	50.000.000,00		
11	1	17	01	20	Penunjang pengadaan barang dan jasa	100%	Kota Malang	honor pejabat pengadaan	10.800.000,00		
12	1	17	01	81	Updating Data Website Disbudpar	100%	Kota Malang	website dinas	50.000.000,00		
13	1	17	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	75%	Kota Malang	perjalan dinas dalam/luar	100.000.000,00		
14	1	17	01	93	Penyediaan Mass media	80%	Kota Malang	mass media	50.000.000,00		
II	1	17	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				160.000.000,00		
15	1	17	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	80%	Kota Malang	gedung dan fasilitas kantor	50.000.000,00		
16	1	17	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	80%	Kota Malang	kendaraan inventaris kantor	60.000.000,00		
17	1	17	02	90	Pemeliharaan Gedung Kesenian Gajayana	80%	Kota Malang	Gedung kesenian gajayana	50.000.000,00		
III	1	17	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				70.000.000,00		
18	1	17	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	Kota Malang	Lakip, kelog dan sejenisnya	25.000.000,00		
19	1	17	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	100%	Kota Malang	laporan bendahara	5.000.000,00		
20	1	17	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	100%	Kota Malang	laporan bendahara	10.000.000,00		
21	1	17	06	05	Penyusunan Rencana dan Dokumen Kegiatan dan Anggaran	100%	Kota Malang	dokumen RKA dan DPA	10.000.000,00		
22	1	17	06	06	Penyusunan Perubahan Rencana dan Dokumen Kegiatan dan Anggaran	100%	Kota Malang	dokumen PRKA dan DPPA	10.000.000,00		
23	1	17	06	55	Sensus / Pendataan kembali barang milik daerah	100%	Kota Malang	Inventaris kantor	10.000.000,00		
IV	1	17	15		Program Pengembangan Nilai Budaya				925.000.000,00		
24	1	17	15	04	Gebyar Seni Budaya di UPT. TAREKO	90%	Kota Malang	Masyarakt umum, seniman dan budavawan	150.000.000,00		

25	1	17	15	06	Pagelaran Seni budaya	90%	Kota Malang	Masyarakt umum, seniman dan budavawan	250.000.000,00	Masyarakat
26	1	17	15	09	Rapat Koordinasi Museum Indonesia		Kota Malang	Lembaga Museum Indonesia	75.000.000,00	
27	1	17	15	36	Jaringan Kota Pusaka Indonesia	80%	Kota Malang	anggota kota pusaka di seluruh Indonesia	150.000.000,00	
28	1	17	15	26	Perawatan Benda Cagar Budaya	90%	Kota Malang	Terpeliharanya budaya tradisional Kota Malang sehingga arus kunjungan wisatawan meningkat	50.000.000,00	
29	1	17	15	07	Festival Seni Religi		Kota Malang		50.000.000,00	
30	1	17	15	08	Pelangi seni budaya nusantara dan Gebyar wisata budaya	75%	Kota Malang	seniman budayawan	200.000.000,00	
V	2	04	15		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata				1.607.074.400,00	
31	2	04	15	09	Pembinaan dan pengembangan TIC (Tourist Information Centre)	100%	Kota Malang	lokasi TIC alun alun	75.000.000,00	
32	2	04	15	24	Mengikuti event di luar kota dan kerjasama promosi pariwisata	80%	Kota Malang	promosi seni budaya daerah di luar kota	200.000.000,00	
33	2	04	15	29	Malang kota Kreatif	80%	Kota Malang	potensi pariwisata kota Malang	150.000.000,00	
34	2	04	15	30	Apeksi	80%	Kota Malang	anggota APEKSI se Indonesia	482.074.400,00	Kota Malang sebagai tuan rumah
35	2	04	15	31	Pemberdayaan kakang mbakyu	90%	Kota Malang	kakangmbakyu	100.000.000,00	
36	2	04	15	03	Pembuatan Bahan Promosi Wisata Kota Malang	80%	Kota Malang	sarana promosi pariwisata	200.000.000,00	
37	2	04	15		Bahan Bakar Bus Pariwisata	100%	Kota Malang	Masyarakat dan Insan Pariwisata	400.000.000,00	
VI	1	17	16		Program Pengelolaan Kekayaan Budava				1.230.000.000,00	
38	1	17	16	29	Kirab Budaya Nusantara	90%	Kota Malang	Aktualisasi Budaya sebagai wujud dari apresiasi terhadap budava lokal	240.000.000,00	
39	1	17	16	10	Festival Kendedes dan Ken Arok	80%	Kota Malang	Masyarakat, seniman dan budayawan Kota Malang	190.000.000,00	

				BELANJA LANGSUNG					5.900.000.000,00		
I	1.18	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					1.067.982.800,00		
1	1.18	01	01	.01 Penyediaan jasa surat menyurat	100%	Kota Malang	Administrasi Perkantoran		73.441.300,00		
2	1.18	01	01	.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	Kota Malang	Administrasi Perkantoran		636.750.000,00		
3	1.18	01	01	.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan	100%	Kota Malang	Administrasi Perkantoran		66.600.000,00		
4	1.18	01	01	.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor	100%	Kota Malang	Administrasi Perkantoran		24.350.000,00		
5	1.18	01	01	.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	Kota Malang	Administrasi Perkantoran		44.361.500,00		
6	1.18	01	01	.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	Kota Malang	Administrasi Perkantoran		5.700.000,00		
7	1.18	01	01	.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	Kota Malang	Administrasi Perkantoran		7.920.000,00		
8	1.18	01	01	.17 Penyediaan makanan dan minuman	100%	Kota Malang	Administrasi Perkantoran		23.860.000,00		
9	1.18	01	01	.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	Kota Malang	Administrasi Perkantoran		91.000.000,00		
10	1.18	01	01	.19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	100%	Kota Malang	Administrasi Perkantoran		94.000.000,00		
II	1.18	01	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					399.180.000,00		
11	1.18	01	02	.02 Pengadaan peralatan gedung kantor	100%	Kota Malang	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		63.600.000,00		
12	1.18	01	02	.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100%	Kota Malang	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		150.000.000,00		
13	1.18	01	02	.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	Kota Malang	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		64.050.000,00		
14	1.18	01	02	.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100%	Kota Malang	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		12.430.000,00		
15	1.18	01	02	.04 Pengadaan Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM)	100%	Kota Malang	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		109.100.000,00		
III	1.18	01	05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					62.733.000,00		

16	1.18	01	05	.01	Pendidikan dan pelatihan formal	100%	Kota Malang	peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	55.000.000,00		
17	1.18	01	05	.11	Pelaksanaan Senam Rutin bagi PNS	100%	Kota Malang	peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	7.733.000,00		
IV	1.18	01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				44.736.900,00		
18	1.18	01	06	.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	Kota Malang	peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	17.127.000,00		
19	1.18	01	06	.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	100%	Kota Malang	peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8.408.400,00		
20	1.18	01	06	.05	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	100%	Kota Malang	peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	19.201.500,00		
V	1.18	01	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan				592.869.000,00		
21	1.18	01	16	.11	Seleksi Paskibraka Provinsi	100%	Kota Malang	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembanqunan	74.714.500,00		
22	1.18	01	16	.13	Seleksi Pemuda Pelopor	100%	Kota Malang	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembanqunan	94.555.000,00		
23	1.18	01	16	.17	Bakti Pemuda Antar Propinsi	100%	Kota Malang	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembanqunan	90.500.000,00		
24	1.18	01	16	.27	Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan	100%	Kota Malang	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembanqunan	73.000.000,00		
25	1.18	01	16	.37	Pelatihan Kepemimpinan dan Outbound bagi pemuda				172.764.000,00		
26	1.18	01	16	.47	Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalagunaan dan peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	100%	Kota Malang	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembanqunan	87.335.500,00		

VI	1.18	01	17		Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda					243.750.000,00
27	1.18	01	17	01	Pelatihan Manajemen Kewirausahaan	100%	Kota Malang	peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda		125.000.000,00
28	1.18	01	17	02	Peningkatan Kapasitas pelaku home industri olahraga melalui pelatihan manajemen kewirausahaan	100%	Kota Malang	peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda		43.750.000,00
29	1.18	01	17	03	sosialisasi HAKI Bagi Wirausaha Muda	100%	Kota Malang	peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda		75.000.000,00
VII	1.18	01	20		Program Pembinaan dan Pemasvarakatan Olahraga					1.583.257.000,00
30	1.18	01	20	.25	Lomba Bola Volly Antar Pelajar	100%	Kota Malang	Pembinaan dan Pemasvarakatan Olahraga		80.000.000,00
31	1.18	01	20	.33	Lomba Olahraga Tradisional	100%	Kota Malang	Pembinaan dan Pemasvarakatan Olahraga		90.000.000,00
32	1.18	01	20	.41	Pendataan Potensi Olahraga	100%	Kota Malang	Pembinaan dan Pemasvarakatan Olahraga		50.000.000,00
33	1.18	01	20	.49	Pengiriman Atlet POR SD	100%	Kota Malang	Pembinaan dan Pemasvarakatan Olahraga		1.103.922.000,00
34	1.18	01	20	.57	Seleksi POR SD	100%	Kota Malang	Pembinaan dan Pemasvarakatan Olahraga		85.405.000,00
35	1.18	01	20	.65	Pemusatan Latihan POR SD	100%	Kota Malang	Pembinaan dan Pemasvarakatan Olahraga		98.930.000,00
36	1.18	01	20	.73	Lomba Olahraga bagi penyandang cacat	100%	Kota Malang	Pembinaan dan Pemasvarakatan Olahraga		75.000.000,00
VIII	1.18	01	21		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga					1.905.491.300,00

37	1.18	01	21	.08	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana	100%	Kota Malang	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Olahraga untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	75.000.000,00		
38	1.18	01	21	.09	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok	100%	Kota Malang	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Olahraga untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	50.000.000,00		
39	1.18	01	21	.12	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga Lapangan Lainnya	100%	Kota Malang	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Olahraga untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	35.000.000,00		
40	1.18	01	21	.15	Pengecatan Stadion Gajayana	100%	Kota Malang	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Olahraga untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	500.000.000,00		
41	1.18	01	21	.18	Pemeliharaan Gedung GOR KENAROK	100%	Kota Malang	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Olahraga untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	190.000.000,00		
42	1.18	01	21	.21	Pembuat musholla UPT GOR Ken Arok	100%	Kota Malang	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Olahraga untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	408.278.500,00		
43	1.18	01	21	.24	Penambahan Tribun VVIP	100%	Kota Malang	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Olahraga untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	150.000.000,00		

44	1.18	01	21	.27	Pemeliharaan Lapangan Sepakbola luar Stadion Gajayana	100%	Kota Malang	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Olahraga untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	497.212.800,00		
----	------	----	----	-----	---	------	-------------	--	----------------	--	--

SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				lokasi	target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
1	1.1 9	1.1 9.0	01	BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
						5.538.700.000,00			
						471.200.000,00			
1	1.1 9	1.1 9.0	01 01	01 Penyediaan jasa surat menyurat	100%	Kota Malang	Pelayanan surat menyurat	104.387.500,00	
2	1.1 9	1.1 9.0	01 02	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	Kota Malang	Pelayanan jasa komunikasi	35.812.500,00	
3	1.1 9	1.1 9.0	01 07	07 Penyediaan jasa administrasi keuangan	100%	Kota Malang	Pelayanan administrasi keuangan	55.000.000,00	
4	1.1 9	1.1 9.0	01 08	08 Penyediaan jasa kebersihan kantor	100%	Kota Malang	Pelayanan jasa kebersihan	100.000.000,00	
5	1.1 9	1.1 9.0	01 09	09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	100%	Kota Malang	Pelayanan jasa perbaikan peralatan kerja	49.000.000,00	
6	1.1 9	1.1 9.0	01 15	15 Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	100%	Kota Malang	Pelayanan jasa informasi	3.000.000,00	

7	1.1 9	1.1 9.0 1	01	17	17	Penyediaan makanan dan minuman	100%	Kota Malang	Pelayanan makan minum	24.000.000,00		
8	1.1 9	1.1 9.0 1	01	18	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	Kota Malang	Bakesbangpol kota malang	100.000.000,00		
II	1.1 9	1.1 9.0 1	02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				120.000.000,00		
9	1.1 9	1.1 9.0 1	02	22	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100%	Kota Malang	Pemeliharaan gedung kantor	45.000.000,00		
10	1.1 9	1.1 9.0 1	02	24	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	Kota Malang	Pemeliharaan kendaraan dinas	75.000.000,00		
III	1.1 9	1.1 9.0 1	06			Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				90.000.000,00		
11	1.1 9	1.1 9.0 1	06	01	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	Kota Malang	Laporan capaian kinerja SKPD	15.000.000,00		
12	1.1 9	1.1 9.0 1	06	01	05	Penyusunan SOP + IKM		Kota Malang		45.000.000,00		
13	1.1 9	1.1 9.0 1	06	02	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	100%	Kota Malang	Laporan keuangan semesteran	15.000.000,00		
14	1.1 9	1.1 9.0 1	06	04	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	100%	Kota Malang	Laporan keuangan akhir tahun	15.000.000,00		
IV	1.1 9	1.1 9.0 1	15			Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				2.500.000.000,00		
15	1.1 9	1.1 9.0 1	15	01	01	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	100%	Kota Malang	Masyarakat kota malang	2.500.000.000,00		
V	1.1 9	1.1 9.0 1	16			Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal				725.000.000,00		
16	1.1 9	1.1 9.0 1	16	12	12	Penertiban tempat usaha rekreasi dan hiburan umum pada bulan romadhlon	100%	Kota Malang	Masyarakat kota malang	125.000.000,00		

17	1.1 9	1.1 9.0 1	16	13	13	Pelaksanaan pemantauan kegiatan orang asing, NGO, mahasiswa dan lembaga asing	100%	Kota Malang	Masyarakat kota malang	125.000.000,00		
18	1.1 9	1.1 9.0 1	16	17	17	Fasilitasi Kominda	100%	Kota Malang	Masyarakat kota malang	200.000.000,00		
19	1.1 9	1.1 9.0 1	16	30	30	Penanganan Gangguan Keamanan dalam negeri di kota Malang		Kota Malang		275.000.000,00		
VI	1.1 9	1.1 9.0 1	17			Program pengembangan wawasan kebangsaan				1.207.500.000,00		
20	1.1 9	1.1 9.0 1	17	04	04	Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beraqama (FKUB)	100%	Kota Malang	Masyarakat kota Malang	400.000.000,00		
21	1.1 9	1.1 9.0 1	17	07	07	Peningkatan dan Pemantapan Ketahanan Bangsa	100%	Kota Malang	Masyarakat kota Malang	15.000.000,00		
22	1.1 9	1.1 9.0 1	17	08	08	Meningkatkan kesadaran masyarakat berbangsa dan bernegara untuk mengikuti upacara hari-hari bear nasional	100%	Kota Malang	Masyarakat kota Malang	125.000.000,00		
23	1.1 9	1.1 9.0 1	17	09	09	Sosialisasi Penanaman Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan	100%	Kota Malang	Masyarakat kota Malang	100.000.000,00		
24	1.1 9	1.1 9.0 1	17	10	10	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	100%	Kota Malang	Masyarakat kota Malang	100.000.000,00		
25	1.1 9	1.1 9.0 1	17	19	17	Pembinaan Penghayat Kepercayaan	100%	Kota Malang	Masyarakat kota Malang	100.000.000,00		
26	1.1 9	1.1 9.0 1	17	12	12	Forum Pimpinan Daerah		Kota Malang	Masyarakat kota Malang	367.500.000,00		
VII	1.1 9	1.1 9.0 1	18			Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan				150.000.000,00		
27	1.1 9	1.1 9.0 1	18	04	04	Rencana aksi nasional hak asasi manusia	100%	Kota Malang	Masyarakat kota malang	150.000.000,00		
VIII	1.1 9	1.1 9.0 1	21			Program Pendidikan Politik masyarakat				275.000.000,00		

28	1.1	1.1	21	16	16	Fasilitasi Bantuan Keuangan kepada Parpol	100%	Kota Malang	Masyarakat kota malang	25.000.000,00		
29	1.1	1.1	21	16	16	Pembinaan Demokrasi dan Politik bagi Masyarakat		Kota Malang	Masyarakat kota malang	250.000.000,00		

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				lokasi	target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		BELANJA LANGSUNG				8.509.500.000,00			
	01.1.1901.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.923.914.000,00			
1	01.1.1901.	01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bln	Satpol PP	Pelayanan Administrasi Kantor	190.212.000,00			
2	01.1.1901.	02. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bln	Satpol PP	Penyediaan Pelayanan Jasa Komunikasi Kantor	24.000.000,00			
3	01.1.1901.	08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	23 Jenis	Satpol PP	Pelayanan Kebersihan Kantor	26.250.000,00			
4	01.1.1901.	09. Penyediaan Jasa Honorarium Kantor	100 org	Satpol PP	Pemberian Honorarium Tenaga Bantuan Polisi Pamongpraja (Non PNS - Kontrak)	1.452.000.000,00			
5	01.1.1901.	10. Penyediaan Alat Tulis Kantor	57 Jenis	Satpol PP	Penyediaan Alat Tulis Kantor	28.930.000,00			
6	01.1.1901.	11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13 Cetak	Satpol PP	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.570.000,00			
7	01.1.1901.	12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10 Jenis	Satpol PP	Penyediaan Instalasi listrik dan penerangan kantor	3.520.000,00			

8	01.	1.1.	01.	15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bln	Satpol PP	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	11.880.000,00
9	01.	1.1.	01.	17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	2520 OK	Satpol PP	Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai serta Rapat	49.352.000,00
10	01.	1.1.	01.	18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	44 HOK	Satpol PP	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	101.200.000,00
II.	01.	1.1.	02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.338.400.000,00
11	01.	1.1.	02.	05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	3 Roda 2	Satpol PP	Penyediaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	51.000.000,00
12	01.	1.1.	02.	22.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	7 Jenis 6 Unit	Satpol PP	Terpenuhinya sarana dan Prasarana Kantor	194.020.000,00
13	01.	1.1.	02.	22.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	1 Gedung	Satpol PP	Penyediaan Perawatan dan Pemeliharaan Gedung Kantor	100.000.000,00
14	01.	1.1.	02.	24.	Pemeliharaan Rutin Berkala/ Kendaraan Dinas/ Operasional	30 Unit	Satpol PP	Penyediaan Perawatan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor	957.790.000,00
15	01.	1.1.	02.	26.	Pemeliharaan Rutin Berkala/ Perlengkapan Gedung Kantor	23 Serv	Satpol PP	Penyediaan perawatan dan pemeliharaan Perlengkapan Kantor	35.590.000,00
III.	01.	1.1.	03.		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				420.000.000,00
16	01.	1.1.	03.	02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	304 stel Personil	Satpol PP	Peningkatan Profesionalisme Aparatur	420.000.000,00
IV.	01.	1.1.	05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				777.584.000,00

17	01.	1.1.	05.	01.	Peningkatan Kapasitas Sikap dan Tugas	50 Org	Satpol PP	Peningkatan Profesionalisme Aparatur	88.300.000,00
18	01.	1.1.	05.	03.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	3 Hr 40 Org	Satpol PP	Pengembangan Sumberdaya Aparatur	79.284.000,00
19	01.	1.1.	05.	04.	Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	198 Giat	Satpol PP	Pemerintahan Pelaksanaan	132.000.000,00
20	01.	1.1.	05.	05.	Pelaksanaan Diklat Dasar Satpol PP	40 Orang	Satpol PP	Pembinaan Mental dan Fisik Anggota	378.000.000,00
21	01.	1.1.	05.	06.	Pelatihan dasar (pembekalan dan bimtek banpol)	100 orang	Satpol PP	Peningkatan Profesionalisme Aparatur	100.000.000,00
V.	01.	1.1.	06.		Propram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				25.000.000,00
22	01.	1.1.	06.	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja Satpol PP	1 bulan	Satpol PP	Peningkatan Akuntabilitas keuangan	5.000.000,00
23	01.	1.1.	06.	03.	Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	1 Bulan	Satpol PP	Peningkatan Akuntabilitas keuangan	5.000.000,00
24	01.	1.1.	06.	04.	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Bulan	Satpol PP	Peningkatan Akuntabilitas keuangan	15.000.000,00
VI.	01.	1.1.	26		Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat				2.585.402.000,00
25	01.	1.1.	26	02	Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Lingkungan	12 bulan	Satpol PP	Pemantauan dan Pengawasan terhadap Hiburan Malam	969.000.000,00
26	01.	1.1.	26	03	Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	35 org	Satpol PP	Pengendalian	520.490.000,00
27	01.	1.1.	26	04	Penyelenggaraan Ketertiban Umum pada hari besar Agama dan Nasional	15 Org, 25 Hr	Satpol PP	Pelaksanaan Pengamanan hari Besar Agama dan nasional	25.000.000,00
28	01.	1.1.	26	05	Peningkatan Trantibum secara Terpadu	75 Org, 15 Hr	Satpol PP	pengawasan dan penertiban trantibum dengan jajaran keamanan lainnva	149.759.000,00

29	01.	1.1.	1.1.1.1.1.26	06	Pembongkaran Reklame dan Bangunan	12 Bulan	Satpol PP	pengawasan dan penertiban reklame dan bangunan	360.470.000,00		
30	01.	1.1.	1.1.1.1.1.26	07	Penegakan Ketrentaman dan Ketertiban Daerah	11 Bulan	Satpol PP	pelaksanaan operasional dan pengawasan	130.200.000,00		
31	01.	1.1.	1.1.1.1.1.26	09	Peningkatan Koordinasi dalam Pelaksanaan Pelanggaran	6 bulan	Satpol PP	pelaksanaan trantibum koordinasi dalam penindakan pelanggaran dengan iaiaran sambing	20.000.000,00		
32	01.	1.1.	1.1.1.1.1.26	10	Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah	5 lokasi	Satpol PP	Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Masyarakat	110.000.000,00		
33	01.	1.1.	1.1.1.1.1.26	11	Operasi Penegakan Perda	12 Bulan	Satpol PP	pelaksanaan pengawasan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota	250.483.000,00		
34	01.	1.1.	1.1.1.1.1.26	12	Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Trantibum	11 Bulan	Satpol PP	pelaksanaan penindakan pelanggaran	50.000.000,00		
VII.	01.	1.1.	1.1.1.1.1.27		Program Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas				1.439.200.000,00		
35	01.	1.1.	1.1.1.1.1.27	01	Pelatihan Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat bagi Anggota Linmas	114 org	Satpol PP	pelaksanaan pelatihan tanggap darurat bagi anggota satuan linmas	200.000.000,00		
36	01.	1.1.	1.1.1.1.1.27	02	Pengerahan Dukungan Satuan Linmas	24 Giat	Satpol PP	pengerahan dukungan satuan linmas	69.000.000,00		
37	01.	1.1.	1.1.1.1.1.27	03	Sosialisasi Peranan Anggota Linmas	5 Giat	Satpol PP	Optimalisasi Peran dan Fungsi Linmas	110.000.000,00		
38	01.	1.1.	1.1.1.1.1.27	04.	Pengembangan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat	3534 Org	Satpol PP	Optimalisasi Pelaksanaan Pam Siswakarsa	1.060.200.000,00		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	lokasi	target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
I	1	06	03	01		BELANJA LANGSUNG							
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
1	1	06	03	01	01	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12	Kota Malang			45.000.000		
II	1	06	03	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah							
2	1	06	03	21	01	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ)	1 dokumen	Kota Malang			325.000.000		
III	1	20	03	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
3	1	20	03	06	01	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	1 dokumen	Kota Malang			180.000.000		
4	1	20	03	06	02	Penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD)	1				45.000.000		
IV	1	20	03	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
5	1	20	03	05	01	Peningkatan Kapasitas Perangkat Kecamatan dan Kelurahan	3				202.000.000		
V	1	20	03	28		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.							
6	1	20	03	28	01	Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan kewenangan Camat dan Lurah	1	Kota Malang			45.000.000		
7	1	20	03	28	02	Penilaian Sinergitas dan Kinerja Kecamatan	1				64.439.925		
8	1	20	03	28	03	Peningkatan Pelayanan administrasi RT/RW	4639				8.405.000.000		
9	1	20	03	28	04	Peningkatan Kapasitas Ketua RT/RW	1				98.000.000		

10	1	20	03	28	05	Bimbingan Teknis Frontline bagi petugas loket Kecamatan dan Kelurahan	1			75.000.000		
VI	1	20	03	27		Program Penataan Otonomi Daerah Baru				347.443.825		
11	1	20	03	27	01	Perapatan Pilar Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	1	Kota Malang		215.551.225		
12	1	20	03	27	02	Kajian Penataan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	1			131.892.600		
VII	1	20	03	01		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah				864.106.250		
13	1	20	03	01	01	Penyelenggaraan Rapat ke-11 Komwil IV Apeksi	1	Kota Malang		864.106.250		
VIII	1	23	03	15		Program Pengembangan data/ Informasi/Statistik Daerah				15.350.000		
14	1	23	03	15	01	Penyusunan Monografi Kota Malang	2	Kota Malang		15.350.000		

SKPD : BAGIAN HUKUM

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
								lokasi	target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2					3	4	4	5	6	7	8	9
I	1	20	03	06		BELANJA LANGSUNG				4.235.000.000,00			
						Program Penataan Perundang-undangan				1.960.000.000,00			
1	1	20	03	06		Asistensi Pembahasan Ranperda	30 ranperda		Ditetapkannya Ranperda menjadi Perda	200.000.000,00			
2	1	20	03	06		Workshop Ranperda Inisiatif DPRD	15 ranperda		Terlaksananya kegiatan pembahasan Ranperda inisiatif DPRD	400.000.000,00			

3	1	20	03	06	Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah	30 Ranperda	Terbentuknya Ranperda usulan SKPD	400.000.000,00		
4	1	20	03	06	Harmonisasi dan Sinkronisasi Ranperwal dan Rankepwal	60 Ranperwal, 500 Rankepwal dan 100 rankepksekda	Terbentuknya Ranperwal dan Rankepwal	150.000.000,00		
5	1	20	03	06	Harmonisasi dan Sinkronisasi Perda dan Perwal	20 Perda dan 20 Perwal	Terbentuknya Perda dan Perwal yang telah disempurnakan	300.000.000,00		
6	1	20	03	06	Penyusunan penjelasan, tanggapan, dan jawaban Walikota terhadap Ranperda	15 dokumen	Tersusunnya penjelasan, tanggapan, dan jawaban Walikota terhadap Ranperda	45.000.000,00		
7	1	20	03	06	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	3 dokumen	Tersedianya buku-buku produk hukum daerah	340.000.000,00		
8	1	20	03	06	Redokumentasi Produk Hukum Daerah	5 dokumen	<i>Tersusunnya kembali Produk Hukum Daerah</i>	125.000.000,00		
II	1	20	03	07	Program Peningkatan Pengetahuan Masyarakat dan Aparatur Pemerintah di Bidang Hukum			1.158.000.000,00		
9	1	20	03	07	Penyuluhan Hukum	15 kali	Terselenggaranya penyuluhan Hukum	700.000.000,00		
10	1	20	03	07	Bimbingan Teknis Legal Drafting	100 orang	Terselenggaranya Bimbingan Teknis "Legal Drafting"	302.000.000,00		
11	1	20	03	07	Bimbingan Teknis Pejabat Tata Usaha Negara	100 orang	<i>Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pejabat Tata Usaha Negara</i>	156.000.000,00		
III	1	20	03	43	Program Penerapan dan Penegakan Hukum			1.117.000.000,00		
12	1	20	03	43	Fasilitasi dan koordinasi penegakan hukum daerah	22 kali	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi penegakan hukum daerah	195.000.000,00		
13	1	20	03	43	Fasilitasi bantuan hukum	112 Sidang	Terlaksananya bantuan hukum	922.000.000,00		

SKPD : BAGIAN ORGANISASI

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
								lokasi	target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2					3	4	4	5	6	7	8	9
A	1	06				Belanja Langsung				2.730.986.000,00			
I	1	06	21			Perencanaan Pembangunan				600.000.000,00			
	1	06	21	20		Program perencanaan pembangunan daerah				600.000.000,00			
	1	06	21	20		Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2015	100		Tersusunnya dokumen penetapan kinerja dan perubahannva	55.000.000,00			
	2	06	21	21		Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016 Sekretariat Daerah	100		Meningkatnya kualitas perencanaan	45.000.000,00			
	3	06	21	28		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi	100		Tersusunnya rencana aksi roadmap reformasi birokrasi	500.000.000,00			
B	1	20				Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Keneagawaian dan Persandian				2.130.986.000,00			
II	1	20	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				25.000.000,00			
	4	20	01	07		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100		Terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan dengan tertib dan lancar	25.000.000,00			
III	1	20	06			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				283.500.000,00			

5	1	20	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	113.500.000,00
6	1	20	06	36	Penyusunan laporan semesteran & umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM tahun 2015	100	Tersedianya laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM	120.000.000,00
7		20	06	37	Monitoring dan Evaluasi penerapan standar pelayanan minimal	100	Terwujudnya penerapan SPM	50.000.000,00
IV	1	20	29		Program penataan kelembagaan perangkat daerah			365.000.000,00
8	1	20	29	14	Monitoring dan Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	100	Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kota Malang	50.000.000,00
9	1	20	29	17	Penyempurnaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	100	Meningkatnya penyempurnaan tupoksi perangkat daerah Kota Malang	50.000.000,00
10	1	20	29	18	Evaluasi Perangkat Daerah	100	Terwujudnya perangkat daerah yang tepat fungsi	65.000.000,00
11	1	20	29	19	Penyusunan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah	100	Terwujudnya naskah akademik dan rancangan perda organisasi dan tata kerja perangkat daerah	100.000.000,00
12	1	20	29	20	Penyusunan Kebijakan Bidang Kelembagaan Perangkat Daerah	100	Terwujudnya penguatan kelembagaan perangkat daerah	100.000.000,00
V	1	20	30		Program pengembangan sistem dan prosedur ketatalaksanaan dan pelayanan publik			777.500.000,00
13	1	20	30	04	Penyusunan sistem dan prosedur tetap	100	Peningkatan kinerja bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik	125.000.000,00
14	1	20	30	04	Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan	100	Peningkatan kinerja bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik	125.000.000,00

15	1	20	30	05	Penyusunan Ranperwal Pakaian Dinas Walikota, Wawali & PNS dilingkungan Pemerintah Kota Malang	100		Peningkatan kinerja bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik	95.000.000,00		
16	1	20	30	04	Penyusunan & Sosialisasi Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Malang	100		Peningkatan kinerja bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik	225.000.000,00	Menyesuaikan dg PERMENPAN No. 80/2012 ttg Pedoman TND Instansi Pemerintah	
17	1	20	30	16	Monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik	100		Terselenggaranya pengembangan pelayanan publik	57.500.000,00		
18	1	20	30	19	Pelaksanaan Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat	100		Terselenggaranya peningkatan pelayanan publik	150.000.000,00		
VI	1	20	31		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan pemerintahan				555.136.000,00		
19	1	20	31	06	Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat daerah	100		Meningkatnya kualitas kinerja aparatur perangkat daerah	100.000.000,00		
20	1	20	31	07	Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	100		Meningkatnya kualitas kinerja aparatur perangkat daerah	190.136.000,00		
21	1	20	31	08	Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial	100		Meningkatnya kualitas kinerja aparatur perangkat daerah	115.000.000,00		
22	1	20	31	08	Bimtek Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	100		Meningkatnya kualitas kinerja aparatur perangkat daerah	150.000.000,00		
VII	1	20	41		Program Pelaksanaan Pengkajian dan Penerapan Standar Manajemen Mutu				124.850.000,00		
23	1	20	41	06	Pemeliharaan Standar Manajemen Mutu ISO 9001-2008 pada Sekretariat Daerah Kota Malang	100		Terwujudnya penerapan SMM ISO 9001:2008 pd perangkat daerah	124.850.000,00		

SKPD : BAGIAN PEMBANGUNAN

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
								lokasi	target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2					3	4	4	5	6	7	8	9
						BELANJA LANGSUNG				2.250.000.000,00			
						Program Pelayanan Administrasi				1.976.500.000,00			
						Pembangunan							
1	1	20	03.04	37	01	Penyusunan Pedoman Proses Pengadaan Barang/Jasa	1 Dokumen	Kota Malang	Tersusunnya Pedoman Proses Pengadaan Barana/iasa	60.000.000,00			
2	1	20	03.04	37	02	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Kota Malang	1 Dokumen	Kota Malang	Tersusunnya Pedoman Pelaksanaan	75.000.000,00			
3	1	20	03.04	37	03	Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	1 Dokumen, 1 Ranperda	Kota Malang	Tersusunnya Naskah Akademik dan Ranperda Ijin Usaha Jasa Konstruksi	91.500.000,00			
4	1	20	03.04	37	04	Pelatihan Pembuatan Dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)	105 Orang	Kota Malang	Pemahaman PPTK dalam melaksanakan dan mengendalikan kegiatan	100.000.000,00			
5	1	20	03.04	37	05	Fasilitasi Penyelenggaraan ULP Kota Malang	1 Paket	Kota Malang	Terselenggaranya ULP di lingkungan Pemerintah Kota Malang	1.500.000.000,00			

6	1	20	03.04	37	06	Koordinasi dengan Penyedia Jasa Konsultansi, Konstruksi dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)	3 kali	Kota Malang	Tercapainya laporan dan evaluasi tiap Tribunal terhadap Penyedia Jasa Konsultansi, Konstruksi dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)	150.000.000,00		
II	1	20	03.04	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah				250.000.000,00		
7	1	20	03.04	21	01	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	12 kali/buku	Kota Malang	Tersusunnya laporan monev pelaksanaan administrasi pembangunan secara berkala di lingkungan Pemerintah Kota Malang	250.000.000,00		
III	1	20	03.04	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				23.500.000,00		
8	1	20	03.04	01	01	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Hr 3 org Jasa Adm Keu.	Kota Malang	Tersedianya honorarium bagi Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	23.500.000,00		

SKPD : BAGIAN PERKONOMIAN DAN USAHA DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				lokasi	target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		BELANJA LANGSUNG				750.000.000,00			

I	1	16	1.20.	22		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi				250.000.000,00		
1	1	16	1.20.	22	01	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah	1 Paket	Kota Malang	Perumusan Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah	100.000.000,00		
2	1	16	1.20.	22	02	Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	5 Buku	Kota Malang	TPID	75.000.000,00		
3	1	16	1.20.	22	03	Fasilitasi Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED)	5 Buku	Kota Malang	FPED	75.000.000,00		
II	1	16	1.20.	16	01	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				75.000.000,00		
4	1	16	1.20.	16	02	Fasilitasi Pendampingan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya)	10 Buku	Kota Malang	Kelompok Masyarakat Berbasis RT/RW (Posdaya)	75.000.000,00		
III	1	16	1.20.	17		Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah				425.000.000,00		
5	1	16	1.20.	17	01	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Pembentukan BUMD Bidang Telematika	1 Paket	Kota Malang	Perumusan Kebijakan BUMD Bidang Telematika	150.000.000,00		
6	1	16	1.20.	17	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Pembentukan BUMD PD. Pasar	1 Paket	Kota Malang	Perumusan Kebijakan BUMD PD. Pasar	150.000.000,00		
7	1	16	1.20.	17	03	Monitoring dan Evaluasi BUMD	5 Buku	Kota Malang	Monev BUMD PDAM, PD. RPH, dan PD. BPR Tugu Artha	25.000.000,00		
8	1	16	1.20.	17	04	Fasilitasi Pasar Murah Ramadhan	1 Paket	Kota Malang	Masyarakat Ekonomi Menengah Kebawah	100.000.000,00		

SKPD : BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2015	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

9	1	13	1.20 .030 6	21	Fasilitasi silaturahmi lembaga sosial keagamaan	500 orang	Kota Malang	Terlaksananya fasilitasi silaturahmi lembaga sosial keagamaan	74.962.500,00		
10	1	13	1.20 .030 6	21	Fasilitasi sosialisasi prosedur perjalanan Haji & Umroh	500 orang	Kota Malang	Terlaksananya fasilitasi prosedur perjalanan & umroh	139.910.000,00		
11	1	13	1.20 .030 6	21	Fasilitasi Kegiatan Gebyar Takbir Idul Fitri	300 orang/peserta	Kota Malang	Terlaksananya Kegiatan Gebyar Takbir Idul Fitri	45.042.000,00		
12	1	13	1.20 .030 6	21	Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan di 5 Kecamatan	2000 orang	Kota Malang	Terlaksananya Kegiatan Safari Ramadhan di 5 Kecamatan	93.687.000,00		
13	1	13	1.20 .030 6	21	Fasilitasi Peringatan Hari Besar Keagamaan	1300	Kota Malang	Terlaksananya peringatan hari besar keagamaan	20.212.500,00		
14	1	13	1.20 .030 6	21	Fasilitasi Panjatan Do'a Hari-Hari Besar	318 orang	Kota Malang	Terlaksananya Panjatan Do'a HUT Kota Malang, HUT RI dan Tahun Baru 2016	117.357.563,00		
15	1	13	1.20 .030 6	21	Fasilitasi Silaturahmi Ulama' dan Umara'	100 orang	Kota Malang	Terlaksananya Kegiatan Silaturahmi Ulama dan Umara	73.375.000,00		
16	1	13	1.20 .030 6	21	Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah	700 orang	Kota Malang	Terlaksananya Pemberangkatan CJH dari Daerah ke Embarkasi dan Pemulangan dari Embarkasi ke Daerah	173.347.000,00		
17	1	13	1.20 .030 6	21	Fasilitasi kegiatan keagamaan Masjid Baiturrohim Balaikota Malang	82 orang, Imam Penceramah selama 1 tahun	Kota Malang	Terwujudnya Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan	83.730.000,00		
18	1	13	1.20 .030 6	21	Analisa Dampak Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Sosial Keagamaan	1 Dokumen	Kota Malang	Hasil Analisa	55.000.000,00		
19	1	13	1.20 .030 6	21	Kajian Peran Lembaga Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan	1 Dokumen	Kota Malang	Hasil Kajian	55.000.000,00		
20	1	13	1.20 .030 6	21	Analisa Dampak Kesenjangan Ekonomi Terhadap Kehidupan Beragama	1 Dokumen	Kota Malang	Hasil Analisa	55.000.000,00		

21	1	13	1.20 .030 6	21	Kajian Penyusunan Sistem Manajemen Informasi Pendidikan Keagamaan	1 Dokumen	Kota Malang	Hasil Kajian	55.000.000,00		
22	1	13	1.20 .030 6	21	Kajian Penyusunan Sistem Manajemen Informasi Penerima Dana Bansos & Hibah kepada Masyarakat	1 Dokumen	Kota Malang	Hasil Kajian	55.000.000,00		
II	1	13	1.20 .030 6	01	Pelayanan Administrasi Perkantoran				56.786.937,00		
23	1	13	1.20 .030 6	01	01	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 Dokumen	Kota Malang	Terlaksananya Jasa Penyediaan Administrasi Keuangan	33.600.000,00	
24	1	13	1.20 .030 6	01	02	Penyusunan Laporan Keuangan	1 Dokumen	Kota Malang	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan	7.186.937,00	
25	1	13	1.20 .030 6	01	03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 Dokumen	Kota Malang	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6.000.000,00	
26	1	13	1.20 .030 6	01	04	Penyediaan Jasa Perbaikan Alat Kerja	10 Unit	Kota Malang	Terlaksananya Penyediaan Jasa Perbaikan Alat Kerja	10.000.000,00	

SKPD : BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
				lokasi	target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9		
I	1.2 0 0	1.2 0 0	030 7 030	01	BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1	1.2 0 0	1.2 0 0	030 7 030		Penyediaan Jasa Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10 jenis	Kota Malang	Tersedianya jasa bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.883.430.000,00 709.205.000,00	199.080.000,00	

2	1.2 0	1.2 0	030 7	01. 21	Fasilitasi Layanan Keprotokolan	17 Kegiatan upacara, 900 Kegiatan penerimaan tamu, lembur dan latihan korsik	Kota Malang	Tercapainya layanan keprotokolan yang optimal	510.125.000,00		
II	1.2 0	1.2 0	030 7	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				48.000.000,00		
3	1.2 0	1.2 0	030 7	05. 26	Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	8 orang	Kota Malang	Meningkatnya keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	48.000.000,00		
III	1.2 0	1.2 0	030 7	31	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Pemerintahan				200.000.000,00		
4	1.2 0	1.2 0	030 7	31. 12	Peningkatan Kualitas Aparatur Kehumasan	50 orang	Kota Malang	Meningkatnya SDM Aparatur tentang kehumasan	200.000.000,00		
IV	1.2 5	1.2 0	030 7	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				200.000.000,00		
5	1.2 5	1.2 0	030 7	15. 50	Bimbingan Teknis Kehumasan dan Keprotokolan	1 kali	Kota Malang	Meningkatnya wawasan tentang kehumasan dan keprotokolan	200.000.000,00		
V	1.2 5	1.2 0	030 7	18	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa				4.726.225.000,00		
6	1.2 5	1.2 0	030 7	18. 05	Publikasi Kebijakan dan Kegiatan Pemerintah Kota	55 media	Kota Malang	Terpublikasinya kebijakan dan kegiatan Pemerintah Kota	3.431.225.000,00		
7	1.2 5	1.2 0	030 7	18. 06	Dokumentasi Kebijakan dan Kegiatan Pemerintah Kota	6 jenis	Kota Malang	Terdokumentasinya kebijakan dan kegiatan Pemerintah Kota	250.000.000,00		
8	1.2 5	1.2 0	030 7	18. 11	Penyusunan Profil Kota Malang	1000 buku	Kota Malang	Tersedianya Buku Profil Kota Malang	95.000.000,00		
9	1.2 5	1.2 0	030 7	18. 18	Kemitraan dengan Pers	4 kali	Kota Malang	Terfasilitasinya Kemitraan dengan Pers	300.000.000,00		

10	1.2	1.2	030		Penyusunan Majalah Kota Malang	24000 ekspl	Kota Malang	Tersedianya Majalah Kota Malang	650.000.000,00		
----	-----	-----	-----	--	--------------------------------	-------------	-------------	---------------------------------	----------------	--	--

SKPD : BAGIAN UMUM

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
								lokasi	target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2					3	4	4	5	6	7	8	9
						BELANJA LANGSUNG				31.880.000.000,00			
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				11.901.973.750,00			
1	1	20	03	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	15.000 surat	Kota Malang	Jumlah surat terlayani selama 1 tahun	454.796.650,00			
2	1	20	03	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kota Malang	Jumlah rekening yang dibayar selama 1 tahun dilingkungan sekretariat	2.866.500.000,00			
3	1	20	03	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	815 unit	Kota Malang	Jumlah kendaraan laik jalan dari segi administrasi dan fisik	157.500.000,00			
4	1	20	03	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	Kota Malang	Pelayanan administrasi keuangan lancar	89.250.000,00			
5	1	20	03	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	144 unit	Kota Malang	Meningkatnya kebersihan gedung/kantor	283.500.000,00			
6	1	20	03	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	64 buah	Kota Malang	Pelayanan pelaksanaan perbaikan peralatan kerja	68.250.000,00			
7	1	20	03	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	39 macam barang	Kota Malang	Penunjang pekerjaan administrasi kantor	250.000.000,00			

8	1	20	03	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	35 macam cetakan	Kota Malang	Penunjang administrasi perkantoran	1.200.000.000,00		
9	1	20	03	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	21 alat listrik	Kota Malang	Pelayanan penggantian peralatan listrik	51.000.000,00		
10	1	20	03	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga/ bahan pembersih	20 macam jenis barang	Kota Malang	Tersedianya peralatan rumah tangga	131.250.000,00		
11	1	20	03	01	16	Penyediaan bahan logistik kantor	25 macam barang	Kota Malang	Tersedianya kebutuhan bahan logistik	131.250.000,00		
12	1	20	03	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	450 acara	Kota Malang	Pelaksanaan tugas koordinasi / konsultasi	1.058.991.800,00		
13	1	20	03	01	25	Penyediaan pelayanan tamu-tamu dinas	100 tamu dinas dan tamu apeksi	Kota Malang	Pelaksanaan penerimaan tamu-tamu dinas	264.680.000,00		
14	1	20	03	01	28	Peringatan hari jadi Provinsi Jawa Timur	1 acara	Kota Malang	Kegiatan/Upacara Hari Jadi Provinsi Jawa Timur	-		
15	1	20	03	01	60	Peringatan/Kegiatan Insedentil	1 tahun	Kota Malang	Kegiatan/upacara yang terselenggarakan lancar	2.750.000.000,00		
16	1	20	03	01	61	Peringatan HUT Kota Malang ke 101	1 acara	Kota Malang	Kegiatan/Upacara HUT Kota Malang ke 101 yang terselenggarakan lancar	388.750.000,00		
17	1	20	03	01	62	Peringatan Hari Pendidikan Nasional	1 acara	Kota Malang	Kegiatan/upacara Hari Pendidikan Nasional yang terselenggarakan lancar	99.750.000,00		
18	1	20	03	01	63	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional	1 acara	Kota Malang	Kegiatan/Upacara Hari Kebangkitan Nasional yang terselenggarakan lancar	89.250.000,00		
19	1	20	03	01	64	Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI	1 acara	Kota Malang	Kegiatan/Upacara HUT Proklamasi RI yang terselenggarakan lancar	236.250.000,00		

20	1	20	03	01	65	Kegiatan Bulan Ramadhan	4 acara	Kota Malang	Kegiatan buka puasa bersama yang diselenggarakan	236.250.000,00		
21	1	20	03	01	66	Takbir dan Halal Bil Halal	5 acara	Kota Malang	Kelancaran pelaksanaan Takbir dan Halal Bil Halal yang diselenggarakan	730.000.000,00		
22	1	20	03	01	67	Peringatan Hari Kesaktian Pancasila	1 acara	Kota Malang	Kegiatan/upacara Hari Kesaktian Pancasila yang diselenggarakan	86.310.000,00		
23	1	20	03	01	68	Peringatan Hari Sumpah Pemuda	1 acara	Kota Malang	Kegiatan/upacara Hari Sumpah Pemuda yang diselenggarakan	91.488.600,00		
24	1	20	03	01	69	Peringatan Hari Pahlawan	1 acara	Kota Malang	Kegiatan/upacara Hari Pahlawan yang diselenggarakan	116.006.100,00		
25	1	20	03	01	70	Peringatan Hari Ibu	1 acara	Kota Malang	Kegiatan/upacara Hari Ibu yang diselenggarakan	70.950.600,00		
II	1	20	03	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				10.384.776.250,00		
26	1	20	03	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	6 unit	Kota Malang	Pengadaan kendaraan dinas	-		
27	1	20	03	02	06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	8 macam	Kota Malang	Penyediaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	350.000.000,00		
28	1	20	03	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	5 macam	Kota Malang	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	648.706.250,00		
29	1	20	03	02	08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	9 macam	Kota Malang	Penyediaan peralatan rumah jabatan/dinas	350.000.000,00		
30	1	20	03	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	6 macam	Kota Malang	Penyediaan peralatan gedung/kantor	598.175.000,00		
31	1	20	03	02	17	Pengadaan mebelair rumah jabatan/dinas	6 macam	Kota Malang	Penyediaan mebelair rumah jabatan/dinas	371.200.000,00		
32	1	20	03	02	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Wilayah Sekretariat Daerah	3.730 m2	Kota Malang	Pemeliharaan gedung kantor wilayah Sekretariat Daerah	3.995.000.000,00		

33	1	20	03	02	20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	800 m2	Kota Malang	Pemeliharaan rumah jabatan	367.500.000,00			
34	1	20	03	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	1.065,4 m2	Kota Malang	Pemeliharaan rumah dinas	577.500.000,00			
35	1	20	03	02	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	3 unit	Kota Malang	Jumlah mobil jabatan yang laik jalan	273.945.000,00			
36	1	20	03	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	51 unit	Kota Malang	Jumlah kendaraan laik jalan	2.000.000.000,00			
37	1	20	03	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	68 buah dan 4 taman	Kota Malang	Barang dan taman yang dipelihara	250.000.000,00			
38	1	20	03	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	46 jenis	Kota Malang	Tersedianya peralatan kebersihan gedung	125.000.000,00			
39	1	20	03	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	400 jenis	Kota Malang	Barang yang diperbaiki	194.250.000,00			
40	1	20	03	02	30	Pengadaan perlengkapan kantor kepala daerah/wakil kepala daerah	8 macam	Kota Malang	Penyediaan sarana dan prasarana kedinasan	152.250.000,00			
41	1	20	03	02	83	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan telekomunikasi	1 paket	Kota Malang	Jaringan interkom terpelihara dengan baik	131.250.000,00			
III	1	20	03	03		Program peningkatan disiplin aparatur				1.960.000.000,00			
42	1	20	03	02	84	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	1 paket	Kota Malang	Tersedianya pakaian dinas bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Malang	1.750.000.000,00			
43	1	20	03	03	02	Pengadaan pakaian kerja lapangan beserta perlengkapannya	2 paket	Kota Malang	Penyediaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	105.000.000,00			
44	1	20	03	03	03	Peningkatan dan pengembangan kedisiplinan serta ketrampilan penunjang kerja	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kedisiplinan aparatur	105.000.000,00			
IV	1	20	03	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				1.925.000.000,00			
45	1	20	03	05	13	Penguatan kapasitas aparatur sekretariat daerah	2 kegiatan	Kota Malang	meningkatnya kapasitas aparatur	75.000.000,00			
46	1	20	03	05	14	Pengembangan jaringan persandian telekomunikasi	1 paket	Kota Malang	Tersedianya persandian yang mendukung	150.000.000,00			

47	1	20	03	05	15	Pengembangan dukungan analisa, pertimbangan dan saran bidang pemerintahan	12 bulan	Kota Malang	Tersedianya bahan analisa, pertimbangan dan saran bidang pemerintahan	150.000.000,00		
48	1	20	03	05	17	Fasilitasi dan koordinasi penyusunan kebijakan daerah	12 bulan	Kota Malang	Tersedianya bahan analisa, pertimbangan dan saran	500.000.000,00		
49	1	20	03	05	18	Pengembangan dukungan analisa, pertimbangan dan saran bidang hukum dan politik	12 bulan	Kota Malang	Tersedianya bahan analisa, pertimbangan dan saran bidang hukum dan politik	150.000.000,00		
50	1	20	03	05	19	Pengembangan dukungan analisa, pertimbangan dan saran bidang ekonomi dan keuangan	12 bulan	Kota Malang	Tersedianya bahan analisa, pertimbangan dan saran bidang ekonomi dan keuangan	150.000.000,00		
51	1	20	03	05	20	Peningkatan dan pengembangan koordinasi bahan perumusan kebijakan bidang Pemerintahan	12 bulan	Kota Malang	Tercapainya koordinasi kebijakan dibidang Pemerintahan	150.000.000,00		
52	1	20	03	05	21	Peningkatan dan pengembangan koordinasi bahan perumusan kebijakan bidang Pembangunan	12 bulan	Kota Malang	Tercapainya koordinasi kebijakan dibidang Pembangunan	150.000.000,00		
53	1	20	03	05	22	Peningkatan dan pengembangan koordinasi bahan perumusan kebijakan bidang Adminitrasi Umum	12 bulan	Kota Malang	Tercapainya koordinasi kebijakan dibidang Administrasi Umum	150.000.000,00		
54	1	20	03	05	17	Pengembangan dukungan analisa, pertimbangan dan saran bidang pembangunan	12 bulan	Kota Malang	Tersedianya bahan analisa, pertimbangan dan saran bidang pembangunan	150.000.000,00		
55	1	20	03	05	17	Pengembangan dukungan analisa, pertimbangan dan saran bidang SDM dan kesra	12 bulan	Kota Malang	Tersedianya bahan analisa, pertimbangan dan saran bidang sdm dan kesra	150.000.000,00		
V	1	20	03	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				45.000.000,00		

56	1	20	03	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 buku	Kota Malang	Buku LAKIP SKPD 2015	25.000.000,00		
57	1	20	03	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	2 kali	Kota Malang	Buku laporan yang akuntabel	20.000.000,00		
VI	1	20	03	16		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah				5.488.250.000,00		
58	1	20	03	16	01	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	1 tahun	Kota Malang	Terlaksananya dialog audensi dengan tokoh masyarakat	252.000.000,00		
59	1	20	03	16	04	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	1 tahun	Kota Malang	Terlaksananya kunjungan kerja Walikota/Wakil Wakil Walikota	236.250.000,00		
60	1	20	03	16	10	Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah Kepala Daerah	1 tahun	Kota Malang	Terlaksananya urusan rumahtangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	4.000.000.000,00		
61	1	20	03	16	11	Belanja Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1 tahun	Kota Malang	Terlaksananya urusan rumahtangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	1.000.000.000,00		
VII	1	20	03	17		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah				175.000.000,00		
62	1	20	03	17	16	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	12 bulan	Kota Malang	Meningkatnya manajemen aset daerah	175.000.000,00		

SKPD : BAGIAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							lokasi	target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2				3	4	4	5	6	7	8	9
I	1	20	20.03	01	BELANJA LANGSUNG				1.500.000.000,00			
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				50.000.000,00			
1	1	20	20.03	01	07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1	Kota Malang	DOKUMEN	25.000.000,00			
2	1	20	20.03	01	09 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Kota Malang	DOKUMEN	25.000.000,00			
II	1	20	20.03	16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				760.000.000,00			
3	1	20	20.03	16	01 Penyusunan Rancangan Perwal tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)2015	1	Kota Malang	RANPERWAL	75.000.000,00			
4	1	20	20.03	16	02 Penyusunan Kajian Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Malang	1	Kota Malang	NA	75.000.000,00			
5	1	20	20.03	16	03 Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal	1	Kota Malang	DOKUMEN	60.000.000,00			
6	1	20	20.03	16	04 Kajian Percepatan Pembangunan Infrastruktur dengan Skema Public Private Partnership	1	Kota Malang	NA	75.000.000,00			
7	1	20	20.03	16	05 Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di daerah	1	Kota Malang	DOKUMEN	75.000.000,00			
8	1	20	20.03	16	06 Penyusunan peta investasi daerah dan identifikasi potensi sumber daya daerah	1	Kota Malang	PETA POTENSI INVESTASI	100.000.000,00			
9	1	20	20.03	16	07 Penyusunan NA dan ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	Kota Malang	DOKUMEN	75.000.000,00			

10	1	20	20.03	16	08	Kajian Kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Penanaman Modal di Kota Malang	1	Kota Malang	NA	75.000.000,00		
11	1	20	20.03	16	09	Penyusunan Kajian Perizinan Usaha di Bidang Pertanian	1	Kota Malang	NA	75.000.000,00		
12	1	20	20.03	16	10	Penyusunan Kajian Perizinan Usaha di Bidang Perhubungan	1	Kota Malang	NA	75.000.000,00		
III	1	20	20.03	18	Program Peningkatan Kerjasama antar Daerah					295.000.000,00		
13	1	20	20.03	18	01	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama antar daerah Malang Raya dalam Penyediaan Pelayanan Publik	1	Kota Malang	MOU	100.000.000,00		
14	1	20	20.03	18	02	Kajian Kerjasama antar daerah Penanganan Banjir wilaya Malang Raya	1	Kota Malang	DOKUMEN	60.000.000,00		
15	1	20	20.03	18	03	Kajian Kerjasama antar daerah bidang Pariwisata	1	Kota Malang	DOKUMEN	60.000.000,00		
16	1	20	20.03	18	04	Kajian Percepatan Pembangunan Daerah dengan Pengguna usahaan Aset Atau Baranq Milik Daerah	1	Kota Malang	NA	75.000.000,00		
IV	1	20	20.03	19	Program Peningkatan Kerjasama dengan Pihak Ketiga					395.000.000,00		
17	1	20	20.03	19	01	Penyusunan Dokumentasi Naskah Perjanjian Kerjasama	1	Kota Malang	DOKUMEN	50.000.000,00		
18	1	20	20.03	19	02	Evaluasi Perjanjian Kerjasama dengan Pola BOT Pasar Besar	1	Kota Malang	DOKUMEN	60.000.000,00		
19	1	20	20.03	19	03	Evaluasi Perjanjian Kerjasama dengan Pola BOT MOG	1	Kota Malang	DOKUMEN	60.000.000,00		
20	1	20	20.03	19	04	Fasilitasi Pembahasan Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama	1	Kota Malang	RANCANGAN NASKA	75.000.000,00		
21	1	20	20.03	19	05	Pelaksanaan Monitoring dan Pengendalian Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	1	Kota Malang	LAPORAN	75.000.000,00		
22	1	20	20.03	19	06	Pengembangan Website	1	Kota Malang	PAKET	75.000.000,00		

SKPD : SEKRETARIAT DPRD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator	Rencana Tahun 2015	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
			Kinerja Program			

					Daerah Dan Program/Kegiatan	(outcome)/ Kegiatan (output)	lokasi	target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2				3	4	4	5	6	7	8	9
					BELANJA LANGSUNG				42.823.000.000,00			
1	1	20	.20.0	01	Program Pelayanan Administrasi				8.177.878.964,00			
1	1	20	.20.0	01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1 Tahun	Kota Malang	Jumlah surat terkirim	67.100.000,00			
2	1	20	.20.0	01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	Kota Malang	Tercukupinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik	384.800.000,00			
3	1	20	.20.0	01 03	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Kota Malang	Tertib administrasi keuangan	212.700.000,00			
4	1	20	.20.0	01 04	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1 Tahun	Kota Malang	Terwujudnya kantor yang bersih dan sehat	427.960.000,00			
5	1	20	.20.0	01 05	Penyediaan alat tulis kantor	1 Tahun	Kota Malang	Tercukupinya kebutuhan ATK	101.381.200,00			
6	1	20	.20.0	01 06	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	Kota Malang	Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan	108.191.200,00			
7	1	20	.20.0	01 07	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	Kota Malang	Terpenuhinya penerangan kantor	25.825.000,00			
8	1	20	.20.0	01 08	Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat	1 Tahun	Kota Malang	Tersedianya makanan dan minuman	663.600.000,00			
9	1	20	.20.0	01 09	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	Kota Malang	Terwujudnya hasil rapat koordinasi dan konsultasi	3.458.274.564,00			
10	1	20	.20.0	01 10	Kegiatan penunjang Pengadaan Barang dan Jasa	1 Tahun	Kota Malang	Terwujudnya pengadaan barang/jasa	63.730.000,00			
11	1	20	.20.0	01 11	Penyediaan Jasa Informasi, Publikasi dan Komunikasi	1 Tahun	Kota Malang	Tersedianya jasa informasi, publikasi dan komunikasi	611.240.000,00			
12	1	20	.20.0	01 12	Pengadaan pakaian dinas anggota DPRD	1 Tahun	Kota Malang	Terwujudnya disiplin Aparatur	709.100.000,00			
13	1	20	.20.0	01 13	Penataan /Manajemen Arsip	225 Stel	Kota Malang	Terwujudnya Penataan/Manajemen Arsip	46.435.000,00			
14	1	20	.20.0	01 14	Kegiatan Peringatan/Isidental	1 Tahun	Kota Malang	Terciptannya peringatan /isidental	311.672.000,00			

15	1	20	.20.0	01	15	Penyediaan Makan dan Minum Rapat-rapat Paripurna	1 Tahun	Kota Malang	Terwujudnya Makan dan Minum Rapat-rapat Paripurna	932.175.000,00		
16	1	20	.20.0	01	16	Penyediaan Peralatan RT	1 Tahun	Kota Malang	Terwujudnya Makan dan Minum Rapat-rapat Paripurna	53.695.000,00		
II	1	20	.20.0	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				7.650.575.000,00		
17	1	20	.20.0	02	01	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	Kota Malang	Terciptanya kelancaran pelayanan gedung kantor	966.300.000,00		
18	1	20	.20.0	02	02	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Tahun	Kota Malang	Tercapainya perawatan rumah jabatan/dinas	168.050.000,00		
19	1	20	.20.0	02	03	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	Kota Malang	Tercapainya Pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan/dinas	1.173.630.000,00		
20	1	20	.20.0	02	04	Pemeliharaan Mebeleur	1 Tahun	Kota Malang	Tercapainya perawatan rumah jabatan/dinas	60.000.000,00		
21	1	20	.20.0	02	05	Peningkatan Sarana dan Prasarana	1 Tahun	Kota Malang	Terawatnya kendaraan operasional/dinas	5.007.400.000,00		
22	1	20	.20.0	02	06	Pemeliharaan rutin rumah jabatan	1 Tahun	Kota Malang	Terawatnya mebeleur kantor	244.360.000,00		
23	1	20	.20.0	02	07	Pemeliharaan rumah dinas	1 Tahun	Kota Malang	Terawatnya mebeleur kantor	30.835.000,00		
III	1	20	.20.0	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				209.662.000,00		
24	1	20	.20.0	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 paket	Kota Malang	Terlaksananya penyusunan LAKIP, KKL, RKT SKPD	62.180.000,00		
25	1	20	.20.0	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	2 paket	Kota Malang	Terlaksananya Laporan Keuangan Semester SKPD	17.000.000,00		
26	1	20	.20.0	06	03	Penyusunan Laporan Akhir Tahun	1 paket	Kota Malang	Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun	31.900.000,00		
27	1	20	.20.0	06	04	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	3 paket	Kota Malang	Terlaksananya penyusunan RKA. DPA. DPPA SKPD	68.411.000,00		

28	1	20	.20.0	06	05	Penyusunan Rencana Kerja	2 paket	Kota Malang	Terlaksananya penyusunan Renja	30.171.000,00		
IV	1	20	.20.0	15		Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah				26.784.884.036,00		
29	1	20	.20.0	15	01	Pembahasan rancangan peraturan daerah	20 Perda	Kota Malang	Meningkatnya jumlah produk hukum/Perda	4.306.807.676,00		
30	1	20	.20.0	15	02	Rapat-rapat paripurna	1 Tahun	Kota Malang	Terlaksananya rapat-rapat DPRD	583.114.000,00		
31	1	20	.20.0	15	03	Kegiatan Reses	2 paket	Kota Malang	Terserapnya aspirasi masyarakat	3.158.934.000,00		
32	1	20	.20.0	15	04	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	1 Tahun	Kota Malang	Meningkatnya kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD sesuai tugas dan funasinv	6.984.185.460,00		
33	1	20	.20.0	15	05	Penyambutan Tamu Dinas Luar Daerah	1 Tahun	Kota Malang	Terlaksananya kegiatan penyambutan tamu dinas dari Luar Daerah	521.296.000,00		
34	1	20	.20.0	15	06	Workshop Peningkatan Fungsi DPRD	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kapasitas anggota DPRD sesuai tugas dan funasinv	626.361.000,00		
35	1	20	.20.0	15	07	Pembuatan majalah mimbar legislatif	600 Buku	Kota Malang	Terpenuhinya pembuatan buletin/majalan Parlemen	285.510.000,00		
36	1	20	.20.0	15	08	Pengelolaan Hasil Pemberitaan Media Cetak		Kota Malang	Terpenuhinya pemberitaan media cetak	204.996.500,00		
37	1	20	.20.0	15	09	Asuransi pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD	1 paket	Kota Malang	Terpenuhinya pemeliharaan kesehatan anggota DPRD	156.404.600,00		
38	1	20	.20.0	15	10	Outbond DPRD Kota Malang	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kapasitas anggota DPRD sesuai tugas dan funasinv	466.436.000,00		
39	1	20	.20.0	15	11	Pengembangan Website DPRD Kota Malang	1 paket	Kota Malang	Meningkatnya kapasitas anggota DPRD sesuai tugas dan funasinv	161.990.000,00		

40	1	20	.20.0	15	12	Publikasi Profil dan Kegiatan DPRD	2 paket	Kota Malang	Meningkatnya kapasitas anggota DPRD sesuai tugas dan funasinv	81.524.000,00		
41	1	20	.20.0	15	13	Optimalisasi/kunjungan kerja/studi banding bagi Komisi A DPRD Kota Malang	1 Paket	Kota Malang	Meningkatnya kapasitas anggota DPRD sesuai tugas dan funasinv	997.500.000,00		
42	1	20	.20.0	15	14	Optimalisasi/kunjungan kerja/studi banding bagi Komisi B DPRD Kota Malang	1 Paket	Kota Malang	Meningkatnya kapasitas anggota DPRD sesuai tugas dan funasinv	1.079.350.000,00		
43	1	20	.20.0	15	15	Optimalisasi/kunjungan kerja/studi banding bagi Komisi C DPRD Kota Malang	1 Paket	Kota Malang	Meningkatnya kapasitas anggota DPRD sesuai tugas dan funasinv	1.079.350.000,00		
44	1	20	.20.0	15	16	Optimalisasi/kunjungan kerja/studi banding bagi Komisi D DPRD Kota Malang	1 Paket	Kota Malang	Meningkatnya kapasitas anggota DPRD sesuai tugas dan funasinv	997.500.000,00		
45	1	20	.20.0	15	17	Sosialisasi Produk Hukum DPRD Kota Malang	1 tahun	Kota Malang	Sosialisasi Produk Hukum DPRD Kota Malang	21.435.800,00		
46	1	20	.20.0	15	18	Peningkatan Kapasitas Badan Anggaran DPRD Kota Malang	3 paket	Kota Malang	Meningkatnya kapasitas anggota badan2 di DPRD sesuai tugas dan funasinv	853.350.000,00		
47	1	20	.20.0	15	19	Peningkatan Kapasitas Badan Legislasi DPRD Kota Malang	3 paket	Kota Malang	Meningkatnya kapasitas anggota badan2 di DPRD sesuai tugas dan funasinv	528.550.000,00		
48	1	20	.20.0	15	20	Peningkatan Kapasitas Badan Musyawarah DPRD Kota Malang	3 paket	Kota Malang	Meningkatnya kapasitas anggota badan2 di DPRD sesuai tugas dan funasinv	853.350.000,00		
49	1	20	.20.0	15	21	Peningkatan Kapasitas Badan Kehormatan DPRD Kota Malang	3 paket	Kota Malang	Meningkatnya kapasitas anggota badan2 di DPRD sesuai tugas dan funasinv	203.750.000,00		
50	1	20	.20.0	15	22	Penyusunan Ranperda Inisiatif Dewan	26 ranperda	Kota Malang	Meningkatnya tercapainya Penyusunan Ranperda Inisiatif Dewan	1.184.745.000,00		

51	1	20	.20.0	15	24	Pelantikan PAW Anggota DPRD Kota Malang	3 paket	Kota Malang	Terlaksananya Pelantikan PAW Anggota DPRD Kota Malana	298.524.000,00		
52	1	20	.20.0	15	25	Hubungan Antar Lembaga Kesekretariatan DPRD	3 paket	Kota Malang		932.050.000,00		
53	1	20	.20.0	15	26			Kota Malang	Terlaksananya Pelantikan PAW Anggota DPRD Kota Malana	217.870.000,00		

SKPD : INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
								lokasi	target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2					3	4	4	5	6	7	8	9
1	1	20	05	20		BELANJA LANGSUNG Program Peningkatan sistem pengawasan <i>internal</i> dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	29,87% (23 SKPD dari 77 SKPD)	Kota Malang	Meningkatnya pelayanan publik yang prima dan kinerja pemerintahan yang akuntabel	4.500.000.000,00 1.125.734.795,00			
1	1	20	05	20	01	Kegiatan Pelaksanaan pengawasan <i>internal</i> secara berkala	75 SKPD	Kota Malang	Tercapainya pengawasan yang berkualitas dan profesional	341.535.450,00			
2	1	20	05	20	07	Kegiatan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	41 dalam daerah 8 luar daerah	Kota Malang	Terciptanya koordinasi pengawasan yang sinergis & harmonis dengan APFP lain	241.186.650,00			

3	1	20	05	20	11	Kegiatan Penanganan kasus pengaduan/pemeriksaan khusus dan pengujian di lingkungan pemerintah daerah	6 kasus khusus dan 12 pengujian	Kota Malang	Penurunan pengaduan masyarakat dan penurunan kasus pelanggaran hukum oleh aparat Pemkot (Riksus)	75.935.900,00		
4	1	20	05	20	06	Kegiatan Tindaklanjut hasil temuan pengawasan	100%	Kota Malang	Tercapainya pengawasan yang berkualitas dan profesional	30.172.545,00		
5	1	20	05	20	12	Kegiatan Monitoring PAD	13 SKPD	Kota Malang	Terpantaunya PAD dari SKPD penghasil	24.586.700,00		
6	1	20	05	20	13	Kegiatan Monitoring kegiatan fisik SKPD	30 kegiatan	Kota Malang	Terpantaunya proyek yang dilaksanakan oleh Pemda	51.066.500,00		
7	1	20	05	20	14	Kegiatan Review Laporan Keuangan Daerah	24 SKPD	Kota Malang	Terlaksananya laporan pertanggungjawaban keuangan daerah	28.065.600,00		
8	1	20	05	20	15	Kegiatan Evaluasi LAKIP SKPD	56 SKPD	Kota Malang	Tercapainya penyusunan LAKIP SKPD Kota Malang	26.338.350,00		
9	1	20	05	20	16	Kegiatan Review atas kinerja instansi pemerintah	24 SKPD	Kota Malang	terukurnya perkembangan keberhasilan kinerja SKPD per semester	6.847.100,00		
10	1	20	05	20	18	Pencanangan Zona Integritas pada Pemerintah Kota Malang	100%	Kota Malang	Terlaksananya pencanangan Zona Integritas pada Pemerintah Kota Malang	200.000.000,00		
11	1	20	05	20	19	Pemantauan Tindak Lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)	4 kali	Kota Malang	Terlaksananya Sidang majelis Pertimbangan TP-TGR	100.000.000,00		
II	1	20	05	06		Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan	100%	Kota Malang	Meningkatnya profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan	65.777.050,00		
12	1	20	05	06	02	Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran	1 dokumen	Kota Malang	Tersusunnya administrasi keuangan SKPD yang tertib	45.905.100,00		

13	1	20	05	06	05	Kegiatan Penyusunan Rencana Kegiatan & Anggaran	1 dokumen/27 kegiatan	Kota Malang	Tesusunnya dokumen RKA SKPD	4.871.950,00		
14	1	20	05	06		Kegiatan Penyusunan LAKIP SKPD	1 dokumen	Kota Malang	Tesusunnya LAKIP SKPD	5.000.000,00		
15	1	20	05	06		Kegiatan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan	1 dokumen	Kota Malang	Tesusunnya dokumen Ringkasan hasil Pengawasan	5.000.000,00		
16	1	20	05	06		Kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	1 dokumen	Kota Malang	Tesusunnya dokumen hasil survey kepuasan masvarakav	5.000.000,00		
III	1	20	05	21		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa & Anaratur Pengawasan	75% (6/8)	Kota Malang	Meningkatnya profesionalitas SDM APIP	225.847.950,00		
17	1	20	05	21	01	Kegiatan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa & aparatur pengawasan	6 kegiatan	Kota Malang	Terlaksananya pelatihan bagi tenaga pemeriksa & aparatur pengawasan	125.847.950,00		
18	1	20	05	21	02	Kegiatan Optimalisasi pengawasan dan peningkatan kapabilitas APIP	12 kali	Kota Malang	Terlaksananya kegiatan peningkatan wawasan APIP	100.000.000,00		
IV	1	20	05	02		Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	100%	Kota Malang	Meningkatnya profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan	2.882.127.330,00		
19	1	20	05	02	26	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung/kantor	6 unit	Kota Malang	terawatnya perlengkapan kantor	2.475.000,00		
20	1	20	05	02	28	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor	30 item	Kota Malang	terawatnya peralatan gedung kantor	17.160.000,00		
21	1	20	05	02	42	Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	943 m ²	Kota Malang	Terlaksananya perluasan gedung kantor	2.257.362.330,00		
22	1	20	05	02	42	<i>Detail Engineering Drawing (DED)</i>		Kota Malang	Tersedianya Rancangan Bangunan Gedung Kantor			
23	1	20	05	02	24	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	6 unit roda 4 4 unit roda 2	Kota Malang	terpeliharanya kendaraan dinas	190.930.000,00		
24	1	20	05	02	05	Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional	2 unit mobil station wagon	Kota Malang	tercukupinya kebutuhan kendaraan dinas	414.200.000,00		

1	2			3	4	4	5	6	7	8	9
				BELANJA LANGSUNG				6.695.520.000,00			
I	1.20	06	01	Program Pelayanan Administrasi				660.032.000,00			
				Perkantoran							
1	1.20	06	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000 surat	Kota Malang	Terpenuhinya administrasi surat	12.556.000,00		
2	1.20	06	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 % (tiap tahun)	Kota Malang	Terpenuhinya administrasi telekomunikasi	24.000.000,00		
3	1.20	06	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 % (tiap tahun)	Kota Malang	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.500.000,00		
4	1.20	06	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100 % (tiap tahun)	Kota Malang	Administrasi Keuangan	55.000.000,00		
5	1.20	06	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100 % (tiap tahun)	Kota Malang	Tercapainya Kebersihan Kantor	8.000.000,00		
6	1.20	06	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100 % (tiap tahun)	Kota Malang	Terpenuhinya alat tulis kantor	97.950.000,00		
7	1.20	06	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100 % (tiap tahun)	Kota Malang	Terpenuhinya barang cetakan	98.650.000,00		
8	1.20	06	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25 unit	Kota Malang	Tersedianya perlengkapan kantor	160.700.000,00		
9	1.20	06	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 % (tiap tahun)	Kota Malang	Tersedianya bahan bacaan	5.200.000,00		
10	1.20	06	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	100 % (tiap tahun)	Kota Malang	Terpenuhinya makan minum kantor	12.432.000,00		
11	1.20	06	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	62 kali	Kota Malang	Terpenuhinya konsultasi dan koordinasi yang kontinue	131.044.000,00		
12	1.20	06	01		Inventarisasi Aset BKD	100%	Kota Malang	terhitungnya jumlah aset bkd	15.000.000,00		
13	1.20	06	01		Pawai Pembangunan	100%	Kota Malang	tersedianya kendaraan dinas	25.000.000,00		
II	1.20	06	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				195.158.000,00			
14	1.20	06	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	100%	Kota Malang	Terpeliharanya gedung	20.000.000,00		
15	1.20	06	02	24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2 mobil , 11 moto	Kota Malang	Terpeliharanya mobil dan motor dinas	135.408.000,00		
16	1.20	06	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebel	60 buah	Kota Malang	Terpeliharanya meja & kursi kantor	9.750.000,00		

17	1.20	06	02	Pemeliharaan Fingerprint	116 buah	Kota Malang	fingerprint Pemkot Malang	30.000.000,00		
III	1.20	06	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				101.500.000,00		
18	1.20	06	03	06	Pengadaan Tanda Pengenal PNS	2000 buah	Kota Malang	Terpenuhinya Tanda Pengenal PNS	71.500.000,00	
19	1.20	06	03	12	Penyelesaian Laporan LHKPN di Lingkungan Pemkot Malang	100%	Kota Malang	Tercapainya Laporan LHKPN	30.000.000,00	
IV	1.20	06	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Aparatur				48.890.000,00		
20	1.20	06	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	5 eks	Kota Malang	Tercapainya akuntabilitas kinerja instansi	11.500.000,00	
21	1.20	06	06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	4 eks	Kota Malang	Tercapainya akuntabilitas keuangan semesteran	8.650.000,00	
22	1.20	06	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4 eks	Kota Malang	Tercapainya akuntabilitas keuangan akhir tahun	10.740.000,00	
23	1.20	06	06	05	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	RKA = 4 buku DPA = 8 buku Renja = 3 buku DPPA = 8 buku	Kota Malang	Tercapainya penyusunan RKA, DPA, Renja	11.000.000,00	
24	1.20	06	06	11	Penyusunan IKM	IKM : 6 bk	Kota Malang	Tersusunnya IKM	7.000.000,00	
V	1.20	06	39	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				3.830.840.000,00		
25	1.20	06	39	01	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD	73 org	Kota Malang	PNS yang belum mengikuti prajabatan	1.314.000.000,00	
26	1.20	06	39	04	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional PNS Daerah	25 org	Kota Malang	PNS yang terkait tugas fungsionalnya	200.000.000,00	
27	1.20	06	39	06	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV	40 orang	Kota Malang	PNS yang belum mengikuti Diklatpim IV	500.000.000,00	
28	1.20	06	39	07	Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Pangkat Penyesuaian Ijazah Ujian Dinas Tk.1 dan Tk.II	150 orang	Kota Malang	PNS yang perlu mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan ujian dinas	105.000.000,00	
29	1.20	06	39	09	Pelaksanaan Senam Rutin bagi PNS	571 orang	Kota Malang	Terpenuhinya kesehatan aparatur	3.840.000,00	

30	1.20	06	39	11	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III	5 org	Kota Malang	PNS yang belum mengikuti Diklatpim III	150.000.000,00		
31	1.20	06	39	10	Bimbingan teknis pengadaan barang jasa pemerintah	40 orang	Kota Malang	PNS yang belum mempunyai sertifikat pengadaan barang jasa	155.000.000,00		
32	1.20	06	39	16	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II	6 orang	Kota Malang	PNS yang belum mengikuti Diklatpim II	252.000.000,00		
33	1.20	06	39		Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis AcruaI	220 orang	Kota Malang	Tercapainya peningkatan jumlah PNS yang mendapat bimtek	226.000.000,00		
34	1.20	06	39	23	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	20 orang	Kota Malang	PNS yang terkait tugas dan fungsinya Kelapa SKPD	150.000.000,00		
35	1.20	06	39	28	Peningkatan Dan Pengembangan Sinergi Aparatur Di Lingkungan Pemkot Malang	53 org	Kota Malang		700.000.000,00		
36	1.20	06	39		Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Petugas Pemadam Kebakaran	5 orang	Kota Malang	Jumlah Peserta diklat	75.000.000,00		
VI	1.20	06	40		Program Pembinaan dan Penguasaan Aparatur				1.859.100.000,00		
37	1.20	06	40	02	Seleksi Penerimaan CPNS	100 org	Kota Malang	Jumlah CPNS yang direkrut dan ditempatkan sesuai formasi jabatan	397.000.000,00		
38	1.20	06	40	08	Pemberian Penghargaan Satya Lencana Baqi PNS	150 orang	Kota Malang	PNS yang berprestasi	10.100.000,00		
39	1.20	06	40	12	Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Praja IPDN	25 org	Kota Malang	Calon Praja IPDN	26.300.000,00		
40	1.20	06	40	17	Analisa Kebutuhan Sumber Daya Aparatur	3 jenis 20 buku		Data formasi kebutuhan SDA PNS Pemkot Malang	60.000.000,00		
41	1.20	06	40	18	Pelaksanaan Pertimbangan Mutasi, Jabatan dan Pangkat	300 org			530.000.000,00		
42	1.20	06	40	20	Pengangkatan CPNS menjadi PNS	73 org	Kota Malang	Diangkatnya CPNS menjadi PNS	50.000.000,00		
43	1.20	06	40	23	Penyusunan Data Informasi Kepegawaian Daerah	8 Jenis Buku	Kota Malang	Data Informasi Kepegawaian	70.000.000,00		
44	1.20	06	40	24	Penyelesaian Administrasi Identitas Pegawai	737 orang	Kota Malang	PNS yang belum memiliki Karis,KarsuKarpeg,T asben dan pensiun PNS Pemkot Malang	80.000.000,00		
45	1.20	06	40	25	Pelaksanaan Pembinaan Kedisiplinan Pegawai	9 kasus	Kota Malang		47.300.000,00		

46	1.20	06	40	29	Penataan Administrasi Kepegawaian	11933 berkas	Kota Malang	Tersusunnya file/berkas PNS sesuai dengan NIP Baru (18 Dikit)	75.000.000,00		
47	1.20	06	40	30	Pembinaan dan Pelatihan Pasukan Upacara PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Malang	4 kali	Kota Malang	PNS Pemkot Malang	36.400.000,00		
48	1.20	06	40	39	Pembekalan dan Penyerahan SK PNS	73 org	Kota Malang	Calon PNS	30.000.000,00		
49	1.20	06	40	42	Penilaian, Penetapan dan penyesuaian Angka Kredit	425 org	Kota Malang	Pejabat Fungsional	40.000.000,00		
50	1.20	06	40	48	Proses Kenaikan Pangkat	1544 org	Kota Malang	Proses Kenaikan Pangkat Lebih efektif dan terkoordinir	170.000.000,00		
51	1.20	06	40	50	Pengembangan Sistem Pelayanan Administrasi dan Informasi Kepegawaian Versi WEB	100%	Kota Malang	Pembangunan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian	75.000.000,00		
52	1.20	06	40		Penetapan Peraturan Walikota Tentang Jabatan Fungsional Tertentu	100%	Kota Malang	Tercapainya jabatan fungsional sesuai formasi	82.000.000,00		
53	1.20	06	40		Penilaian Pejabat Struktural	179 org	Kota Malang	Pejabat Eselon	55.000.000,00		
54	1.20	06	40		Asistensi SKP	200 org	Kota Malang	Terciptanya disiplin PNS	25.000.000,00		

SKPD : BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				lokasi	target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
1	1.2 0.0 7	01	BELANJA LANGSUNG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			2.797.776.000,00 879.732.900,00			

1	1.2 0.0 7	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya pelayanan administrasi yang optimal	BP2T	2339	36.390.000,00		
2	1.2 0.0 7	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Tercapainya kelancaran dalam melaksanakan tugas-tugas BP2T	BP2T	2 Mbps	68.000.000,00		
3	1.2 0.0 7	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terwujudnya kelancaran administrasi keuangan BP2T	BP2T	14 org	154.000.000,00		
4	1.2 0.0 7	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih dan rapi	BP2T	35 jenis	45.000.000,00		
5	1.2 0.0 7	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kelancaran tugas kantor	BP2T	85 jenis	109.436.800,00		
6	1.2 0.0 7	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terwujudnya kelancaran administrasi kantor	BP2T		163.455.600,00		
7	1.2 0.0 7	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tercapainya kelancaran administrasi kantor	BP2T		7.700.000,00		
8	1.2 0.0 7	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya kelancaran dalam melaksanakan tugas-tugas BP2T	BP2T	2 unit	80.000.000,00		
9	1.2 0.0 7	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Tersedianya bahan bacaan	BP2T	6 jenis	65.040.000,00		
10	1.2 0.0 7	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan rapat dan tamu	BP2T	1452 dos	22.440.000,00		

11	1.2 0.0 7	01	18	Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Meningkatnya kualitas aparatur dan mekanisme perijinan	BP2T	43 OK	100.137.500,00			
12	1.2 0.0 7	01	20	Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa	Terpenuhinya Pengadaan Barang dan jasa	BP2T	19	28.133.000,00			
II	1.2 0.0 7	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						293.234.000,00		
13	1.2 0.0 7	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	BP2T	100%	199.450.000,00			
14	1.2 0.0 7	02	28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	BP2T	3 jenis	24.300.000,00			
15	1.2 0.0 7	02	49	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pengelolaan & Penyimpan Arsip	Terpeliharanya sarana pengarsipan	BP2T	31 pak, 24 buah	69.484.000,00			
III	1.2 0.0 7	3	PROGRAM PENINGKATAN DISPLIN APARATUR						21.230.000,00		
16	1.2 0.0 7	3	05	Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu		BP2T	14 stel	21.230.000,00			
IV	1.2 0.0 7	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						55.000.000,00		
17	1.2 0.0 7	05	36	Partisipasi keikutsertaan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur di BP2T	BP2T	5 kali	55.000.000,00			

V	1.2	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				81.950.000,00	
	0.0	7							
18	1.2	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya LAKIP Tahun 2014	BP2T	15 buku	9.350.000,00	
	0.0	7							
19	1.2	06	05	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan DPA	Tersedianya RKA Tahun 2016 dan DPA Tahun 2015	BP2T	15 buku	11.550.000,00	
	0.0	7							
20	1.2	06	07	Penatausahaan Keuangan	Tersedianya laporan keuangan BP2T	BP2T		44.000.000,00	
	0.0	7							
21	1.2	06	11	Penyusunan Pelaporan Index Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tercapainya kepuasan masyarakat	BP2T	20 buku	10.450.000,00	
	0.0	7							
22	1.2	6	23	Penyusunan Kerangka Kerja Logis		BP2T	10 buku	6.600.000,00	
	0.0	7							
VI	1.2	17		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		BP2T		175.263.900,00	
	0.0	7							
23	1.2	17	31	Penyediaan Jasa Administrasi Ijin Reklame Insidentil pada hari libur (sabtu) di BP2T	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam mengurus ijin	BP2T	70%	44.979.000,00	
	0.0	7							
24	1.2	17	40	Intensifikasi / Penagihan Retribusi Ijin - ijin di BP2T	Terbayarnya retribusi ijin yang belum diambil	BP2T	399 kali	40.216.000,00	
	0.0	7							
25	1.2	17	77	Monitoring dan Evaluasi Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Pengusaha Pariwisata yang belum memiliki ijin	BP2T		42.477.400,00	
	0.0	7							
26	1.2	17	93	Monitoring Ijin Keramaian	Masyarakat yang melaksanakan ijin keramaian	BP2T	125 kali	47.591.500,00	
	0.0	7							

34	1.2 0.0 7	28		20	Peninjauan Lapangan Kelayakan Permohonan dan Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	PT/CV/Koperasi yang mengajukan ijin usaha jasa konstruksi (IUJK)	BP2T	20 kali	12.000.000,00		
35	1.2 0.0 7	28		21	Pengelolaan Pelayanan Pengaduan	Penanganan Pengaduan	BP2T		63.350.000,00		
36	1.2 0.0 7	28		25	Bimbingan Teknis Etika Pelayan Publik	Petugas Front Office dan Back Office pada BP2T	BP2T	54 org	96.065.200,00		
37	1.2 0.0 7	28		32	Pemeliharaan SMM ISO 9001:2008 pada BP2T Kota Malang	Terwujudnya penerapan SMM melalui ISO 9001:2008 pada BP2T Kota Malang	BP2T	100%	110.000.000,00		
38	1.2 0.0 7	28		33	Penyusunan SP dan SOP	Penyelenggaraan pelayanan publik yang prima	BP2T		7.700.000,00		
39	1.2 0.0 7	28		38	Pendataan bangunan di Kota Malang	Terdatanya bangunan di Kota Malang	BP2T	90%	100.000.000,00		
40	1.2 0.0 7	28		39	Peninjauan Lokasi Kelayakan Permohonan IMB bagi Bangunan yang sudah berdiri		BP2T	75%	22.000.000,00		
41	1.2 0.0 7	28		40	Pawai Pembangunan	Terlaksananya Pawai Pembangunan	BP2T		25.000.000,00		
42	1.2 0.0 7	28		41	Pelayanan Mobil Keliling	Terlaksananya Pelayanan Online dengan mobil keliling	BP2T		53.000.000,00		
43	1.2 0.0 7	28		42	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Peningkatan kinerja	BP2T		300.000.000,00		

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
						Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	lokasi	target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	1	20	1.20	.01	Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya program pelayanan administrasi perkantoran						
1	1	20	1.20	01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselesaikannya administrasi perkantoran	Kota Malang	100%	194.683.000,00			
2	1	20	1.20	02.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya media komunikasi, informasi dan sosialisasi perpajakan daerah	Kota Malang	100%	952.800.000,00			
3	1	20	1.20	07.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	meningkatkan kinerja pengelola jasa administrasi keuangan	Kota Malang	100%	51.400.000,00			
4	1	20	1.20	08.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa dan peralatan kebersihan kantor	Kota Malang	100%	33.553.700,00			
5	1	20	1.20	10.01	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kota Malang	100%	75.823.000,00			
6	1	20	1.20	11.01	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Malang	100%	97.478.950,00			

7	1	20	1.20 .01	12. 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	Kota Malang	100%	17.796.050,00		
8	1	20	1.20 .01	13. 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Malang	100%	910.000.000,00		
9	1	20	1.20 .01	15. 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya sarana informasi	Kota Malang	100%	10.000.000,00		
10	1	20	1.20 .01	17. 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan/minuman untuk rapat dan tamu	Kota Malang	100%	150.000.000,00		
11	1	20	1.20 .01	18. 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah	Kota Malang	100%	200.000.000,00		
II	1	20	1.20 .02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Kota Malang	100%	1.748.920.000,00		
12	1	20	1.20 .02	24. 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Lancarnya kegiatan operasional	Kota Malang	100%	723.920.000,00		
13	1	20	1.20 .02	28. 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kota Malang	100%	75.000.000,00		
14	1	20	1.20 .02		Pembangunan gudang arsip Pajak Daerah	Terbangunnya gudang arsip	Kota Malang	100%	950.000.000,00		
III	1	20	1.20 .06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku	Kota Malang	100%	25.692.000,00		

15	1	20	1.20 .06	02. 06	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya dokumen pelaporan keuangan	Kota Malang	100%	25.692.000,00		
IV	1	20	1.20 .17		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terkelolanya keuangan daerah yang efektif dan efisien	Kota Malang	100%	10.931.853.300,00		
16	1	20	1.20 .17	26. 26	Penagihan dan pelaporan tunggakan pajak daerah (non PBB)	Penagihan atas tunggakan Pajak Daerah	Kota Malang	100%	563.865.500,00		
17	1	20	1.20 .17	29. 29	Intensifikasi penerimaan PBB	Realisasi penerimaan PBB	Kota Malang	100%	2.855.488.000,00		
18	1	20	1.20 .17	35. 35	Peningkatan pendapatan pajak daerah (non PBB)	Meningkatnya pendapatan Pajak Daerah (non PBB)	Kota Malang	100%	2.133.962.200,00		
19	1	20	1.20 .17	58. 58	Pengolahan data dan penagihan piutang PBB	Tersusunnya database tunggakan pajak daerah	Kota Malang	100%	650.456.000,00		
20	1	20	1.20 .17	60. 60	Proses penyelesaian keberatan dan penghapusan piutang Pajak Daerah	Pemrosesan keberatan pajak daerah dan penyelesaian penghapusan piutang Pajak Daerah	Kota Malang	100%	346.306.600,00		
21	1	20	1.20 .17	76. 76	Pemeriksaan pajak daerah Kota Malang	Validasi data wajib pajak	Kota Malang	100%	700.100.000,00		
22	1	20	1.20 .17	88. 88	Pengelolaan benda-benda berharga	Perforasi dan pencatatan benda-benda berharga	Kota Malang	100%	55.500.000,00		
23	1	20	1.20 .17	89. 89	Pembukuan dan pelaporan	Tersusunnya laporan pajak daerah	Kota Malang	100%	55.500.000,00		
24	1	20	1.20 .17	90. 90	Kajian administrasi pajak daerah	Kajian produk hukum tentang pajak daerah	Kota Malang	100%	198.425.000,00		
25	1	20	1.20 .17	105 .10 5	Kegiatan Sensus potensi wajib pajak daerah	Database wajib pajak daerah	Kota Malang	100%	650.000.000,00		

						BELANJA LANGSUNG					750.000.000,00			
I	1	02	21			Program Pengembangan Lingkungan Sehat		Kecamatan Klojen	70%		4.025.000,00			
1	1	02	21	.06		Kegiatan Pengembangan Program Kota Sehat	11	Kecamatan Klojen	Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan		4.025.000,00			
II	1	06	21			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Kecamatan Klojen	80%		14.507.000,00			
						Jumlah publikasi hasil musrenbang kecamatan Prosentase tingkat kehadiran peserta Musrenbang Jumian Musrenbangca m yang memiliki tingkat partisipasi perempuan minimal 30%			2					
2	06	21	.03			Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang			100%		14.507.000,00			
III	1	19	16			Program Pemeliharaan kantrabtibmas dan pencegahan tindak kriminal		Kecamatan Klojen	100%		51.625.000,00			
						Presentase partisipasi pemilih dalam Pemilu			98,84%					
						Presentase partisipasi pemilih dalam Pilpres			—					
						Rasio pos kamling per jumlah 100 KK			0,847					
						Prosentase keaktifan RW dalam mengadakan siskamling								

						Rasio petugas Linmas (1 RT 1 Linmas pada 2014)						
3	1	19	16	.07	Kegiatan Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Wilayah Kecamatan		0,011					51.625.000,00
IV	1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Kecamatan Klojen	100%		250.697.250,00
						Adanya SOP pelayanan informasi publik		Ada				
						Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran		100%				
4	1	20	01	.01	Kegiatan Jasa surat menyurat							4.912.000,00
5	1	20	01	.02	Kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik							55.900.000,00
6	1	20	01	.07	Kegiatan jasa administrasi keuangan							34.362.000,00
7	1	20	01	.08	Kegiatan jasa kebersihan kantor							40.415.250,00
8	1	20	01	.10	Kegiatan alat tulis kantor							14.733.000,00
9	1	20	01	.11	Kegiatan barang cetakan dan penggandaan							6.450.000,00
10	1	20	01	.12	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor							3.245.000,00
11	1	20	01	.15	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan undang-undangan							4.080.000,00
12	1	20	01	.17	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman							20.200.000,00
13	1	20	01	.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah							15.000.000,00
14					Kegiatan Pawai pembangunan							25.000.000,00
15	1	20	01	.19	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor							26.400.000,00
V	1	20	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				Kecamatan Klojen	100%		7.760.000,00
16	1	20	5	11	Kegiatan Pelaksanaan Senam Rutin Bagi PNS	Persentase peningkatan ketrampilan dan profesionalisme aparatur						7.760.000,00

VI	1	20	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			100%	6.882.000,00		
						Persentase pelaksanaan administrasi capaian kinerja keuangan		100%			
						Adanya sistem evaluasi kinerja pemerintah daerah		Ada			
17	1	20	06	.01	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				1.265.000,00		
18	1	20	06	.02	Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran				2.260.000,00		
19	1	20	06	.05	Kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran				1.105.000,00		
20	1	20	06	.11	Kegiatan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat				1.240.000,00		
21	1	20	06	.24	Kegiatan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan				1.012.000,00		
VII	1	20	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			100%	297.818.250,00		
						Persentase pelaksanaan sarana dan prasarana aparatur		100%			
22	1	20	02	.07	Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor				34.260.400,00		
23	1	20	02	.09	Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor				41.230.000,00		
24	1	20	02	.22	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				90.146.250,00		
25	1	20	02	.24	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil operasional/dinas				53.900.000,00		
26	1	20	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional				78.281.600,00		
VIII	1	22	17		Program peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan		Kecamatan Klojen	85%	57.670.000,00		

						Jumlah organisasi perempuan Persentase kegiatan organisasi perempuan yang difasilitasi cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di Tingkat kecamatan					
27	1	22	17	.05	Monitoring Stimulan Pembangunan					1	32.160.000,00
28	1	22	17	.13	Kegiatan Stimulan PKK Kecamatan					1	14.010.000,00
29					Kegiatan Stimulan Karang Werda Kecamatan						2.000.000,00
30	1	22	17	.20	Kegiatan Stimulan Kader Lingkungan Kecamatan						5.000.000,00
31	1	22	17	.22	Kegiatan Penunjang Kegiatan Forum Komunikasi Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan FKA-LPMK)						4.500.000,00
IX	1	22	20		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan						49.363.500,00
						Jumlah lokasi monitoring hasil pembangunan kelurahan	Kecamatan K			80%	
						Pembinaan				11	
						Keamanan dan ketertiban Masyarakat				12	
32	1	22	20	.49	Pembinaan keamanan dan Ketertiban Masyarakat						24.363.500,00
33	2	1	22	20	Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat tingkat kecamatan						25.000.000,00
X	1	23	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah		Kecamatan Klojen			100%	9.652.000,00

34						Penyusunan Buku Profil Kecamatan	Adanya sistem pengelolaan data dan arsip daerah yang bisa diakses oleh masyarakat	Ada			2.622.000,00		
35	1	23	15	.08		Kegiatan Pengolahan dan Updating database monografi kecamatan dan Pemberdayaan Administrasi Kecamatan					7.030.000,00		

SKPD : KECAMATAN BLIMBING

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
								lokasi	target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2					3	4	4	5	6	7	8	9
1	1	20	10	01		BELANJA LANGSUNG				750.000.000,00			
						Pelayanan Administrasi Perkantoran							
1	1	20	10	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya Kelancaran Kegiatan Surat-Menyurat	Kec. Blimbing	100	33.000.000,00	-		
2	1	20	10	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Rekening Listrik, telepon dan Air	Kec. Blimbing	100	54.000.000,00	tambah daya		
3	1	20	10	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya Kondisi Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang layak Pakai	Kec. Blimbing	100	5.500.000,00	-		

4	1	20	10	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan administrasi keuangan	Kec. Blimbing	100	33.000.000,00		
5	1	20	10	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya Kebersihan Kantor	Kec. Blimbing	100	30.000.000,00		
6	1	20	10	01	10	Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor (ATK)	Tersedianya alat tulis kantor yang mencukupi	Kec. Blimbing	100	16.500.000,00		
7	1	20	10	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	terpenuhinya barang cetakan untuk kantor	Kec. Blimbing	100	7.000.000,00		
8	1	20	10	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya alat listrik dan penerangan	Kec. Blimbing	100	3.000.000,00		
9	1	20	10	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerUndang-undangan	Meningkatnya wawasan Aparat	Kec. Blimbing	100	12.000.000,00		
10	1	20	10	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terwujudnya Kelancaran Kegiatan Harian, Rapat maupun Tamu	Kec. Blimbing	100	25.000.000,00		
11						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terwujudnya Kelancaran Kegiatan Rapat keluar daerah	Kec. Blimbing	100	20.000.000,00		
12	1	20	10	01	19	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Keamanan kantor sebagaimana mestinya		100	30.000.000,00		
13						Peringatan Hari hari Besar Nasional dan Pawai Pembangunan	terselenggaranya Publikasi hasil pembangunan	Kec. Blimbing	100	25.000.000,00		
II						Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik						
14						Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan/ PATEN)	Terwujutnya Pelayanan Terpadu di Kecamatan	Kec. Blimbing	100	30.000.000,00		
III						Program Pengembangan data/Informasi/statistik daerah						

15						Penyusunan Buku Profil Kecamatan	Tersusunnya Buku Profile Kecamatan	Kec. Blimbing	100	5.000.000,00		
IV	1	20	10	02		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
16	1	20	10	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor yang memadai	Kec. Blimbing	100	25.000.000,00	-	
17	1	20	10	02	07	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor yang memadai	Kec. Blimbing	100	50.000.000,00		
18	1	20	10	02	22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terwujudnya Kondisi Gedung Kantor yang baik	Kec. Blimbing	100	111.200.000,00	-	
19	1	20	10	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terwujudnya Kendaraan Dinas/Operasional yang Layak Pakai	Kec. Blimbing	100	40.000.000,00	-	
V	1	20	10	06		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan		Kec. Blimbing				
20	1	20	10	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Pemerintahan	Kec. Blimbing	100	3.000.000,00		
21	1	20	10	06	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Pemerintahan	Kec. Blimbing	100	3.000.000,00		
22	1	20	10	06	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	meningkatnya Kemampuan Administrasi Keuangan	Kec. Blimbing	100	3.000.000,00		
VI	1	20	10	21		Perencanaan Pembangunan Daerah						

23	1	20	10	21	14	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Penyusunan Prioritas Kegiatan Pembangunan Wilayah Kecamatan Rlimbinn	Kec. Blimbing	100	22.000.000,00	
VII	1	20	10	17		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membanqun Kelurahan					
24	1	20	10	17	13	Stimulan Kegiatan PKK Kecamatan Blimbing	terlaksananya Kegiatan PKK Kecamatan	Kec. Blimbing	100	20.000.000,00	1 kali pembinaan , monitoring 12 bulan
25	1	20	10	17	22	Penunjang Kegiatan Forum Komunikasi Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masvarakat Kelurahan (FKA-LPMK)	terlaksananya Kegiatan FKA-LPMK	Kec. Blimbing	100	3.500.000,00	
26	1	20	10	17	26	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Tingkat Kecamatan	terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan	Kec. Blimbing	100	45.000.000,00	lansia, pemuda, kota sehat, keluarga prasejahtera, kader linakunaan
VII	1	20	10	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masvarakat Kelurahan					
27	1	20	10	15		Penunjang program pemberdayaan Masyarakat kelurahan	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kelurahan se Kecamatan Rlimbinn	Kec. Blimbing	100	20.000.000,00	
28	1	20	10	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah	Kec. Blimbing	100	10.000.000,00	
29	1	20	10	15		Desiminasi Peningkatan Tertib Administrasi RT/RW	Meningkatnya Tertib Administrasi di RT /RW	Kec. Blimbing	100	23.000.000,00	Pembinaan RT/RW se Kec Blimbing
VIII	1	20	10	16		Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal					

30	1	20	10	16	07	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Blimbing	Terciptanya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan Rlimhnn	Kec. Blimbing	100	42.300.000,00	Patroli wilayah & rapat koordinasi,		
----	---	----	----	----	----	--	---	---------------	-----	---------------	-------------------------------------	--	--

SKPD : KECAMATAN KEDUNGKANDANG

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							lokasi	target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2				3	4	4	5	6	7	8	9
A	1	06			BELANJA LANGSUNG				750.000.000,00			
I	1	06	21		Perencanaan Pembangunan				12.981.100,00			
1	1	06	21	14	Program perencanaan pembangunan daerah				12.981.100,00			
					Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah publikasi hasil Musrenbang Kecamatan	Kec. Kedungkandang	160 orang	12.981.100,00	Sangat diperlukan untuk mempercepat cabaian prooram		
						Jumlah Musrenbangca m yg memiliki tingkat kehadiran di atas 80%						
						Jumlah Musrenbangca m yang memiliki tingkat partisipasi perempuan minimal 30%						
B	1	19			Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri				80.021.700,00			

II	1	19	16		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal				80.021.700,00	
2	1	19	16	07	Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah kecamatan	Prosentase keaktifan koordinasi Muspika (Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan) Prosentase pemilih dalam pemilu Prosentase pemilih dalam pilpres Prosentase pemilih dalam pilukada Rasio pos kaming per iumlah 100 KK Prosentase keaktifan RW dlm mengadakan siskamlina Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masvarakat. Rasio petugas Linmas (1 RT 1 Linmas pada 2015)	Kec. Kedungkandang	100%	80.021.700,00	Sangat dibutuhkan kerja sama untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan serta ketentraman wilayah.
C	1	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah .Perangkat Daerah					

III	1	20	01		Program pelayanan administrasi perkantoran	Pelaksanaan administrasi perkantoran.	Kec. Kedungkan dang	100%	344.356.100,00	Sangat diperlukan untuk tercapainya program pelayanan administrasi
3	1	20	01	.01	Penyediaan jasa surat menyurat				15.318.000,00	
4	1	20	01	.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				58.700.000,00	Tambah daya listrik 3 fass
5	1	20	01	.03	Penyediaan jasa dan peralatan dan perlengkapan kantor				7.590.000,00	
6	1	20	01	.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				43.573.200,00	
7	1	20	01	.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor non PNS 3 orang @ Rp. 1.500.000,00				54.000.000,00	Sesuai JURNAL II SSH PEMDA KOTA MALANG TAHUN 2014.(BELUM TERMASUK PA.IAK)
8	1	20	01	.10	Penyediaan alat tulis kantor				13.762.100,00	
9	1	20	01	.11	Penyediaan barang cetakan dan penqandaan				10.000.000,00	
10	1	20	01	.12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor				4.818.000,00	
11	1	20	01	.15	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan				2.494.800,00	
12	1	20	01	.17	Penyediaan makanan dan minuman				9.900.000,00	
13	1	20	01	.18	Perjalanan dinas dalam daerah				5.000.000,00	
14	1	20	01	.18	Perjalanan dinas luar daerah				15.000.000,00	
15	1	20	01	.19	Penyediaan jasa pengaman kantor non PNS 3 orang @ Rp. 1.650.000,00				59.400.000,00	Sesuai JURNAL II SSH PEMDA KOTA MALANG TAHUN 2014.(BELUM TERMASUK PA.IAK)
16	1	20	01	.20	Penyediaan jasa pengemudi (sopir) non PNS 1 orang. 1.650.000,00				19.800.000,00	Sesuai JURNAL II SSH PEMDA KOTA MALANG TAHUN 2014.(BELUM TERMASUK PA.IAK)

17					Penyediaan sewa kendaraan hias untuk kegiatan pawai Kota Malang				25.000.000,00	Sangat diperlukan untuk mempercepat capaian program kegiatan Pemerintah Kota Malang
IV	1	20	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pelaksanaan sarana dan prasarana aparatur	Kec. Kedungkan dang	100%	172.840.800,00	Sangat diperlukan untuk tercapainya program sarana dan prasarana aparatur
18	1	20	02	.09	Pengadaan peralatan gedung kantor				71.292.100,00	
19	1	20	02	.22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor				40.036.700,00	
20	1	20	02	.24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional				61.512.000,00	
V	1	20	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA /	Kec. Kedungkan dang	100%	51.642.300,00	Sangat diperlukan untuk mempercepat capaian program dan kegiatan
21	1	20	06	.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD				3.988.050,00	
22	1	20	06	.02	Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran I dan II				18.081.800,00	
23	1	20	06	.05	Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran				8.050.900,00	
24	1	20	06	.06	Kegiatan penyusunan Rencana Kerja				6.000.000,00	
25	1	20	06	.07	Kegiatan penyusunan SOP dan SP				5.000.000,00	
26	1	20	06	.08	Kegiatan penyusunan KELOG LKPJ dan LPPD				3.000.000,00	
27	1	20	06	.09	Kegiatan penyusunan IKM				3.000.000,00	
28	1	20	06	27	Kegiatan penyusunan buku PROFIL				4.521.550,00	

D	1	22				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah lembaga yang membantu pelaksanaan kesejahteraan sosial	Kec. Kedungkan dang	100%	53.478.500,00	Sangat diperlukan untuk mempercepat program dan kegiatan partisipasi masyarakat dalam
VI	1	22	17			Program Peningkatan Partisipasi Masvarakat Dalam Pembinaan				53.478.500,00	
29	1	22	17	.05		Monitoring stimulan pembangunan				30.178.500,00	
30	1	22	17	.13		Stimulan kegiatan PKK Kecamatan				20.000.000,00	
31	1	22	17	.22		Penunjang Kegiatan Forum Komunikasi Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masvarakat Kelurahan (FKA-LPMK)				3.300.000,00	
E	1	23				Statistik	Adanya sistem pengelolaan data dan arsip daerah yang bisa diakses oleh masyarakat	Kec. Kedungkan dang	100%	5.870.700,00	Sangat diperlukan untuk mempercepat mengetahui sejauh mana data program dan kegiatan di wilayah
VII	1	23	15			Program pengembangan data / informasi / statistik daerah				5.870.700,00	
32	1	23	15	.08		Pengolahan dan updating database monografi Kecamatan dan Pemberdayaan Administrasi Kecamatan				5.870.700,00	
F	5	1	5			Belanja bantuan sosial				28.808.800,00	
VIII	5	1	5	.01		Belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan	Jumlah kegiatan yang membantu tercapainya pelaksanaan kegiatan sosial	Kec. Kedungkan dang	100%	28.808.800,00	Sangat diperlukan tercapainya program kegiatan pelaksanaan sosial di wilayah Kecamatan
33						Penunjang kegiatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia				2.000.000,00	
34						Penunjang kegiatan HUT Kota Malang				2.000.000,00	

35					Penunjang kegiatan rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan				3.000.000,00		
36					Penunjang kegiatan Karang Taruna Kecamatan				2.500.000,00		
37					Penunjang kegiatan Karang Werdha Kecamatan				2.708.800,00		
38					Penunjang kegiatan Kader Lingkungan				2.500.000,00		
39					Penunjang kegiatan Kecamatan Layak Anak				5.000.000,00		
40					Penunjang kegiatan Kecamatan Sehat				2.500.000,00		
41					Penunjang kegiatan PRAMUKA Kecamatan				2.500.000,00		
42					Penunjang kegiatan senam jasmani				2.400.000,00		
43					Penunjang kegiatan Halal Bi Halal Hari Raya Idul Fitri				1.700.000,00		

SKPD : KECAMATAN LOWOKWARU

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
						Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	lokasi	target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2				3	4	4	5	6	7	8	9
1	1	06	21		BELANJA LANGSUNG Program perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kec. Lowokwaru		750.000.000,00			
1	1	06	21	14.14	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan		Kec. Lowokwaru	100	16.260.000,00			

II	1	19	16		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kec. Lowokwaru						
2	1	19	16	07.07	Peningkatan keamanan dan ketertiban Wilayah Kecamatan		Kec. Lowokwaru	100	90.112.000,00				
III	1	13	21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		Kec. Lowokwaru						
3	1	13	21	42.42	Pendataan lembaga sosial kemasyarakatan		Kec. Lowokwaru	1	5.000.000,00				
IV	1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Kec. Lowokwaru						
4	1	20	01	01.01	Penyediaan jasa surat menyurat		Kec. Lowokwaru	100	24.890.000,00				
5	1	20	01	02.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kec. Lowokwaru	100	23.700.000,00				
6	1	20	01	03.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Kec. Lowokwaru	100	13.570.000,00				
7	1	20	01	07.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Kec. Lowokwaru	100	37.990.000,00				
8	1	20	01	08.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Kec. Lowokwaru	100	25.500.000,00				
9	1	20	01	10.10	Penyediaan alat tulis kantor		Kec. Lowokwaru	100	20.645.000,00				
10	1	20	01	11.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Kec. Lowokwaru	100	15.500.000,00				
11	1	20	01	12.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Kec. Lowokwaru	100	6.000.000,00				
12	1	20	01	15.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Kec. Lowokwaru	100	3.696.000,00				
13	1	20	01	17.17	Penyediaan makanan dan minuman		Kec. Lowokwaru	100	23.000.000,00				
14	1	20	01	18.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah		Kec. Lowokwaru	100	20.000.000,00				
15	1	20	01	19.19	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor		Kec. Lowokwaru	100	30.000.000,00				
16					Pawai pembangunan		Kec. Lowokwaru	100	25.000.000,00				

V	1	20	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana	Kec. Lowokwaru					
17	1	20	02	09.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Belayanan	Kec. Lowokwaru	100	53.966.000,00			
18	1	20	02	22.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Kec. Lowokwaru	100	6.000.000,00			
19	1	20	02	24.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Kec. Lowokwaru	100	63.768.000,00			
20	1	20	02	42	Rehabilitasi gedung kantor Kecamatan Lowokwaru		Kec. Lowokwaru	100	114.250.000,00			
VI	1	20	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya Data dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang akuntabel	Kec. Lowokwaru					
21	1	20	06	01.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Kec. Lowokwaru	100	3.500.000,00			
22					Penyusunan laporan keuangan Semester dan Akhir Tahun		Kec. Lowokwaru	100	14.158.000,00			
23	1	20	06	05.05	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran		Kec. Lowokwaru	100	4.500.000,00			
24	1	20	06	25.25	Penyusunan Rencana Kerja		Kec. Lowokwaru	100	5.000.000,00			
25	1	20	06	35.35	Penataan Arsip / Aset		Kec. Lowokwaru	100	7.600.000,00			
VII	1	20	28		Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kec. Lowokwaru					
26	1	20	28	23.23	Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan /PATEN)		Kec. Lowokwaru	100	7.000.000,00			

VIII	1	22	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kec. Lowokwaru					
27	1	22	17	13.13	Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan		Kec. Lowokwaru	100	10.000.000,00			
28					Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan		Kec. Lowokwaru	100	5.000.000,00			
29	1	22	17	19	Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat		Kec. Lowokwaru	100	3.000.000,00			
30	1	22	17	20.20	Fasilitasi Kegiatan Kader Lingkungan Kecamatan		Kec. Lowokwaru	100	3.000.000,00			
31	1	22	17	22.22	Penunjang Kegiatan Forum Komunikasi Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (FKA-LPMK)		Kec. Lowokwaru	100	3.000.000,00			
IX	1	22	20		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kec. Lowokwaru					
32	1	22	20	04.04	Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		Kec. Lowokwaru	100	51.395.000,00			
X	1	23	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Meningkatnya akurasi data dalam penyelenggaraan pemerintah	Kec. Lowokwaru					
33	1	23	15	08.08	Pengolahan monografi Kecamatan dan Pemberdayaan Administrasi Kecamatan		Kec. Lowokwaru	100	6.000.000,00			
34	1	23	15	27	Penyusunan Profil Kecamatan		Kec. Lowokwaru	100	8.000.000,00			

SKPD : KECAMATAN SUKUN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2015	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

5	1.2	1.2	01	03	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana kerja	Kecamatan Sukun	100	6.000.000,00		
6	1.2	1.2	01	07	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana kerja	Kecamatan Sukun	100	23.340.000,00		
7	1.2	1.2	01	08	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana kerja	Kecamatan Sukun	100	39.600.000,00		
8	1.2	1.2	01	10	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana kerja	Kecamatan Sukun	100	39.600.000,00		
9	1.2	1.2	01	11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana kerja	Kecamatan Sukun	100	3.500.000,00		
10	1.2	1.2	01	12	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana kerja	Kecamatan Sukun	100	13.200.000,00		
11	1.2	1.2	01	15	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana kerja	Kecamatan Sukun	100	21.140.000,00		
12	1.2	1.2	01	17	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana kerja	Kecamatan Sukun	100	17.791.000,00		
13	1.2	1.2	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana kerja	Kecamatan Sukun	100	20.000.000,00		
14	1.2	1.2	01	19	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana kerja	Kecamatan Sukun	100	25.000.000,00		
15	1.2	1.2	01		Kegiatan Pawai Pembangunan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pembangunan Nasional	Kecamatan Sukun	100	8.700.000,00		
IV	1.2	1.2	02		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				100.000.000,00		
15	1.2	1.2	02		Pembangunan penambahan gedung lokal	Luas Gedung yang akan dibangun	Kecamatan Sukun	20,8 x 3,3 m2	100.000.000,00		
V	1.2	1.2	03		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				18.461.500,00		

17	1.2 0	1.2 0.1 3	03	01	Pengembangan Monografi Kecamatan		Kecamatan Sukun	100	18.461.500,00		
VI	1.2 0	1.2 0.1 3	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				173.485.465,00		
18	1.2 0	1.2 0.1 3	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana kerja	Kecamatan Sukun	100	92.020.000,00		
19	1.2 0	1.2 0.1 3	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana kerja	Kecamatan Sukun	100	39.294.465,00		
20	1.2 0	1.2 0.1 3	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana kerja	Kecamatan Sukun	100	42.171.000,00		
VII	1.2 0	1.2 0.1 3	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				42.633.500,00		
21	1.2 0	1.2 0.1 3	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintah	Kecamatan Sukun	100	3.291.000,00		
22	1.2 0	1.2 0.1 3	06	01	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintah	Kecamatan Sukun	100	6.110.000,00		
23	1.2 0	1.2 0.1 3	06	02	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintah	Kecamatan Sukun	100	5.903.500,00		
24	1.2 0	1.2 0.1 3	06	04	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RENSTRA)	Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintah	Kecamatan Sukun	100	4.984.000,00		
25		1.2 0.1 3	06	04	Penyusunan Pelaporan Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintah	Kecamatan Sukun	100	4.650.000,00		
26		1.2 0.1 3	06	04	Penyusunan Rencana Kerja	Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintah	Kecamatan Sukun	100	2.685.000,00		

27	1.2 0	1.2 0.1 3	06	06	Penyusunan Buku Profil Kecamatan Sukun	Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintah	Kecamatan Sukun	100	8.540.000,00		
28		1.2 0.1 3	06	06	Penataan Arsip/aset	Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintah	Kecamatan Sukun	100	1.250.000,00		
29	1.2 0	1.2 0.1 3	06	06	PenyusunanStandart Operasional Prosedur (SOP)	Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintah	Kecamatan Sukun	100	5.220.000,00		
D	1.2 2	1.2 0.1 3			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
VIII	1.2 2	1.2 0.1 3	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan				42.625.000,00		
30	1.2 2	1.2 0.1 3	17	13	Stimulan Kegiatan PKK Kecamatan	Meningkatnya kualitas dan partisipasi masyarakat dalam	Kecamatan Sukun	100	25.000.000,00		
31	1.2 2	1.2 0.1 3	17	17	Stimulan Kegiatan Karang Wreda Kecamatan	nerencanaan Meningkatkan kualitas dan partisipasi masyarakat dalam	Kecamatan Sukun	100	3.000.000,00		
32	1.2 2	1.2 0.1 3	17	19	Stimulan Kegiatan Forum Kecamatan Sehat	nerencanaan Meningkatkan kualitas dan partisipasi masyarakat dalam	Kecamatan Sukun	100	2.625.000,00		
33	1.2 2	1.2 0.1 3	17	20	Stimulan Kegiatan Kader Lingkungan Kecamatan	nerencanaan Meningkatkan kualitas dan partisipasi masyarakat dalam	Kecamatan Sukun	100	3.000.000,00		
						nerencanaan					

34	1.2 2	1.2 0.1 3	17	21	Stimulan Kegiatan Kwartir Ranting Pramuka Kecamatan	Meningkatnya kualitas dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan	Kecamatan Sukun	100	3.000.000,00		
35	1.2 2	1.2 0.1 3	17		Stimulan Kegiatan Kota Layak Anak	Meningkatnya kualitas dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan	Kecamatan Sukun	100	3.000.000,00		
36	1.2 2	1.2 0.1 3	17	22	Penunjang Kegiatan Forum Komunikasi Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (FKA-LPMK)	Meningkatnya kualitas dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan	Kecamatan Sukun	100	3.000.000,00		
IX	1.2 2	1.2 0.1 3	20		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan				38.750.000,00		
37	1.2 2	1.2 0.1 3	20	4	Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Meningkatnya kualitas dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan	Kecamatan Sukun	100	38.750.000,00		

SKPD : SEKRETARIAT KORPRI

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				lokasi	target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		Belanja Langsung				550.000.000,00			

SKPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							lokasi	target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2				3	4	4	5	6	7	8	9
					BELANJA LANGSUNG				11.522.590.000,00			
1	1	20	01		PROGRAM Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.884.214.840,00			
1	1	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7350 surat	BPKAD	Jumlah surat	100.000.000,00			
2	1	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 lembar	BPKAD	Terbayarnya biaya bulanan	760.805.000,00			
3	1	20	01	04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10 ruangan / 16 jenis	BPKAD	Tersedianya alat kebersihan	50.000.000,00			
4	1	20	01	05	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	7 jenis alat	BPKAD	Tersedianya sarana prasarana	77.500.000,00			
5	1	20	01	06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	58 jenis	BPKAD	Tersedianya ATK	62.000.000,00			
6	1	20	01	07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 jenis	BPKAD	Tersedianya Cetakan	69.774.700,00			
7	1	20	01	08	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21 jenis	BPKAD	Tersedianya peralatan kantor	249.067.640,00			
8	1	20	01	09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	2 surat kabar	BPKAD	Tersedianya bahan bacaan	15.000.000,00			
9	1	20	01	10	Penyediaan Makanan dan Minuman	47 kali rapat, 420 tamu	BPKAD	Tersedianya makanan minuman	70.067.500,00			
10	1	20	01	11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	60 kali dalam daerah 24 kali luar daerah	BPKAD	Terwujudnya rapat koordinasi	339.400.000,00			
11	1	20	01	12	Operasional UPT Perkantoran Terpadu	1 paket	BPKAD	Lancarnya kegiatan operasional UPT	1.065.600.000,00			
12	1	20	01	xx	Pawai Kendaraan	12 bulan	BPKAD	Terlaksananya pawai kendaraan	25.000.000,00			

II	1	20	02		PROGRAM Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%			860.368.000,00
13	1	20	02	03	Pembangunan gedung kantor	1 dokumen	BPKAD	Dokumen Detail Engineering Design (DED)	90.000.000,00
14	1	20	02	19	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pelayanan terpadu	1 paket	BPKAD	Terpeliharanya gedung kantor terpadu	400.000.000,00
15	1	20	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	21 ruang / 12 bln	BPKAD	Terpeliharanya gedung	50.000.000,00
16	1	20	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	4 mobil , 12 sepeda motor / 12 bln	BPKAD	Terpeliharanya kendaraan	75.000.000,00
17	1	20	02	xx	Pembangunan kanopi parkir kendaraan bermotor perkantoran terpadu	1 paket	BPKAD	Tersedianya kanopi parkir kendaraan	160.000.000,00
18	1	20	02	xx	Pengecatan eksterior Gedung Perkantoran Terpadu	1 paket	BPKAD	Terlaksana Pengecatan gedung	60.368.000,00
19	1	20	02	xx	Pengadaan Bibit tanaman untuk taman perkantoran terpadu	1 paket	BPKAD	tersedianya bibit tanaman	25.000.000,00
III	1	20	06		PROGRAM Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%			156.201.000,00
20	1	20	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 buku / 2 bulan	BPKAD	Tersusunnya capaian dan ikhtisar realisasi kinerja	17.000.000,00
21	1	20	06	02	Penyusunan laporan keuangan Semesteran	8 buku / 12 bln	BPKAD	Tersusunnya laporan keuangan	90.201.000,00
22	1	20	06	39	Penyusunan RKA dan DPA	60 (PRKA/DPPA/RKA/DPA)	BPKAD	Tersusunnya Rencana Kegiatan	19.000.000,00
23	1	20	06	17	Penyusunan Standar Pelayanan Publik dan IKM	10 SPP 8 IKM	BPKAD	Tersusunnya SPP dan IKM	15.000.000,00
24	1	20	06	45	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	smt 1 n 2 20 eks SOP / 3 bln	BPKAD	Tersusunnya SOP	15.000.000,00
IV	1	20	17		PROGRAM Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%			4.926.799.400,00
25	1	20	17	06	Penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang APBD TA. 2016	200 buku	BPKAD	Tersusunnya ranperda ttg APBD TA. 2016	377.240.000,00
26	1	20	17	08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA. 2015	200 buku	BPKAD	Tersusunnya ranperda ttg Perubahan APBD TA. 2015	449.671.800,00

27	1	20	17	49	Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah	600 dokumen	BPKAD	Tersusunnya NPHD	50.720.000,00		
28	1	20	17	50	Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD	100 SKPD	BPKAD	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD	136.000.000,00		
29	1	20	17	79	Pengendalian pelaksanaan anggaran	12 bulan	BPKAD	Terlaksananya pengendalian terhadap pelaksanaan APBD	46.540.000,00		
30	1	20	17	80	Penyusunan Standar Biaya Umum 2016	150 buku	BPKAD	Tersusunnya bahan/draft Standar Biaya Umum 2016	60.000.000,00		
31	1	20	17	81	Penyusunan Standar Satuan Harga 2016	150 buku	BPKAD	Tersusunnya bahan/draft Standar Satuan Harga 2016	115.000.000,00		
32	1	20	17	82	Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang	300 ijin	BPKAD	Terbitnya Ijin sewa tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang	97.047.600,00		
33	1	20	17	103	Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan	25.000 SP2D, 103 SKPD, 12 dokumen	BPKAD	Terlaksananya penerbitan SP2 D, Tersusunnya Surat Penyediaan Dana (SPD), Tersusunnya Register SP2D Harian, bulanan dan tahunan	300.000.000,00		
34	1	20	17	22	Peningkatan Pelayanan Gaji PNS	103 SKPD ; 13 dokumen; 1 aplikasi gaji, 2 kali	BPKAD	Terselenggaranya pelayanan pengelolaan gaji PNS, tersusunnya rekap gaji pegawai, sistem aplikasi penatausahaan gaji PNS, terselenggaranya sosialisasi pelayanan gaji PNS	350.000.000,00		

35	1	20	17	101	Penyusunan dan Sosialisasi Sistem Prosedur Penatausahaan Perbendaharaan	4 kali kegiatan	BPKAD	Peningkatan kualitas sistem dan prosedur penatausahaan perbendaharaan, Terselenggaranya Sosialisasi sistem dan prosedur penatausahaan perbendaharaan	200.000.000,00		
36	1	20	17	94	Penatausahaan, analisis dan Evaluasi Pengelolaan Kas	103 SKPD; 1 mou; 4 Dokumen ; 1 sosialisasi	BPKAD	Tersedianya anggaran kas; tersusunnya MoU dengan bank persepsi; tersusunnya dokumen penempatan dana deposito dan penyertaan modal ; terselenggaranya sosialisasi mekanisme alur teselenggaranya penatausahaan dan pemeliharaan arsip administrasi perbendaharaan dan pengelolaan kas; tersedianya sistem informasi pengarsipan	150.000.000,00		
37	1	20	17	102	Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas	1 paket	BPKAD teselenggaranya penatausahaan dan pemeliharaan arsip administrasi perbendaharaan dan pengelolaan kas; tersedianya sistem informasi pengarsipan	195.000.000,00		
38	1	20	17	xx	Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD berbasis akrual	1 paket	BPKAD Terlaksananya Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD	200.000.000,00		
39	1	20	17	66	Penatausahaan Pembukuan Penerimaan Pendapatan dan Pembukuan Belanja	275 buku	BPKAD	Tersedianya buku laporan pembukuan penerimaan dan belanja	150.000.000,00		

40	1	20	17	70	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemkot Malang	102 buku laporan keuangan SKPD Pemkot Malang	BPKAD	Terlaksananya asistensi penyusunan laporan keuangan	85.000.000,00		
41	1	20	17	96	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA. 2014	128 buku	BPKAD	Tersusunnya Buku Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	175.000.000,00		
42	1	20	17	97	Penyusunan Ranperda dan Raperwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	375 buku	BPKAD	Tersusunnya Buku Ranperda dan Raperwal Pertanggungjawaban APBD Pemkot Malang	236.000.000,00		
43	1	20	17	98	Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah	15 SKPD dan 3 BUMD	BPKAD	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi PAD	64.580.000,00		
44	1	20	17	xx	Penatausahaan Keuangan PPKD	24 laporan	BPKAD	Terlaksananya fungsi PPKD, penatausahaan bendahara penerimaan dan funasi BIJD	1.159.000.000,00		
45	1	20	17	xx	Monitoring dan penatausahaan dana transfer	1 thn ; 2 kali ; 12 kali ke propinsi dan 8 pemerintah pusat	BPKAD	Tercapainya target penerimaan dari dana tranfer,Rekonsiliasi dengan SKPD penerima dana tranfer, koordinasi dan konsultasi ke pemerintah propinsi dan pemerintah pusat terkait dana terselenggaranya penyaluran dan penatausahaan hibah, bansos, pembiayaan, belanja tak terduga,terselenggaranya sosialisasi untuk penerima hibah	145.000.000,00		
46	1	20	17	xx	Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial	12 bulan	BPKAD	terduga,terselenggaranya penyaluran dan penatausahaan hibah, bansos, pembiayaan, belanja tak terduga,terselenggaranya sosialisasi untuk penerima hibah	125.000.000,00		

47	1	20	17	xx	Pelayanan dan penatausahaan surat-surat berharga	1 sistem	BPKAD	tersedianya sistem aplikasi penatausahaan surat-surat berharga pemerintah kota malang, terselenggaranya pelayanan terkait surat-surat berharga	60.000.000,00		
V	1	09	16		Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp 4.114.000.000,00		Terlaksananya Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	222.924.000,00		
48	1	09	16	13	Pemasangan Papan Himbuan untuk Pengamanan Aset Pemerintah Daerah	20 papan himbuan	BPKAD	Terlaksananya Pengendalian BMD	97.500.000,00		
49	1	09	16	xx	Perhitungan Penetapan dan Pengetikan SKRD	5239 SKRD/10 buku	BPKAD	Tercetaknya Tagihan Wajib Retribusi Daerah	47.424.000,00		
50	1	09	16	xx	Penagihan dan Pemanggilan Wajib Retribusi	5239 wajib retribusi	BPKAD	Tercapainya Target Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	78.000.000,00		
VI	1	09	17		PROGRAM Fasilitas Penyelesaian Konflik-Konflik Tanah dan Bangunan Milik Pemkot	100%		Terlaksananya Fasilitas Konflik-konflik Tanah dan Bangunan Milik Pemkot	94.848.000,00		
51	1	09	17	01	Fasilitas Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	100%	BPKAD	Terlaksananya Fasilitas Penyelesaian Konflik-Konflik Tanah dan Bangunan Milik Pemkot	94.848.000,00		
VII					PROGRAM Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah				400.000.000,00		
52					Inventarisasi/Sensus dan Kodefikasi Aset Milik Daerah	2 kecamatan	BPKAD	Terlaksananya Inventarisasi/Sensus dan Kodefikasi Aset Milik Daerah	400.000.000,00		

VIII	1	20	42		PROGRAM Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah	1 tahun		Terlaksananya Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah	1.549.720.000,00		
53	1	20	42	10	Penatausahaan Aset Milik Daerah dan Update Data dengan SIMBADA	1 tahun	BPKAD	Terlaksananya Penatausahaan Aset Milik Daerah dan Update Data dengan SIMBADA	785.000.000,00		
54	1	20	42	09	Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah melalui Aplikasi SIMBADA di Kota Malang	100 SKPD	BPKAD	Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah melalui Aplikasi SIMBADA	150.000.000,00		
55	1	20	42	11	Pelaksanaan dan Penyusunan Mekanisme Kegiatan Perforasi Benda-Benda Berharga	30 buku dan benda berharga	BPKAD	Terlaksananya Kegiatan Perforasi Benda-Benda Berharga	65.000.000,00		
56	1	20	42	xx	Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	120 buku	BPKAD	Tersusunnya Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	100.000.000,00		
57	1	20	42	xx	Fasilitasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Kota Malang	100 SKPD	BPKAD	Terlaksananya penatausahaan Barang Milik Daerah Kota Malang	80.000.000,00		
58	1	20	42	xx	Penaksiran Sewa Aset Pemerintah Kota Malang	12 bulan	BPKAD	Terlaksananya Penilaian Tanah Asset Pemkot dalam Rangka Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan	120.120.000,00		
59	1	20	42	xx	Penghapusan Barang Milik Daerah	25 dokumen penghapusan	BPKAD	Terlaksananya Penghapusan Barang Milik Daerah Pemkot	93.600.000,00		
60	1	20	42	xx	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Daerah	12 bulan	BPKAD	Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang daerah	156.000.000,00		

IX	1	24	16		PROGRAM Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	1,500		Terlaksananya Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	193.514.760,00		
61	1	24	16	xx	Penyediaan dan Penataan Ruang Arsip dan Penyimpanan Benda-Benda Berharga Milik Daerah	1 ruang / 2 scanner	BPKAD	Tertatanya Ruang Arsip dan Sarana prasarana	193.514.760,00		
X	1	09	19		PROGRAM Peningkatan Status Hukum Aset Pemerintah Kota Malang	42 %/ 20 bidang		Terlaksananya Peningkatan Status Hukum Aset Pemerintah Kota Malang	234.000.000,00		
62	1	09	19	01	Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Malang	42 %/ 20 bidang	BPKAD	Terlaksananya Pengamanan dan Pengendalian Asset Pemkot	234.000.000,00		

SKPD : KANTOR KETAHANAN PANGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				lokasi	target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
						2.000.000.000,00			
						259.080.000,00			
1	1 21 1	BELANJA LANGSUNG							
		PROGRAM PELAYANAN							
		ADMINISTRASI PERKANTORAN							
1	1 21 1 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kota Malang		8.480.000,00			
2	1 21 1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik		Kota Malang		3.000.000,00			
3	1 21 1 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kota Malang		10.000.000,00			
4	1 21 1 7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Kota Malang		31.320.000,00			
5	1 21 1 8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Kota Malang		4.500.000,00			
6	1 21 1 9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		Kota Malang		7.800.000,00			
7	1 21 1 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Kota Malang		25.110.000,00			

8	1	21	1	11	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Kota Malang	15.000.000,00		
9	1	21	1	13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kota Malang	100.000.000,00		
10	1	21	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Per UU	Kota Malang	3.990.000,00		
11	1	21	1	17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Kota Malang	13.380.000,00		
12	1	21	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Kota Malang	36.500.000,00		
II	1	21	2		PROGRAM PENINGKATAN SARANA		39.970.000,00		
13	1	21	2	01	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Malang	39.970.000,00		
III	1	21	6		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		35.950.000,00		
14	1	21	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Malang	4.950.000,00		
15	1	21	6	4	Penyusunan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD	Kota Malang	10.000.000,00		
16	1	21	6	5	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Malang	6.000.000,00		
17	1	21	6	26	Penyusunan Standart Pelayanan Publik Dan Indek Kepuasan Masyarakat	Kota Malang	15.000.000,00		
IV	1	21	15		PROGRAM PENGEMBANGAN KETERSEDIAAN DAN PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		860.000.000,00		
18	1	21	15	32	Penyusunan Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan	Kota Malang	75.000.000,00		
19	1	21	15	36	Penyusunan dan Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH)	Kota Malang	60.000.000,00		
20	1	21	15	37	Penyusunan dan Analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Kota Malang	75.000.000,00		
21	1	21	15	38	Raskin	Kota Malang	650.000.000,00		
V	1	21	16		PROGRAM PENGEMBANGAN DISTRIBUSI DAN STABILITAS HARGA PANGAN		215.000.000,00		
22	1	21	16	01	Pemantauan dan Analisis Pasokan, Harga dan Akses Pangan	Kota Malang	65.000.000,00		

23	1	21	16	02	Pembinaan dan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan		Kota Malang		150.000.000,00		
VI	1	21	17		PROGRAM PENGEMBANGAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN DAN KEAMANAN PANGAN				590.000.000,00		
24	1	21	17	01	Sosialisasi dan Promosi Penganeekaragaman Pangan		Kota Malang		150.000.000,00		
25	1	21	17	02	Sosialisasi dan Promosi Keamanan Pangan		Kota Malang		150.000.000,00		
26	1	21	17	03	Pelatihan Penyusunan Analisis Kebutuhan Konsumsi Pangan		Kota Malang		50.000.000,00		
27	1	21	17	04	Pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan		Kota Malang		150.000.000,00		
28	1	21	17	05	Lomba Cipta Menu Berbasis Pangan Lokal		Kota Malang		90.000.000,00		

SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				lokasi	target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		BELANJA LANGSUNG PENDIDIKAN				4.119.087.000			
	1 01	Program Pengembangan Budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan				2.143.582.800			
	1 01 21	Program Pengembangan Budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan				2.018.582.800			
1	1 01 21 02	Pengembangan Minat dan Budaya Baca Buku	Pemustaka	Kota Malang	252.000 pemustaka	45.000.000			
2	1 01 21 09	Penyediaan Bahan Pustaka	Perpustakaan Umum	Kota Malang	800 judul, 4000 eks	450.000.000			
3	1 01 21 11	Otomasi pelayanan perpustakaan	Pelayanan perpustakaan	Kota Malang	1632 jam	753.284.800			
4	1 01 21 12	Pengelolaan buku	Pengolahan Buku	Kota Malang	6000 eks	70.298.000			
5	1 01 21 13	Peningkatan Pelayanan perpustakaan keliling	Masyarakat	Kota Malang	12,600 2000 koleksi	300.000.000			

6	1	01	21	15	Pembinaan Perpustakaan Masyarakat dan Lembaga Pendidikan Binaan	Masyarakat	Kota Malang	370 perpustakaan	100.000.000		
7	1	01	21	17	Pengadaan sarana perpustakaan (untuk difabilitas)	Masyarakat difabilitas (Tuna netra)	Kota Malang	1 paket (100%)	150.000.000		
8	1	01	21	19	Penyediaan sarana Ruang Baca perpustakaan	Ruang baca	Kota Malang	1 ruang utk disabilitas	150.000.000		
II	1	05	21		Program Peningkatan SDM Aparatur				45.000.000		
9	1	05	21	10	Kontribusi Mengikuti Diklat (Perpustakaan dan Kearsipan)	SDM Kantor Perpustakaan dan Arsip	Kota Malang	10 orang	45.000.000		
III	1	20	41		Program Pelaksanaan Pengkajian dan Penerapan Standar Manajemen Mutu				80.000.000		
10	1	20	41	02	Pemeliharaan ISO 9001 : 2008 pada Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang	Mutu pelayanan sesuai standar	Kota Malang	1 kali (100%)	80.000.000		
IV	1	24			KEARSIPAN				1.975.504.200		
	1	24	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.011.257.050		
11	1	24	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Administrasi Perkantoran	Kota Malang	1500 surat	31.040.000		
12	1	24	01	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Pelayanan pada Masyarakat Lancar	Kota Malang	3 jenis (100%)	335.220.000		
13	1	24	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Laporan laporan	Kota Malang	5 jenis (100%)	50.805.000		
14	1	24	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Gedung kantor terpelihara	Kota Malang	6 orang	160.000.000		
15	1	24	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Peralatan Kantor	Kota Malang	35 jenis (100%)	55.461.850		
16	1	24	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan	Kota Malang	6 jenis (100%)	87.278.400		
17	1	24	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Komponen untuk penerangan bangunan	Kota Malang	20 jenis (100%)	20.576.800		
18	1	24	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan	Kota Malang	528 jenis bahan bacaan	29.000.000		
19	1	24	01	17	Penyediaan makan dan minum	Pelayanan tamu rapat	Kota Malang	1200 orang 30 kali	76.875.000		

20	1	24	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rakor luar daerah dan Rakor dalam daerah	Kota Malang	10 kali dan 20 kali	165.000.000		
V	1	24	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				624.100.000		
21	1	24	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Dak garasi samping	Kota Malang	1 paket (100%)	200.000.000		
22	1	24	02	09	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Pemasangan otomatis genset	Kota Malang	1 paket (100%)	50.000.000		
23		24	02	20	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Gedung kantor (mengecat bagian depan)	Kota Malang	1 paket (100%)	109.000.000		
24	1	24	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan operasional	Kota Malang	5 mobil dan 4 motor	125.000.000		
25	1	24	02	28	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Penataan jaringan listrik	Kota Malang	1 paket (100%)	40.100.000		
26	1	24	02	42	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Gedung kantor (Lt III)	Kota Malang	1 paket (100%)	100.000.000		
VI	1	24	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan				45.000.000		
27	1	24	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja		Kota Malang	5 dok Lakip, 5 dok LKPJ-LPPD	15.000.000		
28	1	24	06	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan akhir tahun		Kota Malang	5 dok lap semesteran, lap akhir tahun	5.000.000		
29	1	24	06	03	Penyusunan Prognosis Realisasi Anggaran		Kota Malang	5 dok Prognosis	5.000.000		
30	1	24	06	05	Penyusunan IKM, SOP, SPM		Kota Malang	5 dok IKM	10.000.000		
31	1	24	06		Penyesunan Renja		Kota Malang	5 buku RKA, DPA, dan DPPA	10.000.000		
VII	1	24	16		Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/arsip daerah				86.952.050		
32	1	24	16	01	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Sarana prasarana	Kota Malang	2 jenis	13.498.800		
33	1	24	16	02	Pendataan dan Penataan dokumen/arsip daerah	Meningkatnya data arsip SKPD/ arsip daerah	Kota Malang	3 SKPD	38.453.250		
34	1	24	16	03	Penduplikasian dokumen/arsip + peringatan hari besar nasional	Dokumen sejarah	Kota Malang	5 jenis	35.000.000		

VIII	1	24	17		Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan				51.707.800		
35	1	24	17	01	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Terpeliharanya arsip	Kota Malang	12 bulan (100%)	21.707.800		
36	1	24	17	02	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah (pelaksanaan fumigasi)	Fumigasi depo arsip	Kota Malang	1 kali (100%)	30.000.000		
IX	1	24	18		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi				156.487.300		
37	1	24	18	02	Penyediaan sarana layanan informasi arsip	Sarpras layanan kearsipan	Kota Malang	1 paket (100%)	156.487.300		

SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							lokasi	target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2				3	4	4	5	6	7	8	9
I	1	25	01	01	BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur	Kota Malang	100%	10.000.000.000,00 1.207.000.000,00			
1	1	25	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tata Laksana Dinas	Kota Malang	100%	17.000.000,00		
2	1	25	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur	Kota Malang	100%	20.000.000,00		
3	1	25	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur	Kota Malang	100%	80.000.000,00		
4	1	25	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur	Kota Malang	100%	20.000.000,00		

5	1	25	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur	Kota Malang	100%	60.000.000,00		
6	1	25	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur	Kota Malang	100%	50.000.000,00		
7	1	25	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur	Kota Malang	100%	23.000.000,00		
8	1	25	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur	Kota Malang	100%	25.000.000,00		
9	1	25	01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur	Kota Malang	100%	550.000.000,00		
10	1	25	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur	Kota Malang	100%	6.000.000,00		
11	1	25	01	01	17	Penyediaan makanan minuman	Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur	Kota Malang	100%	75.000.000,00		
12	1	25	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur	Kota Malang	100%	175.000.000,00		
13	5	2	2	15	03	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Negeri	Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur	Kota Malang	100%	75.000.000,00		
14	1	25	01	01	18	Penyusunan Invebtarisasi Barang?aset	Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur	Kota Malang	100%	6.000.000,00		
15	1	25	01	01	19	Pawai Pembangunan	Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur	Kota Malang	100%	25.000.000,00		
II	1	25	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Kota Malang	100%	150.000.000,00		
16	1	25	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya ketersediaan	Kota Malang	100%	65.000.000,00		
17	1	25	01	02	25	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Meningkatnya Ketesediaan sarana prasarana aparatur	Kota Malang	100%	85.000.000,00		
III	1	25	01	06		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Kota Malang	100%	125.000.000,00		

17	1	25	1	6	Pelatihan Peningkatan Kinerja PNS	Peningkatan Kinerja PNS	Kota Malang	100%	125.000.000,00		
IV	1	25	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Terlaksananya penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kota Malang	100%	87.500.000,00		
18	1	25	01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP dan KELOG	Kota Malang	100%	15.000.000,00	
19	1	25	01	06	03	Penyusunan pelaporan keuangan Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Malang	100%	7.500.000,00	
20	1	25	01	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Malang	100%	13.000.000,00	
21	1	25	01	06	05	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	Tersusunnya RKA, DPA dan Renia	Kota Malang	100%	14.000.000,00	
22	1	25	01	06	07	Penyusunan pelaporan index kepuasan masyarakat (IKM) Dinas Kominfo	Tersusunnya data IKM	Kota Malang	100%	11.000.000,00	
	1	25	01	06	09	Penyusunan Profil Dinas Kominfo	Tersusunnya data profil	Kota Malang	100%	15.000.000,00	
24	1	25	01	06	12	Penyusunan Standard Pelayanan Publik (SPP) Dinas Kominfo	Tersusunnya data spp	Kota Malang	100%	12.000.000,00	
V	1	25	01	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		Kota Malang	100%	4.830.500.000,00		
25	1	25	01	15	12	Maintenance Infrastruktur Telematika	Infrastruktur Telematika Pemerintah Kota Malang	Kota Malang	100%	350.000.000,00	
26	1	25	01	15	31	Peningkatan Kapasitas Koneksi Internet	Koneksi Internet SKPD se-Kota Malang	Kota Malang	100%	2.350.000.000,00	
27	1	25	01	15	35	Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur Teler	Infrastruktur telematika Pemkot Malang	Kota Malang	100%	75.000.000,00	

28	1	25	01	15	39	Peningkatan Sistem Keamanan Data dan	Aplikasi layanan publik Pemerintah Kota Malang dan NOC (Network Operation Center)	Kota Malang	100%	100.000.000,00		
27	1	25	01	15	43	Pembinaan Telecenter Daragati Kota Malang	Masyarakat Kota Malang	Kota Malang	100%	200.000.000,00		
29	1	25	01	15	45	Pembinaan Lembaga Penyiaran	Lembaga Penyiaran se Kota Malang	Kota Malang	100%	125.000.000,00		
30	1	25	01	15	45	Teknologi Digital Bagi lembaga Penyiaran	Lembaga Penyiaran se Kota Malang	Kota Malang	100%	75.000.000,00		
32	1	25	01	15	58	Pendataan Pos dan Telekomunikasi (Warnet, Wartel, Jasa Titipan)	Menetahui jumlah warnet, wartel, dan Jasa Titipan se Kota Malang	Kota Malang	100%	175.000.000,00		
33	1	25	01	15	59	Maintenance Menara Telekomunikasi	Meningkatkan Kualitas Menara Pemkot Malang	Kota Malang	100%	150.000.000,00		
34	1	25	01	15	60	Pengawasan Menara Telekomunikasi	Mengetahui Kondisi tower se Kota Malang	Kota Malang	100%	100.000.000,00		
35	1	25	01	15	61	Impelentasi ducting bersama Kota Malang	Menyedion Infrastruktur pasif Telekomunikasi	Kota Malang	100%	1.130.500.000,00		
VI	1	25	01	19		Program Pengembangan Implementasi e - Government		Kota Malang	100%	450.000.000,00		
36	1	25	01	19	01	Implementasi e - Government		Kota Malang	100%	100.000.000,00		
37	1	25	01	15	42	Operasional LPSE Kota Malang	Pengelolaan layanan LPSE dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Kota Malang	100%	200.000.000,00		

38	1	25	01	15	43	Standarisasi Layanan dan keamanan LPS	Peningkatan infrastruktur LPSE dan Pelayanan LPSE	Kota Malang	100%	150.000.000,00		
VII	1	25	01	20		Program Pengembangan sarana Komonikasi dan Deseminasi Informasi		Kota Malang	100%	350.000.000,00		
39	1	25	01	15	47	Pembinaan dan pemberdayaan seni pertura	Sarasehan festival pertura pencaelaran	Kota Malang	100%	350.000.000,00		
VIII	1	25	01	15		Fasilitasi peningkatan SDM Bidang Komonikasi dan Informasi		Kota Malang	100%	100.000.000,00		
40	1	25	01	15	49	Implementasi Open Source	Masyarakat Kota Malang	Kota Malang	100%	100.000.000,00		
IX	1	25	01	15		Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi Informasi		Kota Malang	100%	450.000.000,00		
41	1	25	01	15	55	Sosialisasi dan pelatihan Aplikasi intranet	SKPD se-Kota Malang	Kota Malang	100%	150.000.000,00		
42	1	25	01	15	54	Sosialisasi dan Bintek LPSE	Peningkatan SDM SKPD Kota Malang di bidang pengadaan barang / jasa secara elektronik	Kota Malang	100%	300.000.000,00		
X	1	25	01	20		Program Kerja sama Informasi dan Media Masa		Kota Malang	100%	825.000.000,00		
44	1	25	01	20	01	Pembinaan dan pemberdayaan Forum KIM	KIM Sekota Malang	Kota Malang	100%	150.000.000,00		
45	1	25	01	20	02	Pembinaan dan pemberdayaan KIM	KIM Sekota Malang	Kota Malang	100%	300.000.000,00		
46	1	25	01	15	46	Pengembangan Kemitraan Media Masa	Media Komunitas se Kota Malang	Kota Malang	100%	375.000.000,00		
XI	1	25	01	20		Program Peningkatan kualitas pelayanan publik				550.000.000,00		

47	1	25	01	20	03	Penyebaran Informasi Publikasi Kota Malang	Meningkatnya kualitas dan jangkauan informasi	Kota Malang	100%	150.000.000,00		
48	1	25	01	20	04	Peningkatan Sarana dan Prasarana pelayanan publik	Komunikasi Sarana dan Prasarana pelayanan publik	Kota Malang	100%	400.000.000,00		
XII	1	25	01	20		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Infotmasi				100.000.000,00		
43	1	25	01	20	02	Publikasi dan Dokumentasi	Meningkatkan kualitas dan jangkauan informasi Komunikasi	Kota Malang	100%	100.000.000,00		
XIII	1	25	01	15		Program Perkembangan sistem dan prosedur ketatalaksanaan dan pelayanan publik		Kota Malang	100%	150.000.000,00		
44	1	25	01	15	40	Pelayanan Pengaduan Publik Kota Malang	Terpenuhinya pelayanan pengaduan publik	Kota Malang	100%	150.000.000,00		
XIV	1	25	01	15		Program Pelaksanaan Pengkajian dan penerapan standar management mutu		Kota Malang	100%	200.000.000,00		
45	1	25	01	15	44	Pengolahan Informasi dan Dokumentasi Kota Malang	Meningkatnya kualitas dan jangkauan informasi Komunikasi	Kota Malang	100%	200.000.000,00		
XV	1	25	01	15		Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi		Kota Malang	100%	425.000.000,00		
46	1	25	01	15	57	Pengolahan konten website Kota Malang	Trasparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah	Kota Malang	100%	425.000.000,00		

8	2	01.2	01.01	01		Promosi dan publikasi	Aparatur Dinas Pertanian Kota Malang	Kota Malang	100%	50.000.000,00		
9	2	01.2	01.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Aparatur Dinas Pertanian Kota Malang	Kota Malang	100%	27.923.000,00		
10	2	01.2	01.01	01	18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Aparatur Dinas Pertanian Kota Malang	Kota Malang	100%	123.075.000,00		
11	2	01.2	01.01	01	88	Pameran Produk - produk Pertanian	Aparatur Dinas Pertanian Kota Malang	Kota Malang	100%	75.000.000,00		
II	2	01.2	01.01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Kota Malang		229.222.500,00		
12	2	01.2	01.01	02	22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Bangunan Kantor Dinas Pertanian Kota Malang	Kota Malang	100%	127.000.000,00		
13	2	01.2	01.01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Kendaraan Dinas Operasional Kantor	Kota Malang	100%	85.000.000,00		
14	2	01.2	01.01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Kantor Dinas Pertanian Kota Malang	Kota Malang	100%	17.222.500,00		
III	2	01.2	01.01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Kota Malang		50.000.000,00		
15	2	01.2	01.01	05		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas Pertanian	Aparatur Dinas Pertanian Kota Malang	Kota Malang	100%	50.000.000,00		
IV	2	01.2	01.01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Kota Malang		7.760.000,00		
16	2	01.2	01.01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Malang	100%	1.730.000,00		
17	2	01.2	01.01	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Capaian kinerja keuangan program & kegiatan Dinas Pertanian Kota Malang	Kota Malang	100%	3.730.000,00		
18	2	01.2	01.01	06	05	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran		Kota Malang	100%	2.300.000,00		

V	2	01.2	01.01	15		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		Kota Malang			105.000.000,00		
19	2	01.2	01.01	15	02	Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)	Kota Malang	100		40.000.000,00		
20	2	01.2	01.01	15	11	Kegiatan Peningkatan kemampuan lembaga tani	Poktan/Gapoktan	Kota Malang	100		40.000.000,00		
21	2	01.2	01.01	15	12	Kegiatan Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian	Penyuluh Pertanian dan Petani Kota Malana	Kota Malang	100		25.000.000,00		
VI	2	01.2	01.01	16		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)		Kota Malang			75.000.000,00		
22	1	01.2	01.01	16	12	Kegiatan Pengembangan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	Kelompok Tani/Pelaku usaha	Kota Malang	100		75.000.000,00		
VII	2	01.2	01.01	17		Program Peningkatan pemasaran hasil pertanian/perkebunan unggulan daerah		Kota Malang			60.000.000,00		
23	2	01.2	01.01	17	7	Kegiatan Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	Poktan/Gapoktan/Aspartan Kota Malang	Kota Malang	100		60.000.000,00		
VIII	2	01.2	01.01	18		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tanaman Perkebunan		Kota Malang			45.000.000,00		
24	2	01.2	01.01	18	02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/perkebunan Tepat Guna	Operasional kebun tanaman hias	Kota Malang	100		15.000.000,00		
25	2	01.2	01.01	18	05	Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian	Kota Malang	100		30.000.000,00		
IX	2	01.2	01.01	19		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan		Kota Malang			30.000.000,00		
26	2	01.2	01.01	19	10	Kegiatan Pendampingan dan Penyusunan RDCK Pupuk Bersubsidi	Kelompok Tani	Kota Malang	100		30.000.000,00		
X	2	01.2	01.01	20		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan		Kota Malang			100.000.000,00		
27	2	01.2	01.01	20	01	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Penyuluh/Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP)/Kelompok Tani	Kota Malang	100		100.000.000,00		
XI	2	01.2	01.01	15		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		Kota Malang			125.000.000,00		

28	2	01.2	01.01	15	12	Pemberdayaan Petani Pemakai Air	Perkumpulan Petani Pemakai Air	Kota Malang	100%	125.000.000,00
XII	2	01.2	01.01	16		Program Peningkatan Ketahanan Pangan(Pertanian/Perkebunan)		Kota Malang		175.000.000,00
29	2	01.2	01.01	16	06	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk	Kelompok tani/masyarakat	Kota Malang	100%	125.000.000,00
30	2	01.2	01.01	16	08	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Kelompok tani/masyarakat	Kota Malang	100%	50.000.000,00
XIII	2	01.2	01.01	19		Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan		Kota Malang		50.000.000,00
31	2	01.2	01.01	19	08	Pengendalian dan Pemberantasan Hama Penyakit Tanaman	Kelompok tani/masyarakat	Kota Malang	100%	50.000.000,00
XIV	2	02.2	01.01	16		Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan		Kota Malang		50.000.000,00
32	2	02.2	01.01	16	06	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Kelompok tani/Masyarakat	Kota Malang	100%	50.000.000,00
XV	2	01.2	01.01	16		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)		Kota Malang		85.000.000,00
33	2	01.2	01.01	16	09	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Bidang Peternakan	Ta'mir dan PKK Kecamatan se Kota Malang	Kota Malang	100%	85.000.000,00
XVI	2	01.2	01.01	21		Program pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular Ternak		Kota Malang		160.000.000,00
34	2	01.3	01.01	21	01	Pendataan Masalah Peternakan	Peternak Kota Malang	Kota Malang	100%	30.000.000,00
35	2	01.2	01.01	21	02	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Peternak Kota Malang	Kota Malang	100%	130.000.000,00
XVII	2	01.2	01.01	23		Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan		Kota Malang		140.000.000,00
36	2	01.2	01.01	23	09	Fasilitasi Penataan Rumah Pematangan Hewan Unggas	Peternak di Kota Malang	Kota Malang	100%	50.000.000,00
37	2	01.2	01.01	23	14	Pengawasan Bahan Pangan Asal Hewan	Penjual Daging dan Penerima Daging Qurban Kota Malana	Kota Malang	100%	90.000.000,00
XVIII	2	01.2	01.01	24		Program peningkatan penerapan teknologi peternakan		Kota Malang		30.000.000,00
38	2	01.2	01.01	24	02	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	Peternak di Kota Malang	Kota Malang	100%	30.000.000,00
XIX	2	05.2	01.01	20		Program Pengembangan Budidaya Perikanan		Kota Malang		607.300.000,00
39	2	05.2	01.01	20	03	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	pembudidaya ikan di kolam air tawar	Kota Malang	100%	83.400.000,00

40	2	05.2	01.01	20	07	Pengembangan Pembenihan BBI	Pembenihan di BBI untuk mendukung kebutuhan Para Pembudidaya ikan di wilayah Kota Malang dan sekitarnya	Kota Malang	100%	420.000.000,00		
41	2	05.2	01.01	20	08	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Konsultasi dan Koordinasi Bidang Perikanan	Pembenih ikan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan pemasar ikan	Kota Malang	100%	57.900.000,00		
42	2	05.2	01.01	20		Bimtek Pengendalian Hama penyakit ikan	pembudidaya ikan di kolam air tawar dan ppl (petugas penyuluh lanangan)	Kota Malang	100%	46.000.000,00		
XX	2	05.2	01.01	23		Program Optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi Perikanan		Kota Malang		212.700.000,00		
43	2	05.2	01.01	23	02	Kampanye Gemarikan	kelompok pengolah dan aparat	Kota Malang		154.000.000,00		
44	2	05.2	01.01	23		Database Usaha Perikanan	kelompok pengolah dan aparat	Kota Malang		58.700.000,00		

SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				lokasi	target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
1	2	06.06.01	BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			7.760.000.000,00 381.000.000,00			

1	2	06	.06.0	01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3500 surat / 1 thn	Kota Malang	Aparatur	10.475.000,00
2	2	06	.06.0	01.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	Kota Malang	Aparatur	6.000.000,00
3	2	06	.06.0	01.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	Kota Malang	Aparatur	88.525.000,00
4	2	06	.06.0	01.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10 ruangan/ 16 jenis/ 12 bulan	Kota Malang	Kantor	22.000.000,00
5	2	06	.06.0	01.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	4 jenis peralatan/ 12 bln	Kota Malang	Peralatan kerja	4.000.000,00
6	2	06	.06.0	01.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	51 jenis ATK	Kota Malang	Aparatur	35.000.000,00
7	2	06	.06.0	01.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 jenis	Kota Malang	Aparatur	15.000.000,00
8	2	06	.06.0	01.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 jenis peralatan	Kota Malang	Peralatan kerja	75.000.000,00
9	2	06	.06.0	01.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 surat kabar	Kota Malang	Aparatur	5.000.000,00
10	2	06	.06.0	01.	Penyediaan Makan dan Minum	20 kl rapat/ 200 tamu	Kota Malang	Aparatur	20.000.000,00
11	2	06	.06.0	01.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	90 kl dlm daerah, 12 kl luar daerah	Kota Malang	Aparatur	100.000.000,00
II	2	06	.06.0	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				450.000.000,00
12	2	06	.06.0	02.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 mobil	Kota Malang	Aparatur	350.000.000,00
13	2	06	.06.0	02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 ruang	Kota Malang	Gedung Kantor	25.000.000,00
14	2	06	.06.0	02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	3 mobil, 5 spd motor / 1 th	Kota Malang	Kendaraan dinas	75.000.000,00
III	2	06	.06.0	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				115.000.000,00
15	2	06	.06.0	05.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui Diklat/Bimtek Teknis/Fungsional dan Pemaqangan	20 kali	Kota Malang	Aparatur	15.000.000,00
16	2	06	.06.0	05.	Peningkatan Kinerja Pegawai melalui Pembangunan Team Work dan Capacity Building	1 kali	Kota Malang	Aparatur	100.000.000,00
IV	2	06	.06.0	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				399.000.000,00

17	2	06	.06.0	06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 buku / 2 bln	Kota Malang	Aparatur	20.000.000,00
18	2	06	.06.0	06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	8 buku / 1 keg	Kota Malang	Aparatur	19.000.000,00
19	2	06	.06.0	06.05	Penyusunan RKA dan DPA	RKA 3 bk, DPA 17 bk	Kota Malang	Aparatur	20.000.000,00
20	2	06	.06.0	06.71	Penyusunan Rancangan Peraturan di Bidang perindustrian dan Perdagangan	2 ranperda/ranperwal	Kota Malang	Aparatur	200.000.000,00
21	2	06	.06.0	06.06	Penyusunan Standard Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik dan IKM	SOP 3 bk, SPP 3 bk, IKM 6 bk	Kota Malang	Masyarakat	30.000.000,00
22	2	06	.06.0	06.73	Penyusunan kajian Rencana Pembangunan Industri Kota	6 bln	Kota Malang	Masyarakat	80.000.000,00
23	2	06	.06.0	06.74	Pemeliharaan ISO 9001 tentang SOP Disperindag	1 kali	Kota Malang	Aparatur	30.000.000,00
V	2	06	.06.0	15	Program Perlindungan Konsumen dan Penanganan Perdaanan				535.000.000,00
24	2	06	.06.0	15	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Konsumen	50 kasus	Kota Malang	Masyarakat sebagai konsumen	155.000.000,00
25	2	06	.06.0	15	Peningkatan Pengawasan Peredaran barang dan jasa	1 tahun	Kota Malang	Pelaku usaha	75.000.000,00
26	2	06	.06.0	15	Pos Ukur Ulang Barang-barang Non Barang Dalam Keadaan Terbuka (BDKT) dan Sosialisasi Tertib Ukur di Pasar Tradisional	15 pasar tradisional	Kota Malang	Pedagang dan Pembeli di Pasar Tradisional	75.000.000,00
27	2	06	.06.0	0,1	Sosialisasi Tertib Ukur di Pasar Tradisional	1 kali keg	Kota Malang		75.000.000,00
28	2	06	.06.0	15	Monitoring Pelaksanaan Tera / Tera ulang UTTP	5 Kecamatan	Kota Malang	IKM Mamin	15.000.000,00
29	2	06	.06.0	15	Sosialisasi tentang konsumen cerdas dan mandiri	100 peserta	Kota Malang	Masyarakat	100.000.000,00
30	2	06	.06.0	15	Sosialisasi Pengawasan Barang Beredar	1 keg	Kota Malang		40.000.000,00
VI	2	06	.06.0	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor				2.030.000.000,00
31	2	06	.06.0	17	Pengembangan Peluang Pemasaran bagi IKM Sektor Kerajinan (Dekranasda) Kota Malang	50 IKM	Kota Malang	IKM Kerajinan	475.000.000,00
32	2	06	.06.0	17	Pengembangan peluang pemasaran dan sarana promosi bagi produk kota Malang	50 IKM	Kota Malang	IKM Unggulan dan kerajinan	175.000.000,00
33	2	06	.06.0	17	Pameran Produk dalam Rangka APEKSI	50 IKM	Kota Malang	IKM	450.000.000,00

34	2	06	.06.0	17	Penyediaan Website dan Fasilitas E-Commerce Kota Malang	25 IKM	Kota Malang	IKM Kota Malang	100.000.000,00		
35	2	06	.06.0	17.	Pelatihan Ekspor bagi IKM-IDKM Kota Malang	30 IKM-IDKM	Kota Malang	IKM-IDKM Kota Malang	80.000.000,00		
36	2	06	.06.0	17	Misi Dagang dan Buying Mission bagi Produk Berorientasi Ekspor	15 IKM	Kota Malang	IKM Kota Malang	750.000.000,00		
VII	2	06	.06.0	18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				335.000.000,00		
37	2	06	.06.0	18	Pemantauan harga dan ketersediaan stok bahan pokok	5 pasar	Kota Malang	pasar di Kota Malang	100.000.000,00		
38	2	06	.06.0	19	Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Perdagangan / Peredaran Minuman Beralkohol	15 pemantauan	Kota Malang	Pelaku usaha di Kota Malang	45.000.000,00		
39	2	06	.06.0	19	Pembinaan dan formalisasi usaha perdagangan bagi IDKM Non Formal	45 pelaku usaha	Kota Malang	Pelaku usaha di kota Malang	55.000.000,00		
40	2	06	.06.0	19	Pendataan dan Penyusunan Database Waralaba Mamin	5 Kecamatan	Kota Malang	Waralaba mamin	65.000.000,00		
41	2	06	.06.0	19	Pendataan dan penyusunan data base ritel dan toko modern	5 kecamatan	Kota Malang	peritel tradisional dan toko modern	70.000.000,00		
VIII	2	07	.06.0	15	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi				675.000.000,00		
42	2	07	.06.0	15	Pelatihan Pembuatan Telor Asin Bagi Masyarakat di Lingkungan IHT	60 peserta	Kota Malang	IKM Mamin	200.000.000,00	DBHCHT	
43	2	07	.06.0	15	Pengawasan mesin Pelinting rokok di Kota Malang	38 IHT	Kota Malang	IHT	25.000.000,00	DBHCHT	
44	2	07	.06.0	15	Fasilitasi Magang Kerja Pembuatan Batik Kayu	30 IKM	Kota Malang	IKM IHP & K	100.000.000,00	DBHCHT	
45	2	07	.06.0	15	Pelatihan peningkatan keterampilan desain furniture berbahan sintetis	60 IKM	Kota Malang		150.000.000,00	DBHCHT	
46	2	07	.06.0	15	Pelatihan peningkatan keterampilan desain produk IATT berbasis komputer	60 IKM	Kota Malang		200.000.000,00	DBHCHT	
IX	2	07	.06.0	16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				1.135.000.000,00		
47	2	07	.06.0	16	Pelatihan Peningkatan kualitas kemasan dan pengetahuan trend desain kemasan bagi IKM mamin	60 IKM	Kota Malang	IKM Mamin	80.000.000,00	DBHCHT	
48	2	07	.06.0	16	Pelatihan Pengolahan dan diversifikasi produk olahan Buah serta pengemasannya	60 org	Kota Malang	Masyarakat	100.000.000,00	DBHCHT	
49	2	07	.06.0	16	Bimtek Usaha minuman dalam kemasan dan depo isi ulang air minum	100 IKM	Kota Malang	IKM Mamin	80.000.000,00	DBHCHT	
50	2	07	.06.0	16.	Monitoring dan evaluasi kegiatan pembuatan Kerajinan Bambu	3 KUB tusuk sate	Kota Malang	IKM Tusuk sate	50.000.000,00		

51	2	07	.06.0	16	Penguatan ekonomi masyarakat melalui bantuan sarana produksi IKM Kripik Singkong baqi IKM	IKM	Kota Malang	IKM	50.000.000,00	DBHCHT
52	2	07	.06.0	17	Pelatihan pembuatan Parafin dan Sterno Gel dilingkungan IHT	30 Org	Kota Malang	masyarakat dilingkungan IHT	75.000.000,00	DBHCHT
53	2	07	.06.0	17	Pelatihan Pembuatan Paving Beton / Batako dilingkungan IHT	30 org	Kota Malang	Masyarakat di lingkungan IHT	100.000.000,00	DBHCHT
54	2	07	.06.0	17	Pelatihan Peningkatan Keterampilan reparasi kendaraan bermotor	30 Org	Kota Malang	IKM IATT dan Mastarakat	100.000.000,00	DBHCHT
55	2	07	.06.0	17	Pelatihan Peningkatan Keterampilan Reparasi AC kendaraan roda empat	30 Org	Kota Malang	IKM IATT dan Mastarakat	100.000.000,00	DBHCHT
56	2	07	.06.0	17	Pelatihan peningkatan keterampilan reparasi dinamo kendaraan roda empat	30 Org	Kota Malang	IKM IATT dan Mastarakat	100.000.000,00	DBHCHT
57	2	07	.06.0	17	pelatihan peningkatan keterampilan berbahan dasar kain flanel	30 Org	Kota Malang	Masyarakat	100.000.000,00	DBHCHT
58	2	07	.06.0	17	Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Bantuan Sarana Usaha Telor Asin	60 IKM	Kota Malang	Masyarakat	200.000.000,00	DBHCHT
X	2	07	.06.0	17	Program Peningkatan Kemampuan Teknoloai Industri				550.000.000,00	
59	2	07	.06.0	17	Pelatihan Dasar Pengoperasian Mesin CNC Baqi IKM IATT	30 Org	Kota Malang	IKM IATT dan Mastarakat	150.000.000,00	DBHCHT
60	2	07	.06.0	17	penguatan ekonomi Masyarakat melalui penyediaan sarana produksi industri logam, mesin	5 IKM	Kota Malang	IKM Logam Mesin	200.000.000,00	DBHCHT
61	2	07	.06.0	16.60	Penguatan ekonomi masyarakat melalui penyediaan sarana produksi industri tekstil	5 IKM	Kota Malang	IKM Tekstil	200.000.000,00	DBHCHT
XI	2	07	.06.0	18	Program Penataan Struktur Industri				175.000.000,00	
62	2	07	.06.0	18	Pelatihan Peningkatan ketrampilan dan temu usaha pemasaran produk IKM komponen otomotif IATT di Kota Malang	30 IKM	Kota Malang	IKM IATT	75.000.000,00	
63	2	07	.06.0	18	Pelatihan Peningkatan Desain dan temu usaha Produk IKM Mamin	30 IKM	Kota Malang	IKM Rotan	100.000.000,00	DBHCHT
XII	2	07	.06.0	19	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial				980.000.000,00	
64	2	07	.06.0	19	Penyusunan DED Kawasan Industri Kota Malang	6 bulan		industri Kota Malang	250.000.000,00	
65	2	07	.06.0	19	Penyusunan AMDAL Kawasan Industri Kota Malang	6 bulan	Kota Malang	industri Kota Malang	300.000.000,00	

67	2	07	.06.0	19	Pelatihan peningkatan keterampilan dalam rangka Diversifikasi produk Logam dan Mesin dalam rangka konversi sentra industri kompor menjadi sentra industri teknologi tepat auna	20 IKM	Kota Malang	IKM Kompor di kel Merjosari	150.000.000,00	DBHCHT		
68	2	07	.06.0	19	Pemutakhiran data industri sektor ILMETA dan IATT	500 dat	Kota Malang	IKM Non Formal	80.000.000,00			
69	2	07	.06.0	19	Pelatihan peningkatan keterampilan dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri raket bulutangkis di Kecamatan Sukun	25 IKM	Kota Malang	IKM raket dan Masyarakat Sukun	100.000.000,00	DBHCHT		
70	2	07	.06.0	19	Pelatihan Peningkatan Keterampilan pengusaha Garmen dalam rangka pengolahan bahan baku kulit dan desain produk kulit	30 IKM	Kota Malang	IKM Garmen	100.000.000,00	DBHCHT		

SKPD : DINAS PASAR

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							lokasi	target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2				3	4	4	5	6	7	8	9
					BELANJA LANGSUNG				9.232.500.000,00			
	1	08			Lingkungan Hidup				408.000.000,00			
1	1	08	15		Program Pengembangan Kinerja				233.000.000,00			
					Penelolaan Persampahan							
1	1	08	15	26	Pengadaan Gerobak Sampah	Terangkutnya sampah pasar	Kota Malang	85	98.000.000,00			
2	1	08	15	42	Lomba kebersihan antar Pasar se Kota Malang	Terciptanya lingkungan pasar	Kota Malang	90	35.000.000,00			
3	1	08	15	77	Fasilitasi Pasar Kota Malang menuju Kota Sehat	Tercapainya lingkungan pasar yang sehat	Kota Malang	90	100.000.000,00			

II	1	20	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Kota Malang		175.000.000,00	
4	1	20	17	19	Ekstensifikasi & Intensifikasi Dalam Rangka Meningkatkan Retribusi Daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Kota Malang	90	75.000.000,00	
5	1	20	17	20	Pendataan Pedagang Pasar Tradisional	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Kota Malang	90	100.000.000,00	
	2				URUSAN PILIHAN					
	2				Perdagangan				8.824.500.000,00	
III	2	06	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				771.040.000,00	
6	2	06	01	01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Kelancaran surat menyurat	Kota Malang	90	60.000.000,00	
7	2	06	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	Kelancaran Komunikasi Dinas	Kota Malang	90	60.000.000,00	
8	2	06	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Administrasi keuangan	Kota Malang	100	116.040.000,00	
9	2	06	01	08	Penyediaan Alat Kebersihan Kantor	Kebersihan Kantor & pasar	Kota Malang	90	150.000.000,00	
10	2	06	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Administrasi lancar	Kota Malang	90	50.000.000,00	
11	2	06	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Administrasi lancar	Kota Malang	90	35.000.000,00	
12	2	06	01	12	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik / Bangunan Kantor	Penerangan lampu maksimal	Kota Malang	90	15.000.000,00	
13	2	06	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrasi lancar	Kota Malang	90	100.000.000,00	
14	2	06	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan SDM	Kota Malang	90	5.000.000,00	
15	2	06	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Meningkatkan kinerja	Kota Malang	85	30.000.000,00	
16	2	06	01	18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Data yang akurat	Kota Malang	80	150.000.000,00	
IV	2	06	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.278.070.000,00	
17	2	06	02	11	Pengadaan dan Pengisian Tabung Kebakaran	Keamanan Pasar	Kota Malang	85	50.000.000,00	
18	2	06	02	22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terwujudnya gedung kantor yang lebih memadai	Kota Malang	90	195.000.000,00	

19	2	06	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terwujudnya kendaraan yang lebih baik	Kota Malang	90	313.070.000,00		
20	2	06	02	77	Pengadaan BBM dan pelumas	Tersedianya Bahan bakar Minyak & pelumas	Kota Malang	90	700.000.000,00		
21	2	06	02	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan kantor	Peralatan Kantor layak pakai	Kota Malang	80	20.000.000,00		
V	2	06	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				37.500.000,00		
22	2	06	03	02	Pengadaan Pakaian Kerja Kantib	Pasukan Wastib	Kota Malang	90	37.500.000,00		
VI	2	06	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				270.500.000,00		
23	2	06	06	01	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2015	Tersedianya data Dinas	Kota Malang	90	20.000.000,00		
24	2	06	06	02	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya data Dinas	Kota Malang	90	20.000.000,00		
25	2	06	06	03	Penyusunan Laporan Keuangan Semester	Tertib Administrasi Keuangan	Kota Malang	90	17.500.000,00		
26	2	06	06	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tertib Administrasi Keuangan	Kota Malang	90	18.000.000,00		
27	2	06	06	05	Penyusunan IKM	Tersedianya data Dinas	Kota Malang	90	15.000.000,00		
28	2	06	06	06	Penyusunan Kelog dan LPPD	Tersedianya data Dinas	Kota Malang	90	10.000.000,00		
29	2	06	06	07	Penyusunan dan Review Buku Profil	Tersedianya data Dinas	Kota Malang	90	20.000.000,00		
30	2	06	06	08	Penyusunan Produk Hukum	Raperda dan Perda	Kota Malang	90	150.000.000,00		
VII	2	06	18		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				5.749.390.000,00		
31	2	06	18	03	Peningkatan Pelayanan Pasar	PTT	Kota Malang	90	774.390.000,00		
	2	06	18		Pemeliharaan pasar - pasar se Kota Malang :	Keamanan & kenyamanan pengguna jasa pasar	Kota Malang				

52	2	06	20	03	Peningkatan Ketertiban Pasar	Keamanan & ketertiban pasar	Kota Malang	85	100.000.000,00		
53	2	06	20	04	Bimbingan Teknis peningkatan Ketertiban dan Keamanan Pasar	Pedagang Pasar	Kota Malang	85	50.000.000,00		
54	2	06	20	06	Simulasi Kebakaran	Peningkatan SDM petugas dan pedaqana	Kota Malang	90	100.000.000,00		

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2015			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
				lokasi	target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
1	1.1 1.1 9 9.0 1 01	BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.000.000.000,00 175.000.000,00			
1	1.1 1.1 9 9.0 1 01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	100%	Kota Malang	Pelayanan surat menyurat	25.000.000,00			
2	1.1 1.1 9 9.0 1 01 02 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	Kota Malang	Pelayanan jasa komunikasi	15.000.000,00			
3	1.1 1.1 9 9.0 1 01 07 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	100%	Kota Malang	Pelayanan admin keuangan	25.000.000,00			
4	1.1 1.1 9 9.0 1 01 08 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	100%	Kota Malang	Pelayanan jasa kebersihan	25.000.000,00			
5	1.1 1.1 9 9.0 1 01 09 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	100%	Kota Malang	Pelayanan jasa perbaikan peralatan kerja	10.000.000,00			

17	1.1 9	1.1 9.0 1	25	25		Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana	100%	Kota Malang	Masyarakat kota malang	250.000.000,00		
18	1.1 9	1.1 9.0 1	25	26	26	Peningkatan kapasitas anggota TRC	100%	Kota Malang	Masyarakat kota malang	300.000.000,00		

BAB VI

PENUTUP

Program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2015, dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif sebagai pencerminan *good governance*. Disamping itu dibutuhkan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu SKPD maupun antar SKPD, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap pelaksanaan program dan kegiatan harus ada kerjasama yang sinergis, saling mendukung antara SKPD, masyarakat dan segenap pemangku kepentingan (*stake holder*). Sehubungan dengan itu, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Kota Malang tahun 2015 sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Malang dan masyarakat berkewajiban untuk melaksanakan dan mendukung program-program RKPD Tahun 2015 dengan sebaik-baiknya;
2. RKPD Tahun 2015 menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2015;
3. RKPD Tahun 2015 yang dihasilkan melalui Musrenbang tingkat kota dijadikan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA. 2015 yang dibahas antara pihak Pemerintah Kota dan DPRD;
4. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, setiap SKPD harus mengutamakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan berlandaskan peraturan perundang-undangan;
5. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap SKPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Pada akhir tahun anggaran 2015, setiap SKPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi pencapaian sasaran kegiatan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian RKPD Kota Malang Tahun 2015 ini disusun untuk menjadi arah kebijakan pembangunan Kota Malang pada Tahun 2015 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun Anggaran 2015.

Malang, Juli 2014

WALIKOTA MALANG

H. MOCH. ANTON